SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Kota Salatiga sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Salatiga sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Salatiga;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan lima tahunan Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2
Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

Pasal 3
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Pasal 4
(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Wali Kota.
(2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5
(1) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. pendahuluan;
    b. gambaran umum kondisi Daerah;
    c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
    d. visi dan misi Daerah;
    e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
    f. penutup.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(2) Penjabaran RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 September 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

WURI PUJIASTUTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (10-256/2024)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi secara adil dan merata.

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJPN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung setiap 5 (lima) tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kota Salatiga menyusun RPJPD kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembanguan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah:

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah;
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah Pusat dan Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d. menjamin tercapaianya penggunanaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

PENJABARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2024 ii
LAMPIRAN PENJABARAN RPJPD TAHUN 2025-2045 viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR GRAFIK xv

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Hubungan Antara Dokumen Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya I-5
1.4 Maksud dan Tujuan I-7
1.5 Sistematika dan Penulisan I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Geografi II-1
2.1.2 Demografi II-33
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-42
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-42
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya II-47
2.3 Aspek Daya Saing Daerah II-55
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah II-55
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) II-58
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah II-68
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi II-71
2.4 Aspek Pelayanan Umum II-75
2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi II-75
2.4.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elekttonik (SPBE) II-75
2.4.3 Indeks Inovasi Daerah II-76
2.4.4 Indeks Survey Penilaian Integritas Tahun 2023 ..... II-77
2.4.5 Indeks Pelayanan Publik (IPP) II-78
2.4.6 Jumlah Kejadian Konflik SARA II-80
2.4.7 Indeks Reformasi Hukum II-80
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 ..... II-81
2.5.1 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan II-82
2.5.2 Evaluasi Misi RPJPD 2005-2025 ..... II-87
2.5.3 Kesimpulan dan Rekomendasi II-92
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik II-94
2.6.1 Kependudukan II-94
2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar II-101
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah II-109
2.7.1 Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program/Proyek Strategis II-109

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.7.2 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Berdasarkan Undang-Undang Tentang RPJPN 2025-2045 ..... II-114

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS III-1
3.1 Permasalahan Pembangunan III-1
3.1.1 Aspek Geografi III-1
3.1.2 Aspek Daya Saing III-4
3.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat III-6
3.1.4 Aspek Pelayanan Umum III-8
3.2 Isu Strategis III-10
3.2.1. Isu Strategis Internasional III-10
3.2.2. Isu Strategis Nasional III-13
3.2.3. Isu Regional Provinsi Jawa Tengah III-16
3.2.4. Isu Regional Kota Salatiga III-17

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH IV-1
4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045 ..... IV-1
4.2 Sasaran Visi Daerah Tahun 2025-2045 ..... IV-5
4.3 Misi Daerah Tahun 2025-2045 ..... IV-7

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK V-1
5.1. Arah Kebijakan V-1
5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029 (Tahap I): Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah V-1
5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034 (Tahap II): Akselarasi Transformasi V-3
5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2049 (Tahap III): Optimalisasi Pembangunan V-5
5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045 (Tahap IV): Perwujudan Kota Salatiga Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan V-7
5.2. Sasaran Pokok V-12
5.2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat dan berkualitas V-12
5.2.2. Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat V-13
5.2.3. Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing V-14
5.2.4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan demokratis V-17
5.2.5. Terwujudnya Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim V-18

BAB VI PENUTUP VI-1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Suhu Udara di Kota Salatiga II-5
Tabel 2. 2 Curah Hujan dan Hari Hujan Kota Salatiga tahun 2023 ..... II-7
Tabel 2. 3 Jenis Tanah Kota Salatiga II-11
Tabel 2. 4 Potensi Kemampuan Lahan Kota Salatiga II-16
Tabel 2. 5 Hasil Analisis Daya Dukung Lahan Kota Salatiga II-17
Tabel 2. 6 Status Daya Dukung Pangan Kota Salatiga II-18
Tabel 2. 7 Evaluasi Kesesuaian Lahan Kota Salatiga II-21
Tabel 2. 8 Kondisi Persampahan Kota Salatiga Tahun 2022-2023 ..... II-25
Tabel 2. 9 Kondisi Saluran Irigasi Kota Salatiga Tahun 2023 ..... II-29
Tabel 2. 10 Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan II-33
Tabel 2. 11 Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2023 ..... II-33
Tabel 2. 12 Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kota Salatiga berdasarkan Tahun Sensus 2000, 2010 dan 2020 ..... II-34
Tabel 2. 13 Data Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2017-2023 ..... II-34
Tabel 2. 14 Jumlah dan Laju Petumbuhan Penduduk Kota Salatiga berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020 ..... II-35
Tabel 2. 15 Kepadatan Penduduk Kota Salatiga tahun 2023 ..... II-36
Tabel 2. 16 Kepadatan Penduduk Kota Salatiga berdasarkan Tahun Sensus 2000, 2010 dan 2020 ..... II-37
Tabel 2. 17 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023 ..... II-37
Tabel 2. 18 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Kecamatan Tahun 2023 ..... II-38
Tabel 2. 19 Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga tahun 2010, 2015, 2020 dan 2023 ..... II-55
Tabel 2. 20 Perkembangan APK di Kota Salatiga Tahun 2017-2023 ..... II-60
Tabel 2. 21 Kinerja Perumahan Tahun 2017-2022 ..... II-71
Tabel 2. 22 Indeks Inovasi Daerah di Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 ..... II-76
Tabel 2. 23 Tiga Pilar Pendukung pada Aspek Ekosistem Inovasi Kota Salatiga Tahun 2023 ..... II-76
Tabel 2. 24 Indeks Pelayanan Publik Kota Salatiga Tahun 2018-2022 berdasarkan KEMENPANRB II-80
Tabel 2. 25 Capaian RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 per Unsur Visi, Misi dan Sasaran Pokok II-82
Tabel 2. 26 Evaluasi Capaian Kinerja indikator Makro II-83
Tabel 2. 27 Evaluasi Pencapaian Misi 1 RPJPD 2005-2025 Kota Salatiga II-87
Tabel 2. 28 Evaluasi Pencapaian Misi 2 RPJPD 2005-2025 Kota Salatiga II-89
Tabel 2. 29 Evaluasi Pencapaian Misi 3 RPJPD 2005-2025 Kota Salatiga II-90
Tabel 2. 30 Evaluasi Pencapaian Misi 4 RPJPD 2005-2025 Kota Salatiga II-91
Tabel 2. 31 Evaluasi Pencapaian Misi 5 RPJPD 2005-2025 Kota Salatiga II-91
Tabel 2. 32 Evaluasi Pencapaian Misi 6 RPJPD 2005-2025 Kota Salatiga II-92
Tabel 2. 33 Evaluasi Capaian Kinerja RPJPD Kota Salatiga Berdasarkan Pelaksanaan RPJMD II-93
Tabel 2. 34 Persandingan Tantangan Indonesia Emas 2045 dan Megatren dengan Isu Strategis RPJPD 2025-2045 dan Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025 ..... II-94
Tabel 2. 35 Proyeksi Penduduk Kota Salatiga Tahun 2025-2045 ..... II-95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 36 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045 ..... II-97
Tabel 2. 37 Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Salatiga Tahun 2025-2045 ..... II-98
Tabel 2. 38 Proyeksi Penduduk Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2045 II-98
Tabel 2. 39 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif 2025-2045 ..... II-99
Tabel 2. 40 Proyeksi Angka Ketergantungan 2025-2045 ..... II-100
Tabel 2. 41 Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman 2025-2045 ..... II-101
Tabel 2. 42 Perhitungan Kebutuhan Rumah Kota Salatiga II-103
Tabel 2. 43 Perhitungan Analisis Zona Perumahan Kota Salatiga II-104
Tabel 2. 44 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 2025-2045 ..... II-105
Tabel 2. 45 Potensi Ketersediaan Air Kota Salatiga Tahun 2044 ..... II-105
Tabel 2. 46 Proyeksi Kebutuhan Listrik 2025-2045 ..... II-106
Tabel 2. 47 Proyeksi Produksi Sampah 2025-2045 ..... II-106
Tabel 2. 48 Proyeksi Fasilitas Persampahan 2025-2045 ..... II-107
Tabel 2. 49 Proyeksi Fasilitas Kesehatan 2025-2045 ..... II-107
Tabel 2. 50 Proyeksi Fasilitas Pendidikan 2025-2045 ..... II-108
Tabel 2. 51 Lokasi Pasar per Kecamatan di Kota Salatiga II-108
Tabel 2. 52 Proyeksi Fasilitas Pasar 2025-2045 ..... II-109
Tabel 2. 53 Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional II-109
Tabel 2. 54 Sistem Pusat Kegiatan di Kota Salatiga II-110
Tabel 2. 55 Program Pengembangan Sistem Perkotaan di Kota Salatiga II-111
Tabel 2. 56 Kawasan Strategis Kota Salatiga II-114
Tabel 2. 57 Arah Pembangunan Wilayah Jawa II-114
Tabel 2. 58 Arah Kebijakan Transformasi Sosial Wilayah Jawa II-115
Tabel 2. 59 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Wilayah Jawa II-115
Tabel 2. 60 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Wilayah Jawa II-117
Tabel 2. 61 Landasan Transformasi di Wilayah Jawa II-117
Tabel 2. 62 Kerangka Implementasi Transfromasi Wilayah Jawa II-118

Tabel 3. 1 Isu strategis Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045 .... III-13
Tabel 3. 2 Isu strategis Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 ..... III-16
Tabel 3. 3 Telaah Isu Internasional, Nasional, Provinsi dan Kota III-18

Tabel 4. 1 Penyelarasan Visi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 ..... IV-4
Tabel 4. 2 Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 ..... IV-5
Tabel 4. 3 Target Sasaran Visi Daerah Kota Salatiga IV-6
Tabel 4. 4 Target Indikator Sasaran Visi Daerah Kota Salatiga per tahapan IV-6
Tabel 4. 5 Penyelarasan Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 ..... IV-10
Tabel 4. 6 Penyelarasan Periode dan Tema RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 ..... IV-10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 4. 7 Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.....IV-12

Tabel 5. 1 Penyelarasan Periode dan Tema RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 .....V-1
Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Kota Salatiga Tahun 2025 - 2045 .....V-9
Tabel 5. 3 Penyelarasan Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan IUP RPJPN dengan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan IUP RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Salatiga V-21
Tabel 5. 4 Penyelarasan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan dan Indikator Utama Pembangunan V-30
Tabel 5. 5 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan.....V-39

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Konstelasi dan Posisi Dokumen RPJPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran I-5
Gambar 1. 2 Kaitan Antara RPJPD dengan RPJMD dalam Pembangunan di Daerah I-6

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Salatiga II-2
Gambar 2. 2 Kelerengan Lahan (%) Kota Salatiga II-4
Gambar 2. 3 Suhu Udara Kota Salatiga II-6
Gambar 2. 4 Curah Hujan Tahunan Kota Salatiga II-8
Gambar 2. 5 Batuan Geologi Kota Salatiga II-10
Gambar 2. 6 Peta Jenis Tanah Kota Salatiga II-12
Gambar 2. 7 Sebaran Sungai di Kota Salatiga II-13
Gambar 2. 8 Peta Penggunaan Lahan Kota Salatiga II-15
Gambar 2. 9 Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Salatiga II-19
Gambar 2. 10 Peta Status Daya Dukung Air Kota Salatiga II-20
Gambar 2. 11 Peta Evaluasi Kesesuaian Lahan Kota Salatiga II-23
Gambar 2. 12 Emisi Gas Rumah Kaca Kota Salatiga Tahun 2018-2022 ..... II-26
Gambar 2. 13 Tren Penurunan GRK Kota Salatiga berdasarkan Sektor II-26
Gambar 2. 14 Tren Emisi Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi Kota Salatiga Tahun 2018-2022 ..... II-27
Gambar 2. 15 Tren Emisi Sektor IPPU Kota Salatiga Tahun 2018-2022 ..... II-27
Gambar 2. 16 Tren Emisi Sektor AFOLU Kota Salatiga Tahun 2018-2022 ..... II-28
Gambar 2. 17 Tren Emisi Sektor Pengelolaan Limbah Kota Salatiga Tahun 2018-2022 ..... II-28
Gambar 2. 18 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2017 ..... II-38
Gambar 2. 19 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2018 ..... II-39
Gambar 2. 20 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2019 ..... II-39
Gambar 2. 21 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020 ..... II-40
Gambar 2. 22 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2021 ..... II-40
Gambar 2. 23 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2022 ..... II-41
Gambar 2. 24 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2023 ..... II-41
Gambar 2. 25 Tipologi Klassen Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-58
Gambar 2. 26. Indeks Survey Penilaian Integritas Tahun 2023 ..... II-78

Gambar 4. 1 Konsideran RPJP Kota Salatiga 2025-2045 ..... IV-1
Gambar 4. 2 Perumusan Visi RPJPD Kota Salatiga IV-2
Gambar 4. 3 Visi RPJPD Kota Salatiga IV-2
Gambar 4. 4 Misi RPJPD Kota Salatiga IV-7

Gambar 5. 1 Tahapan Pembangunan Kota Salatiga 2025-2045 ..... V-1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Salatiga Tahun 2017-2023 ..... II-24
Grafik 2. 2 Kejadian Bencana Kota Salatiga tahun 2022 ..... II-29
Grafik 2. 3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2017-2023 ..... II-36
Grafik 2. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023 ..... II-43
Grafik 2. 5 Perkembangan Indeks Gini Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023 ..... II-44
Grafik 2. 6 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2005-2023 ..... II-45
Grafik 2. 7 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2007-2023 ..... II-46
Grafik 2. 8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional 2010-2023 ..... II-47
Grafik 2. 9 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2022 ..... II-48
Grafik 2. 10 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2022 ..... II-49
Grafik 2. 11 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-50
Grafik 2. 12 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023 ..... II-51
Grafik 2. 13 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Kota Salatiga tahun 2017-2023 ..... II-52
Grafik 2. 14 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023 ..... II-52
Grafik 2. 15 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2023 ..... II-53
Grafik 2. 16 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2023 ..... II-54
Grafik 2. 17 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-55
Grafik 2. 18 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2010-2023 ..... II-57
Grafik 2. 19 Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2010 II-59
Grafik 2. 20 Indeks Pendidikan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-59
Grafik 2. 21 Angka Melek Huruf (AMH) Kota Salatiga Tahun 2007-2023 .. II-61
Grafik 2. 22 Angka Melek Huruf (AMH) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 ..... II-61
Grafik 2. 23 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Kota Salatiga Tahun 2023 ..... II-62
Grafik 2. 24 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-63
Grafik 2. 25 Nilai dan Pilar Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 ..... II-63

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 26 Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kota Salatiga Tahun 2023 ..... II-64
Grafik 2. 27 Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-65
Grafik 2. 28 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga Tahun 2008-2023 ..... II-66
Grafik 2. 29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-66
Grafik 2. 30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-67
Grafik 2. 31 Angka Ketergantungan Kota Salatiga Tahun 2017-2023 ..... II-67
Grafik 2. 32 Angka Ketergantungan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-68
Grafik 2. 33 Prosentase Rumah Tangga yang memiliki Pesawat Telepon ... II-69
Grafik 2. 34 Prosentase Penduduk 5 tahun Ke atas yang memiliki Telepon Seluler II-70
Grafik 2. 35 Prosentase Rumah Tangga dengan Akses Internet II-70
Grafik 2. 36 Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2023 ..... II-72
Grafik 2. 37 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nasional Tahun 2015-2023 ..... II-73
Grafik 2. 38 Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Komponen Kota Salatiga tahun 2023 ..... II-74
Grafik 2. 39 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-75
Grafik 2. 40 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Nasional tahun 2018-2023 ..... II-79
Grafik 2. 41 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kota Salatiga Tahun 2016-2022 ..... II-79
Grafik 2. 42 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Salatiga Tahun 2005-2023 ..... II-84
Grafik 2. 43 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Kota Salatiga tahun 2005-2023 ..... II-84
Grafik 2. 44 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2005-2023 ..... II-85
Grafik 2. 45 Pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga Tahun 2005-2022 .... II-86
Grafik 2. 46 Perkembangan Indeks Gini Kota Salatiga Tahun 2005-2023 . II-86
Grafik 2. 47 Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB Kota Salatiga Tahun 2005-2023 ..... II-87
Grafik 2. 48 Perkembangan Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045 ..... II-96
Grafik 2. 49 Perkembangan Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045 ..... II-96
Grafik 2. 50 Proyeksi Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Salatiga Tahun 2025-2045 ..... II-98
Grafik 2. 51 Perkembangan Penduduk Usia Sekolah Kota Salatiga 2025-2045 ..... II-99
Grafik 2. 52 Perkembangan Proyeksi Angka Ketergantungan Kota Salatiga 2025-2045 ..... II-100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, seta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, poteni dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah dalam hal ini wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode lima tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) unutk periode satu tahun. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatf, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode waktu 20 tahun memuat visi, misi, dan arahan pengembangan daerah serta komitmen pemerintah pada skenario 20 tahun ke depan dengan memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan. RPJPD berdasarkan Undang-undang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penyusunannya, RPJPD harus mengacu pada RPJP Nasional, begitu pula RPJMD, disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan Undang-undang SPPN, sebelum RPJP Nasional ditetapkan, penyusunan RPJP Daerah tetap mengikuti ketentuan dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan.

Kota Salatiga menjadi daerah yang periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerahnya akan berakhir pada tahun 2025. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 pasa 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Musyawarah RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan. Maka Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2023 memulai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Tahun 2025-2045, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum dalam Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Kota Salatiga pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Nomor 6178;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029;

23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2043 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3-2023);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1.3 Hubungan Antara Dokumen Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah merupakan satu kesatuan yang secara substansi dan sistematis saling terkait dan saling melengkapi. Dalam pelaksanaannya dokumen-dokumen tersebut terikat secara hierarkis, fungsi (tema dan sektor), serta jangka dan waktu pelaksanaannya. Penjelasan dan justifikasi mengenai keterkaitan antar dokumen dapat dicermati atau sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004). Secara khusus, UU 25/2004 menegaskan bahwa pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

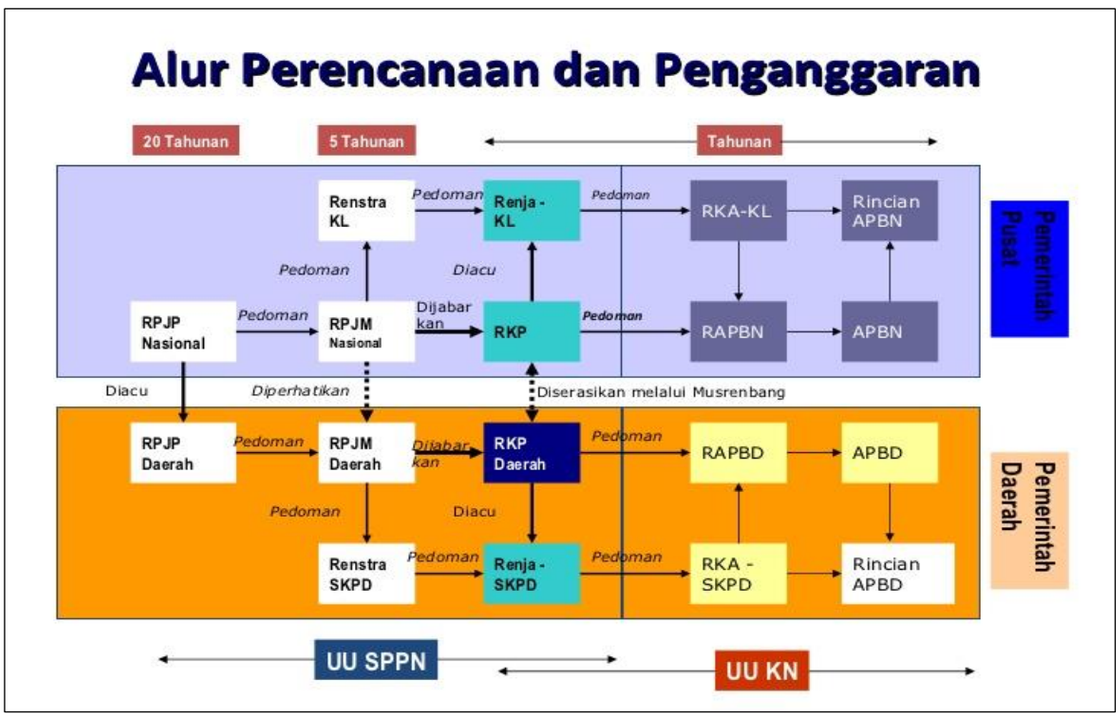

Gambar 1. 1 *Konstelasi dan Posisi Dokumen RPJPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran*
(Sumber: https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/647)

Penjelasan dan kaitan teknis dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PMDN 86/2017). Peraturan tersebut menjelaskan kaitan secara hierarkis dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RPJPD kabupaten/kota terkait dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang di tingkat nasional dan tingkat provinsi. RPJPD harus selaras dengan muatan mulai dari visi-misi hingga kepada arahan pembangunan yang dirancang dalam dokumen-dokumen tersebut.

PMDN 86/2017 juga mengatur kaitan antara RPJPD dengan RPJMD sesuai dengan Gambar 1.2. Secara jangka waktu, RPJPD akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang berlaku selama 5 tahun sesuai dengan masa jabatan pimpinan daerah terpilih. Sesuai dengan waktu pelaksanaannya, RPJPD Kota Salatiga mengacu rencana pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun mulai dari tahun 2025-2045. Dengan kata lain, fungsi RPJMD adalah penterjemahan tujuan dan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih dan juga berisi sasaran pokok RPJPD periode yang sama.

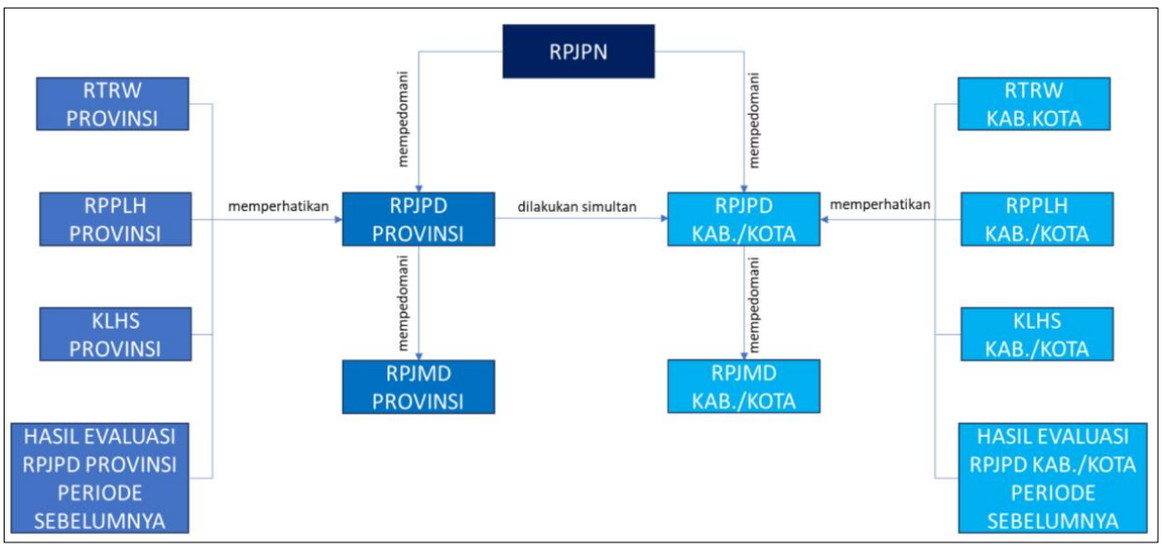

***Gambar 1. 2** Kaitan Antara RPJPD dengan RPJMD dalam Pembangunan di Daerah*
Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Secara horizontal, dokumen RPJPD sebagai gambaran umum atau abstraksi pembangunan harus terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan secara sektoral seperti dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, industri, atau pertanian yang umumnya berbentuk rencana induk atau *masterplan*. Selain itu, RPJPD juga menjadi haluan dalam dokumen perencanaan ruang seperti dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Salatiga dan Rencana Strategis (RENSTRA) serta dokumen rencana penganggaran sesuai bagan pada Gambar 1.1. Selain itu, untuk menentukan rencana pembangunan yang kontekstual, RPJPD Kota Salatiga juga perlu mempertimbangkan masukan dan arah pembangunan dari RPJPD kabupaten/kota lain yang ada di sekitarnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1.4 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan untuk Penyusunan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 pada tahun 2023 adalah:

a) Sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan;

b) Sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kota Salatiga pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD Kota Salatiga sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

2. Tujuan

Adapun tujuan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Penyusunan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 pada tahun 2023 yaitu:

a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

b) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

c) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan

d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat

1.5 Sistematika dan Penulisan

Dokumen RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 terdiri dari 6 (enam) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1 Aspek Geografis dan Demografis
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

BAB III PERMASALAHAN UMUM DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan Pembangunan
3.2 Isu Strategis
3.3 Tantangan Pembangunan Daerah

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045
4.2 Sasaran Visi Daerah Tahun 2025-2045
4.3 Misi Daerah Tahun 2025-2045

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1 Arah Kebijakan
5.2 Sasaran Pokok

BAB VI PENUTUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

1. Peran Strategi Daerah

Kota Salatiga merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur (yang meliputi Kabupaten/Kota Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi). Kawasan ini selain didukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki letak yang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Untuk mendukung hal tersebut maka melalui Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intraregional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura dan secara inter regional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Pulau Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Pulau Kalimantan.

2. Potensi Sumber Daya Alam

a) Lokasi, Luas, dan Batas Wilayah

Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koordinat antara $110^{0}27'56,81"$ dan $110^{0}32'.4,64"$ Bujur Timur dan antara $007^{0}17'$ dan $007^{0}17'23"$, dengan luas total wilayah ± 54,98 km^{2}.

Secara administratif Kota Salatiga terbagi dalam 4 (empat) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan. Kota Salatiga terletak pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang dan Surakarta. Kota Salatiga berada di tengah Kabupaten Semarang, adapun batas wilayah Kota Salatiga terhadap Kabupaten Semarang adalah:

Sebelah Utara	:	▪ Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, Kauman Lor dan Pejaten) ▪ Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo dan Watu Agung)
Sebelah Timur	:	▪ Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Sukoharjo dan Glawan) ▪ Kecamatan Tengaran (Desa Bener, Tegal Waton dan Nyamat)
Sebelah Selatan	:	▪ Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Samirono, Jetak) ▪ Kecamatan Tengaran (Desa Patemon dan Karang Duren)
Sebelah Barat	:	▪ Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Jombor, Sraten dan Gedangan) ▪ Kecamatan Getasan (Desa Polobogo)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

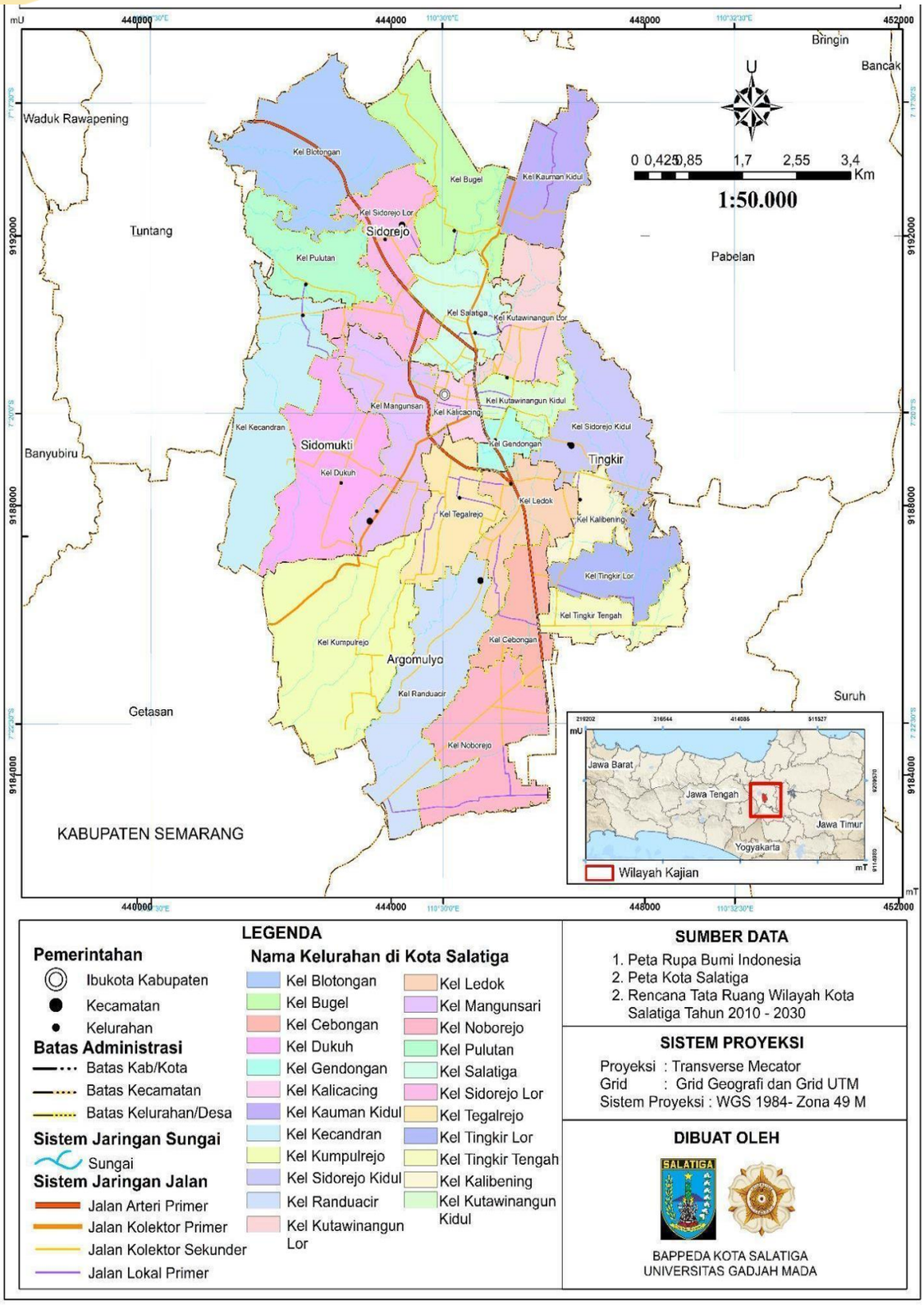

Gambar 2. 1 *Peta Administrasi Kota Salatiga*
Sumber : Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Detail Tata Ruang Bwp Pk I, II, III dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030

b) Ketinggian tempat dan Kelerengan

Kecamatan yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan Argomulyo dengan luas sebesar 18,53 km^2 dan memiliki presentase sekitar 32,63 persen dari keseluruhan total wilayah di Kota Salatiga. Kecamatan Argomulyo merupakan kecamatan dengan letak paling tinggi terutama di wilayah Kelurahan Randuacir, Kelurahan Noborejo dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kelurahan Kumpulrejo dengan ketinggian tempat berkisar 734,5-831 mdpl. Kecamatan Sidorejo merupakan wilayah terbesar kedua setelah Argomulyo, dengan luas daerah sebesar 28,60 persen dan merupakan kecamatan dengan ketinggian tempat terendah di Kota Salatiga terutama di wilayah Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Bugel dan Kelurahan Pulutan dengan ketinggian tempat berkisar 445-541 mdpl. Kecamatan Sidomukti merupakan wilayah terbesar ketiga yaitu dengan luas sebesar 20,18 persen dan Kecamatan Tingkir merupakan Kecamatan dengan luas terkecil di Salatiga yaitu sebesar 18,58 persen.

Kemiringan lereng dibagi menjadi beberapa kelas yaitu datar (0-8 %), landai (8-15 %), agak curam (15-25 %), curam (25-40 %), dan sangat curam (≥ 40 %). Berdasarkan dari kelerengan lahan di Kota Salatiga maka kelerengan wilayah Kota Salatiga didominasi dengan kelerengan datar hingga landau. Kota Salatiga berada pada ketinggian 450-825 meter di atas permukaan air laut (mdpl) dan dikelilingi beberapa gunung (Merbabu, Telomoyo dan Gajah Mungkur) menyebabkan Kota Salatiga memiliki tingkat kesuburan tanah dan potensi alam. Berdasarkan aspek topografi, wilayah Kota Salatiga dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- Daerah Bergelombang ± 65%, terdiri dari Kelurahan: Dukuh, Ledok, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul.
- Daerah Miring ± 25%, terdiri dari Kelurahan: Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan Cebongan.
- Daerah Datar ± 10%, terdiri dari: Kelurahan: Kalicacing, Noborejo, Kalibening dan Blotongan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

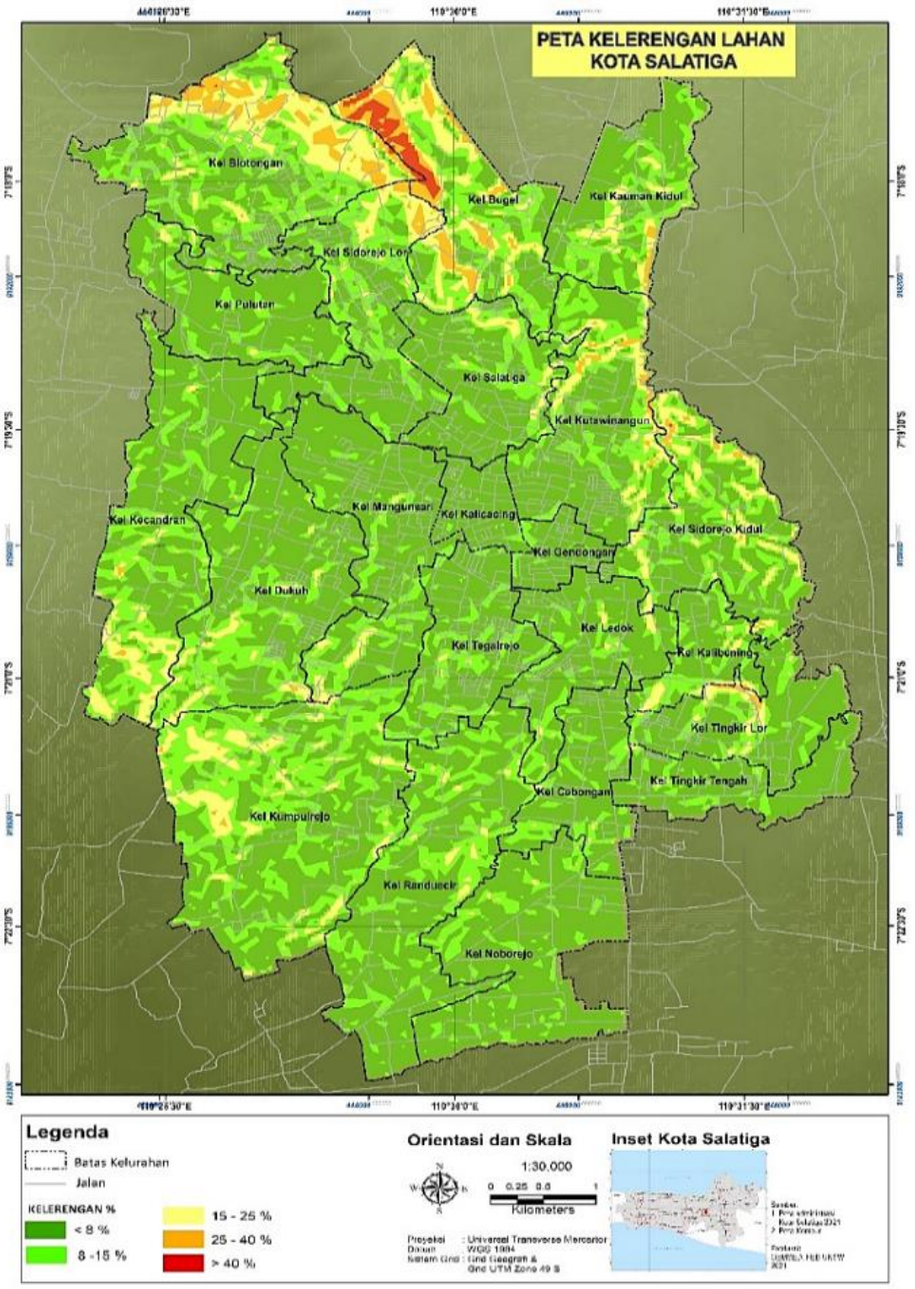

Gambar 2. 2 *Kelerengan Lahan (%) Kota Salatiga*
Sumber: Analisis DEM Kota Salatiga, 2021

c) Iklim

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Jawa Tengah, kondisi iklim di Kota Salatiga yaitu beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 23°C-28°C dengan jumlah curah hujan di Kota Salatiga pada tahun 2022 sebanyak 2.425 mm dengan rata-rata hari hujan 150 hari dan rata-rata curah hujan sebanyak 16,17 mm/hari. Curah hujan tertinggi berada di bulan November sebanyak 448 mm dengan hari hujan 17 hari dan rata-rata curah hujan sebanyak 26 mm/hari. Kota Salatiga berada pada ketinggian tempat antara 445-831 mdpl dan Kota Salatiga berada di tengah-tengah Kabupaten Semarang, dikelilingi gunung Merbabu, Telomoyo dan Gajah Mungkur. Kondisi geomorfologi demikian akan mempengaruhi tipe iklim terutama pada unsur suhu udara dan curah hujan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- **Suhu udara**

  Suhu udara di Kota Salatiga tergolong memiliki suhu yang sejuk, rata-rata suhu dalam setahun berkisar pada angka 26-27,5 derajat celcius dan suhu dengan temperatur tersebut merata ke empat kecamatan di Kota Salatiga.

Tabel 2. 1 *Suhu Udara di Kota Salatiga*

Kecamatan	Suhu °C	LUAS (HA)
Kecamatan Argomulyo	25 - 26 °C	1,584.72
	27 - 27.5 °C	232.25
Kecamatan Sidomukti	25 - 26 °C	101.48
	26 - 27 °C	920.99
	27 - 27.5 °C	101.39
Kecamatan Sidorejo	26 - 27 °C	969.78
	27 - 27.5 °C	626.79
Kecamatan Tingkir	26 - 27 °C	147.16
	27 - 27.5 °C	898.04

Sumber: Analisis DEM dan Ketinggian Tempat, 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

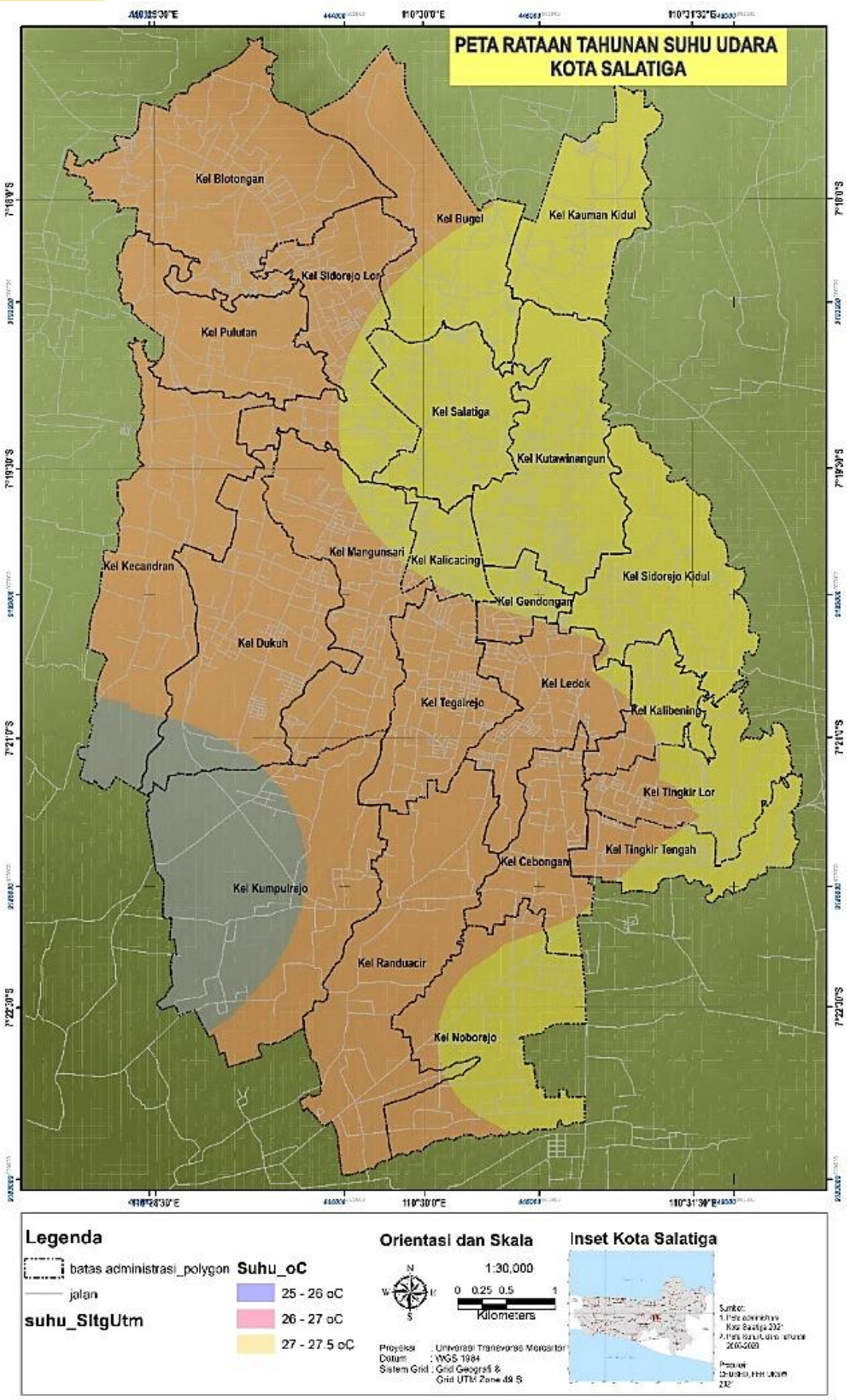

Gambar 2. 3 *Suhu Udara Kota Salatiga*
Sumber: Analisis Ketinggian Tempat 2021

- **Curah Hujan**

  Berdasarkan data 10 tahun (2010-2020) maka Kota Salatiga memiliki rata-rata curah hujan tahunan berkisar pada nilai 2300-2700 mm/tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 2 *Curah Hujan dan Hari Hujan Kota Salatiga tahun 2023*

Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan	Rata-Rata Curah Hujan
Januari	281	12	23,42
Februari	194	12	16,17
Maret	377	12	31,42
April	219	10	21,90
Mei	221	5	44,20
Juni	6	3	2
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	107	18	5,94
November	68	12	5,67
Desember	273	11	24,82
TOTAL	1.746	95	18,38

Sumber: BPS, Kota Salatiga Dalam Angka 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

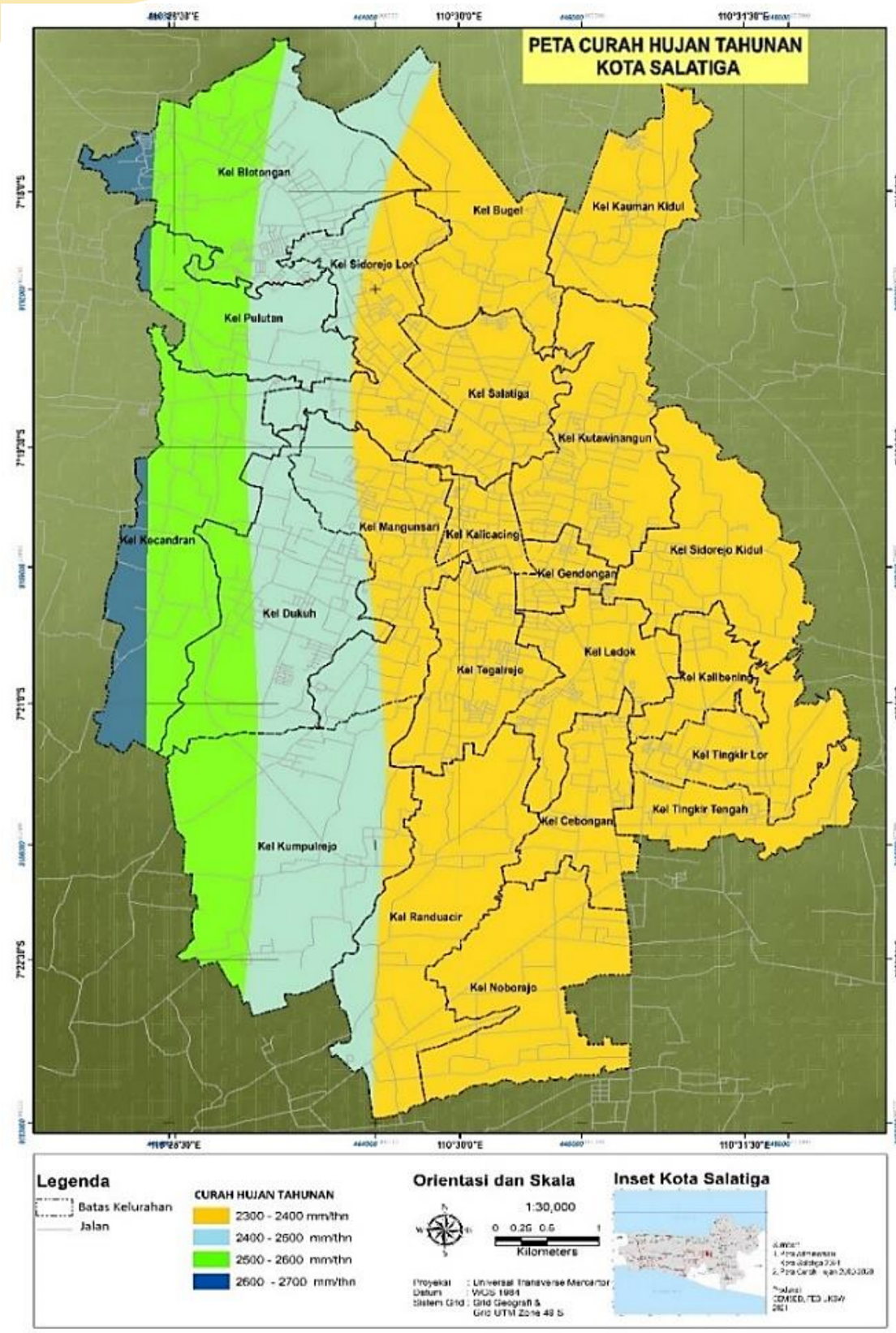

Gambar 2. 4 *Curah Hujan Tahunan Kota Salatiga*
Sumber: Analisis Data Curah Hujan 2010-2020

d) Geologi

Kondisi geologi di Kota Salatiga yaitu satuan morfologi gunung api yang berupa puncak Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo dengan ketinggian tempat umumnya lebih dari 1400 mdpl. Sementara itu satuan morfologi tubuh gunung api yaitu berada pada ketinggian antara 400-1400 mdpl dan kemiringan lereng antara 10^{o}-50^{o} yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

menempati dari tenggara ke barat laut sepanjang lereng Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo dan menempati bagian kecil di barat laut sebagai lereng Gunung Ungaran. Sedangkan pada kondisi morfologi kaki gunungapi menunjukkan bahwa ketinggiannya kurang dari 500 mdpl dan kemiringan lereng antara 5^{o}-30^{o}. Satuan morfologi ini tersusun oleh endapan vulkanik dan batuan sedimen tersier, sungai-sungai yang mengalir di daerah ini umumnya memiliki pola aliran sub-dendritik dan radial yang konvergen di Rawa Pening. Jika dilihat dari kondisi tanah Kota Salatiga didominasi oleh tanah Latosol Coklat dan tanah Latosol Coklat tua. Jenis tanah tersebut menyebabkan Kota Salatiga cocok untuk ditanami beberapa tanaman karena tekstur tanahnya remah dan konsentrasinya gembur.

Berdasarkan peta geologi lembar Salatiga, maka Kota salatiga secara regional merupakan bagian dari peta geologi Pegunungan Kendeng bagian barat (Sukardi dan T. Budhitrisna, 1992) dengan kelompok batuan sedimen atau endapan vulkanik. Oleh karena itu Kota Salatiga memiliki 3 jenis batuan yaitu 1. Endapan Kolokium, Rombakan dari Breksi Volkanik Tufa; 2. Endapan Volkanik Muda yang terdiri dari Tufa Lahan Breksi dan Lava; 3. Tufa, Batu Pasir, Breksi Volkanik dengan Sisipan Napal. Batuan induk tersebut akan menentukan jenis tanah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

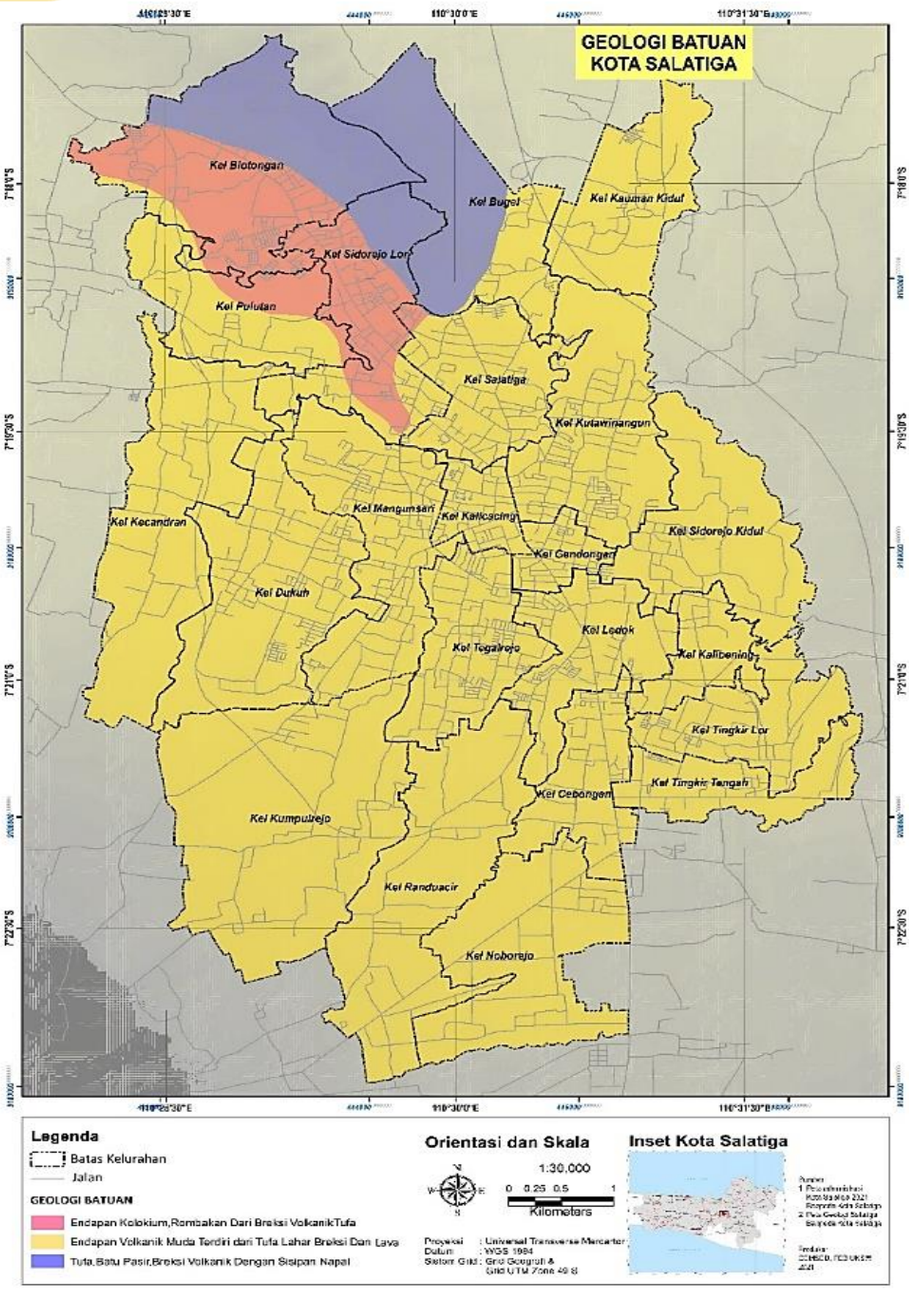

Gambar 2. 5 *Batuan Geologi Kota Salatiga*
Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2023-2043

e) Jenis Tanah

Jenis tanah di Kota Salatiga terdiri dari Aluvial Coklat Kekelabuan, Andosol Coklat, Latosol Coklat Asosiasi Andosol Coklat dan Latosol Coklat Kemerahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

***Tabel 2. 3** Jenis Tanah Kota Salatiga*

No	Kecamatan/ Kelurahan	Luas (Ha)				
		Aluvial Coklat Kekelabuan	Andosol Coklat	Asosiasi Andosol Coklat & Latosol Coklat Kemerahan	Latosol Coklat	Jumlah
I	**Kecamatan Argomulyo**					
1	Noborejo	-	-	99,74	207,57	307,31
2	Cebongan	3,00	-	2,59	148,48	154,07
3	Randuacir	-	-	26,55	382,99	409,53
4	Ledok	24,67	-	-	164,60	189,27
5	Tegalrejo	5,65	-	-	190,09	195,74
6	Kumpulrejo	-	187,02	-	372,49	559,51
	Jumlah	33,32	187,02	128,88	1.466,21	1.815,43
II	**Kecamatan Sidomukti**					
1	Kecandran	99,13	-	254,41	-	353,54
2	Dukuh	16,46	45,25	305,35	3,28	370,34
3	Mangunsari	77,82	4,80	2,99	202,72	288,33
4	Kalicacing	-	-	-	69,75	69,75
	Jumlah	193,40	50,05	562,75	275,75	1.081,96
III	**Kecamatan Sidorejo**					
1	Pulutan	174,19	-	-	38,27	212,46
2	Blotongan	18,77	-	-	405,15	423,92
3	Sidorejo Lor	38,51	-	-	219,20	257,70
4	Salatiga	2,10	-	-	202,94	205,04
5	Bugel	13,71	-	-	236,12	249,83
6	Kauman Kidul	91,11	-	-	118,82	209,93
	Jumlah	338,40	-	-	1.220,48	1.558,88
IV	**Kecamatan Tingkir**					
1	Tingkir Tengah	34,23	-	-	105,27	139,50
2	Tingkir Lor	19,63	-	-	154,53	174,16
3	Kalibening	30,94	-	-	64,95	95,89
4	Sidorejo Kidul	66,56	-	-	210,18	276,74
5	Gendongan	-	-	-	57,17	57,17
6	Kutowinangun Kidul	29,25	-	-	68,52	97,77
7	Kutowinangun Lor	50,95	-	-	149,87	200,82
	Jumlah	231,56	-	-	810,50	1.042,06
	Jumlah Total	796,67	237,07	691,63	3.772,94	5.498,32

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kota Salatiga Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Perhitungan Interpretasi Pemetaan RTRW Kota Salatiga, Diolah, 2022

Jenis tanah di Kota Salatiga secara spasial dapat dilihat pada **Peta Jenis Tanah Kota Salatiga** berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

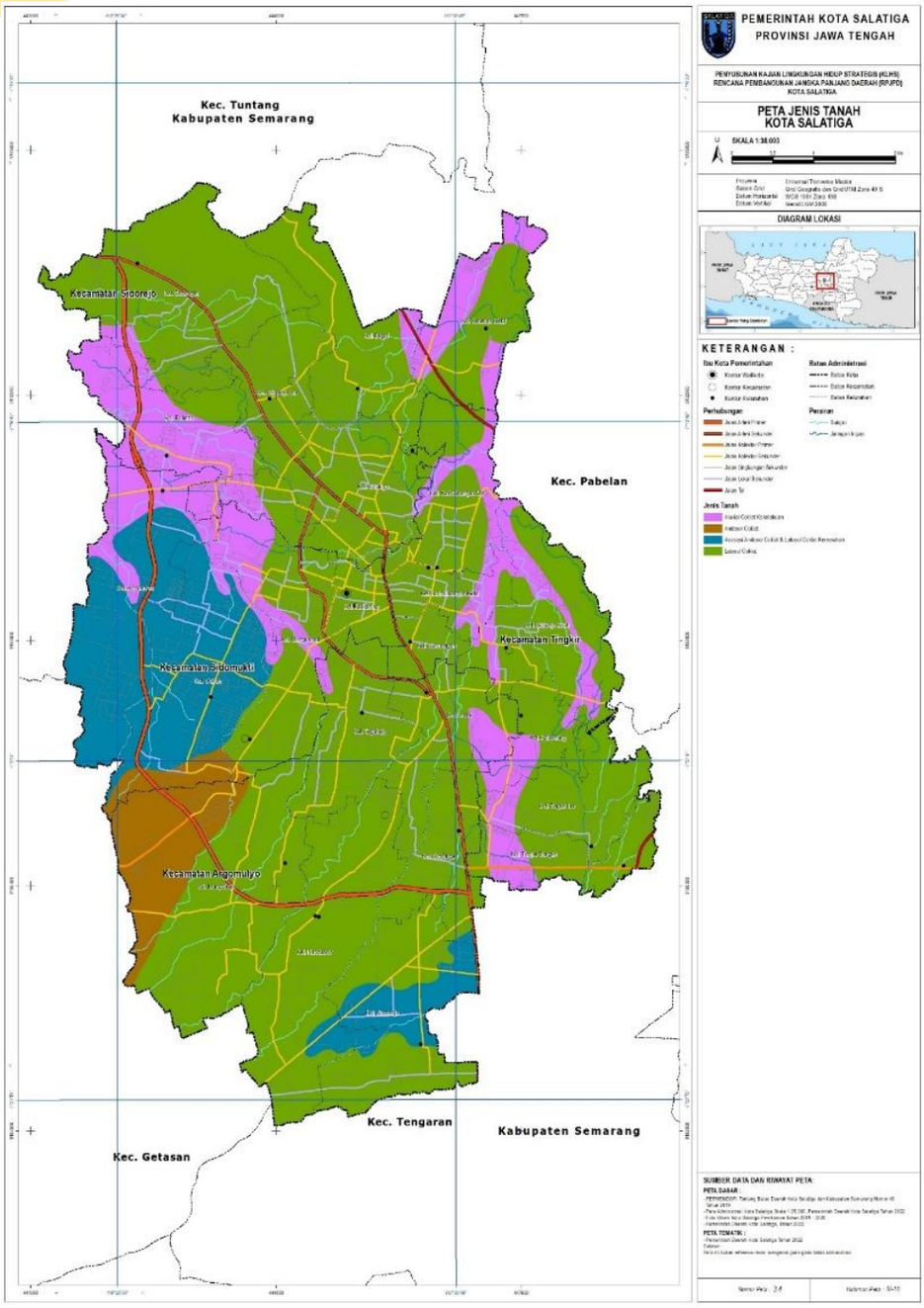

Gambar 2. 6 *Peta Jenis Tanah Kota Salatiga*
Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2023-2043

f) Geohidrologi dan Hidrologi

Kota Salatiga merupakan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang dan DAS Rawa Pening yang merupakan bagian dari area kerja DAS Jratunseluna. Hidrologi di Kota Salatiga dibagi menjadi air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai dan mata air. Sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Mata air dan sungai memiliki potensi tingggi untuk dikembangkan atau dimanfaatkan sebagai sumber air bersih penduduk baik kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Mata air Kota Salatiga tersebut adalah Kali Senjoyo, Kali Tengah, Kali Sraten, Kali Kedawung, Kali Buntang, Kali Ajiawur, Kali Londo. Dengan adanya aliran-aliran sungai dan mata air tersebut sangatlah cukup dan potensial untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dilakukan suatu pengembangan sebagai salah satu sumber air yang sangat bermanfaat untuk kecukupan air di Kota Salatiga.

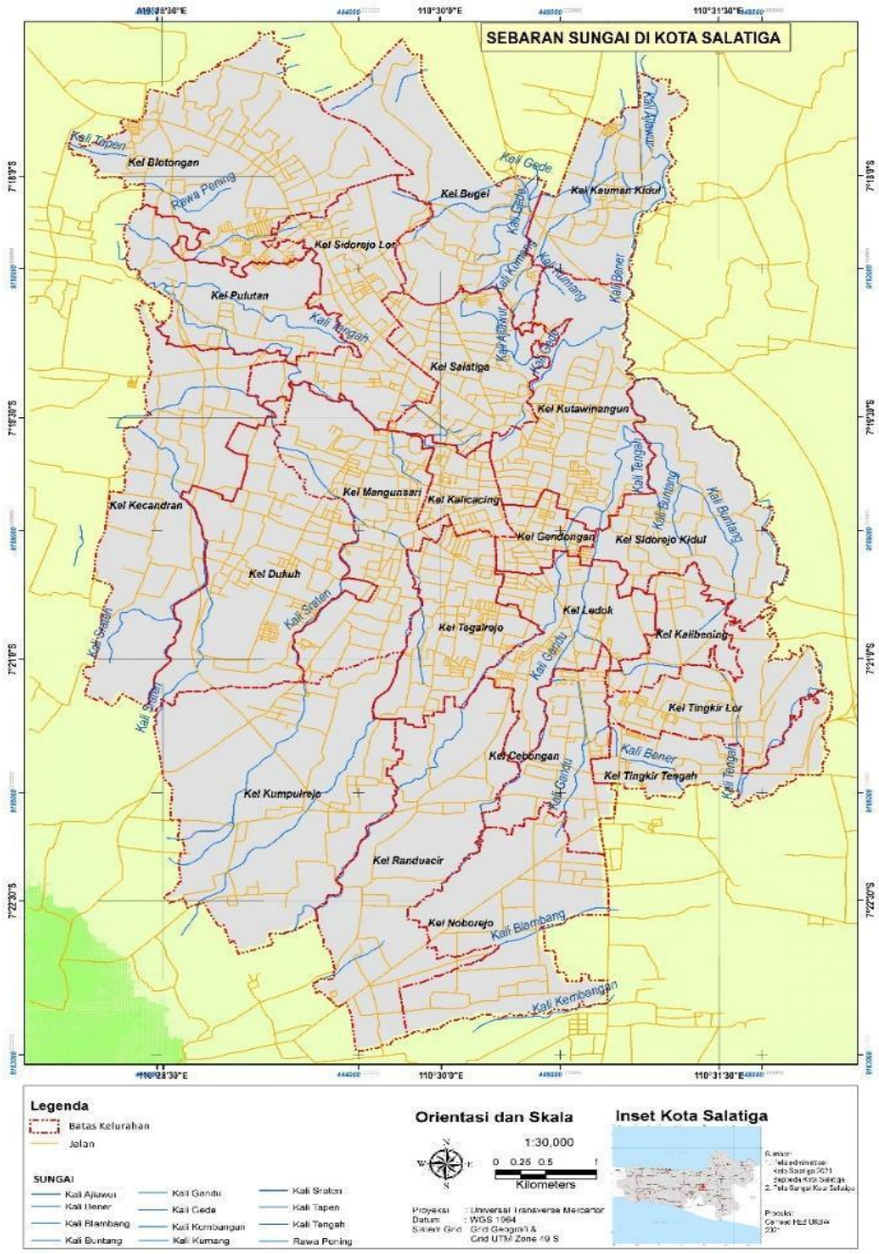

Gambar 2. 7 *Sebaran Sungai di Kota Salatiga*
Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2023-2043

Sumber-sumber air baku dari mata air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih antara lain:

(1) Mata air Senjoyo melayani Kelurahan: Tingkir Lor, Tingkir Tengah, Ledok, Tegalrejo, Mangunsari, Kalicacing, Kecandran, Sidorejo Lor, Pulutan dan Mangunsari;

(2) Mata air Kaligojek melayani Kelurahan: Kalibening, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Kidul, Kutowinangun Lor dan Salatiga;

(3) Mata air Kaligethek, Kalimatan dengan debit 18 (delapan belas) liter per detik dan Kalisombo timur dengan debit 10 (sepeluh) liter per detik melayani Kelurahan: Kuntowinangun Lor, Bugel, Salatiga, Sidorejo Lor dan Blotongan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(4) Sumur artesis Jalan Sukowati melayani Kelurahan: Kalicacing, Mangunsari dan Kecandran;
(5) Sumur artesis Cebongan melayani Kelurahan: Ledok dan Tegalrejo;
(6) Sumur artesis Tegalsari melayani Kelurahan: Kalibening dan Sidorejo Kidul;

Sedangkan untuk aliran sungai yang dapat dimanfaatkan yaitu:
(1) Sungai Senjoyo di Kelurahan: Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
(2) Sungai Setro di Kelurahan Kauman Kidul;
(3) Sungai Jetis di Kelurahan: Randuacir, Noborejo, Cebongan, Ledok, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
(4) Sungai Ngaglik di Kelurahan: Kumpulrejo, Randuacir, Tegalrejo, Ledok, Gendongan, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
(5) Sungai Nanggulan di Kelurahan: Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
(6) Sungai Ngawen di Kelurahan: Kumpulrejo, Tegalrejo dan Mangunsari;
(7) Sungai Sraten di Kelurahan: Kumpulrejo, Mangunsari, Kelurahan Dukuh dan Kecandran;
(8) Sungai Sawahan di Kelurahan: Kumpulrejo, Dukuh dan Kecandran;
(9) Sungai Ngemplak di Kelurahan: Dukuh dan Kecandran.

g) Penggunaan Lahan

Luas tutupan lahan berdasarkan hasil pemetaan RTRW Kota Salatiga Tahun 2021 seluas 5.498,2 hektar dengan luas terbesar sebagai fungsi tegalan/ladang seluas 1.950,87 hektar dan bangunan permukiman seluas 1.808,07 hektare.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

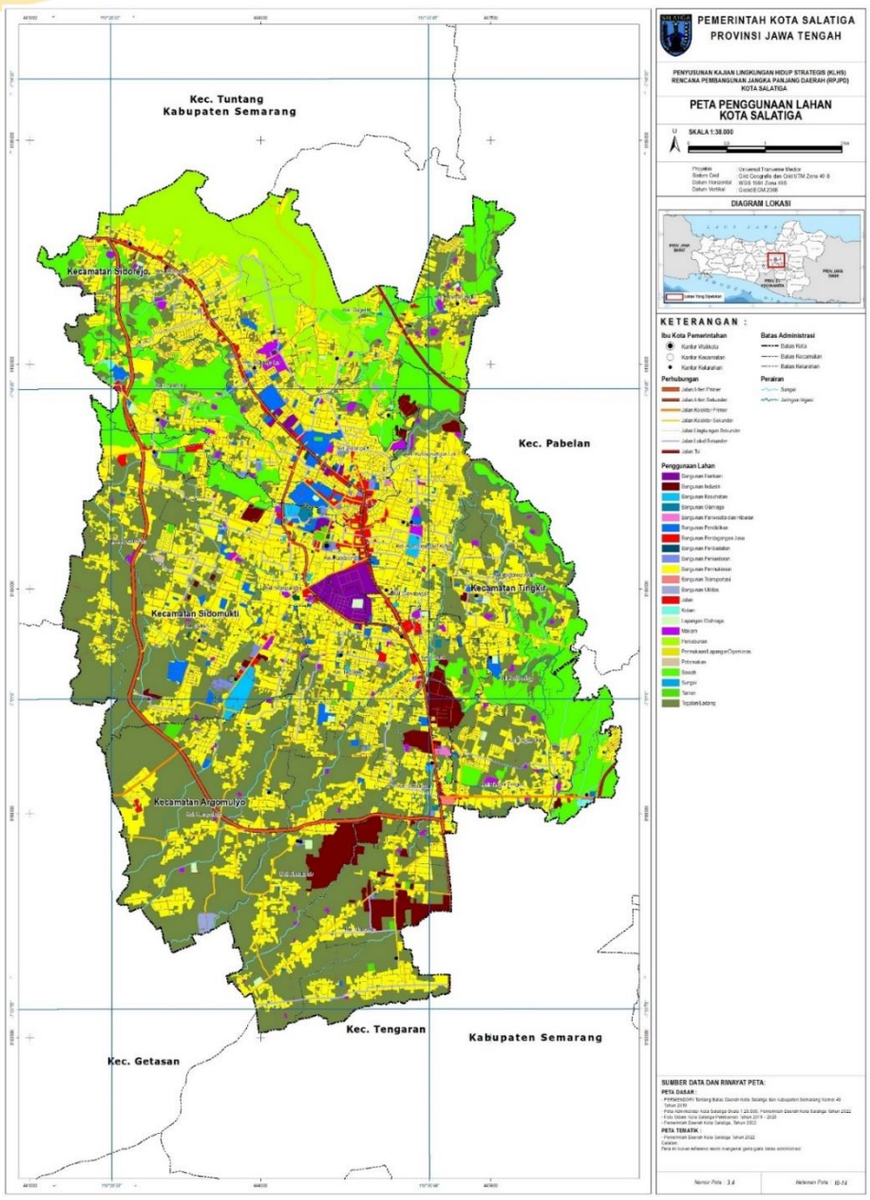

Gambar 2. 8 *Peta Penggunaan Lahan Kota Salatiga*
Sumber: Hasil Olah Pemetaan Tahun 2021 dengan dasar Foto Udara Kota Salatiga Tahun 2019 -2020

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berdasarkan KLHS

a) Daya Dukung Lahan

Informasi daya dukung lahan dapat dianalisis menggunakan kemampuan lahan. Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase dan kondisi lingkungan hidup lain. Analisis kemampuan lahan dalam tingkat kelas dilakukan dengan teknik overlay peta dengan menggunakan data fisik alam dalam bentuk peta yaitu topografi/ kemiringan lereng, jenis tanah, drainase dan lahan kritis. Data tersebut dianalisis menggunakan *overlay* peta untuk menghasilkan klasifikasi kelas lahan.

Berdasarkan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kota Salatiga tahun 2021, kelas kemampuan lahan Kota Salatiga berada pada kelas kemampuan I sampai dengan Kelas VII. Luas sebaran berdasarkan kelas kemampuan lahan yang ada di Kota Salatiga yaitu Kelas I seluas 491,21 Ha, Kelas II seluas 3.738,83 Ha, Kelas III seluas 707,98 Ha, Kelas IV seluas 339,62 Ha, Kelas V

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

seluas 181,30 Ha, Kelas VI seluas 13,25 Ha, Kelas VII seluas 26,36 Ha. Adapun Potensi kemampuan lahan Kota Salatiga dapat dlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 *Potensi Kemampuan Lahan Kota Salatiga*

No	Kecamatan	Kelurahan	Potensi Kemampuan Lahan (Dalam Ha)			Jumlah (Ha)
			Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kec. Argomulyo	Kel. Cebongan	-	1,42	152,65	154,07
		Kel. Kumpulrejo	-	143,02	416,49	559,51
		Kel. Ledok	-	0,95	188,32	189,27
		Kel. Noborejo	-	7,31	300,00	307,31
		Kel. Randuacir	-	24,46	385,16	409,63
		Kel. Tegalrejo	-	19,42	176,32	195,74
		Jumlah	**-**	**196,59**	**1.618,94**	**1.815,53**
2	Kec. Sidomukti	Kel. Dukuh	-	56,52	313,82	370,34
		Kel. Kalicacing	-	-	69,75	69,75
		Kel. Kecandran	-	22,89	330,64	353,53
		Kel. Mangunsari	-	4,33	284,00	288,33
		Jumlah	**-**	**83,74**	**998,21**	**1.081,95**
3	Kec. Sidorejo	Kel. Blotongan	13,35	108,86	301,71	423,92
		Kel. Bugel	18,52	62,25	169,23	250,00
		Kel. Kauman Kidul	1,65	11,54	196,74	209,93
		Kel. Pulutan	-	-	212,46	212,46
		Kel. Salatiga	-	1,09	203,95	205,04
		Kel. Sidorejo Lor	0,11	15,76	241,83	257,70
		Jumlah	**33,63**	**199,50**	**1.325,92**	**1.559,05**
4	Kec. Tingkir	Kel. Gendongan	-	-	57,17	57,17
		Kel. Kalibening	-	-	95,89	95,89
		Kel. Kutowinangun Kidul	-	1,56	96,22	97,77
		Kel. Kutowinangun Lor	5,98	39,17	155,67	200,82
		Kel. Sidorejo Kidul	-	0,36	276,37	276,74
		Kel. Tingkir Lor	-	-	174,16	174,16
		Kel. Tingkir Tengah	-	-	139,47	139,47
		Jumlah	**5,98**	**41,09**	**994,95**	**1.042,03**
Jumlah			**39,61**	**520,92**	**4.938,02**	**5.498,56**

Sumber: Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Salatiga, 2021

Hasil analisis potensi kemampuan lahan, dapat diketahui bahwa Kota Salatiga mempunyai potensi kemampuan lahan tinggi untuk dikembangkan dalam mendukung pembangunan daerah, sedangkan pada wilayah yang termasuk dalam potensi sedang dan rendah perlu memperhatikan beberapa faktor fisik guna lahan yang dapat sebagai penghambat untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari hasil kegiatan pembangunan tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mendukung potensi kemampuan lahan Kota Salatiga diantaranya:

1. Pengembangan kawasan terbangun diupayakan tidak dikembangkan pada kawasan dengan kelerengan lebih dari 25%.
2. Tidak mendirikan bangunan pada kawasan sempadan dan kawasan lindung.
3. Reboisasi pada lahan kritis dan rawan longsor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kondisi potensi kemampuan lahan tinggi, sedang dan rendah menunjukkan kemampuan daya dukung lahan Kota Salatiga dalam mendukung pembangunan daerah juga mempunyai daya dukung tinggi, sedang dan rendah.

Analisis Daya Dukung Lahan berdasarkan Dokumen Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2021 yang dilakukan melalui analisis perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan ruang Wilayah. Daya dukung lahan Kota Salatiga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 5 *Hasil Analisis Daya Dukung Lahan Kota Salatiga*

Ketersediaan Lahan (LS)	Kebutuhan Lahan (DL)	Daya Dukung Lahan	Keterangan
18.623 Ha	48.052,80 Ha	SL < DL Defisit atau terlampaui	Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan Kota Salatiga tidak mampu memenuhi kebutuhan standart hidup layak penduduk

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota SalatigaTahun 2025-2045

Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan lahan (LS) dan kebutulahan lahan (DL) didapatkan bahwa **Status Daya Dukung Lahan : S_L (18.623 Ha) < D_L (48.052,80 Ha)**, hal ini berarti bahwa daya dukung lahan pada tahun 2020 dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan Kota Salatiga tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk.

Hasil analisis pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga disimpulkan bahwa daya dukung lahan sampai dengan tahun 2045 memiliki kondisi defisit karena nilai SL < DL. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan lahan diantaranya meningkatkan produktivitas lahan dengan melakukan intensifikasi lahan pertanian, menekan laju alih fungsi lahan pertanian serta mengembangan irigasi teknis pada sawah tadah hujan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian.

b) Daya Dukung Pangan

Status daya dukung pangan Kota Salatiga, berdasarkan Data Dasara pada Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2021 yang dilakukan memlalui analisis sistem grid, didapatkan hasil bahwa status daya dukung pangan pada status defisit. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan yang ada di Kota Salatiga tidak mampu memenuhi kebutuhan aktivitas kehidupan.

Analisis perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan dalam hal ini kebutuhan padi/beras dihitung mengacu pada pendapat pakar *Fuad, et al*, yang termuat dalam makalah Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI: 255-266. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan dihitung berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun rencana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 6 *Status Daya Dukung Pangan Kota Salatiga*

No	Kecamatan	Kelurahan	Ketersediaan Pangan (Ha)	Kebutuhan Pangan (Ha)	Status Daya Dukung Pangan
1	Kec. Argomulyo	Kel. Cebongan	86	593	Defisit
		Kel. Kumpulrejo	681	995	Defisit
		Kel. Ledok	94	1.281	Defisit
		Kel. Noborejo	304	812	Defisit
		Kel. Randuacir	448	813	Defisit
		Kel. Tegalrejo	101	1.430	Defisit
		Jumlah	**1.715**	**5.924**	**Defisit**
2.	Kec. Sidomukti	Kel. Dukuh	197	1.709	Defisit
		Kel. Kalicacing	0	697	Defisit
		Kel. Kecandran	258	876	Defisit
		Kel. Mangunsari	86	2.033	Defisit
		Jumlah	**541**	**5.316**	**Defisit**
3	Kec. Sidorejo	Kel. Blotongan	85	388	Defisit
		Kel. Bugel	64	109	Defisit
		Kel. Kauman Kidul	48	129	Defisit
		Kel. Pulutan	45	143	Defisit
		Kel. Salatiga	9	431	Defisit
		Kel. Sidorejo Lor	23	405	Defisit
		Jumlah	**273**	**1.606**	**Defisit**
4	Kec. Tingkir	Kel. Gendongan	5	704	Defisit
		Kel. Kalibening	60	306	Defisit
		Kel. Kutowinangun Kidul	23	1.074	Defisit
		Kel. Kutowinangun Lor	78	1.734	Defisit
		Kel. Sidorejo Kidul	170	1.077	Defisit
		Kel. Tingkir Lor	119	675	Defisit
		Kel. Tingkir Tengah	74	775	Defisit
		Jumlah	**529**	**6.346**	**Defisit**
	Jumlah		**3.057**	**19.192**	**Defisit**

Sumber: Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2021

Status daya dukung pangan defisit ini, berarti bahwa Kota Salatiga tidak mampu swasembada pangan dalam arti jumlah pendudukanya telah melampaui jumlah penduduk optimal. Kondisi Kota Salatiga yang mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan ketidak mampuan swasembada pangan menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Kota Salatiga dapat bekerja sama dengfan Bulog dalam penyediaan beras, dapat pula melalui program-program yang dikembangkan untuk dapat meningkatkan produktivitas tanaman, misalnya melalui program intensifikasi tanaman pangan, sehingga dapat menaikkan indeks pertanaman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

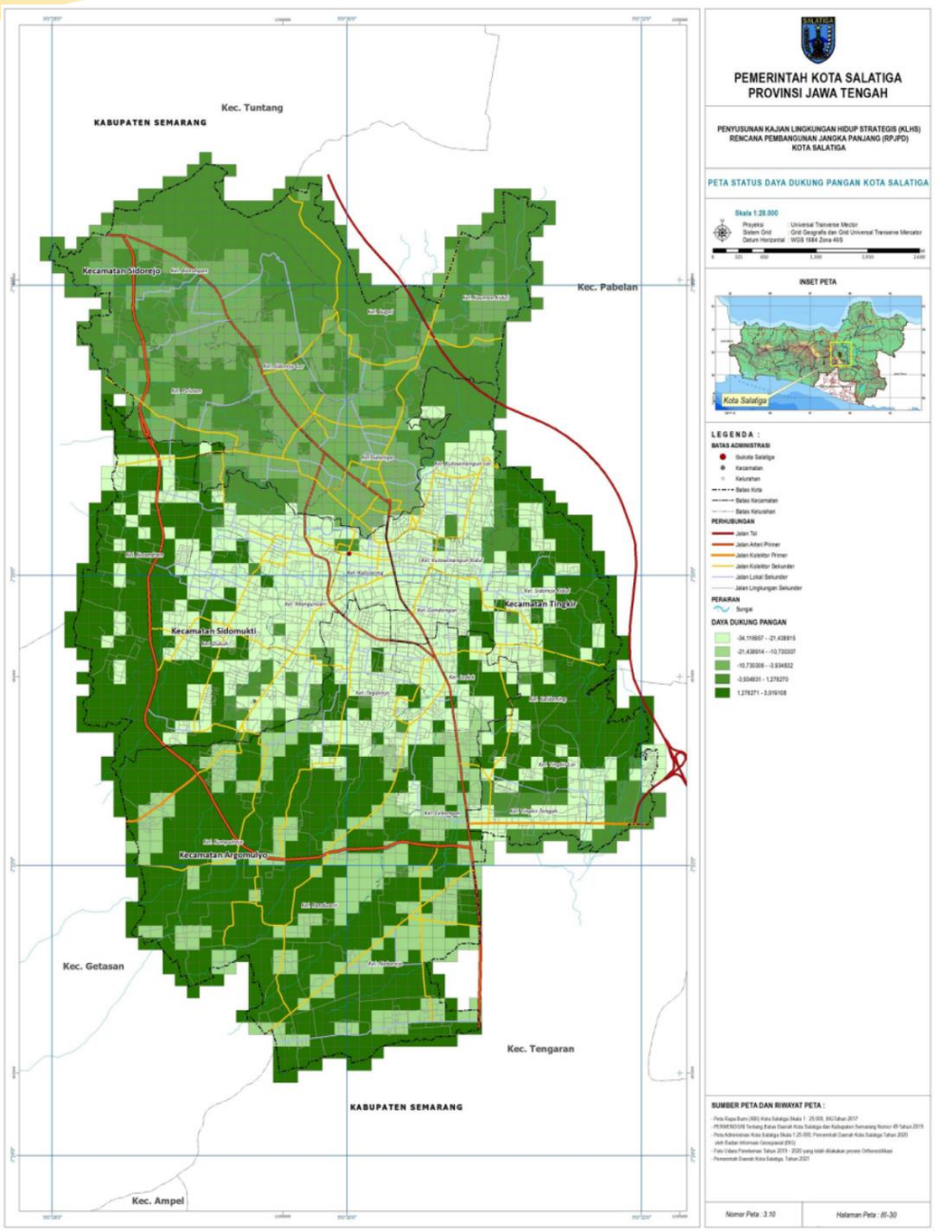

Gambar 2. 9 *Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Salatiga*
Sumber: Dokumen KLHS-RPJPD Kota Salatiga

c) Daya Dukung Air

Status daya dukung air Kota Salatiga, menggunakan pendekatan standar kebutuhan air yang termuat di dalam Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan air di Kota Salatiga, dalam dokumen KLHS RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045, kebutuhan air yang mengalami peningkatan kebutuhan volume tahun 2045 yaitu kebutuhan air domestik meningkat dari 16.616.621 m3/tahun menjadi 18.248.544 m3/tahun dan kebutuhan untuk aktivitas peternakan dari 258.347 m3/tahun menjadi 1.141.720 m3/tahun. Sedangkan kebutuhan air berbasis lahan mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan alih fungsi lahan dari lahan pertanian (sawah, ladang, kebun, tegalan) menjadi pola ruang terbangun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dari perhitungan proyeksi kebutuhan air di Kota Salatiga walauapun diproyeksikan mengalami penurunan dari 54.481.168 m3/tahun di tahun 2021 menjadi 51.086.561 m3/tahun di tahun 2045, tetapi jika dibandingkan dengan proyeksi ketersediaan air di Kota Salatiga, maka masih dalam kondisi defisit/terlampui. Proyeksi Status Daya Dukung Air Kota Salatiga dapat diketahui bahwa :

- Status Tahun 2021 :
  SA (34.432.464,96 m3/tahun) < DA (54.481.168 m3/tahun)
- Status Tahun 2045 :
  SA (34.432.464,96 m3/tahun) < DA (51.326.853 m3/tahun)

Status defisit/ Status defisit/ terlampaui berarti bahwa Kota Salatiga tidak mampu memenuhi kebutuhan air.

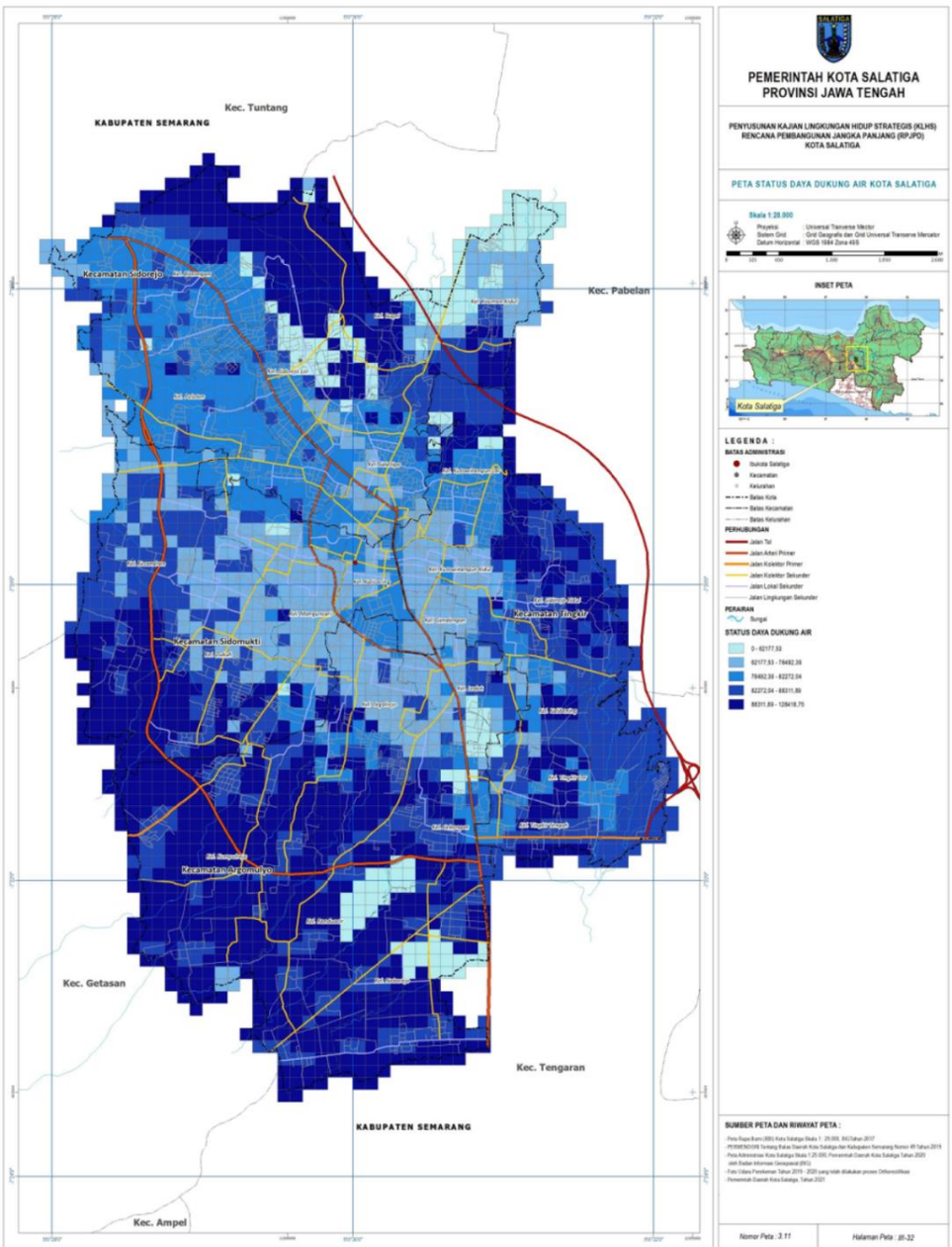

Gambar 2. 10 *Peta Status Daya Dukung Air Kota Salatiga*
Sumber: Dokumen KLHS-RPJPD Kota Salatiga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Evaluasi Kesesuaian Lahan

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara penggunaan lahan dengan hasil analisis kemampuan lahan, sehingga setiap penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan dan mendukung pengembangan kawasan. Beberapa parameter pemetaan yang digunakan yaitu :

a. Peta penggunaan lahan.
b. Peta kemampuan lahan sampai dengan tingkat unit pengelolaan.

Dari hasil analisis evaluasi kesesuaian lahan atau pemanfaatan ruang dapat diketahui beberapa penggunaan lahan yang terindikasi berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan hasil analisis dihasilkan kondisi evaluasi kesesuaian lahan Kota Salatiga didominasi oleh kondisi sesuai/cocok, adapun kondisi kesesuaian lahan lainnya yaitu sesuai/cocok dengan rekomendasi. Karakteristik kondisi evaluasi kesesuaian lahan di Kota Salatiga, yaitu:

a) Sesuai/cocok: merupakan kawasan dengan hasil evaluasi kesesuaian dengan kondisi cocok, dengan beberapa parameter karakteristik, sebagai berikut:
   - Kondisi penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan.
   - Tidak terdapat faktor penghambat dalam kesesuaian lahannya.
   - Jika terdapat faktor penghambat dapat diatasi (tidak berpengaruh negatif).

b) Sesuai/cocok dengan rekomendasi: merupakan kawasan dengan hasil evaluasi kesesuaian kondisi cocok dengan rekomendasi, dengan beberapa parameter karakteristik, sebagai berikut:
   - Kondisi penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan
   - Terdapat faktor penghambat dalam kesesuaian lahannya, namun bisa diatasi dengan alternatif penggunaan lahan lainnya.

***Tabel 2. 7** Evaluasi Kesesuaian Lahan Kota Salatiga*

No	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Evaluasi Kesesuaian (Dalam Ha)		Jumlah (Ha)
			Sesuai	Sesuai dengan Rekomendasi	
1	Kec. Argomulyo	Kel. Cebongan	154,07	-	154,07
		Kel. Kumpulrejo	559,51	-	559,51
		Kel. Ledok	189,27	-	189,27
		Kel. Noborejo	307,31	-	307,31
		Kel. Randuacir	409,63	-	409,63
		Kel. Tegalrejo	195,74	-	195,74
		Jumlah	**1.815,53**	**-**	**1.815,53**
2	Kec. Sidomukti	Kel. Dukuh	370,34	-	370,34
		Kel. Kalicacing	69,75	-	69,75
		Kel. Kecandran	353,53	-	353,53
		Kel. Mangunsari	288,33	-	288,33
		Jumlah	**1.081,95**	**-**	**1.081,95**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Evaluasi Kesesuaian (Dalam Ha)		Jumlah (Ha)
			Sesuai	Sesuai dengan Rekomendasi	
3	Kec. Sidorejo	Kel. Blotongan	411,11	12,81	423,92
		Kel. Bugel	241,77	8,23	250,00
		Kel. Kauman Kidul	209,93	-	209,93
		Kel. Pulutan	212,46	-	212,46
		Kel. Salatiga	201,06	3,97	205,04
		Kel. Sidorejo Lor	251,06	6,64	257,70
		Jumlah	**1.527,40**	**31,65**	**1.559,05**
4	Kec.Tingkir	Kel. Gendongan	57,17	-	57,17
		Kel. Kalibening	95,89	-	95,89
		Kel. Kutowinangun Kidul	91,64	6,14	97,77
		Kel. Kutowinangun Lor	178,81	22,01	200,82
		Kel. Sidorejo Kidul	267,42	9,32	276,74
		Kel. Tingkir Lor	174,16	-	174,16
		Kel. Tingkir Tengah	139,47	-	139,47
		Jumlah	**1.004,56**	**37,47**	**1.042,03**
		Jumlah Total	**5.429,43**	**69,12**	**5.498,56**

Sumber: Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Salatiga, 2021

Hasil evaluasi kesesuaian lahan dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kesesuaian lahan Kota Salatiga dengan kategori “sesuai” seluas kurang lebih 5.429,43 Ha dan “sesuai dengan rekomendasi” seluas kurang lebih 69,12 Ha. Kategori “sesuai” paling banyak terdapat di Kecamatan Argomulyo seluas 1.815,53 Ha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

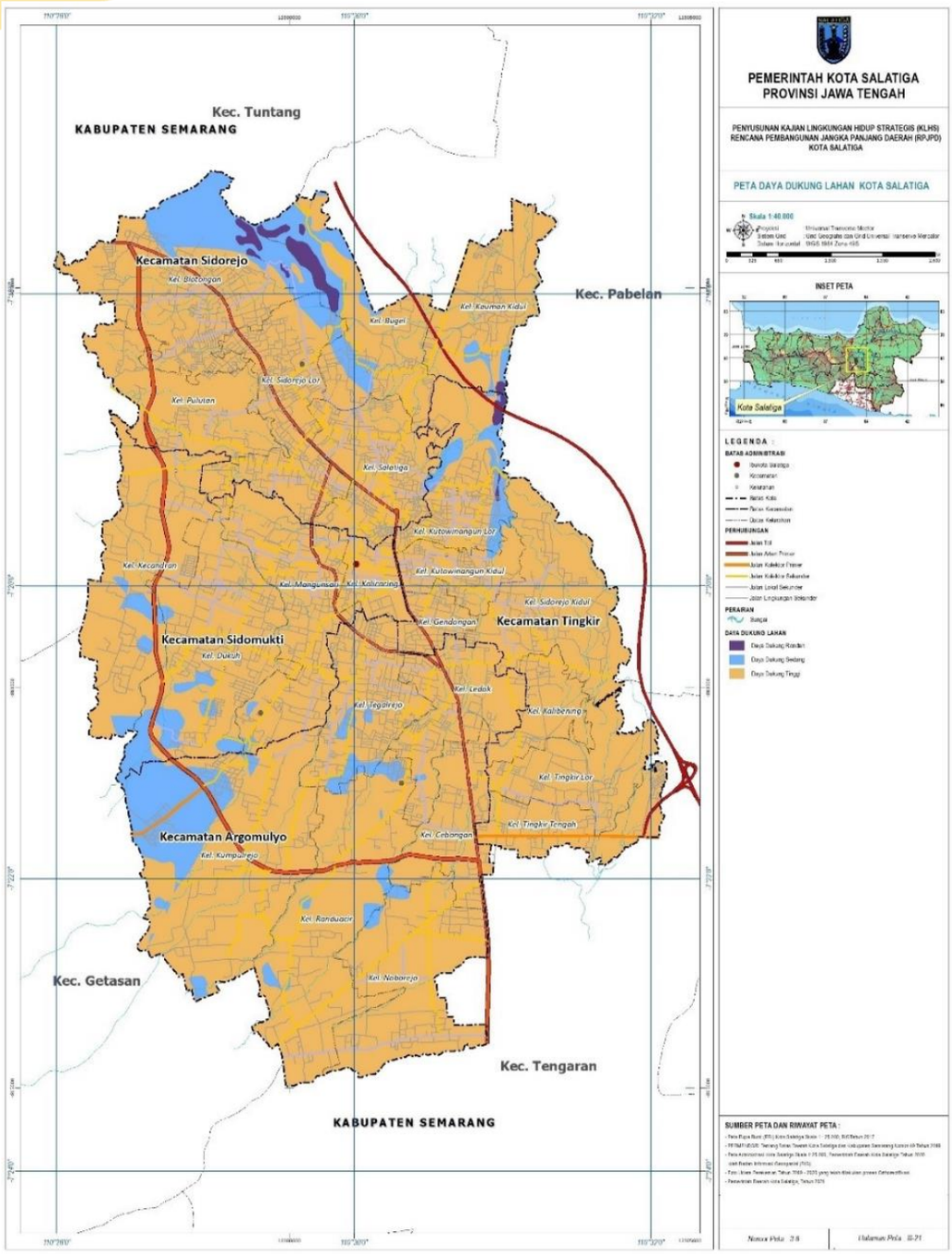

Gambar 2. 11 *Peta Evaluasi Kesesuaian Lahan Kota Salatiga*
Sumber: Dokumen KLHS-RPJPD Kota Salatiga

5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Salatiga mengalami tren kenaikan sejak tahun 2017, hanya turun pada tahun 2021. Pada tahun 2023 terjadi konversi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 58,37 menjadi 69,59. Perubahan tersebut disebabkan oleh penyesuaian metode penghitungan baru komponen IKLH yaitu :

a. Indeks Kualitas Udara (IKU) menambahkan parameter PM 2,5 sehingga nilai IKU mengalami kencendurungan menurun. Dengan perubahan tersebut nilai IKU berubah dari 84,84 menjadi 84,36;
b. Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami perubahan metode perhitungan menjadi perhitungan IKA-INA (Skala maksimal 100 bukan berdasarkan indeks

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai). Dengan menggunakan metode perhitungan baru, nilai IKA berubah dari 44,29 menjadi 70,63;

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada penghitungan IKL sebanyak 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kab/kota dengan ekosistem gambut. Berdasarkan perubahan penghitungan tersebut nilai IKL Kota Salatiga dari 33,62 menjadi 40,49.

Nilai IKLH 69,59 menunjukkan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga berada pada kategori sedang (50< 69,59 <70). Berikut adalah grafik perkembangan IKLH Kota Salatiga.

Grafik 2. 1 *Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Salatiga Tahun 2017-2023*
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, 2017-2023

6. Daya Tampung Sampah

Kondisi capaian pengurangan sampah di Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar 19,06% atau mencapai 8.078,03 ton, sedangkan pada kegiatan penanganan sampah mencapai 77,74% atau 32.952,56 ton, sehingga jumlah sampah yang terkelola pada tahun 2023 sebesar 41.030,59 ton atau 96,80% dari total timbulan sampah. Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngronggo Kota Salatiga memiliki kapasitas 440.000 m3. Adapun pada tahun 2022 volume sampah yang terdapat di TPA Ngronggo sebanyak 561.250 m3. Hal ini berarti saat ini TPA Ngronggo telah *over capacity*, sehingga diperlukan upaya dalam penanganan persampahan guna mengurangi timbulan sampah di Kota Salatiga.

Kondisi capaian pengurangan sampah di Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar 19,06% atau mencapai 8.078,03 ton, sedangkan pada kegiatan penanganan sampah mencapai 77,74% atau 32.952,56 ton. sehingga jumlah sampah yang terkelola pada tahun 2023 sebesar 41.030,59 ton atau 96,80% dari total timbulan sampah. Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngronggo Kota Salatiga memiliki kapasitas 440.000 m3. Adapun pada tahun 2022 volume sampah yang terdapat di TPA Ngronggo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sebanyak 561.250 m3. Hal ini berarti saat ini TPA Ngronggo telah *over capacity*, sehingga diperlukan upaya dalam penanganan persampahan guna mengurangi timbulan sampah di Kota Salatiga.

***Tabel 2. 8** Kondisi Persampahan Kota Salatiga Tahun 2022-2023*

	KETERANGAN	2022	2023
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (ton/tahun)	**40,969.24**	**42.386,57**
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH (ton/tahun)	**7.877,28**	**8.078,03**
	Persentase pengurangan sampah (%)	19,23%	19,06%
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH (ton/tahun)	**30.025,27**	**32.952,56**
	Persentase penanganan sampah (%)	73,29%	77,74%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III) (ton/tahun)	**37,902.55**	**41.030,59**
	Persentase sampah terkelola (%)	92,51%	96,80%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA	**3.066,69**	**1.355,98**
	Persentase sampah tidak dikelola (%)	7,49%	3,20%

Sumber: SIPSN, 2023

Potensi timbulan sampah kota mengalami kenaikan pada tahun 2022-2023, dari 40,969.24 ton menjadi 42.386,57 ton. Upaya pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan sampah juga mengalami peningkatan sebesar 3,5% dari 7.877,28 ton di tahun 2022 meningkat menjadi 8.078,03 ton di tahun 2023. Sedangkan pada upaya penanganan sampah juga meningkat dari 30.025,27 ton di tahun 2022 menjadi 32.952,56 ton di tahun 2023. Sehingga sampah yang tidak dikelola mengalami penurunan yang semula 3.066,69 ton sampah tidak terkelola di tahun 2022 menjadi 1.355,98 ton di tahun 2023. *(Dokumen Kajian Lingkungan Hidup RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045)*

7. Emisi Gas Rumah Kaca

Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah kegiatan monitoring rutin yang dilakukan setiap tahun untuk mengetahui tren emisi di Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sumber emisi yang paling mendominasi di Kota Salatiga dan sebagai bahan dasar dalam menyusun rekomendasi atau Rencana Aksi Daerah dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Terdapat 4 (empat) sektor yang dianalisis sebagai sumber emisi yang dilakukan dalam kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu pengadaan dan penggunaan energi, proses industri dan penggunaan produk pertanian, kehutanan dan perubahan lahan, serta pengelolaan limbah. Besaran total emisi GRK Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2022 mengalami perkembangan yang fluktatif. Pada tahun 2018, nilai emisi GRK Kota Salatiga sebesar 16.135 GgCO2eq mengalami penurunan selama 4 (empat) tahun menjadi 10.673 Gg CO2eq di tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 11.048 CO2eq atau meningkat sebesar
3,5%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

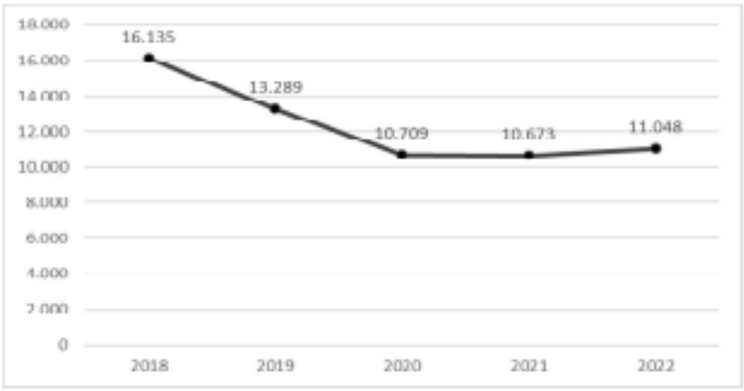

Gambar 2. 12 *Emisi Gas Rumah Kaca Kota Salatiga Tahun 2018-2022*
Sumber: Dokumen IGRK Kota Salatiga, 2023

Tren kenaikan tersebut dipengaruhi oleh sektor pengadaan dan penggunaan energi yang mengalami kenaikan sebesar 5%, sektor limbah mengalami kenaikan emisi sebesar 1%, sektor IPPU (Proses Industri dan Penggunaan Produk) sebesar 37% dan AFOLU (*Agriculture, Forestry, and Other Land Use*) sebesar 10%. Tren penurunan GRK berdasarkan sektor dapat dilihat pada gambar berikut.

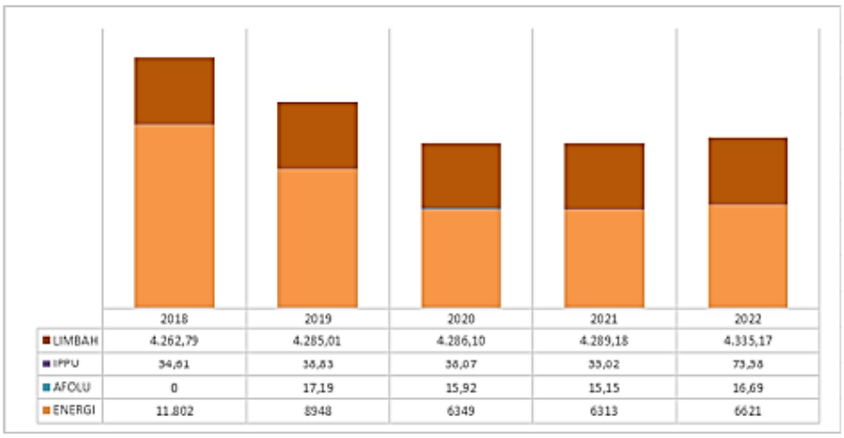

	2018	2019	2020	2021	2022
LIMBAH	4.262,79	4.285,01	4.286,10	4.289,18	4.335,17
IPPU	34,61	35,83	36,07	39,02	73,98
AFOLU	0	17,19	15,92	15,15	16,69
ENERGI	11.802	8948	6349	6313	6621

Gambar 2. 13 *Tren Penurunan GRK Kota Salatiga berdasarkan Sektor*
Sumber: Dokumen IGRK Kota Salatiga, 2023

Berdasarkan dokumen Laporan IGRK Kota Salatiga Tahun 2023, dapat diketahui tren emisi masing-masing sektor penyumbang emisi, yaitu dari kegiatan:

1) Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi

   Secara keseluruhan emisi dari sektor pengadaan dan penggunaan energi di Kota Salatiga mengalami penurunan dari tahun 2018-2021, sedangkan di tahun 2022 mengalami peningkatan. Emisi di sektor ini dibentuk dari kegiatan dengan kategori kegiatan non spesifik, residential, transportasi, industri pengolahan dan konstruksi. Sektor penyumbang emisi tertinggi dari kegiatan industri pengolahan dan konstruksi. Trend emisi sektor-sektor pengadaan dan penggunaan energi periode tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

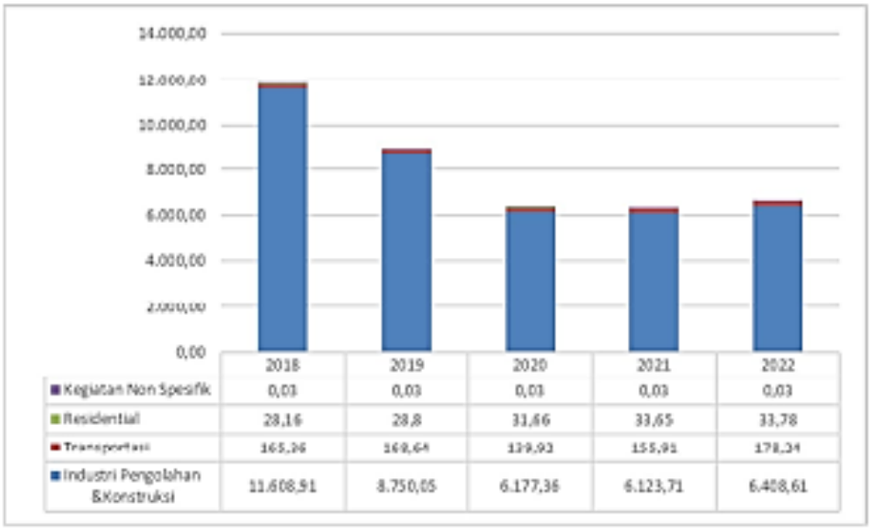

	2018	2019	2020	2021	2022
Kegiatan Non Spesifik	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Residential	28,16	28,8	31,66	33,65	33,78
Transportasi	165,26	169,64	139,93	155,91	178,34
Industri Pengolahan &Konstruksi	11.608,91	8.750,05	6.177,36	6.123,71	6.408,61

Gambar 2. 14 *Tren Emisi Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi Kota Salatiga Tahun 2018-2022*
Sumber: Dokumen IGRK Kota Salatiga, 2022

2) Sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)

Emisi yang dihasilkan dari sektor ini dihasilkan dari aktivitas produk non energi dan pelarut dan industry logam. Sedangkan untuk kategori lainnya tidak ada kegiatan industri sesuai dengan kategori yang menghasilkan emisi GRK dalam prosesnya. Kegiatan di sektor ini mengalami tren naik tetapi berfluktuatif. Total emisi pada tahun 2018 sebesar 54,61 Gg CO2eq dan meningkat di tahun 2022 sebesar 75,58 Gg CO2eq. Tren emisi sektor IPPU dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

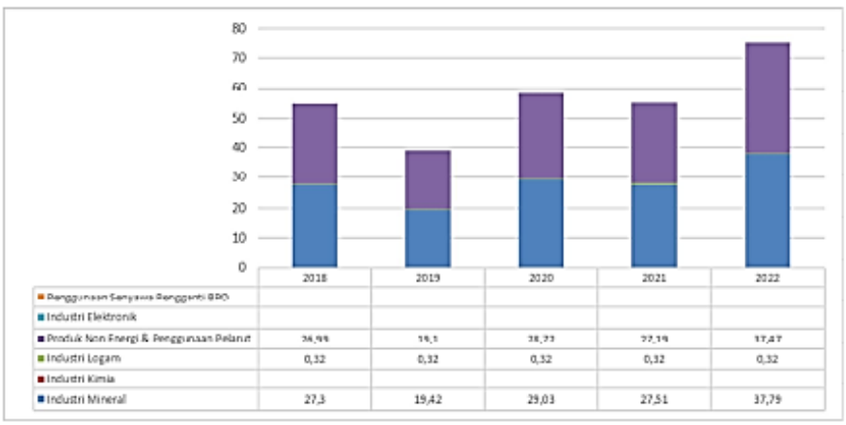

	2018	2019	2020	2021	2022
Penggunaan Senyawa Pengganti BPO					
Industri Elektronik					
Produk Non Energi & Penggunaan Pelarut	26,99	19,1	28,73	27,19	37,87
Industri Logam	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Industri Kimia					
Industri Mineral	27,3	19,42	29,03	27,51	37,79

Gambar 2. 15 *Tren Emisi Sektor IPPU Kota Salatiga Tahun 2018-2022*
Sumber: Dokumen IGRK Kota Salatiga, 2022

3) Sektor AFOLU

Emisi di sektor ini dibentuk dari kegiatan dengan kategori pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan. Emisi paling tinggi adalah agregat pertanian. Tren emisi sektor Afolu dapat dilihat pada grafik berikut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

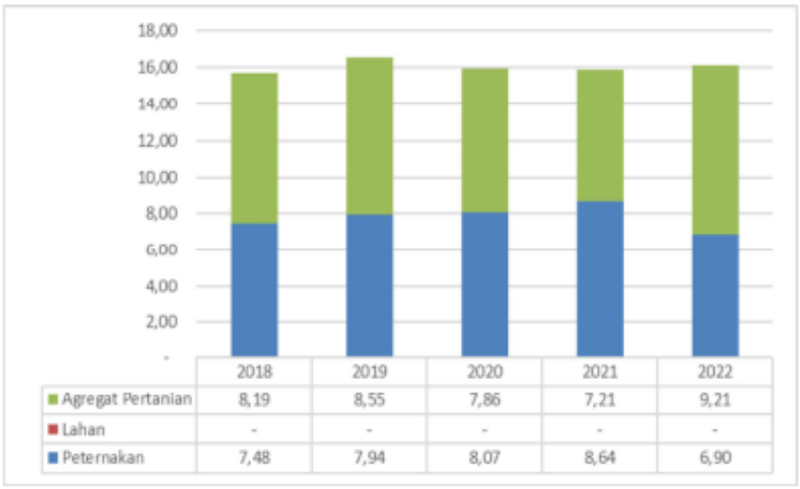

	2018	2019	2020	2021	2022
Agregat Pertanian	8,19	8,55	7,86	7,21	9,21
Lahan	-	-	-	-	-
Peternakan	7,48	7,94	8,07	8,64	6,90

Gambar 2. 16 *Tren Emisi Sektor AFOLU Kota Salatiga Tahun 2018-2022*
Sumber: Dokumen IGRK Kota Salatiga, 2022

4) Sektor Pengelolaan Limbah

Sektor limbah sangat ditentukan oleh jumlah penduduk dan sistem pengelolaan sampahnya. Emisi dari sektor pengelolaan limbah terbesar dihasilkan dari sub sektor pengolahan dan pembuangan air limbah dan diurutan kedua dihasilkan dari subsector pembuangan limbah akhir. Tren emisi sektor pengelolaan limbah dapat dilihat pada gambar berikut.

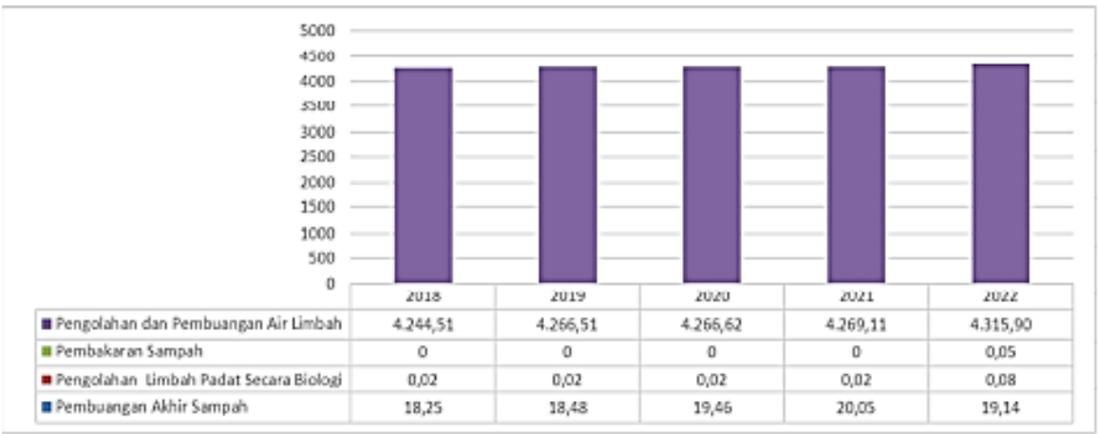

	2018	2019	2020	2021	2022
Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah	4.244,51	4.266,51	4.266,62	4.269,11	4.315,90
Pembakaran Sampah	0	0	0	0	0,05
Pengolahan Limbah Padat Secara Biologi	0,02	0,02	0,02	0,02	0,08
Pembuangan Akhir Sampah	18,25	18,48	19,46	20,05	19,14

Gambar 2. 17 *Tren Emisi Sektor Pengelolaan Limbah Kota Salatiga Tahun 2018-2022*
Sumber: Dokumen IGRK Kota Salatiga, 2022

8. Indeks Risiko Bencana

Kondisi risiko bencana merupakan gambaran terkini dari berbagai macam bencana yang terdapat di Kota Salatiga. Adapun bencana yang terjadi selama tahun 2022 di Kota Salatiga meliputi bencana kekeringan, longsor (talud longsor, tanah longsor), endapan lumpur, luapan air, pohon tumbang. Kejadian bencana selama satu tahun 2022 yang disajikan pada grafik berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	Kekeringan/ Dropping Air Bersih	Endapan Lumpur	Longsoran Tanah	Luapan Air	Pohon Tumbang	Talud Longsor	Tanah Longsor
Argomulyo	22	0	0	0	14	5	5
Sidomukti	0	0	1	1	10	1	1
Sidorejo	1	2	2	15	11	7	8
Tingkir	0	0	0	4	11	0	11

Grafik 2. 2 *Kejadian Bencana Kota Salatiga tahun 2022*
Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Salatiga, 2022

Berdasarkan hasil kajian kebencanaan serta Indeks Rasio Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022 disebutkan, indeks ratio bencana per kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga memiliki tingkat kelas risiko sedang dengan skor 90,89, sedangkan di tahun 2023 pada skor 83,98.

9. Kondisi irigasi

Saluran irigasi yang berada di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2023 sebanyak 12 saluran irigasi sekunder. Persentase jaringan irigasi kondisi baik capaian kinerja RPJMD berada di angka 81%. Total jaringan sekunder sepanjang 23.053 meter, yang dalam kondisi baik sepanjang 18.586 meter (81%) dan dalam kondisi rusak ringan sepanjang 4.467 meter (19%).

Tabel 2. 9 *Kondisi Saluran Irigasi Kota Salatiga Tahun 2023*

No	Nama Saluran	Panjang (m)	Kondisi Kinerja Aset	Nilai	Panjang		Prosentase		Keterangan
					Baik	Sedang	Baik	Sedang	
1	Saluran Sekunder Andong	1.554			1.554		100%		Diambil dari sistem E-Paksi
	Ruas 1	353	Baik	85					
	Ruas 2	166	Baik	82,3					
	Ruas 3	141	Baik	85					
	Ruas 4	97	Baik	85					
	Ruas 5	144	Baik	85					
	Ruas 6	32	Baik	85					
	Ruas 7	256	Baik	85					
	Ruas 8	72	Baik	85					
	Ruas 9	244	Baik	85					
	Ruas 10 (pembuang)	49	Baik	84					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Saluran	Panjang (m)	Kondisi Kinerja Aset	Nilai	Panjang		Prosentase		Keterangan
					Baik	Sedang	Baik	Sedang	
2	Saluran Sekunder Banyuputih	1.369			1.164	63	85%	5%	Diambil dari sistem E-Paksi
	Ruas 1	200	Baik	85					
	Ruas 2	300	Baik	85					
	Ruas 3	27	Baik	85					
	Ruas 4	203	Baik	84					
	Ruas 5	29	Baik	85					
	Ruas 6	405	Baik	82					
	Ruas 7	205	baik	85					
	Ruas 8 (pembuang)	191	sedang	63					
3	Saluran Sekunder Cengek	4.076			4.076		100%		Diambil dari sistem E-Paksi
	Ruas 1	514	Baik	82,8					
	Ruas 2	491	Baik	81,25					
	Ruas 3	152	Baik	81,25					
	Ruas 4	80	Baik	81,25					
	Ruas 5	70	Baik	81,25					
	Ruas 6	117	Baik	81,25					
	Ruas 7	70	Baik	81,25					
	Ruas 8	122	Baik	81,25					
	Ruas 9	27	Baik	81,25					
	Ruas 10	58	Baik	81,25					
	Ruas 11	51	Baik	81,25					
	Ruas 12	174	Baik	81,25					
	Ruas 13	104	Baik	81,25					
	Ruas 14	298	Baik	81,25					
	Ruas 15	75	Baik	81,25					
	Ruas 16	164	Baik	81,25					
	Ruas 17	477	Baik	81,25					
	Ruas 18	85	Baik	81,25					
	Ruas 19	947	Baik	81,25					
4	Saluran Sekunder Bonorejo	390			207	183	53%		Diambil dari sistem E-Paksi
	Ruas 1	207	Baik	85					
	Ruas 2	183	jelek	43,8					
5	Saluran Sekunder Kedawung	2.119			1.983	67	94%	3%	Diambil dari sistem E-Paksi
	Ruas 1	702	Baik	83					
	Ruas 2	437	Baik	82					
	Ruas 3	418	Baik	85					
	Ruas 4	340	Baik	82					
	Ruas 5	86	Baik	85					
	Ruas 6 (pembuang)	136	sedang	67					
6	Saluran Sekunder Siandran	298			298		100%		Diambil dari sistem E-Paksi
	Ruas 1	190	Baik	85					
	Ruas 2	108	Baik	85					
7	Saluran Sekunder Sidali	2.038			583	1455	29%	71%	Diambil dari sistem E-Paksi
	Ruas 1	921	Sedang	74					
	Ruas 2	583	Baik	85					
	Ruas 3	534	Sedang	74					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Saluran	Panjang (m)	Kondisi Kinerja Aset	Nilai	Panjang		Prosentase		Keterangan
					Baik	Sedang	Baik	Sedang	
8	Saluran Sekunder Sijamban	2.500			2.500		100%		Diambil dari sistem E-Paksi
	Ruas 1	991	Baik	83					
	Ruas 2	1.322	Baik	80,4					
	Ruas 3	187	Baik	84					
9	Saluran Sekunder Siluwing	1.540			1.171	369	76%	24%	Diambil dari sistem E-Paksi
	Ruas 1	510	Baik	82					
	Ruas 2	369	Sedang	73,5					
	Ruas 3	661	Baik	85					
10	Saluran Sekunder Tambakboyo	1.808			468	1340	26%	74%	Diambil dari sistem E-Paksi
	Ruas 1	1.340	Baik	84					
	Ruas 2	211	Baik	82					
	Ruas 3	257	Baik	82					
11	Saluran Sekunder Tengah	2.144			2.144		100%	0%	Diambil dari sistem E-Paksi
	Ruas 1	1.147	Baik	82					
	Ruas 2	83	Baik	82					
	Ruas 3	96	Baik	82					
	Ruas 4	818	Baik	80,5					
12	Saluran Sekunder Kedungkopyah	3.428			2.438	990	71%	29%	Diambil dari sistem E-Paksi
	Ruas 1	785	Baik	85					
	Ruas 2	141	Baik	85					
	Ruas 3	294	Baik	85					
	Ruas 4	389	Baik	85					
	Ruas 5	344	Baik	85					
	Ruas 6	161	Baik	85					
	Ruas 7	211	Baik	85					
	Ruas 8	291	sedang	77,8					
	Ruas 9	186	Sedang	74,5					
	Ruas 10	79	Sedang	77,5					
	Ruas 11	194	Sedang	74,5					
	Ruas 12	240	Sedang	74,5					
	Ruas 13	113	Baik	80,5					
TOTAL					**18.586**	**4.467**	**81**	**19**	**23.053**

Sumber : DPUPR, 2023

10. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai ketahanan sebuah daerah terhadap berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin terjadi, termasuk bencana alam, perubahan iklim, kerawanan sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. IKD bertujuan untuk membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi area-area yang mungkin memerlukan perhatian khusus dan sumber daya untuk memperbaiki ketahanan dan kesiapsiagaan daerah. IKD Kota Salatiga tahun 2023 yakni 5,6. Adapun kondisi IKD Kota Salatiga berada di atas IKD Provinsi Jawa Tengah (3,65).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

11. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Hasil perhitungan IKP 2022 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. 9 indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP):

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)
9. Angka harapan hidup pada saat lahir

Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunan GFSI. *Goodridge (2007*) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, bobot rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih adalah nol karena IKP kota tidak menggunakan indikator dari aspek ketersediaan pangan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada delapan indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek.

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off* point IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Berikut adalah *cut off point* IKP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

***Tabel 2. 10** Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan*

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75– 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96– 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2023

Tahun 2023 Kota Salatiga memiliki IKP dengan peringkat lima teratas di antara kota-kota di Indonesia. Berdasarkan peringkat IKP Kota, lima kota dengan urutan skor terbaik adalah Denpasar (95,80), Salatiga (94,20), Bekasi (93,55), Solok (92,87) dan Madiun (92,49). Kondisi ini sinkron dengan skor PPH Kota Salatiga yang meningkat/positif, yakni sebesar 95,51. Kondisi IKP Kota Salatiga (94,20) secara relatif berada di atas Provinsi Jawa Tengah (84,80).

2.1.2 Demografi

1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Kota Salatiga merupakan sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 4 Kecamatan dan 23 Kelurahan. Sensus Penduduk pada tahun 2023 mencatat penduduk Kota Salatiga pada tahun 2022 sebanyak 195.065 jiwa. Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2022 tertinggi di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 52.536 jiwa atau sekitar 26,93% dari total jumlah penduduk Kota Salatiga, selanjutnya disusul Kecamatan Argomulyo sebesar 50.800 jiwa, berikutnya adalah Kecamatan Tingkir (46.791 jiwa), dan terendah ada di Kecamatan Sidomukti sebanyak 44.938 jiwa. Namun secara keseluruhan penduduk Kota Salatiga dapat dikatakan merata. Persebaran penduduk Kota Salatiga selama 6 tahun dari tahun 2017 hingga 2022 terlihat pada tabel dibawah mengalami peningkatan selama 3 tahun dari 2017-2020. Akan tetapi, tahun 2021 jumlah penduduk di Kota Salatiga mengalami penurunan diakibatkan adanya Covid-19 yang banyak menyebabkan kematian. Kemudian pada tahun 2021 hingga 2023, jumlah penduduk yang tersebar di Kota Salatiga mengalami kenaikan. Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga tahun 2017-2023 disajikan pada tabel berikut.

***Tabel 2. 11** Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2023*

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Persentase Tahun 2023 (%)
1	Argomulyo	48.794	49.772	49.679	50.261	50.001	50.800	52.045	25,85
2	Tingkir	46.117	46.605	46.562	46.937	46.341	46.791	48.106	23,89

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Persentase Tahun 2023 (%)
3	Sidomukti	43.617	44.023	44.710	44.162	44.549	44.938	46.125	22,91
4	Sidorejo	53.550	54.211	54.612	54.722	52.634	52.536	55.093	27,36
Kota Salatiga		**192.078**	**194.611**	**195.563**	**196.082**	**193.525**	**195.065**	**201.369**	**100**

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2017-2023

Adapun jumlah dan distribusi penduduk Kota yang didasarkan pada tahun sensus 2000, 2010 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 12 *Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kota Salatiga berdasarkan Tahun Sensus 2000, 2010 dan 2020*

No	Kecamatan	2000		2010		2020	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Argomulyo	29.754	20,55	42.638	24,89	50.261	25,63
2	Tingkir	35.484	24,51	42.054	24,55	46.937	23,94
3	Sidomukti	33.408	23,07	36.611	21,37	44.162	22,52
4	Sidorejo	46.150	31,87	50.024	29,20	54.722	27,91
Kota Salatiga		**144.796**	**100**	**171.327**	**100**	**196.082**	**100**

Sumber: BPS Kota Salatiga (2000, 2010. 2020)

2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah dapat diklasifikasikan dalam beberapa ukuran. Untuk mengukur tingkat lambat atau cepatnya pertumbuhan penduduk dapat digolongkan pada empat kategori yakni sangat lambat, lambat, cepat dan sangat cepat. Adapun pertumbuhan penduduk kategori sangat lambat dengan laju pertumbuhan penduduk kurang dari 1 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk kategori lambat dengan laju pertumbuhan penduduk antara 1-2 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk kategori cepat dengan laju pertumbuhan penduduk di atas 2-3 persen pertahun dan pertumbuhan penduduk dikatakan sangat cepat dengan pertumbuhan penduduk besar dari 3 persen per tahun.

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, dan migrasi baik imigrasi maupun emigrasi. Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kota Salatiga adalah sebesar 201.369 jiwa. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 195.065 jiwa. Apabila dibanding tahun 2017, pertumbuhan penduduk Kota Salatiga naik yakni sebesar 1,56%. Terdapat pertumbuhan penduduk minus atau mengalami penurunan, yaitu pada Kecamatan Sidorejo sebesar -0,38% dari tahun 2017. Berikut tabel jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga.

Tabel 2. 13 *Data Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2017-2023*

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Laju Pertumbuhan Penduduk (2017-2023)
1	Argomulyo	48.794	49.772	49.679	50.261	50.001	50.800	52.045	0,81%
2	Tingkir	46.117	46.605	46.562	46.937	46.341	46.791	48.106	0,29%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Laju Pertumbuhan Penduduk (2017-2023)
3	Sidomukti	43.617	44.023	44.710	44.162	44.549	44.938	46.125	0,60%
4	Sidorejo	53.550	54.211	54.612	54.722	52.634	52.536	55.093	-0,38%
Kota Salatiga		**192.078**	**194.611**	**195.563**	**196.082**	**193.525**	**195.065**	**201.369**	**0,31%**

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2017-2023

Laju pertumbuhan Kota Salatiga apabila ditinjau dari data sensus penduduk 2000, 2010 dan 2020 mengalami laju pertumbuhan sebesar 1,52% dari tahun 2000 sebesar 144.796 jiwa menjadi 196.082 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga terhadap tahun sensus 2000-2010 mengalami kenaikan sebesar 1,68%, dan terhadap tahun sensus 2010-2020 naik sebesar 1,35%. Adapun jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga yang didasarkan pada tahun sensus 2000, 2010 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 14 *Jumlah dan Laju Petumbuhan Penduduk Kota Salatiga berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020*

No	Kecamatan	2000	2010	2020	Pertumbuhan Penduduk (2000-2010) (%)	Pertumbuhan Penduduk (2010-2020) (%)	Pertumbuhan Penduduk (2000-2020) (%)
1	Argomulyo	29.754	42.638	50.261	3,60	1,64	2,62
2	Tingkir	35.484	42.054	46.937	1,70	1,10	1,40
3	Sidomukti	33.408	36.611	44.162	0,92	1,88	1,40
4	Sidorejo	46.150	50.024	54.722	0,81	0,90	0,85
Kota Salatiga		**144.796**	**171.327**	**196.082**	**1,68**	**1,35**	**1,52**

Sumber: BPS Kota Salatiga (2000, 2010, 2020)

Laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 berfluktuasi dan masuk dalam kategori pertumbuhan penduduk lambat dan sangat lambat. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tajam yakni sebesar 1,71 persen pada tahun 2017, turun menjadi 1,40 pada tahun 2018, dan bahkan turun sangat tajam di tahun 2019 yaitu sebesar 0,21 persen (titik terendah pertumbuhan penduduk selama rentang waktu 2017-2021). Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup tajam yaitu dari 0,21 menjadi 1,18 persen dan di tahun 2021-2023 kembali mengalami penurunan dan menyentuh angka dibawah 1 persen (0,57 persen). Naik turunnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Salatiga ini sebagai indikasi dari dinamika kependudukan yang disumbang dari *Total Fertility Rate* atau kelahiran alami dan juga pertambahan penduduk yang disebabkan oleh aspek migrasi. Berikut adalah grafik tren jumlah penduduk Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

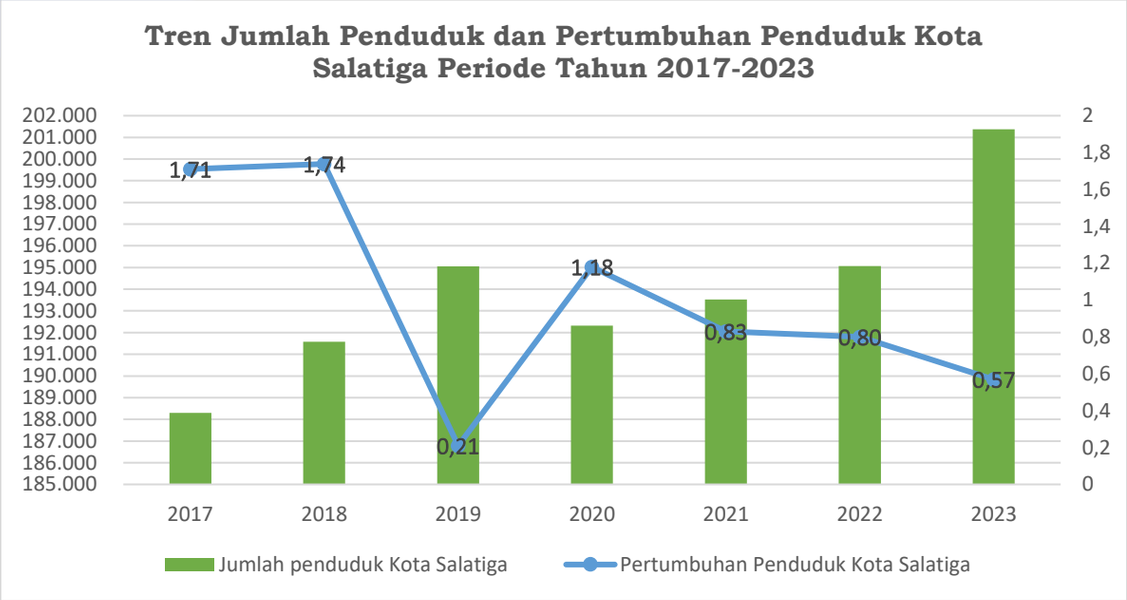

Grafik 2. 3 *Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2017-2023*
Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2018-2023 (diolah)

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan suatu indikator awal untuk menilai perkembangan wilayah, dan juga seluruh dampak yang ditimbulkannya. Wilayah dengan kepadatan tinggi biasanya berupa pusat permukiman penduduk, pusat kegiatan perekonomian, dan pusat suatu peradaban (Muta'ali, 2015). Kepadatan penduduk pada dasarnya merupakan jumlah penduduk yang menempati tiap satuan luas wilayah.

Jumlah penduduk Kota Salatiga pada akhir tahun 2023 adalah 201.369 jiwa, jumlah tersebut naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022) yaitu naik sebesar 6.304 menjadi 195.065 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 55.093 jiwa atau sekitar 27,36% dari total jumlah penduduk Kota Salatiga. Kepadatan penduduk Kota Salatiga akhir tahun 2023 adalah sebesar 3.663 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan terpadat terdapat ada di Kecamatan Tingkir sebesar 4.612 jiwa/km². Berikut tabel kepadatan penduduk Kota Salatiga.

Tabel 2. 15 *Kepadatan Penduduk Kota Salatiga tahun 2023*

No	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km²)
		km²	%	Jiwa	%	
1	Argomulyo	18,14	32,99	52.0450	25,85	2869
2	Tingkir	10,43	18,97	48.106	23,89	4612
3	Sidomukti	10,80	19,64	46.125	22,91	4271
4	Sidorejo	15,61	28,39	55.093	27,36	3529
Kota Salatiga		**54,98**	**100**	**201.369**	**100**	**3663**

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2023

Adapun kepadatan penduduk Kota Salatiga yang didasarkan pada tahun sensus 2000, 2010 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 16 *Kepadatan Penduduk Kota Salatiga berdasarkan Tahun Sensus 2000, 2010 dan 2020*

No	Kecamatan	Luas (km²)	Penduduk (Jiwa)			Kepadatan (Jiwa/km²)		
			2000	2010	2020	2000	2010	2020
1	Argomulyo	18,14	29.754	42.638	50.800	1.640	2350	2800
2	Tingkir	10,43	35.484	42.054	46.791	3.402	4032	4486
3	Sidomukti	10,80	33.408	36.611	44.938	3.093	3390	4161
4	Sidorejo	15,61	46.150	50.024	52.536	2.956	3205	3366
Kota Salatiga		**54,98**	**144.796**	**171.327**	**195.065**	2.634	3116	3548

Sumber: BPS Kota Salatiga (2000, 2010, 2020)

4. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Definisi dari penduduk dewasa adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan lebih atau kurang dari 15 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin. Sedangkan anak-anak adalah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan belum kawin. Komposisi penduduk Kota Salatiga masih didominasi oleh penduduk dengan usia produktif yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas yaitu sekitar 70,26% dari jumlah penduduk seluruhnya. Sedangkan untuk kategori anak-anak berkisar 21,26%. Berdasarkan kategori umur, jumlah penduduk paling banyak berada di kategori umur 35-39 tahun. Berikut menampilkan data penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin sampai dengan kondisi akhir tahun 2022.

Tabel 2. 17 *Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023*

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin *(sex)*		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	<1	967	910	1.877
2	'1 – 5	6.882	6.384	13.266
3	'6 – 10	7.476	6.914	14.390
4	'11 – 15	8.221	7.898	16.119
5	'16 – 20	7.796	7.358	15.154
6	'21 – 25	7.515	7.229	14.744
7	'26 – 30	7.528	7.459	14.987
8	'31 – 35	7.304	7.435	14.739
9	'36 – 40	7.585	7.795	15.380
10	'41 – 45	8.434	8.486	16.920
11	'46 – 50	6.968	7.036	14.004
12	'51 – 55	6.356	6.953	13.309
13	'56 – 60	5.254	5.930	11.184
14	' 60 +	11.586	13.710	25.296
Kota Salatiga 2023		**99.872**	**98.724**	**201.369**
Kota Salatiga 2022		96.341	98.724	**195.065**
Kota Salatiga 2021		95.601	97.924	**193.525**
Kota Salatiga 2020		95.025	97.297	**192.322**
Kota Salatiga 2019		94.887	99.197	**194.084**
Kota Salatiga 2018		93.718	97.853	**191.571**
Kota Salatiga 2017		92.426	96.502	**188.928**
Kota Salatiga 2010		84.807	86.520	**171.327**
Kota Salatiga 2000		70.086	74.710	**144.796**
Kota Salatiga 1990		61.039	62.872	**123.911**

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jumlah penduduk di Kota Salatiga mayoritas didominasi oleh penduduk perempuan di seluruh kecamatannya. Hal tersebut juga ditunjukan dengan besarnya *sex ratio* di Kota Salatiga yang menunjukan seluruh kecamatan memiliki nilai *sex ratio* kurang dari 100, artinya di Kota Salatiga jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan pada tahun 2023.

Tabel 2. 18 *Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Kecamatan Tahun 2023*

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	*Sex Ratio*
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Argomulyo	26.055	25.990	52.045	100,25
2.	Tingkir	23.776	24.330	48.106	97,72
3.	Sidomukti	22.830	23.295	46.125	98,00
4.	Sidorejo	27.211	27.882	55.093	97,59
Kota Salatiga		**99.872**	**101.497**	**201.369**	**98,40**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Transisi demografi adalah suatu perubahan struktur kependudukan yang terjadi karena perubahan fertilitas dan mortalitas pada suatu daerah. Hasil dari transisi demografi yang terjadi pada suatu daerah dapat diidentifikasi dengan melihat piramida penduduk. Piramida penduduk dapat menjelaskan dan menggambarkan struktur penduduk yang terbentuk dari hasil proses fertilitas dan mortalitas di suatu daerah. Berikut ini merupakan piramida penduduk Kota Salatiga Tahun 2017-2021.

Piramida Penduduk Kota Salatiga

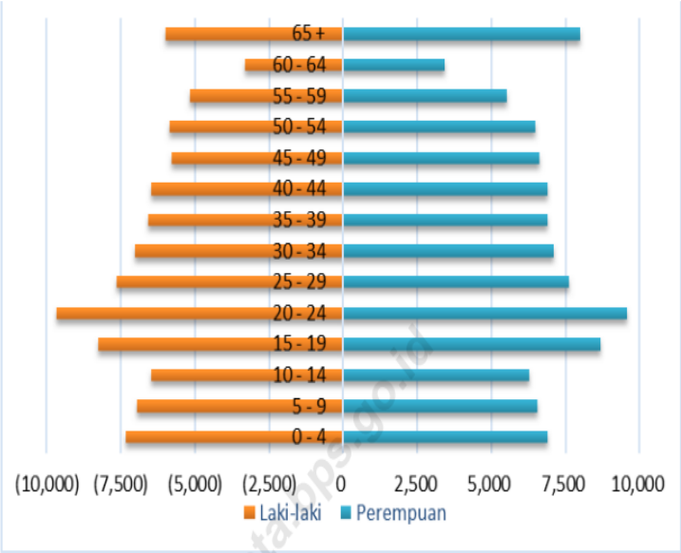

Gambar 2. 18 *Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2017*
Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

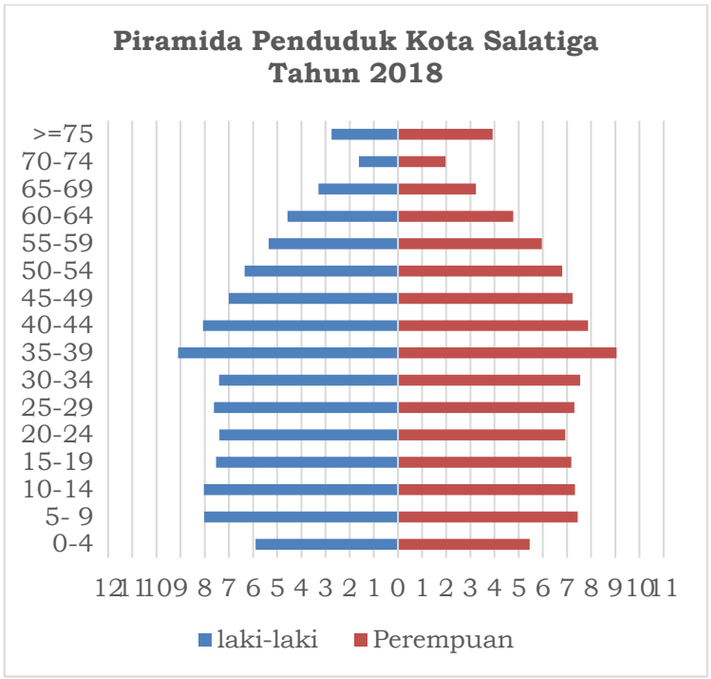

Gambar 2. 19 *Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2018*
Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2019

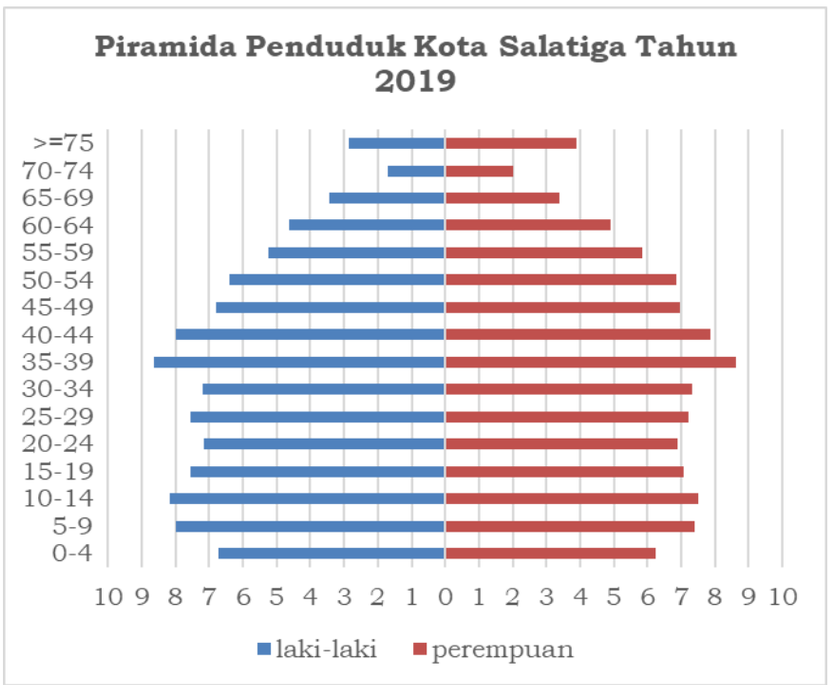

Gambar 2. 20 *Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2019*
Sumber: Kota Salatiga dalam Angka, 2020

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

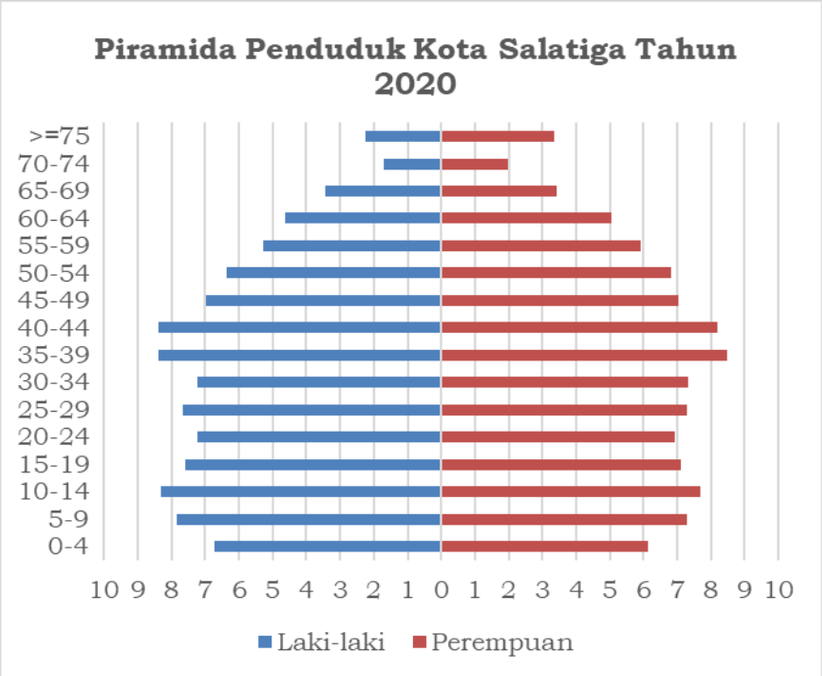

Gambar 2. 21 *Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020*
Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2021

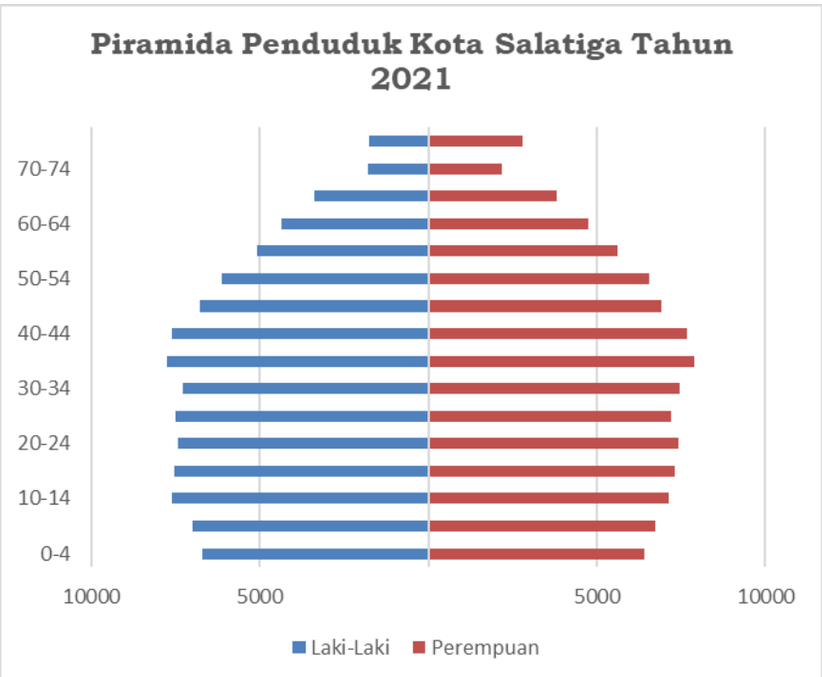

Gambar 2. 22 *Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2021*
Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

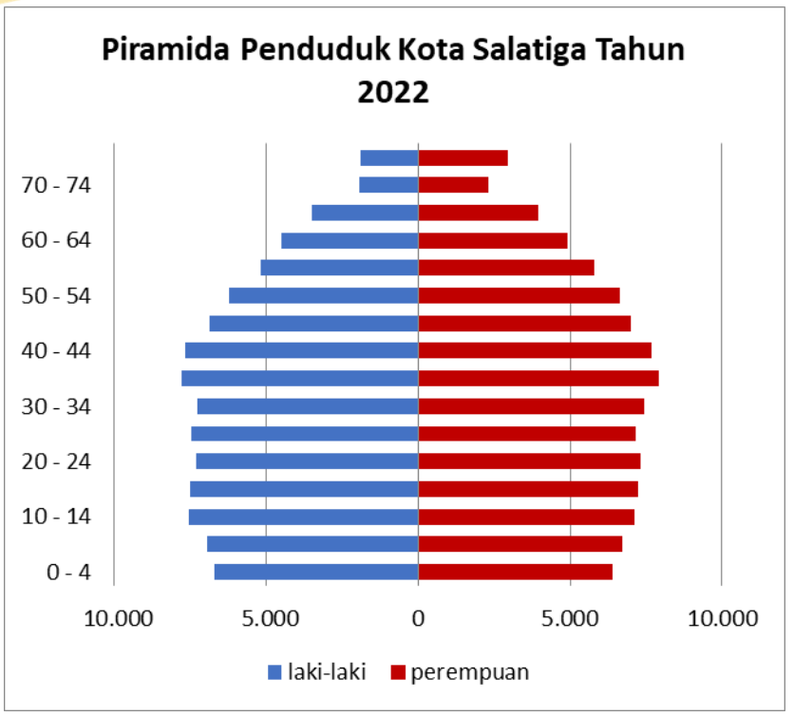

Gambar 2. 23 *Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2022*
Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka 2023

Gambar 2. 24 *Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2023*
Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka 2024

Berdasarkan gambar piramida penduduk, dapat diketahui bahwa proporsi usia penduduk Kota Salatiga tahun 2017-2023 mengalami suatu perubahan yang menunjukkan proporsi penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) semakin meningkat dan disisi lain proporsi penduduk usia belum produktif (0 – 14 tahun) mengalami penurunan dan penduduk usia di atas 65 tahun semakin bertambah sejalan dengan usia harapan hidup Kota Salatiga yang semakin meningkat. Bentuk piramida penduduk Kota salatiga adalah stasioner menuju ke piramida tua. Ciri lainnya adalah rendahnya angka kelahiran dan kematian. Bukti rendahnya angka kelahiran dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dilihat dari pendeknya sayap piramida penduduk usia <1 tahun. Berdasarkan data dari DP3APPKB, disebutkan bahwa Angka Kelahiran/ *Total Fertility Rate (TFR)* Kota Salatiga tahun mulai dari tahun 2019 sampai 2023 berada dibawah 2,0. Artinya bahwa TFR Kota Salatiga berada dibawah TFR nasional (2,18 persen). Hal ini dapat disebabkan oleh suksesnya program KB yang dilaksanakan oleh pemerintah. Permasalahan terkait dengan struktur penduduk di Kota Salatiga adalah bagaimana menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk berdasarkan 2 indikator yaitu fertilitas dan mortalitas.

Tingkat kematian/mortalitas di Kota Salatiga juga tergolong rendah. Berdasarkan data DP3APPKB Tahun 2019-2020, Angka Kematian di Kota Salatiga tahun sebesar 1.678. Penurunan angka kematian ini terlihat dari meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH). UHH Kota Salatiga tahun 2023 sebesar 77,93 lebih besar dari tahun 2022 sebesar 77,72. Selain itu, dilihat dari piramida penduduk juga jelas terlihat bahwa sayap piramida pada usia 75+ tergolong panjang. Panjangnya sayap ini menunjukkan jumlah penduduk lansia di Kota Salatiga semakin meningkat darti tahun ke tahun. Hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan kondisi ini adalah masalah jaminan kesehatan dan kepedulian terhadap pelayanan kesehatan lansia.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dapat diketahui dengan menganalisis nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada nilai PDRB ADHK. Selama tahun 2010-2023 terjadi perubahan nilai laju pertumbuhan PDRB ADHK yang fluktuatif. Dalam kurun waktu 13 tahun nilai laju pertumbuhan PDRB ADHK Kota Salatiga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,98%. Dengan laju pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar -1,68%, yang artinya terjadi penurunan nilai PDRB ADHK pada tahun tersebut. Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan perekonomian dunia dan nasional mengalami guncangan. Meski demikian nilai laju pertumbuhan PDRB ADHK Kota Salatiga pada tahun tersebut masih lebih tinggi daripada nlai laju pertumbuhan PDRB untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yakni -2,65% untuk Provinsi Jawa Tengah dan -2,07% untuk Nasional. Pada tahun 2021 nilai laju pertumbuhan mulai mengalami peningkatan karena kondisi pandemi COVID-19 yang mulai membaik. Banyak program pemerintah terkait penanganan COVID-19 telah dijalankan, masyarakat sudah mulai beradaptasi, sehingga perlahan-lahan laju pertumbuhan PDRB di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, serta Nasional mulai membaik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

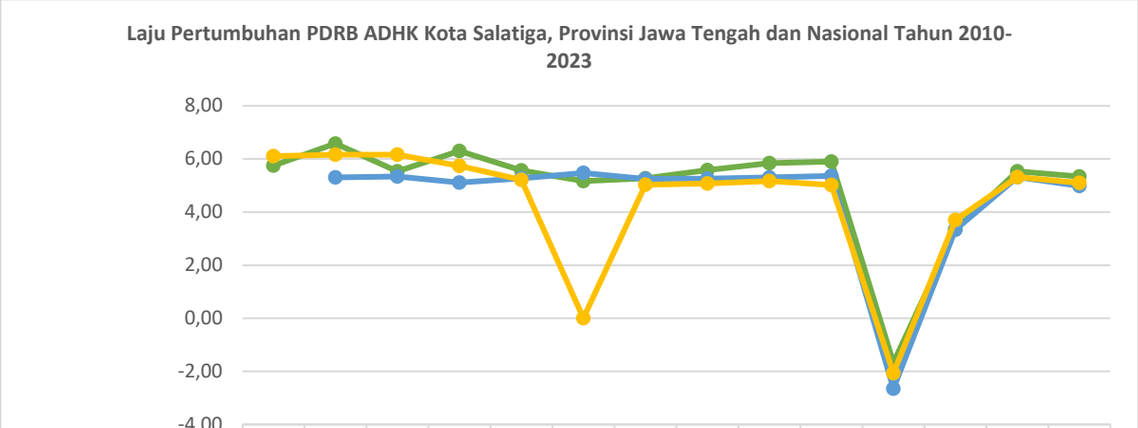

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	5,75	6,58	5,53	6,3	5,57	5,17	5,27	5,58	5,84	5,9	-1,68	3,35	5,53	5,34
Provinsi Jateng		5,3	5,34	5,11	5,27	5,47	5,25	5,26	5,3	5,36	-2,65	3,33	5,31	4,98
Nasional	6,1	6,16	6,16	5,74	5,21	0	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,7	5,31	5,1

Grafik 2. 4 *Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023*

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2024

Keterangan:
*: Data tidak tersedia

2. Indeks Gini

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Rasio Gini atau Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin tinggi, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah, atau mendekati pemerataan sempurna. Tingkat ketimpangan pada Indeks Gini dikategorikan menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang (0,3 < Indeks Gini < 0,4) dan tinggi (Indeks Gini > 0,4).

Indeks Gini Kota Salatiga pada tahun 2010-2015 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Selama tahun 2010-2023 tercatat Indeks Gini tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,47 dan Indeks Gini terendah pada tahun 2011 sebesar 0,34. Pada tahun 2011-2015 Indeks Gini Kota Salatiga mengalami tren kenaikan dari 0,34 yang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang pada tahun 2011 menjadi 0,47 yang masuk ke dalam kategori ketimpangan tinggi pada tahun 2015. Namun pad tahun 2016, nilai Indeks Gini Kota Salatiga mampu turun dengan signifikan menjadi 0,37. Nilainya terus bertahan pada kisaran 0,36-0,38 sampai beberapa tahun berikutnya. Pada periode tahun 2020-2022, nilai Indeks Gini Kota Salatiga kembali mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 0,45 pada tahun 2022. Fenomena ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada periode tahun tersebut. Namun pada tahun 2023 indeks gini kota salatiga kembali turun menjadi 0,417.

Secara garis besar Indeks Gini Kota Salatiga berada di bawah Indeks Gini Nasional. Hanya pada periode tahun 2014-2015 dan periode tahun 2020-2023 nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indeks Gini Kota Salatiga melebihi nilai Indeks Gini Nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah kondisinya cukup fluktuatif. Pada periode tahun 2011-2013 nilai Indeks Gini Kota Salatiga lebih rendah daripada nilai Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah. Namun pada periode tahun 2020-2023 nilai Indeks Gini Kota Salatiga lebih tinggi daripada nilai Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah.

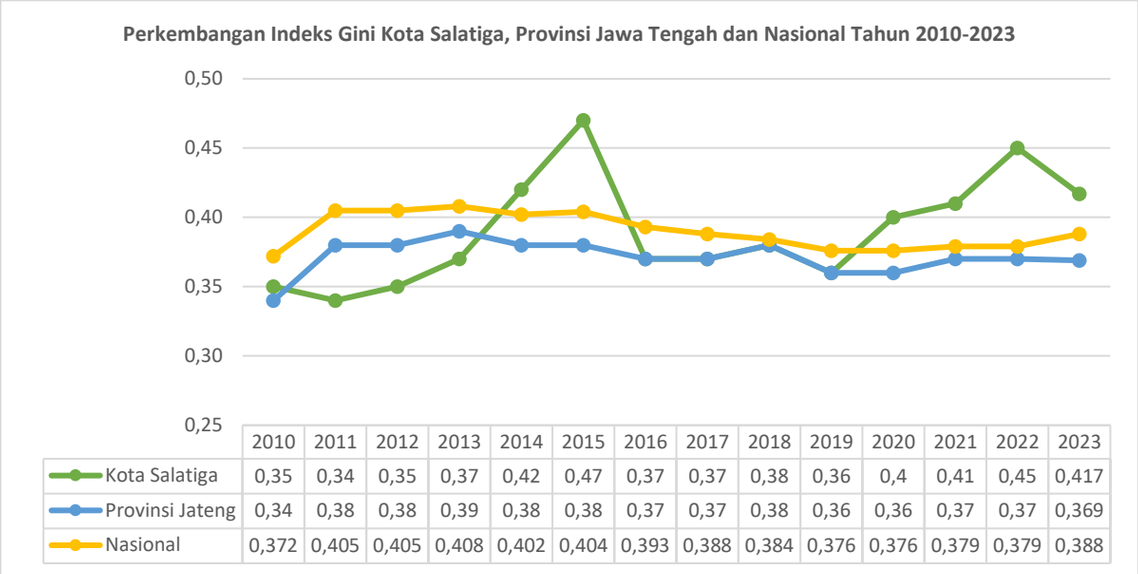

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	0,35	0,34	0,35	0,37	0,42	0,47	0,37	0,37	0,38	0,36	0,4	0,41	0,45	0,417
Provinsi Jateng	0,34	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,38	0,36	0,36	0,37	0,37	0,369
Nasional	0,372	0,405	0,405	0,408	0,402	0,404	0,393	0,388	0,384	0,376	0,376	0,379	0,379	0,388

Grafik 2. 5 *Perkembangan Indeks Gini Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023*

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2010-2023

3. Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan unutk menganalisis kesejahteraan ekonomi. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi keutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kondisi kemiskinan dapat dianalisis menggunakan beberapa indikator, salah satu indikator yang sering digunakan untuk menganalisis kemiskinan adalah persnetase penduduk miskin (P0) yang dianggap mampu merepresentasikan angka kemiskinan.

Persentase Penduduk Miskin (P0) di Kota Salatiga tahun 2005-2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun cenderung menurun.

Pada tahun 2005, persentase penduduk miskin (P0) Kota Salatiga sebesar 8,81%. Tahun 2006-2007 nilainya naik sebesar 0,2% menjadi 9,01%. Kemudian pada periode tahun 2008-2009 terjadi penurunan nilai sebesar 1,19% menjadi 7,82%. Pada tahun 2010 nilainya kembali naik menjadi 8,28%. Namun pada tahun 2011 hingga tahun 2019 persentase penduduk miskin (P0) di Kota Salatiga secara perlahan mengalami penurunan hingga mencapai 4,76%. Pada tahun 2020-2021 nilainya naik sebesar 0,38% menjadi 5,14% dan pada tahun 2023 nilainya mampu turun menjadi 4,66%.

Kenaikan persentase penduduk miskin (P0) yang terjadi pada tahun 2020-2021 disebabkan karena adanya pandemi COVID-19, yang menyebabkan terganggunya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pendapatannya menjadi berkurang. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kota Salatiga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, fenomena ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian mulai membaik karena masyarakat sudah mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi dan program pemerintah berjalan dengan baik.

Kondisi fluktuatif nilai persentase penduduk miskin (P0) di Kota Salatiga sejalan dengan kenaikan dan penurunan nilai persentase penduduk miskin (P0) di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dimana Provinsi Jawa Tengah dan Nasional juga mengalami penurunan nilai persentase penduduk miskin (P0) hingga tahun 2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020. Secara keseluruhan, capaian persentase penduduk miskin (P0) di Kota Salatiga lebih rendah daripada Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Capaian persentase penduduk miskin (P0) pada tahun 2022 adalah sebesar 4,73% untuk Kota Salatiga, 10,93% untuk Provinsi Jawa Tengah, dan 9,57% untuk Nasional. Pada tahun 2023 penduduk miskin sebesar 4,66 % untuk Kota Salatiga, 10,77% dan 9,36% untuk Nasional.

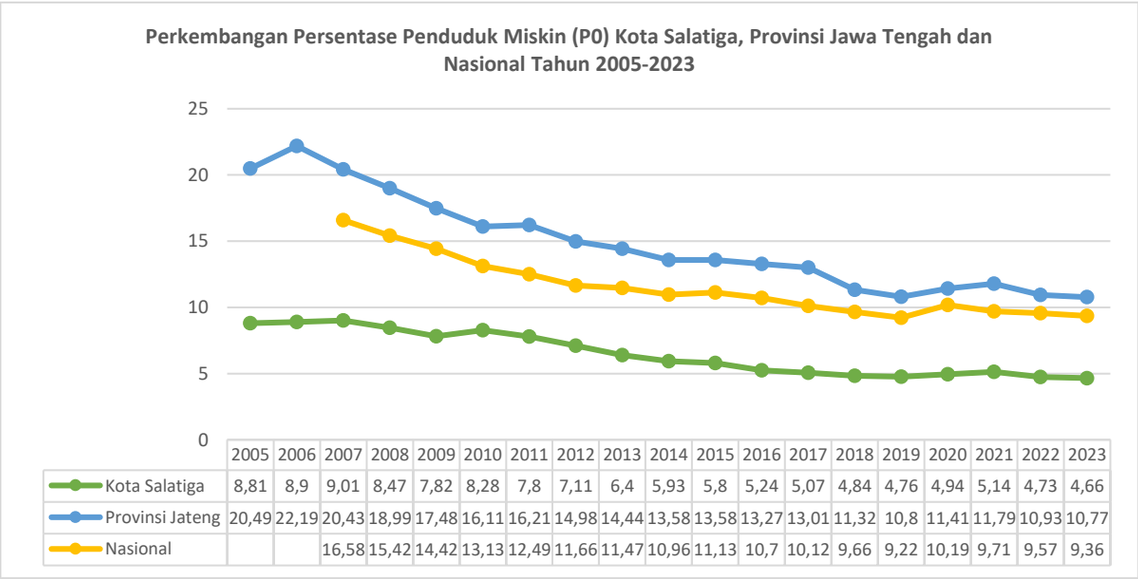

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	8,81	8,9	9,01	8,47	7,82	8,28	7,8	7,11	6,4	5,93	5,8	5,24	5,07	4,84	4,76	4,94	5,14	4,73	4,66
Provinsi Jateng	20,49	22,19	20,43	18,99	17,48	16,11	16,21	14,98	14,44	13,58	13,58	13,27	13,01	11,32	10,8	11,41	11,79	10,93	10,77
Nasional			16,58	15,42	14,42	13,13	12,49	11,66	11,47	10,96	11,13	10,7	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36

Grafik 2. 6 *Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2005-2023*

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005-2023

Keterangan:

* : Data tidak tersedia

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja – 15 tahun ke atas). Nilai TPT menunjukkan besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja yang belum termanfaatkan. Sedangkan pengertian pengangguran menurut BPS meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga pada tahun 2007-2022 mengalami tren yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2007 nilai TPT Kota Salatiga sebesar 11,35%, nilainya terus turun mencapai 4,46% pada tahun 2014. Pada tahun 2015, nilai TPT Kota Salatiga kembali mengalami peningkatan menjadi 6,43%. Nilai TPT pada periode tahun 2017-2019 perlahan mengalami kenaikan dari 3,96% menjadi 4,33%. Pada periode tahun 2020-2022, saat masa pendemi COVID-19 TPT Kota Salatiga naik signifikan pada tahun 2020 menjadi 7,44%, namun kemudian nilai TPT kembali mengalami penurunan menjadi 5,58 pada tahun 2022 dan 4,57 pada tahun 2023. Hal ini menujukan bahwa kebijakan yang dikeluarakan pemerintah untuk menangani mengatasi masalah ketenagakerjaan selama pandemi COVID-19 mampu menekan angka pengangguran. Secara garis besar nilai TPT Kota Salatiga mampu turun menyamai nilai TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

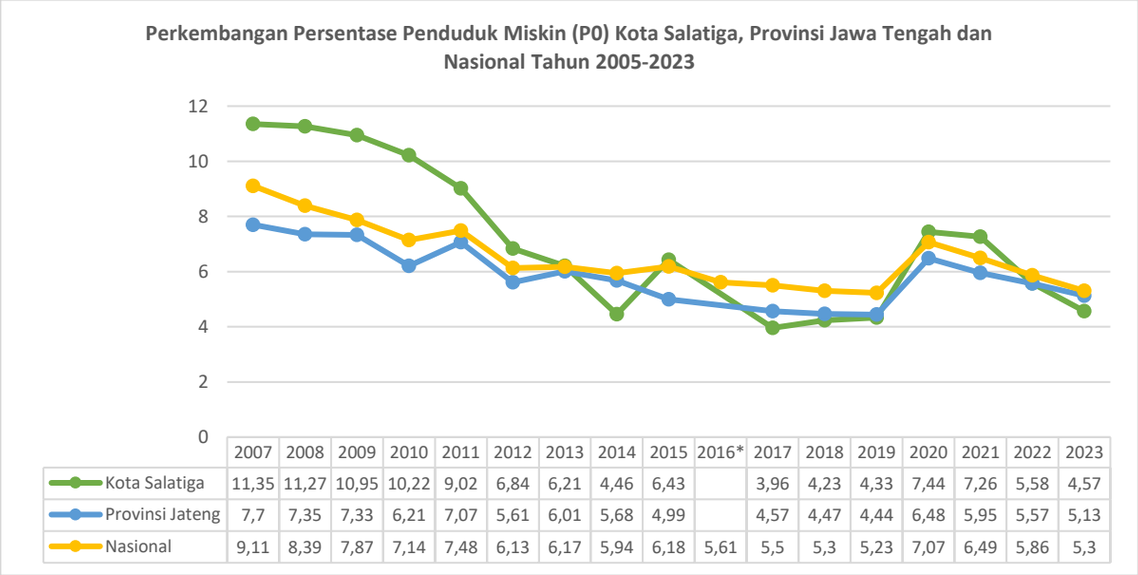

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	11,35	11,27	10,95	10,22	9,02	6,84	6,21	4,46	6,43		3,96	4,23	4,33	7,44	7,26	5,58	4,57
Provinsi Jateng	7,7	7,35	7,33	6,21	7,07	5,61	6,01	5,68	4,99		4,57	4,47	4,44	6,48	5,95	5,57	5,13
Nasional	9,11	8,39	7,87	7,14	7,48	6,13	6,17	5,94	6,18	5,61	5,5	5,3	5,23	7,07	6,49	5,86	5,3

Grafik 2. 7 *Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2007-2023*
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2007-2023

Keterangan:
* : Data tidak tersedia

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimana dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi standar hidup layak diwakili dengan indikator pengeluaran per kapita. BPS mengelompokkan capain IPM menjadi empat kategori yaitu Rendah (IPM < 60), Sedang (60 ≤ IPM ≤ 70), Tinggi (70 ≤ IPM ≤ 80), dan Sangat Tinggi (IPM ≥ 80).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sejak tahun 2010, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Salatiga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2010 nilai IPM Kota Salatiga sebesar 78,35 terus meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 84,99. Dalam kurun waktu 13 tahun terjadi kenaikan IPM sebesar 6,00 poin. Perkembangan ini menunjukan semakin membaiknya pembangunan secara umum di Kota Salatiga. Dengan capaian ini status pembangunan manusia di Kota Salatiga sudah berada pada level sangat tinggi (IPM ≥ 80).

Perkembangan IPM di Kota Salatiga sejalan dengan perkembangan IPM di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Adapun nilai IPM Provinsi Jawa Tengah masuk dalam kategori sedang (60 ≤ IPM ≤ 70) pada tahun 2010 hingga tahun 2016, dan statusnya naik menjadi tinggi (70 ≤ IPM ≤ 80) pada tahun 2017 hingga sekarang. Demikian pula dengan nilai IPM Nasional yang masuk ke dalam kategori sedang (60 ≤ IPM ≤ 70) pada tahunan 2010 hingga tahun 2015, yang kemudian pada tahun berikutnya statusnya naik menjadi tinggi (70 ≤ IPM ≤ 80). Secara keseluruhan nilai IPM Kota Salatiga berada di atas nilai IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tahun 2023, IPM Kota Salatiga sebesar 84,99.

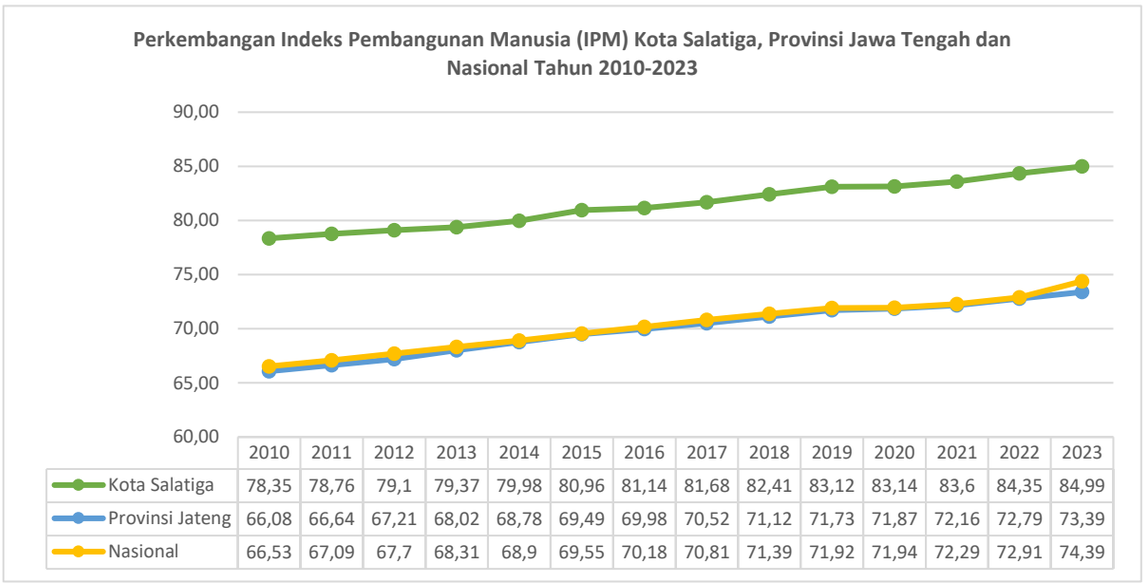

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	78,35	78,76	79,1	79,37	79,98	80,96	81,14	81,68	82,41	83,12	83,14	83,6	84,35	84,99
Provinsi Jateng	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79	73,39
Nasional	66,53	67,09	67,7	68,31	68,9	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39

Grafik 2. 8 *Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional 2010-2023*
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2023

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Indeks Keluarga Sehat

Keluarga yang sehat merupakan pondasi bagi masa depan bangsa. Keluarga yang sehat adalah keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keluarga yakni Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan suatu perhitungan untuk mengetahui apakah keluarga tersebut termasuk keluarga sehat, prasehat, atau tidak sehat dengan ketentuan nilai IKS Sehat > 0,80, IKS Prasehat 0,50 – 0,80, dan IKS Tidak Sehat < 0,5.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ada 12 indikator yang menyusun IKS yaitu keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapatkam imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI ekslusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Salatiga pada tahun 2020 adalah 0,310 yang artinya sebanyak 31% keluarga yang telah terdata tergolong sehat. Nilai IKS Kota Salatiga selama periode tahun 2020-2022 menunjukkan perkembangan yang positif, diman pada tahun 2022 nilainya meningkat menjadi 0,390 yang artinya seanyak 39% keluarga yang telah terdata tergolong sehat. Meski demikian, Kota Salatiga masih masuk dalam Kota Tidak Sehat karena masih rendahnya nilai IKS. Apabila dibandingkan dengan nilai IKS Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, nilai IKS Kota Salatiga berada jauh di atas nilai IKS Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Dimana pada tahun 2020 nilai IKS Nasional hanya sebesar 0,220 dan nilai IKS Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,250.

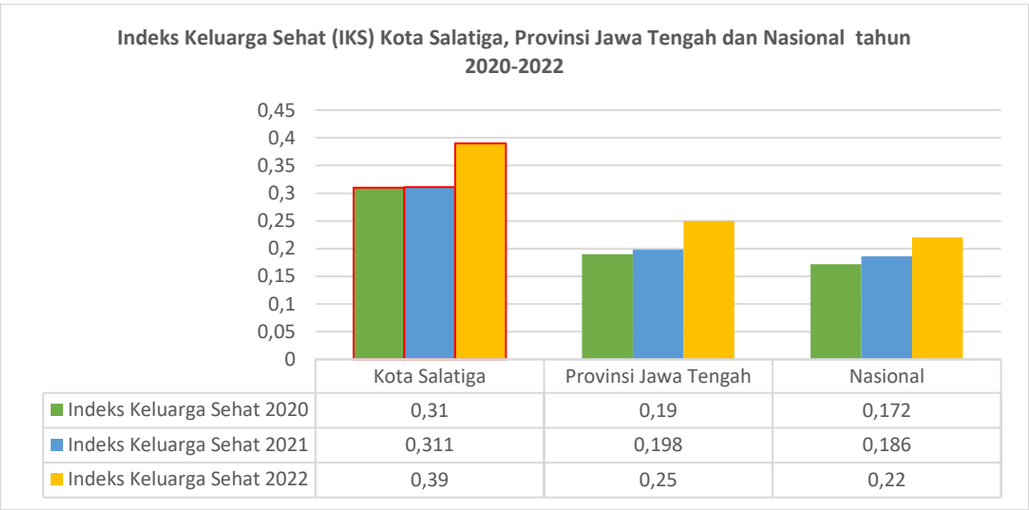

	Kota Salatiga	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
Indeks Keluarga Sehat 2020	0,31	0,19	0,172
Indeks Keluarga Sehat 2021	0,311	0,198	0,186
Indeks Keluarga Sehat 2022	0,39	0,25	0,22

Grafik 2. 9 *Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2022*

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2020-2022

2. Indeks Kualitas Keluarga

Menurun Permen PPPA Nomr 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran pencapaian Kualitas Keluarga. IKK menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkay pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dengan kategori indeks

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak Anak), IKK 50 – 75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak). IKK dibentuk dari 5 pilar atau dimensi yaitu Kualitas Legalisasi dan Struktur, Kualitas Ketahanan Fisik, Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya. Data IKK untuk Kota Salatiga tidak tersedia, sehingga data yang dianalisis adalah IKK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 nilai IKK Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,84 yang kemudian mengalami pertumbuhan sebesar menjadi 76,37 dan pada tahun 2022 menjadi 79,71. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam kategori wilayah yang responsif terhadap gender dan hak anak. Peningkatan nilai IKK juga terjadi pada skala nasional, dimana nilai IKK Nasional mengalami pertumbuhan dari 70,93 pada tahun 2020 menjadi 73,84 pada tahun 2021 dan naik lagi pada tahun 2022 menjadi 77,38. Berdasarkan nilai IKK tersebut, Indonesia termasuk kedalam kategori wilayah yang responsif terhadap gender dan hak anak.

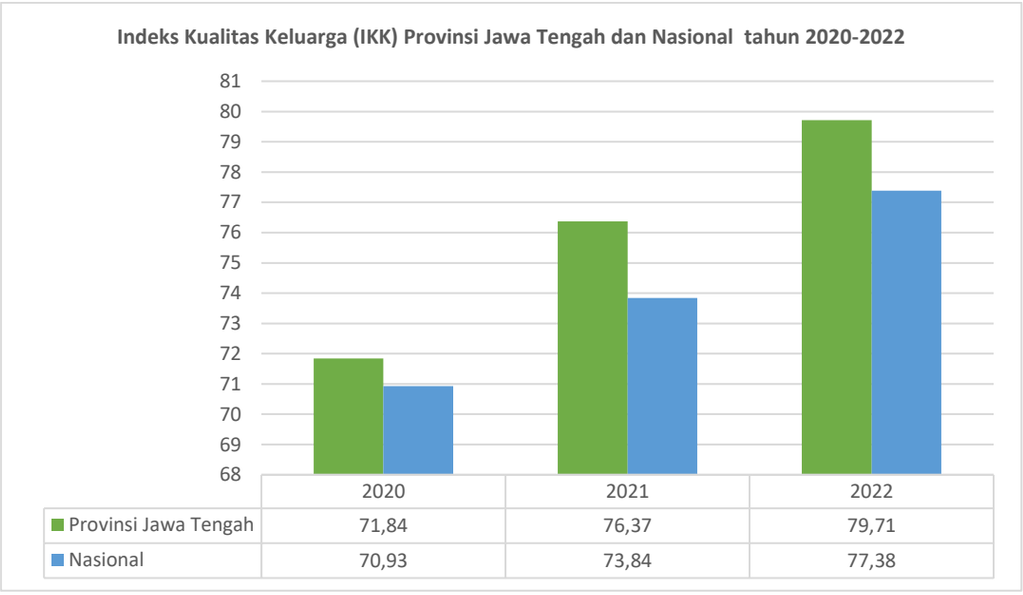

	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Tengah	71,84	76,37	79,71
Nasional	70,93	73,84	77,38

Grafik 2. 10 *Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2022*
Sumber: Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

3. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA dibentuk dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjado dasar membentukan IPA adalah Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahuteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Khusus. Data IPA untuk Kota Salatiga tidak tersedia, sehingga yang dianalisis adalah IPA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Nilai IPA Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Pada periode tahun 2018-2020 nilai IPA Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan positif namun pada tahun 2021 terjadi penurunan IPA. Nilai IPA tertinggi Provinsi Jawa Tengah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 70,72 yang kemudian turun menjadi 63,20 pada tahun 2021. Kondisi serupa juga terjadi pada nilai IPA Nasional. Nilai IPA Nasional mengalami tren kenaikan pada periode tahun 2018-2020 yakni sebesar 66,89 di tahun 2020 namun turun menjadi 61,38 di tahun 2021. Penurunan nilai IPA Provinsi dan Nasional ini salah satunya dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021. Namun pada tahun 2022 nilai IPA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami sedikit peningkatan. Nilai IPA Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah 64,99 sedangkan Nilai IPA Nasional sebesar 63,30.

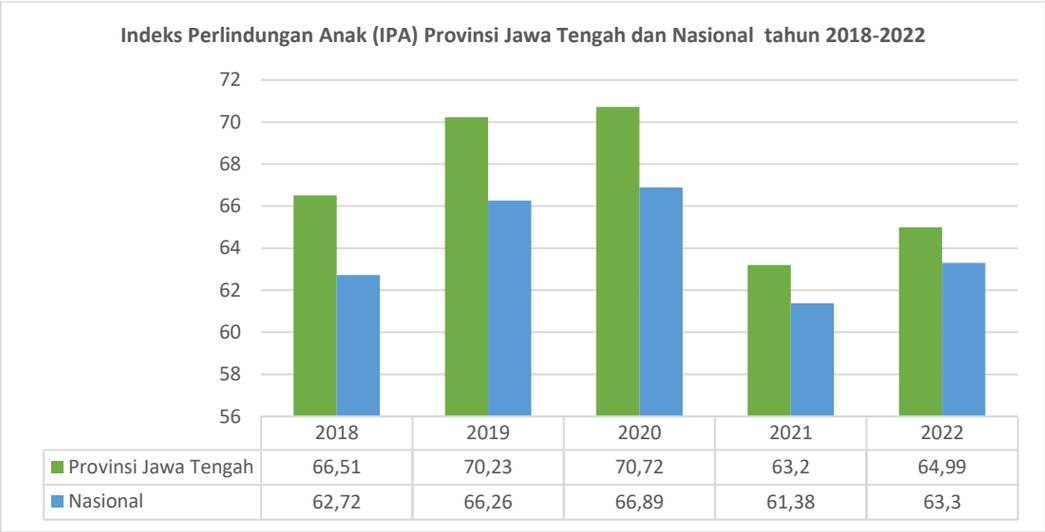

	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Tengah	66,51	70,23	70,72	63,2	64,99
Nasional	62,72	66,26	66,89	61,38	63,3

Grafik 2. 11 *Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022*
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020-2022

4. Indeks Gender

Upaya pembangunan manusia diperuntukkan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, tanpa harus memandang adanya perbedaan jenis kelamin. Capaian pembangunan manusia berbasis gender dilihat diantaranya dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembedayaan Gender (IDG). Selain itu digunakan pula Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai indikator pendukung dalam pembangunan manusia berbasis gender.

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antara gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Nilai IPG yaitu perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Adapaun hasil indeks ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

perempuan dan laki-laki. Angka 100 menjadi patokan unutk menginterpretasikan angka IPG, karena angka 100 merupakan nilai rasio paling sempurna. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), IPG dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu kategori rendah (IPG < 90,00) dan tinggi (IPG > 90,00).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2010, nilai IPG Kota Salatiga sebesar 94,31 dan masuk dalam ketegori tinggi. Nilai IPG Kota Salatiga setiap tahunnya terus peningkatan, hingga pada tahun 2023 nilai IPG Kota Salatiga sebesar 95,45 dan masuk dalam kategori tinggi. Selama periode 2010-2023, nilai IPG Kota Salatiga lebih dari 90,00 dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Kota Salatiga semakin setara. Secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan IPG Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Salatiga berada jauh di atas IPG Nasional dan Provinsi.

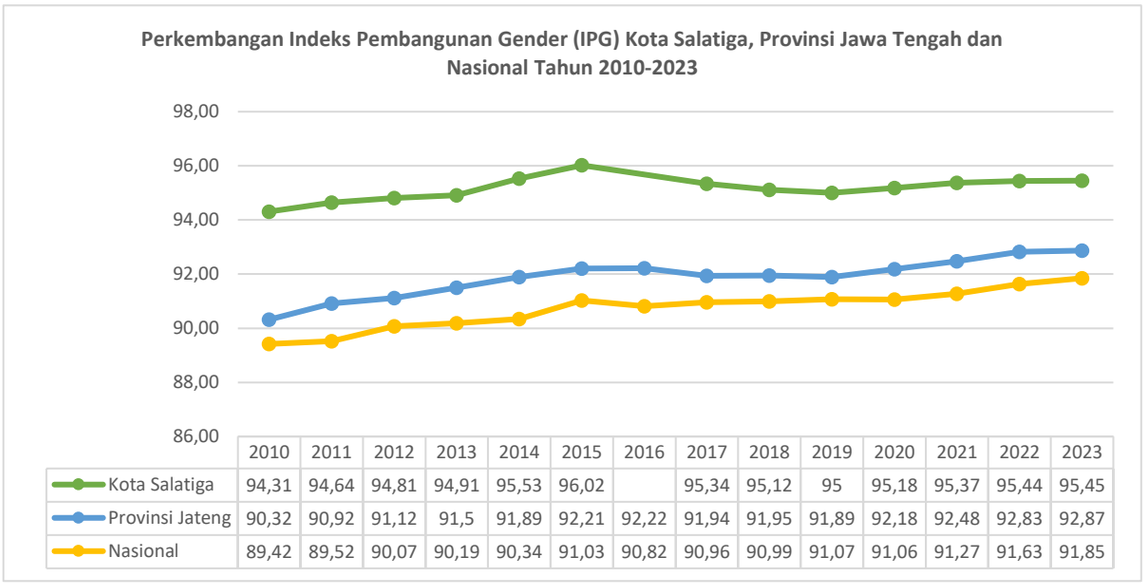

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	94,31	94,64	94,81	94,91	95,53	96,02		95,34	95,12	95	95,18	95,37	95,44	95,45
Provinsi Jateng	90,32	90,92	91,12	91,5	91,89	92,21	92,22	91,94	91,95	91,89	92,18	92,48	92,83	92,87
Nasional	89,42	89,52	90,07	90,19	90,34	91,03	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85

Grafik 2. 12 *Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023*

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2023

Keterangan:
* : Data tidak tersedia

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG dihitung melalui rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Salatiga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2017, nilai IDG Kota Salatiga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sebesar 80,83. Pada tahun 2018 nilainya sempat naik menjadi 82,16. Namun nilainya perlahan turun pada tahun-tahun selanjutnya, hingga pada tahun 2023 nilai IDG Kota Salatiga sebesar 79,48. Penurunan nilai ini juga terjadi pada penurunan nilai beberapa

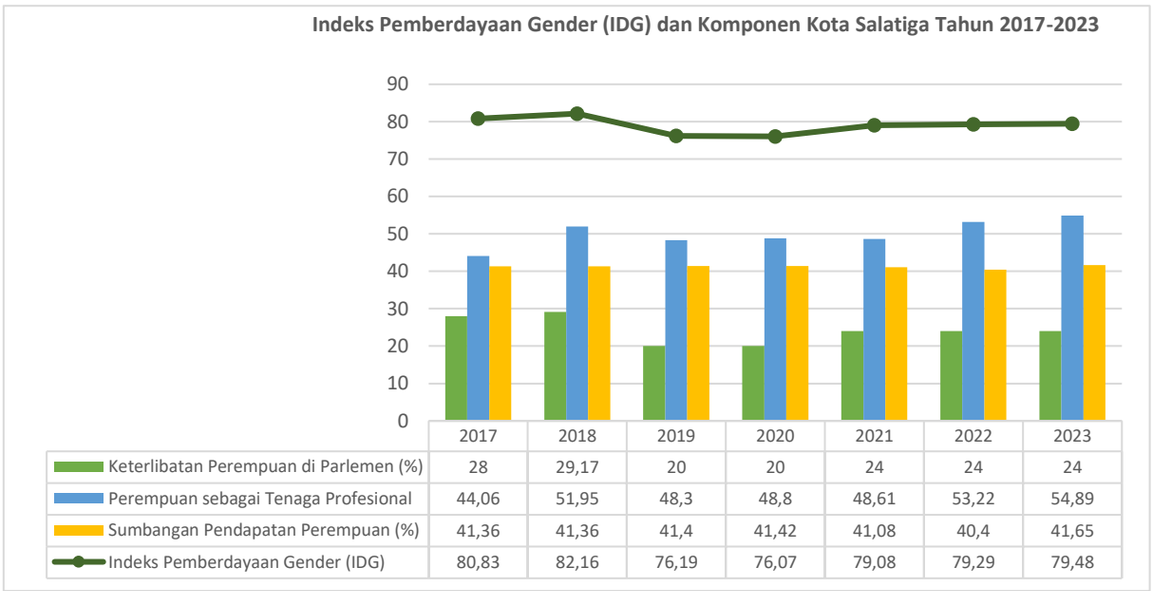

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	28	29,17	20	20	24	24	24
Perempuan sebagai Tenaga Profesional	44,06	51,95	48,3	48,8	48,61	53,22	54,89
Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	41,36	41,36	41,4	41,42	41,08	40,4	41,65
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80,83	82,16	76,19	76,07	79,08	79,29	79,48

indikator pembentuk IDG. Keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2017 sebesar 28,00% turun menjadi 24,00% pada tahun 2023. Komponen sumbangan pendapatan perempuan juga mengalami sedikit keniakan dari 41,36% pada tahun 2017 menjadi 41,65% pada tahun 2023. Sekangkan indikator partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional mengalami peningkatan, nilainya meningkat dari 44,07% pada tahun 2017 menjadi 54,89% pada tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan nilai IDG Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, secara keseluruhan nilai IDG Kota Salatiga berada diatas IDG Nasional dan Provinsi.

Grafik 2. 13 *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Kota Salatiga tahun 2017-2023*
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2017-2023

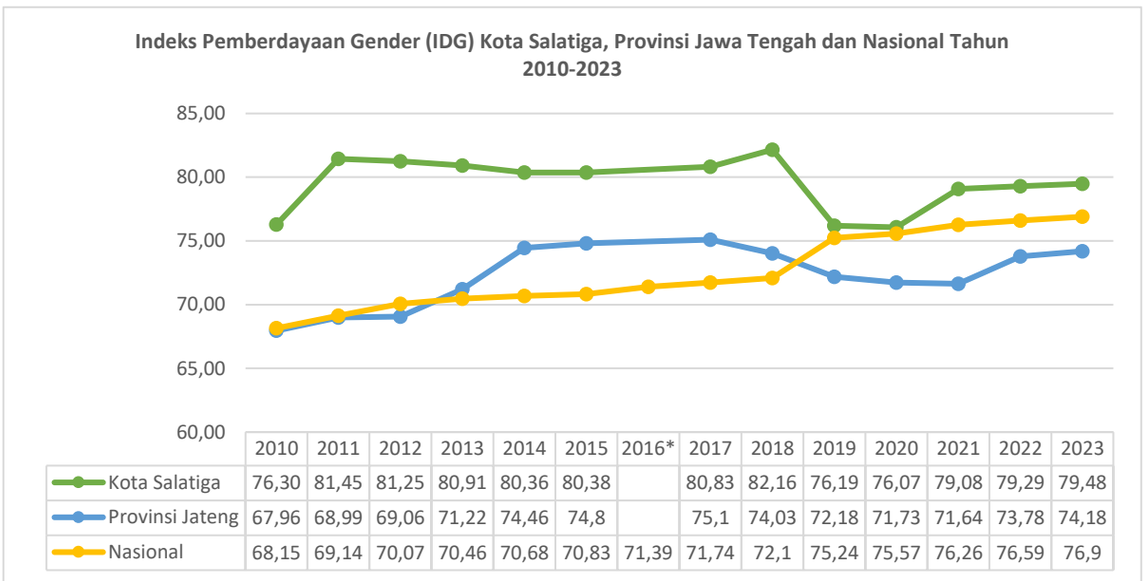

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	76,30	81,45	81,25	80,91	80,36	80,38		80,83	82,16	76,19	76,07	79,08	79,29	79,48
Provinsi Jateng	67,96	68,99	69,06	71,22	74,46	74,8		75,1	74,03	72,18	71,73	71,64	73,78	74,18
Nasional	68,15	69,14	70,07	70,46	70,68	70,83	71,39	71,74	72,1	75,24	75,57	76,26	76,59	76,9

Grafik 2. 14 *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023*
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2023

Keterangan:
* : Data tidak tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Salatiga pada tahun 2018-2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Nilai IKG Kota Salatiga berkisar antara 0,123 hingga 0,143. Pada periode tahun 2019-2020 nilainya naik menjadi 0,166, namun nilainya kembali mengalami penurunan pada periode tahun 2021-2022, dimana pada tahun 2022 nilai IKG Kota Salatiga sebesar 0,133. Penurunan nilai IKG di Kota Salatiga menunjukkan bahwa ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan semakin membaik. Akan tetapi pada tahun 2023, angka IKG kembali naik menjadi 0,143, yang tentu saja menjadi perhatian untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Walaupun demikian, apabila dibandingkan dengan nilai IKG Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, nilai IKG Kota Salatiga berada di bawah nilai IKG Nasional dan Provinsi.

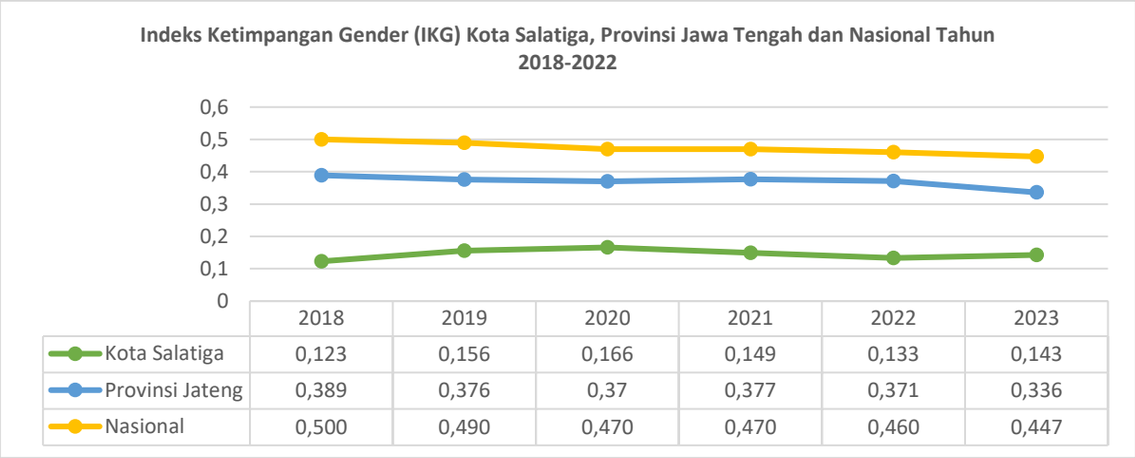

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	0,123	0,156	0,166	0,149	0,133	0,143
Provinsi Jateng	0,389	0,376	0,37	0,377	0,371	0,336
Nasional	0,500	0,490	0,470	0,470	0,460	0,447

Grafik 2. 15 *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2023*
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2023

5. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP digunakan sebagai tolok ukur pembangunan berdasarkan tiga lapisan, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan yang dipetakan dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Data IPP untuk Kota Salatiga tidak tersedia, sehingga yang dianalisis adalah IPP Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Kondisi IPP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2023, mengalami perkembangan yang fluktuatif namun memiliki tren yang cenderung meningkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

meskipun peningkatannya tidak signifikan. Pada tahun 2015 nilai IPP Provinsi Jawa Tengah sebesar 48,33 dimana kemudian nilainya terus naik hingga mencapai 54,40 pada tahun 2019. Namun pada periode tahun 2020-2021 nilainya turun menjadi 50,67 di tahun 2021 dan pada tahun selanjutnya nilainya mampu naik menjadi 53,33 di tahun 2022. Kondisi yag serupa juga terjadi pada nilai IPP Nasional, dimana nilai IPP Nasional mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan dan nilainya sempat turun pada tahun 2020. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan nilai IPP baik di tingkat Nasional maupun Provinsi adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020.

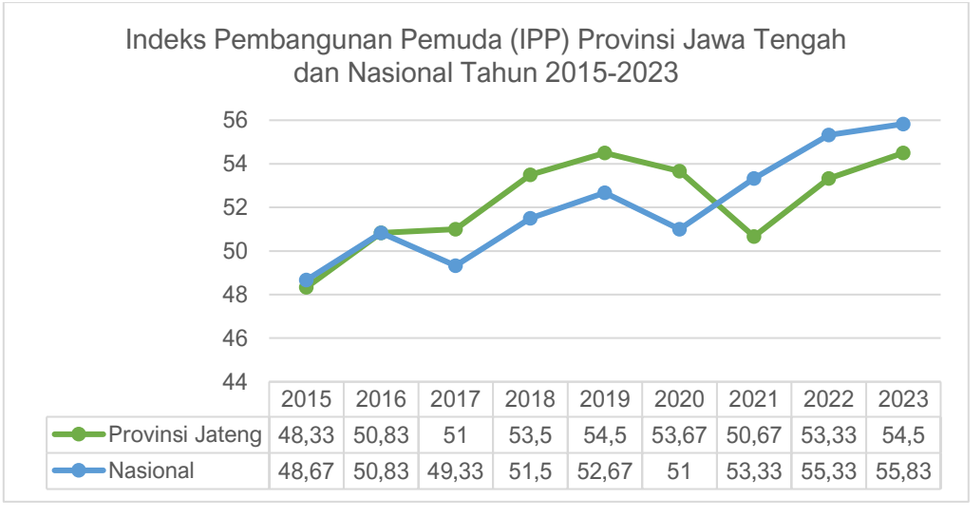

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Jateng	48,33	50,83	51	53,5	54,5	53,67	50,67	53,33	54,5
Nasional	48,67	50,83	49,33	51,5	52,67	51	53,33	55,33	55,83

Grafik 2. 16 *Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2023*
Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2015-2023

6. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koorfinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Ketujuh dimensi tersebut mencakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Kriteria capain IPK adalah IPK ≤ 20 (Kurang), 20 < IPK ≤ 40 (Sedang), 40 < IPK ≤ 60 (Cukup), 60 < IPK ≤ 80 (Baik), 80 < IPK ≤ 100 (Amat Baik). Data IPK untuk Kota Salatiga tidak tersedia, sehingga yang dianalisis adalah IPK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Nilai IPK Provinsi pada periode tahun 2018-2022 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai IPK Provinsi Jawa tengah sebesar 60,05 dan masuk dalam kriteria cukup, pada tahun selanjutnya nilainya naik sebesar 0,89 poin menjadi 60,94. Namun karena pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 nilai IPK Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 55,24 pada tahun 2021. Kondisi serupa juga terjadi pada nila IKK Nasional, dimana pada tahun 2018 nilai IKK Nasional sebesar 53,74 yang kemudian turun menjadi 51,9 pada tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2021. Pada tahun 2022, nilai IPK Nasional dan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan pertumbuhan yang positif menjadi 59,43 untuk IPK Provinsi dan 55,13 untuk IPK Nasional.

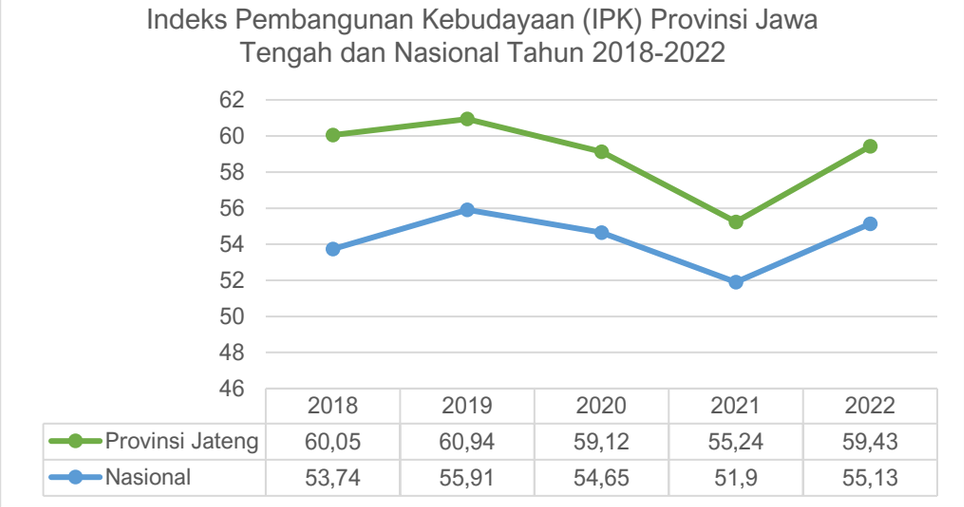

	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Jateng	60,05	60,94	59,12	55,24	59,43
Nasional	53,74	55,91	54,65	51,9	55,13

Grafik 2. 17 *Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022*

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2018-2022

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada satu periode waktu tertentu. Nilai PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai output dari seluruh sektor produksi. Perhitungan PDRB dilakukan dengan menggunakan dasar atas harga berlaku dan atas harga konstan.

PDRB ADHB Kota Salatiga pada tahun 2010 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Nilainya meningkat sebesar 186,94% dalam kurun waktu 13 tahun, dimana pada tahun 2010 PDRB ADHB Kota Salatiga sebesar Rp5.845,48 miliar naik menjadi Rp16.773,09 pada tahun 2023. Pada tahun 2020 hingga 2023 terjadi peningkatan nilai PDRB ADHB yang cukup signifikan. Hanya dalam waktu 2 tahun nilai PDRB ADHB Kota Salatiga bertambah lebih dari Rp2.000 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp13.271,84 miliar.

Tabel 2. 19 *Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga tahun 2010, 2015, 2020 dan 2023*

Lapangan Usaha/*Industry*		Nilai PDRB ADHB (Miliar Rupiah)			
		2010	2015	2020	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan *Agriculture, Forestry, and Fishing*	325,15	491,59	602,19	727.26
B	Pertambangan dan Penggalian *Mining and Quarring*	4,76	4,88	5,44	5.15
C	Industri Pengolahan *Manufacturing*	1.609,65	3.065,35	4.272,67	5.551.82

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lapangan Usaha/*Industry*		Nilai PDRB ADHB (Miliar Rupiah)			
		2010	2015	2020	2023
D	Pengadaan Listrik dan Gas *Electricity and Gas*	13,76	17,50	24,71	28.73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang *Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	6,34	7,09	9,06	10.32
F	Konstruksi *Construction*	850,87	1.364,04	1.850,35	2.282.64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	876,84	1.278,49	1.704,86	2.136.24
H	Tranportasi dan Pergudangan *Transportation and Storage*	182,21	300,23	304,90	600,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum *Accommodation and Food Service Activities*	451,67	732,78	944,91	1.317,09
J	Informasi dan Komunikasi *Information and Communication*	224,75	277,84	510,45	593,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi *Financial and Insurance Activities*	217,03	331,86	471,77	567,51
L	Real Eastate *Real Estate Activities*	296,94	458,12	612,78	725,00
M,N	Jasa Perusahaan *Business Activities*	57,87	104,73	167,00	210,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib *Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	387,54	549,15	690,22	777,71
P	Jasa Pendidikan *Education*	204,35	492,46	733,79	806,626
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial *Human Health and Social Work Activities*	72,81	148,61	239,51	272,01
R,S,T, U	Jasa Lainnya *Other Services Activities*	62,94	90,14	127,24	161,49
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)		**5.845,48**	**9.714,87**	**13.271,84**	**16.773,09**

Sumber: BPS Kota Salatiga (2010, 2015, 2020, 2024)

Nilai kontribusi di atas menunjukkan bahwa perekonomian Kota Salatiga sudah tidak bergantung pada sektor primer, melainkan sudah bergeser pada sektor sekunder. Selama tahun 2010-2023, Sektor Industri Pengolahan; Sektor Konstruksi; serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor utama yang membentuk struktur perekonomian dan menjadi sektor unggulan di Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat juga baik. Indikator lain yang berhubungan dengan PDRB yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB Per Kapita ADHK merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB Per Kapita adalah indikator penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

Nilai PDRB Per Kapita ADHK Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2010-2023 menunjukkan tren yang cenderung meningkat yaitu sebesar Rp34,25 juta pada tahun 2010 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi Rp54,89 juta pada tahun 2023. Kondisi PDRB Per Kapita Kota Salatiga sejalan dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga tahun 2023.

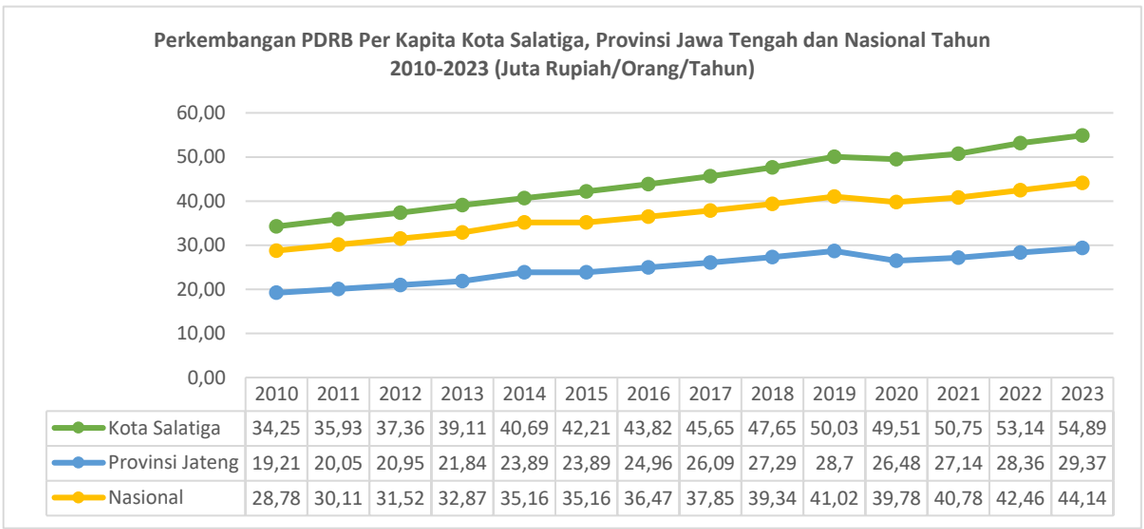

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	34,25	35,93	37,36	39,11	40,69	42,21	43,82	45,65	47,65	50,03	49,51	50,75	53,14	54,89
Provinsi Jateng	19,21	20,05	20,95	21,84	23,89	23,89	24,96	26,09	27,29	28,7	26,48	27,14	28,36	29,37
Nasional	28,78	30,11	31,52	32,87	35,16	35,16	36,47	37,85	39,34	41,02	39,78	40,78	42,46	44,14

***Grafik 2. 18** Perkembangan PDRB Per Kapita ADHK Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2010-2023*
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2023

Untuk membandingkan nilai PDRB Per Kapita Kota Salatiga dengan kota di Provinsi Jawa Tengah digunakan analisis tipologi klassen. Namun tipologi klassen tidak hanya menggunakan basis data PDRB Per Kapita tapi juga menggunakan data pertumbuhan ekonomi. Sehingga analisis ini mampu mengidentifikasi tingkat perkembangan suatu wilayah. Hasil tipologi klassen merupakan klasifkasi wilayah.

Menurut tipologi klassen, wilayah dibagi menjadi menjadi empat klasifikasi yang pertama (Kuadran I) wilayah cepat maju dan cepat tumbuh yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Kedua (Kuadran II) wilayah maju tapi tertekan yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi tapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Ketiga (Kuadran III) wilayah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

berkembang cepat yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Keempat (Kuadran VI) wilayah relatif tertinggal yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota di provinsi.

Berdasarkan analisis tipologi klassen pada kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 Kota Salatiga berada di Kuadran I, dimana Kuadran I merupakan wilayah cepat maju dan cepat tumbuh. Selain Kota Salatiga, kota lain yang berada di Kuadran I antara lain Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Tegal dan Kota Semarang. Sementara itu hanya ada satu kota yang berada di Kuadran II, yaitu Kota Pekalongan. Sedangkan untuk Kuadran IV, tidak ada kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kuadran IV.

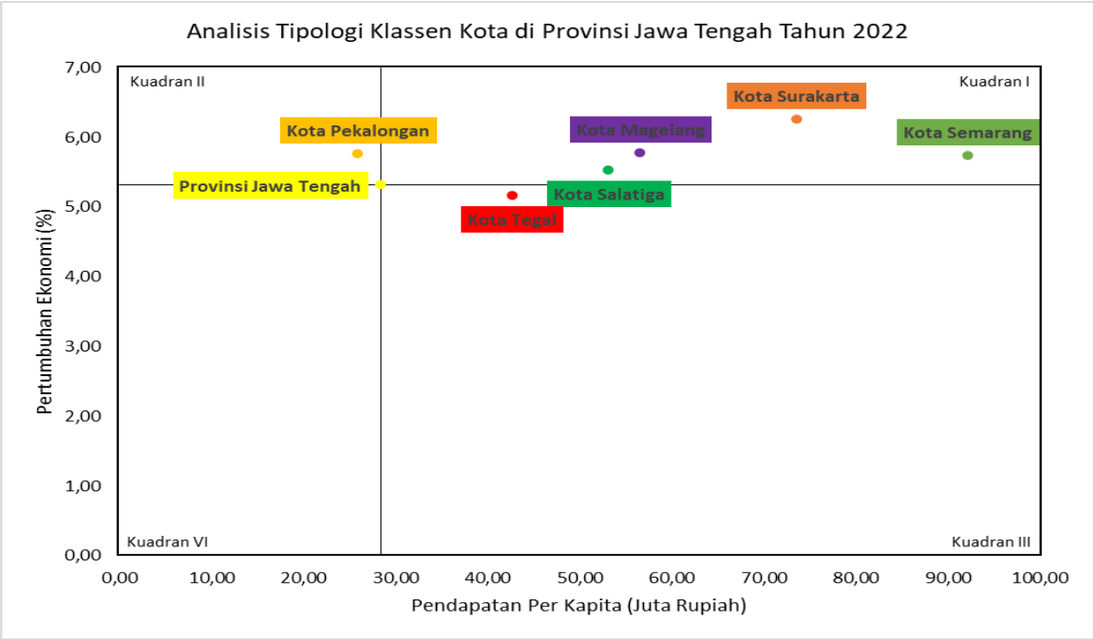

***Gambar 2. 25** Tipologi Klassen Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022*
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022 (diolah)

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingt kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan produktivistas suatu bangsa. Indeks Pendidikan sendiri merupakan salah satu dimensi penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam hal pengetahuan atau tingkat pendidikan. Indeks Pendidikan. Sebelum tahun 2010 Indikator yang menyusun Indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, namun setelah tahun 2010 indikator Angka Melek Huruf diganti deangan Harapan Lama Sekolah.

Indeks Pendidikan Kota Salatiga dihitung meggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan Indeks Pendudukan Kota Salatiga pada tahun 2010-2022 menunjukan perkembangan yang positif, dimana nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Indeks

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pendidikan Kota Salatiga sebesar 0,70. Dalam kurun waktu 13 tahun nilainya meningkat 0,09 poin dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,06%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Kota Salatiga semakin membaik dan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

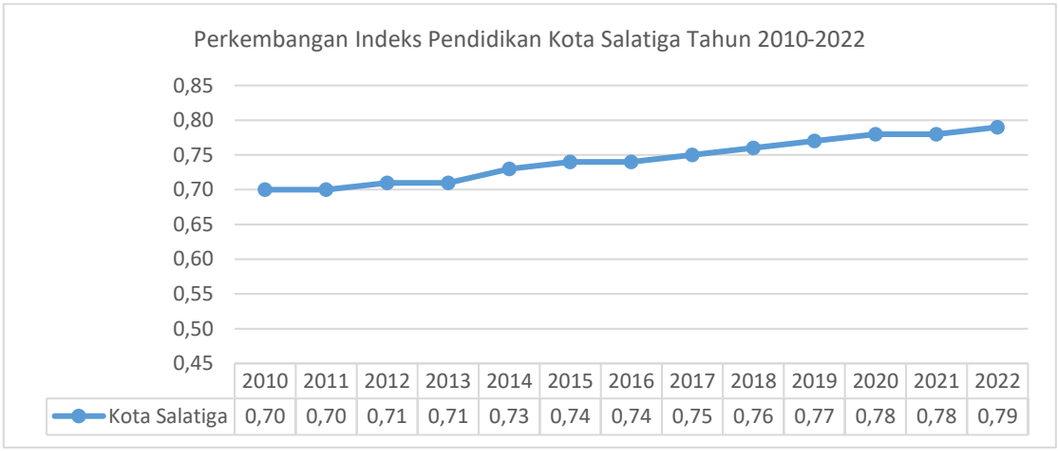

Grafik 2. 19 *Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2010*
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2010-2022 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan Indeks Pendidikan kota di Provinsi Jawa Tengah, Indeks Pendidikan Kota Salatiga cenderung tinggi. Pada tahun 2022, Indeks Pendidikan Kota Salatiga adalah 0,79 dan berada di peringkat pertama bersama dengan Kota Semarang. Pada peringkat kedua ada Kota Surakarta dengan nilai Indeks Pendidikan sebesar 0,78 dan peringkat ketiga Kota Magelang dengan nilai Indeks Pendidikan sebesar 0,76. Kota Pekalongan dan Kota Tegal pada peringkat terakhir dengan nilai Indeks Pendidikan sebesar 0,66.

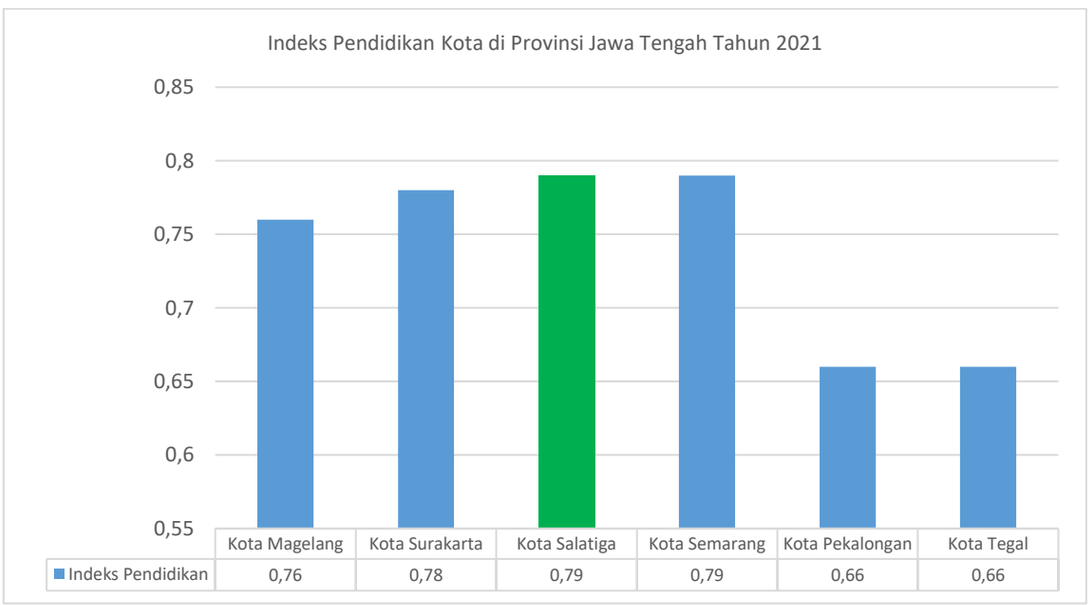

Grafik 2. 20 *Indeks Pendidikan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022*
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Walaupun Indeks Pendidikan Kota Salatiga sudah tinggi, akan tetapi masih ada beberapa unsur Pendidikan yang perlu mendapat perhatian, yaitu Partisipasi PAUD dan Angka Putus Sekolah.

a. Angka Partisipasi PAUD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Salah satu indikator penilaian Partisipasi Sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia di jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan seberapa Tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Tahun 2023 APK di Kota Salatiga untuk jenjang PAUD sebesar 50,45%, jenjang SD sebesar 114,51%, dan jenjang SMP 131,15%. Perkembangan APK di Kota salatiga dalam kurun waktu 2017-2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 20 *Perkembangan APK di Kota Salatiga Tahun 2017-2023*

Angka Partisipasi Kasar (APK)	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PAUD	%	42,53	44,69	48,36	42,64	38,33	40,10	50,45
SD	%	114,21	140,65	107,81	110,37	113,46	114,07	114,51
SMP	%	139,45	136,22	138,41	127,66	130,81	130,59	131,15

b. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) di Kota Salatiga menunjukkan perubahan yang fluktuatif. APS pada jenjang SD/MI di tahun 2017 sebesar 0,05% persen. Pada tahun 2021, APS pada jenjang SD/MI berada pada nilai terendah yakni sebesar 0,005%. Namun pada tahun 2022, nilainya kembali mengalami peningkatan menjadi 0,02% dan di tahun 2023 nasik menjadi 0,041%. Sedangkan untuk APS pada jenjang SMP/MTs, pada tahun 2017 sebesar 0,07%. Lonjakan APS pada jenjang SMP/MTs terjadi pada tahun 2021, yakni sebesar 0,44%. Namun pada tahun 2022, APS mampu ditekan kembali ke kondisi awal sebesar 0,07% tahun 2023 menurun menjadi 0,034%

2. Angka Literasi/Numerisasi

Angka literasi/numerisasi atau Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Setelah tahun 2010 Angak Melek Huruf (AMH) sudah tidak lagi digunakan sebagai indikator untuk menyusun Indeks Pendidikan pada dimensi pengetahuan/tingkat pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angak Melek Huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena Angka Melek Huruf di sebagaian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kota Salatiga tahun 2007-2023 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Nilainya terus meningkat setiap tahun berkisar 0,02-1,28. Pada tahun 2015, AMH Kota Salatiga sebesar 95,21 nilanya meningkat signifikan menjadi 98,74 di tahun 2023. Kondisi ini menujukkan bahwa hampir 99 dari 100 orang dewasa di Kota Salatiga mampu membaca dan menulis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

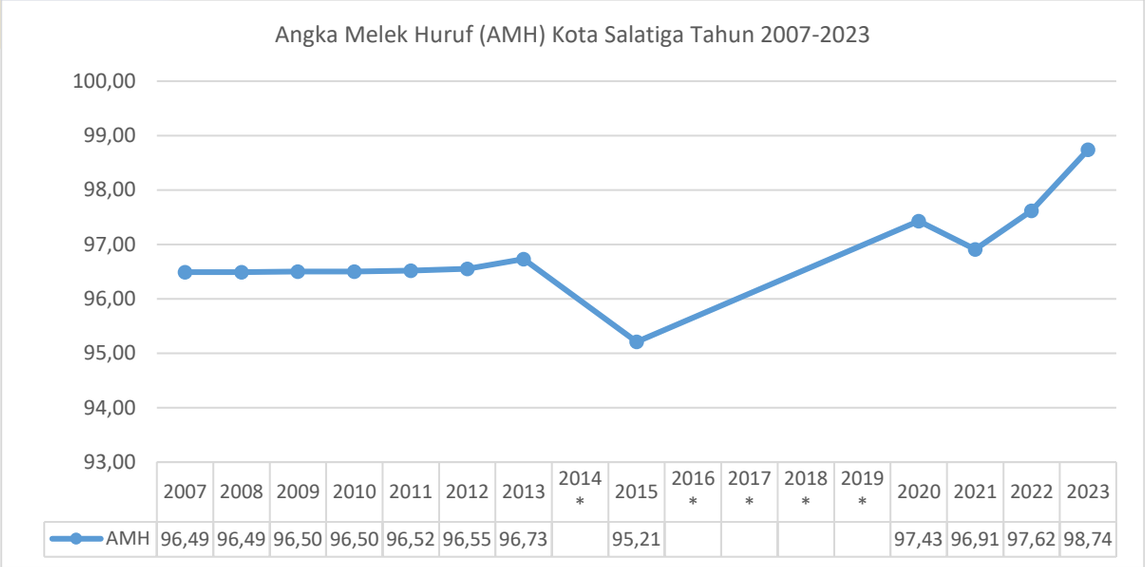

Grafik 2. 21 *Angka Melek Huruf (AMH) Kota Salatiga Tahun 2007-2023*
Sumber: BPS Kota Salatiga. 2007-2024

Keterangan:
* : Data tidak tersedia

Apabila dibandingkan dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2023 AMH Kota Salatiga berada diperingkat ke dua dari enam kota di Provinsi Jawa Tengah. Dimana AMH Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar 98,74. Peringkat pertama adalah Kota Magelang dengan AMH sebesar 100 sedangkan peringkat terakhir adalah Kota Tegal dengan AMH sebesar 97,58.

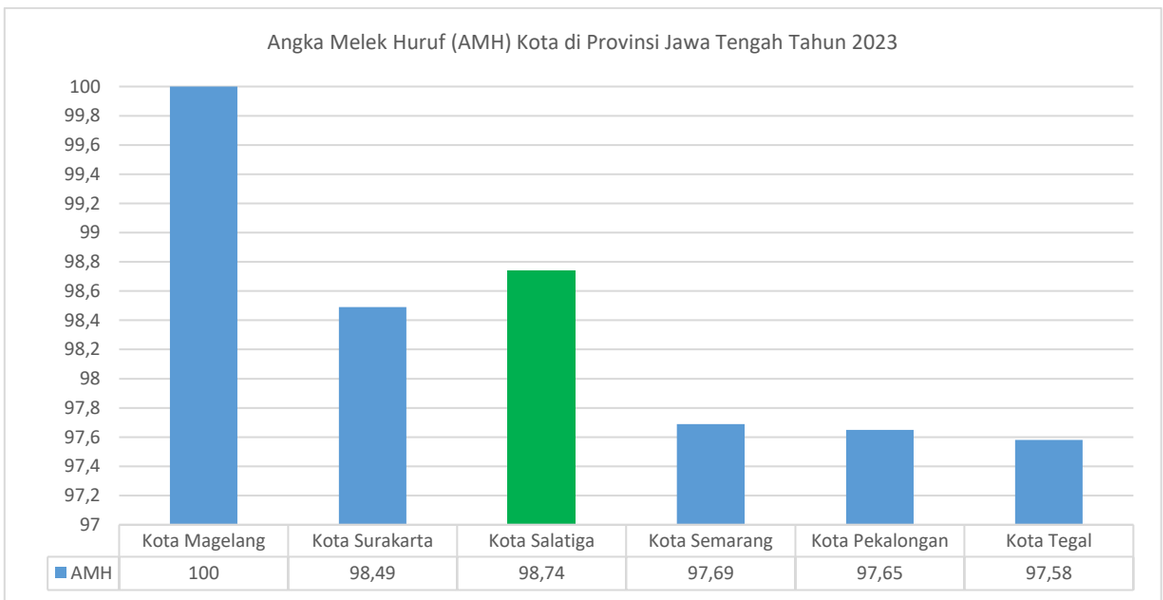

Grafik 2. 22 *Angka Melek Huruf (AMH) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013*
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Karena dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang diterima menjadi lebih baik. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahan belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat tujuh unsur pembangunan listerasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan per hari, jumlah pepustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial/promosi, dan anggota perpustakaan. Perpustakaan Nasional mengelompokan nilai IPLM menjadi 5 kategori yaitu, Sangat Rendah (0-29,9), Rendah (30-49,9), Sedang (50-79,9), Tinggi (80-89,9), dan Sangat Tinggi (90-100).

Kota Salatiga pada tahun 2023, memiliki nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 94,48 dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Dari 7 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Kota Salatiga tahun 2023, 6 UPLM bernilai sempurna dengan skor 1. Sedangkan UPLM terendah adalah UPLM 2 yaitu unsur ketercukupan koleksi perpustakaan dengan nilai 0,6138.

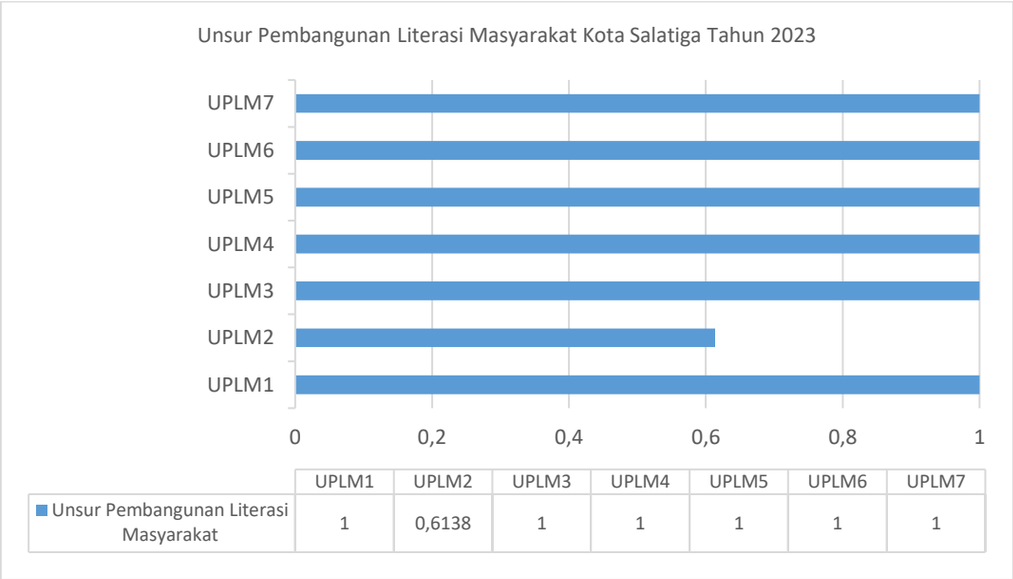

Grafik 2. 23 *Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Kota Salatiga Tahun 2023*
Sumber: Perpustakaan Nasional, 2023

Keterangan:
UPLM 1 : Pemerataan Layanan Perpustakaan
UPLM 2 : Ketercukupan Koleksi Perpustakaan
UPLM 3 : Ketercukupan Tenaga Perpustakaan
UPLM 4 : Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari
UPLM 5 : Perpustakaan ber-SNP
UPLM 6 : Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialiasi dan Promosi
UPLM 7 : Anggota Perpustakaan

Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) kota di Provinsi Jawa Tengah, nilai IPLM Kota Salatiga paling tinggi dengan nilai 94,48. Sedangkan peringkat kedua dan seterusnya diduduki Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Semarang dan yang terakhir Kota Tegal. Di Provinsi Jawa Tengah, kota dengan IPLM yang masuk kategori sangat tinggi adalah Kota Salatiga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dan Kota Magelang. Sedangkan Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Semarang memiliki nilai IPLM sedang.

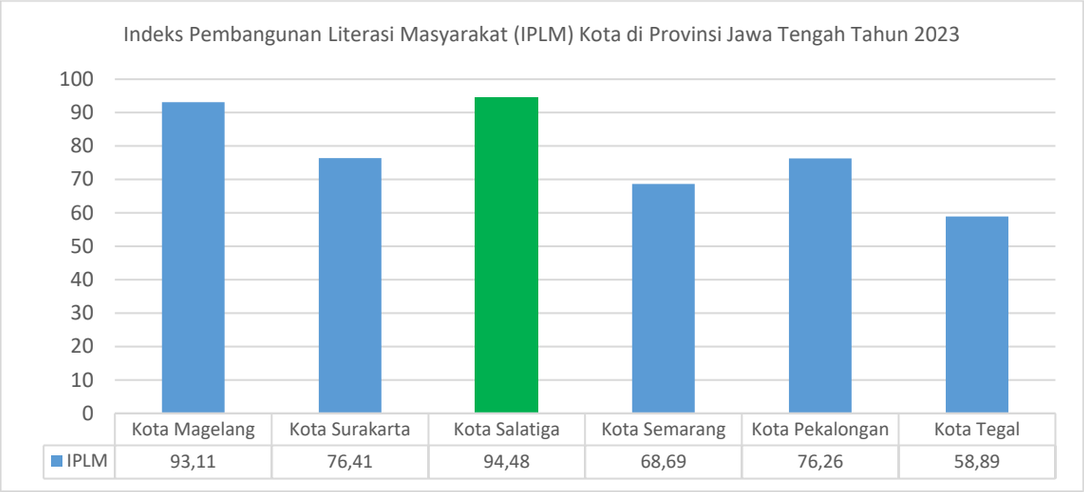

Grafik 2. 24 *Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*
Sumber: Perpustakaan Nasional, 2023

4. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pengetahuan serta kecakapan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jarigan internet dan lainnya. Indeks Literasi Digital bentuk dari 4 pilar utama yaitu *Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety,* dan *Digital Culture.*

Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2022 adalah sebesar 3,54 dengan Pilar Digital Culture menjadi pilar yang memiliki nilai tertinggi (3,84), dan Pilar Digital Safety merupakan pilar dengan nilai indeks terendah (3,12). Sedangkan nilai Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,61 dimana Pilar Digital Culture menjadi pilar dengan nilai tertinggi (3,91) dan Pilar Digital Safety menjadi pilar dengan nilai terendah (3,23).

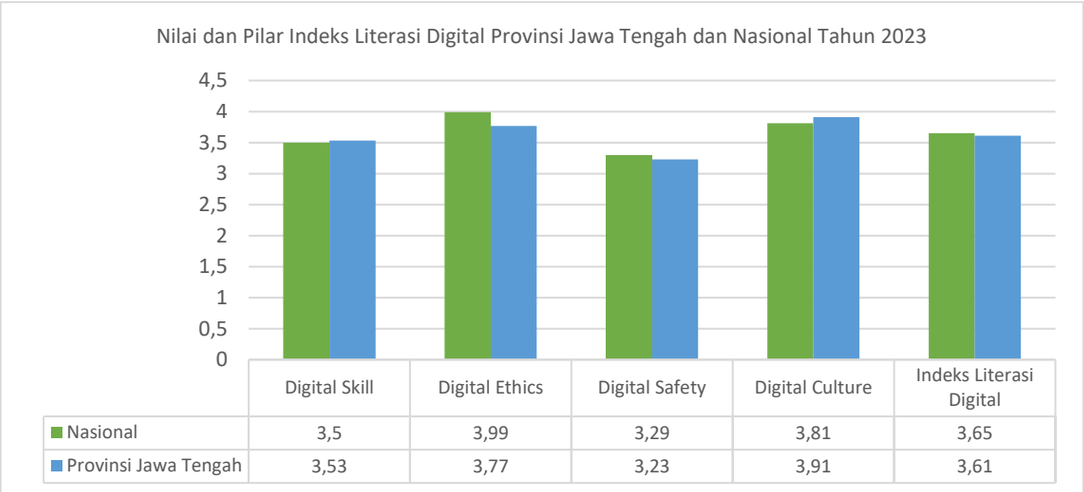

Grafik 2. 25 *Nilai dan Pilar Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023*
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Data Indeks Literasi Digital untuk Kota Salatiga tidak tersedia karena perhitungan Indeks Literasi Digital hanya pada level Nasional dan Provinsi, untuk tetap dapat menggambarakan menggambarkan kemampuan penggunaan teknologi oleh masyarakat maka akan digunakan indeks pengganti yaitu Indeks Masyarakat Digital.

5. Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-sehari maupun terkait pekerjaannya. Masyarakat digital sendiri diartikan sebagai sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-seharinya, di mana semua aktivits yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua ini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya. Terdapat empat pilar utama pembentuk Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

Nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kota Salatiga pada tahun 2023 termasuk dalam 5 Kota Se-Indonesia dengan IMD paling tinggi dengan nilai 51,93. Nilai tersebut berasal dari rata-rata skor 4 pilar yaitu pilar infrastruktur dan ekosistem (45,75), pilar keterampilan digital (71,26), pilar pemberdayaan (25,12) dan pilar pekerjaan (47,09). Secara lebih rinci, pilar keterampilan digital memiliki poin paling tinggi yang artinya sebagian besar dari masyarakat Kota Salatiga telah memiliki keterampilan digital atau memiliki penguasaan teknologi yang baik. Sedangkan nilai terendah ada pada pilar pemberdayaan, hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan masyarakat. Sehingga meskipun masyarakat Kota Salatiga memiliki keterampilan digital yang baik, masyarakat belum memanfaatkannya untuk kegiatan sehari-hari.

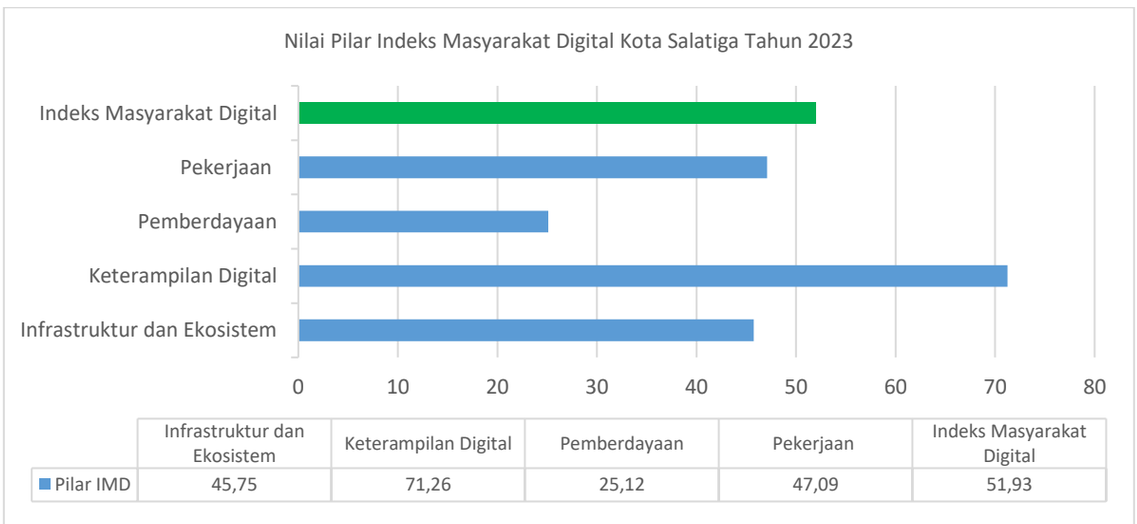

***Grafik 2. 26** Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kota Salatiga Tahun 2023*
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Apabila dibandingkan dengan kota lain di Provinsi Jawa Tengah, nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kota Salatiga paling tinggi. Nilai IMD Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar 51,93 diikuti oleh Kota Semarang dengan nilai 51,49 lalu Kota Surakarta dengan nilai 51,04, Kota Tegal dengan nilai 49,28, Kota Magelang dengan nilai 48,58 dan yang terakhir Kota Pekalongan dengan nilai 48,43.

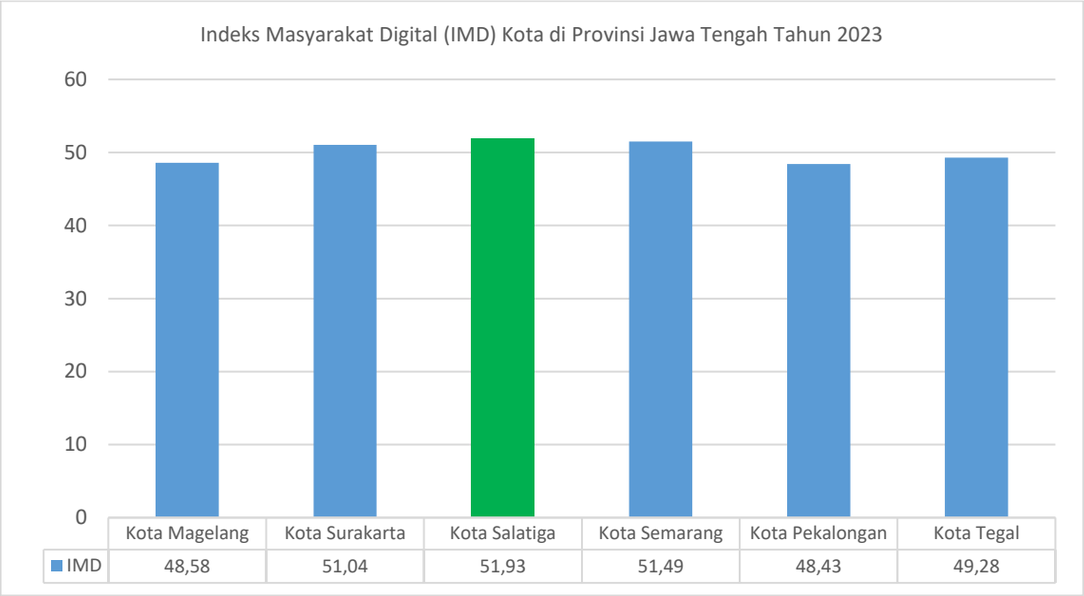

***Grafik 2. 27** Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2023

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan sebagai dasar nutk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK maka semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif. BPS mengelompokkan nila TPAK menjadi 3 yaitu tinggi (TPAK ≥ 70), sedang (50 < TPAK < 70), rendah (TPAK ≤ 50).

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga tahun 2007-2023 mengalami tren yang fluktuatif namun cenderung naik. Pada tahun 2008, TPAK Kota Salatiga sebesar 65,20%. Pada periode tahun 2008-2013, secara bergantian nilainya mengalami kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 2013 nilai TPAK Kota Salatiga sebesar 67,96%. Pada periode tahun 2014-2015, nilai TPAK Kota Salatiga mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 62,70%. Pada 2017-2018, nilai TPAK mampu naik hingga angka 72,15%. Pada tahun 2019, nilainya kembali turun menjadi 66,96%. Namun pada tahun selanjutnya nilai TPAK Kota Salatiga kembali mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 nilanya menjadi 72,09%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

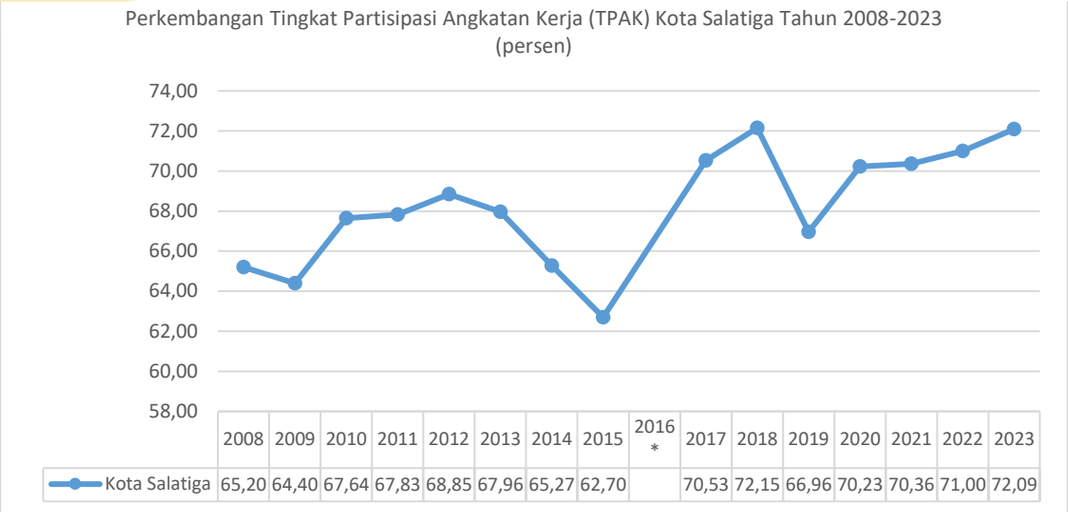

Grafik 2. 28 *Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga Tahun 2008-2023*
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008-2024

Apabila dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kota di Provinsi Jawa Tengah, TPAK Kota Salatiga cenderung tinggi. Pada tahun 2023, nilai TPAK Kota Salatiga sebesar 72,09% dan berada di peringkat kedua. Peringkat Pertama adalah Kota Pekalongan dengan nilai 73,95%. Kota Salatiga dan Kota Pekalongan dengan nilai TPAK lebih dari 70% berada pada ketegori kota dengan TPAK tinggi. Sedangkan Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Magelang masuk dengan kategori sedang dengan nilai TPAK secara berurutan 69,42%, 66,64%, 69,18%, dan 69,66%.

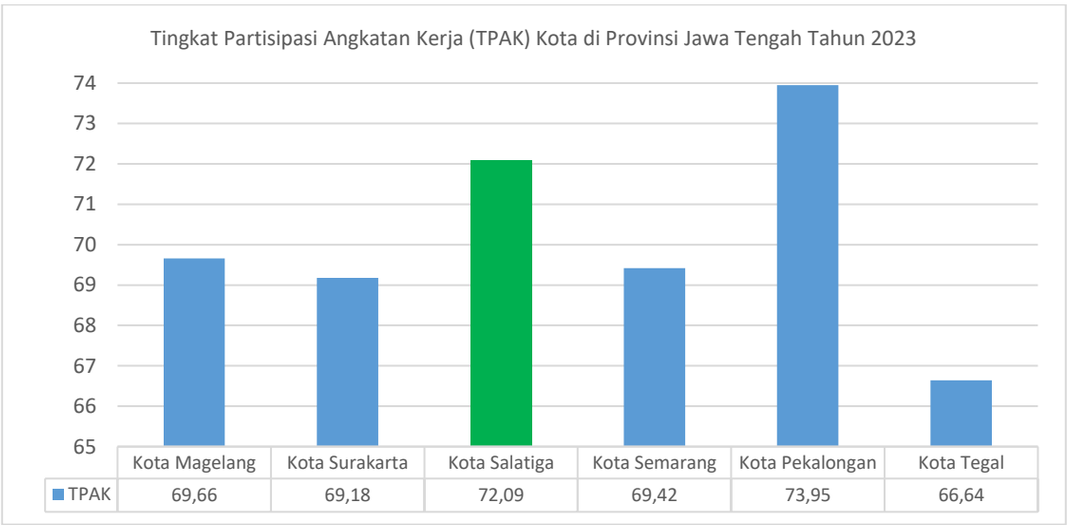

Grafik 2. 29 *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Sedangkan TPAK berdasarkan jenis kelamin, Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kota Salatiga tahun 2018-2023 mengalami tren yang fluktuatif dengan capaian cenderung turun. Pada tahun 2018, TPAK Perempuan Kota Salatiga sebesar 66,88%. Nilai TPAK Perempuan sempat mengalami kenaikan dari tahun 2019-2020, tetapi kembali menurun pada tahun 2022. Pada tahun 2023 nilai TPAK Perempuan Kota Salatiga kembali mengalami penurunan menjadi 62,98%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

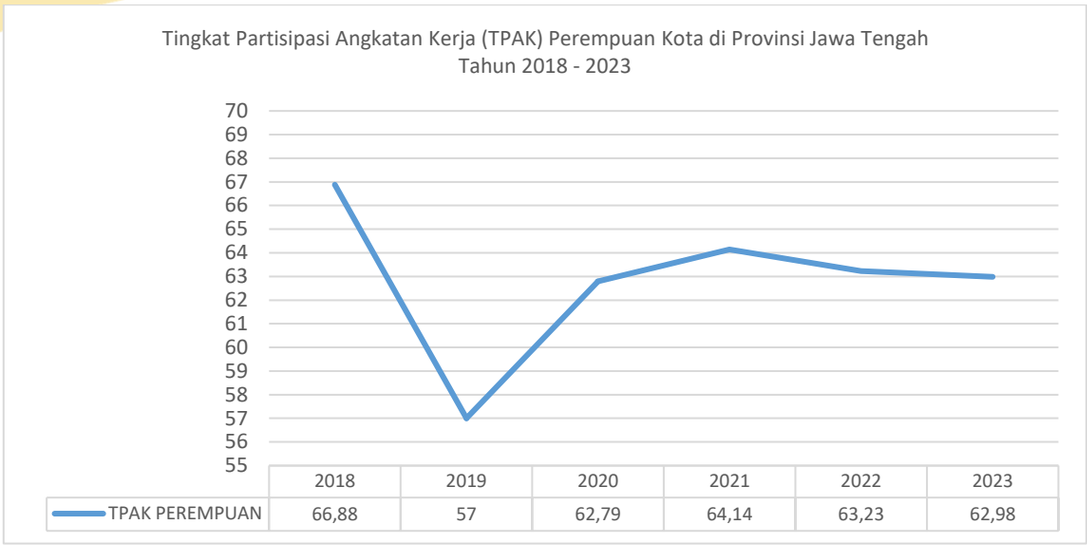

Grafik 2. 30 *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2024

7. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan atau Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase angka ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka ketergantungan Kota Salatiga pada tahun 2017-2022 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Pada periode tahun 2017-2020, angka ketergantungan Kota Salatiga stabil berada di angka 40. Kemudian nilai sempat turun pada tahun 2021 menjadi 39,34. Angka ketergantungan kembali mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya menjadi 42,76 yang artinya pada tahun 2023 sebanyak 100 penduduk usia produktif harus menanggung 43 penduduk usia tidak produktif.

Grafik 2. 31 *Angka Ketergantungan Kota Salatiga Tahun 2017-2023*

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017-2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Apabila dibandingkan dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2023 angka ketergantungan Kota Salatiga berada di peringkat kedua, dengan angka ketergantungan sebesar 42,76. Pada peringkat pertama ada Kota Tegal dengan angka ketergantungan sebesar 42,98 dan peringkat ketiga adalah Kota Pekalongan sebesar 42,45. Pada peringkat selanjutnya secara berturut-turut ada Kota Surakarta (42,09), Kota Magelang (41,34), dan Kota Semarang (40,38) di posisi terakhir.

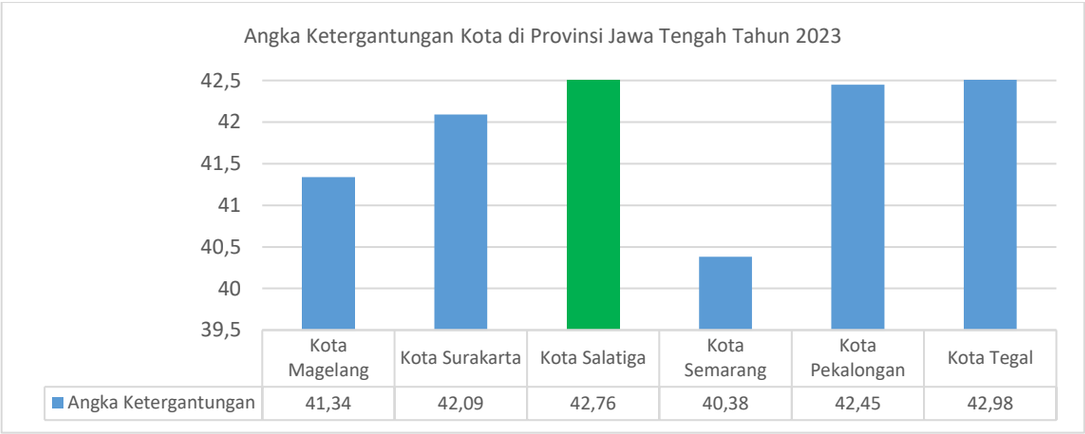

***Grafik 2. 32** Angka Ketergantungan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

1. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastrutur merupakan salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Kota atau *City Development Index* (CDI) yang digunakan untuk mengukur kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas dasar. Fasilitas dasar yang menyusun Indeks Infrastruktur adalah akses air bersih, akses sanitasi, akses listrik, dan akses telepon. Indeks infrastruktur yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat pembangunan disuatu kota semakin baik. Secara lebih lengkap data Indeks Infrastruktur untuk Kota Salatiga belum tersedia. Akan tetapi untuk menyajikan kondisi infrastruktur yang mendekati pemenuhan aspek Indeks Infrastruktur dapat diketahui dari capaian kinerja bidang urusan pemerintah daerah bidang infrastruktur.

a. Bidang Jalan

Kota Salatiga memiliki panjang jalan 384,64 Km, dengan kondisi baik sepanjang 366,02 Km atau 95,16% dari panjang jalan. Prioritas pembangunan infrastruktur didukung dengan kebijakan Wali Kota Salatiga untuk pembangunan Infrastuktur dan penataan wajah kota. Per bulan Juli 2023 kendaraan bermotor berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Salatiga tercatat 165.382 kendaraan atau 0,23% rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Salatiga.

b. Air Bersih

Infrastruktur lainnya berupa penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Berdasarkan laporan Penerapan SPM Kota Salatiga bidang Pekerjaan Umum, pada tahun 2023 persentase rumah tangga berakses air minum layak adalah sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

87,97% atau 42.844 rumah tangga yang telah terlayani dari 48.702 rumah tangga di Kota Salatiga. Sedangkan untuk penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah mencapai 98,62% atau 197.455 orang terlayani dari 200.200 penduduk Kota Salatiga tahun 2023.

c. Sanitasi

Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak sampai dengan tahun 2023 mencapai 94,61 %, sedangkan berdasarkan laporan Penerapan SPM untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik telah mencapai 98,62%.

d. Tenaga Listrik

Penggunaan tenaga listrik tahun 2023 berjumlah 57.936 rumah tangga atau 99,9% dari 57.941 rumah tangga se Kota Salatiga.

e. Telepon

Akses Telepon yang merupakan salah satu penyusun indeks infrastruktur untuk Kota Salatiga berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS hanya tersedia sampai dengan tahun 2021. Persentase rumah tangga yang memilki pesawat telpon pada tahun 2021 adalah 5,76%, lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah (1,2%) dan peringkat tiga dari kota se-Jawa Tengah.

Sedangkan pendekatan lain mengenai pelayanan telepon di Kota Salatiga dalah gambaran penduduk yang mempunyai telepon selular, yang sampai dengan tahun 2021 sebanyak 90,47% yang merupakan capaian tertinggi dibandingkan Kota-Kota di Jawa Tengah. Perkembangan akses telepon Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

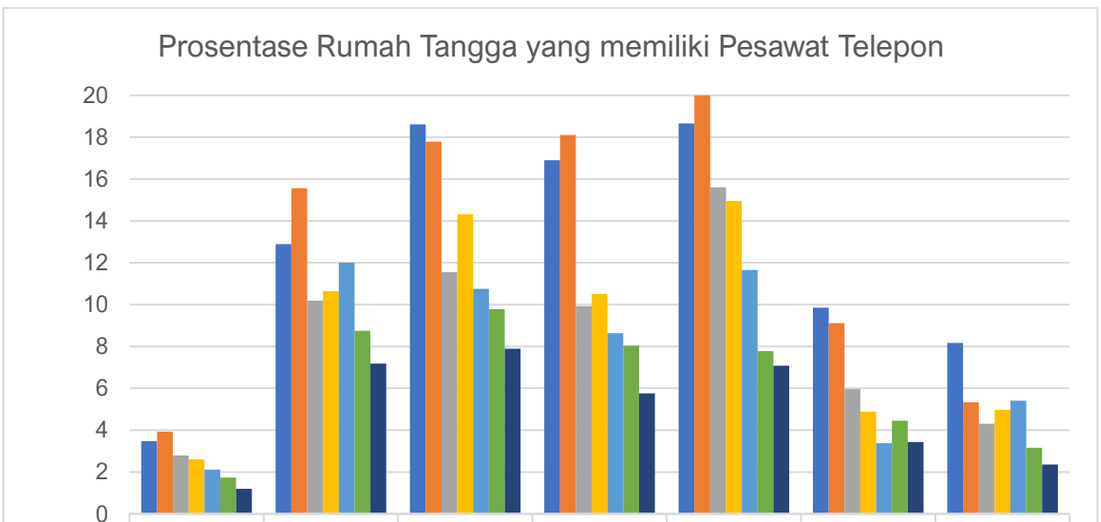

	PROVINSI JAWA TENGAH	Kota Magelang	Kota Surakarta	Kota Salatiga	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Tegal
2015	3,48	12,89	18,62	16,90	18,65	9,86	8,17
2016	3,93	15,57	17,79	18,11	20	9,11	5,34
2017	2,8	10,19	11,55	9,93	15,6	5,96	4,31
2018	2,61	10,64	14,32	10,51	14,95	4,88	4,97
2019	2,11	12,01	10,75	8,64	11,65	3,37	5,41
2020	1,73	8,75	9,78	8,04	7,78	4,45	3,16
2021	1,2	7,18	7,9	5,76	7,08	3,44	2,36

Grafik 2. 33 *Prosentase Rumah Tangga yang memiliki Pesawat Telepon*
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2021, diolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

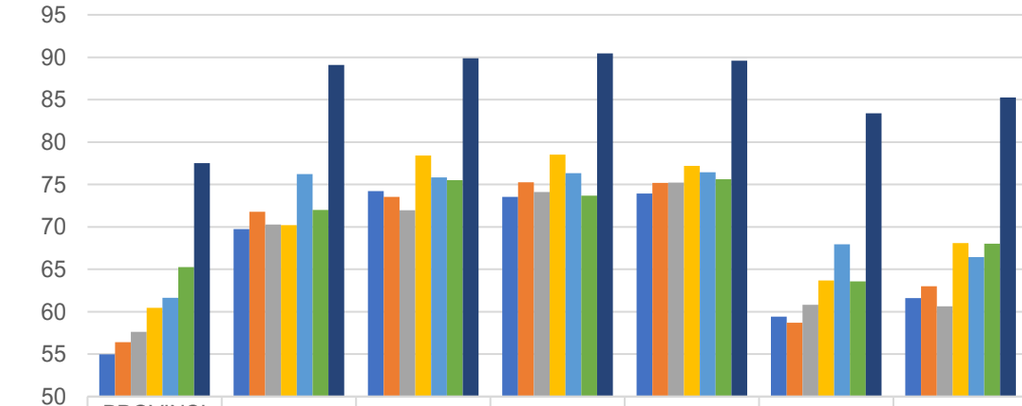

	PROVINSI JAWA TENGAH	Kota Magelang	Kota Surakarta	Kota Salatiga	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Tegal
2015	54,97	69,75	74,21	73,53	73,94	59,42	61,61
2016	56,41	71,8	73,54	75,25	75,17	58,72	63,01
2017	57,62	70,29	71,95	74,12	75,22	60,82	60,65
2018	60,47	70,20	78,41	78,51	77,18	63,70	68,09
2019	61,66	76,22	75,83	76,35	76,43	67,95	66,45
2020	65,27	72,00	75,50	73,70	75,62	63,59	68,02
2021	77,52	89,10	89,89	90,47	89,61	83,39	85,27

Grafik 2. 34 *Prosentase Penduduk 5 tahun Ke atas yang memiliki Telepon Seluler*
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2021, diolah

Gambaran lain mengenai infratruktur komunikasi adalah prosentase rumah tangga dengan akses internet. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PT. Telkom Cabang Kota Salatiga, pada tahun 2022 dan 2023, terjadi peningkatan rumah tangga dengan akses internet, sebagai berikut :

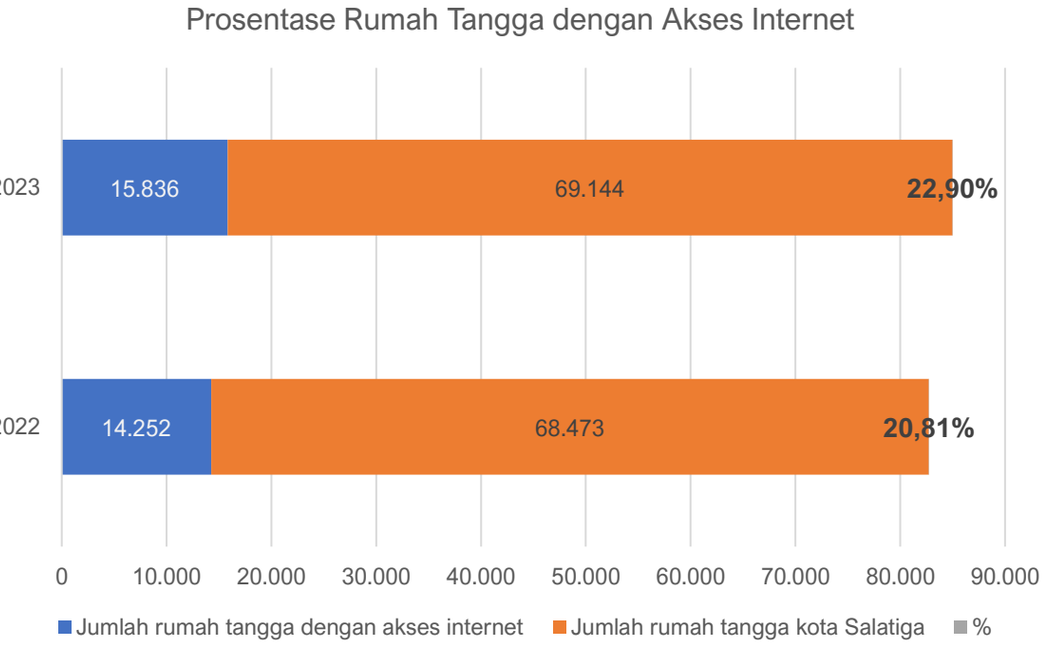

Grafik 2. 35 *Prosentase Rumah Tangga dengan Akses Internet*
Sumber : PT. Telkom Cabang Salatiga, 2023, diolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

f. Perumahan

Pada bidang perumahan, salah satu urusan pemerintah daerah adalah membantu dan menfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam suatu perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan ulitas (PSU) yang memadai. Hal inilah yang menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah bidang perumahan. Untuk kinerja ketersediaan rumah layak huni selama 6 tahun terakhir (2017-2022) sudah diatas 80 persen, namun capaiannya belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Indikator tersebut adalah persentase rumah tinggal bersanitasi, cakupan ketersediaan rumah layak huni, dan cakupan layanan rumah layak huni terjangkau. Sedangkan pada tahun 2023, kinerja perumahan dapat dilihat dari indikator berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditarget 7,86% di tahun 2023, baru terealisasi 7,34 % atau dengan capaian 93,38%.

***Tabel 2. 21** Kinerja Perumahan Tahun 2017-2022*

Indikator Kinerja	Satuan	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Capaian	OPD Penanggung Jawab
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
Program Lingkungan Sehat Perumahan															
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	81	-	83	82,18	85	93,51	89	52,89	92	88,19	100	86,03	Tidak Tercapai	DPKP
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan															
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	89,29	90,38	90,07	90,58	90,96	91,5	91,84	93,94	92,73	91,4	93,62	91,95	Tidak Tercapai	DPKP
Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau	%	26,5	8,53	36,71	9,74	48,38	18,35	60,04	25,4	71,71	30,1	83,38	34,42	Tidak Tercapai	DPKP

2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunnan infrastruktur yag sudah berjalan. Indeks Kulitas Layanan Infrastruktur berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Indeks ini disusun berdasarkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

Secara lebih lengkap data Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur untuk Kota Salatiga belum tersedia, akan tetapi indikator yang mendekati penilaian kinerja tersebut adalah pendapaian indeks kepuasan masyarakat pada urusan pekerjaan umum, yang pada tahun 2023 tercapai nilai 88,19.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi (IDI) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Pusat maupun di Daerah. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Untuk saat ini pengukuran IDI baru dilaksanakan pada tingkat Nasional dan Provinsi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sehingga data Indeks Demokrasi untuk Kota Salatiga belum tersedia. Analisis yang dilakukan akan menggunakan data IDI Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021-2022 menunjukkan kinerja yang baik. Dimana pada tahun 2021, IDI Provinsi Jawa Tengah sebesar 81,15 kemudian mengalami peningkatan sebesar 3,64 poin menjadi 84,79 pada tahun 2022. Kondisi serupa juga terjadi pada IDI Nasional. Pada tahun 2021 IDI Nasional sebesar 78,12 dan naik menjadi 80,41 pada tahun 2022.

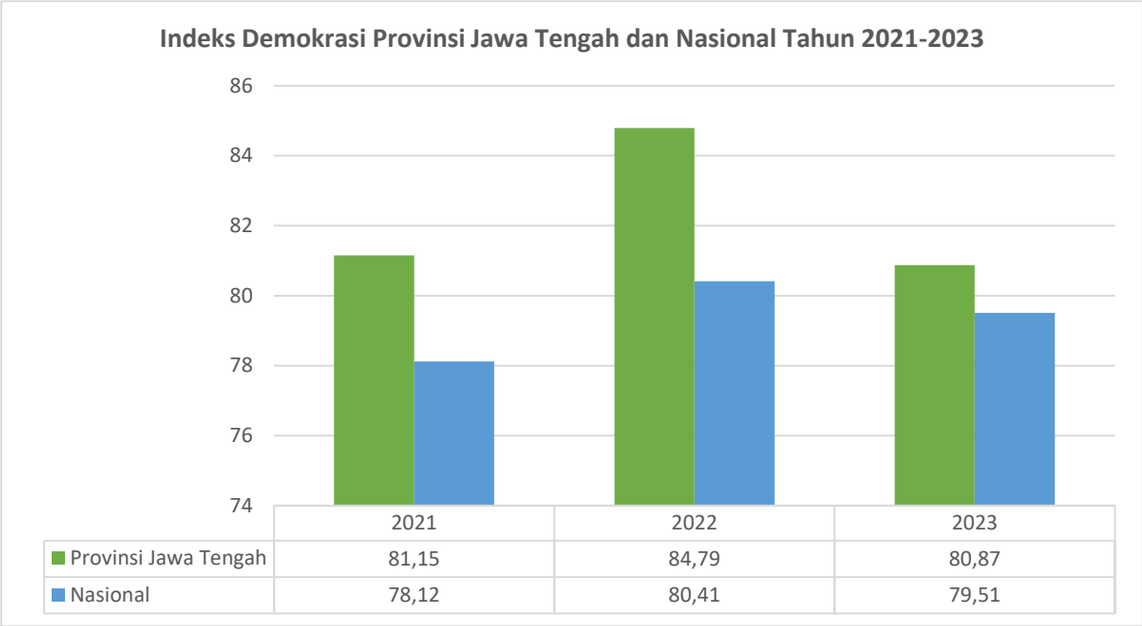

	2021	2022	2023
Provinsi Jawa Tengah	81,15	84,79	80,87
Nasional	78,12	80,41	79,51

Grafik 2. 36 *Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2023*
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021-2023

2. Indeks Rasa Aman

Rasa merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang kemudian pemerintah wajib untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena rasa aman berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Karena rasa aman merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah maka diperlukam alat ukur yang dapat mencerminkan situasi keamanan yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu disusunlah suatu indeks mengenai keamaan manusai, yang kemudian disebut dengan Indeks Rasa Aman (IRA). Indeks Rasa Aman disusun dengan tujuan mampu menggambarkan kondisi keamanan di masyarakat yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengemabilan keputusan. Secara lebih lengkap data Indeks Rasa Aman untuk Kota Salatiga belum tersedia.

3. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mencerminkan stabilitas keamana suatu daerah. Dimana stabilitas keamanan tersebut berkaitan dengan frekuensi terjadinya masalah ketertiban seperti demonstrasi yang kemudian berdampak pada masalah ketentraman masyarakat. Indeks ini digunakan sebagai salah satu parameter yang digunakan oleh investor ketika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

akan melakukan penanaman modal disuatu daearh. Secara lebih lengkap Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Salatiga belum tersedia.

4. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. IKUB diukur dengan mengacu pada tiga dimensi utama yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Kriteria capaian IKUB adalah IKUB Sangat Rendah (0-20), IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-80), IKUB Sangat Tinggi (80-100). Data IKUB untuk Kota Salatiga tidak tersedia, sehingga yang dianalisis adalah IKUB Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Nilai IKUB Nasional pada tahun 2015-2023 menunjukkan perubahan yang fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, IKUB Nasional sebesar 75,36 dan masuk kedalam kategori IKUB Tinggi. Kemudian nilainya mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, dimana nilai IKUB Nasional turun menjadi 67,46. Kemudian pada tahun 2021 nilainya kembali naik cukup signifikan menjadi 72,39 dan terus naik pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 76,02. Secara keseluruhan nilai IKUB Nasional masuk dalam kategori IKUB Tinggi.

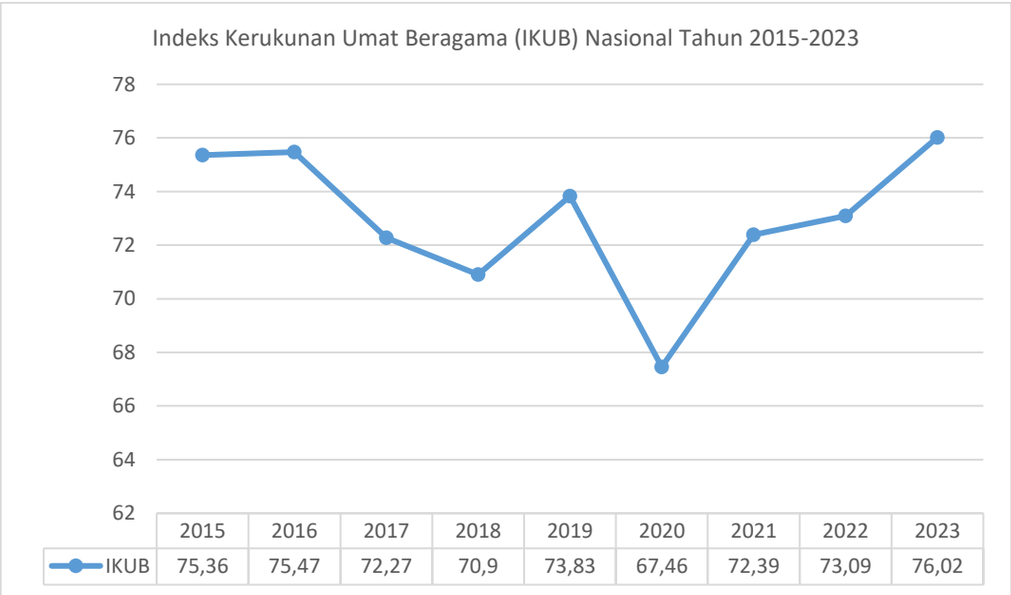

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKUB	75,36	75,47	72,27	70,9	73,83	67,46	72,39	73,09	76,02

Grafik 2. 37 *Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nasional Tahun 2015-2023*
Sumber: Kementerian Agama, 2015-2023

5. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalalah untuk memperoleh suatu ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Komponen lingkungan pendukung ditopang oleh pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan kestabilan ekonomi makro. Komponen sumber daya manusia ditopang oleh pilar kesehatan dan keterampilan. Komponen pasar ditopang oleh pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Komponen ekosistem inovasi ditopang oleh pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Salatiga sebesar 3,77. Dengan rincian nilai pilar pada komponen lingkungan pendukung sebesar 4,58 pada pilar 1, 3,39 pada pilar 2, 4,98 pada pilar 3, dan 3,42 pada pilar 4. Nilai setiap pilar pada komponen sumber daya manusia sebesar 4,45 pada pilar 5 dan 4,53 pada pilar 6. Nilai setiap pilar pada komponen pasar sebesar 3,33 pada pilar 7, 3,37 pada pilar 8, 1,09 pada pilar 9 dan 4,12 pada pilar 10. Kemudian besarnya nilai setiap pilar pada komponen ekosistem inovasi sebesar 3,2 pada pilar 11 dan 4,78 pada pilar 12.

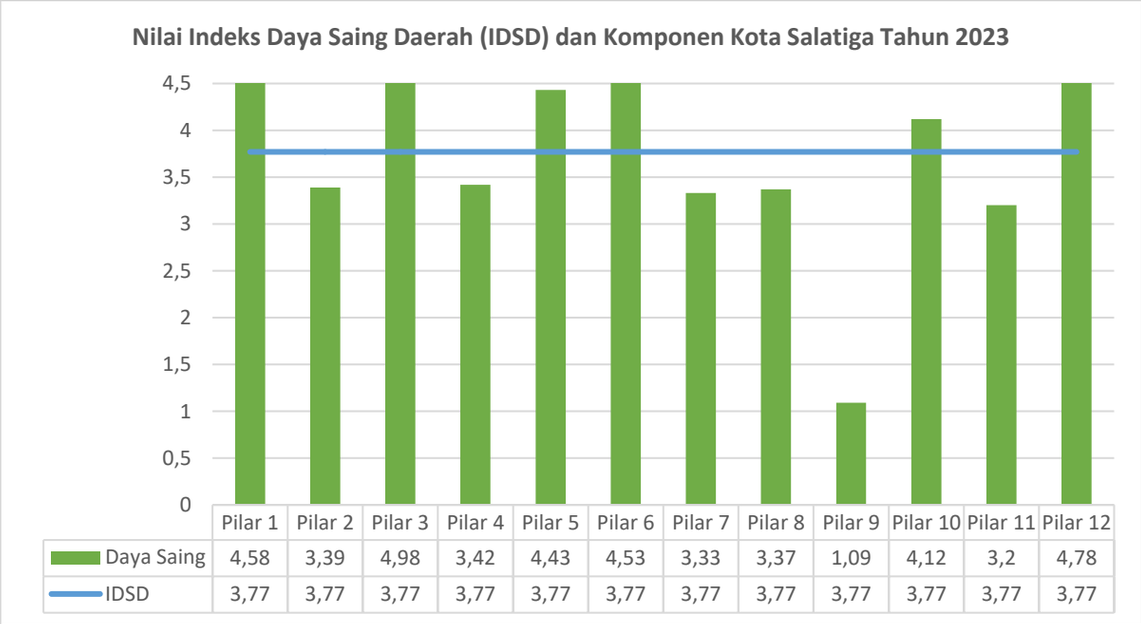

	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12
Daya Saing	4,58	3,39	4,98	3,42	4,43	4,53	3,33	3,37	1,09	4,12	3,2	4,78
IDSD	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77

Grafik 2. 38 *Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Komponen Kota Salatiga tahun 2023*
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2023

Keterangan :

Pilar 1 : Instansi	Pilar 5 : Kesehatan	Pilar 9 : Sistem Keuangan
Pilar 2 : Infrastruktur	Pilar 6 : Keterampilan	Pilar 10 : Ukuran Pasar
Pilar 3 : Adopsi TIK	Pilar 7 : Pasar Produk	Pilar 11 : Dinamisme Bisnis
Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja	Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) kota di Provinsi Jawa Tengah, nilai IDSD Kota Salatiga cenderung rendah. Pada tahun 2023, nilai IDSD Kota Salatiga sebesar 3,77 dan berada di posisi tiga terendah bersama Kota Tegal (3,63) dan Kota Pekalongan (3,60). Nilai IDSD tertinggi dimiliki oleh Kota Surakarta sebesar 4,08 disusul oleh Kota Semarang (3,95) dan Kota Magelang (3,81). Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai IDSD sebesar 3,89 sehingga hanya Kota Semarang dan Kota Surakarta yang memiliki nilai IDSD lebih besar dari provinsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

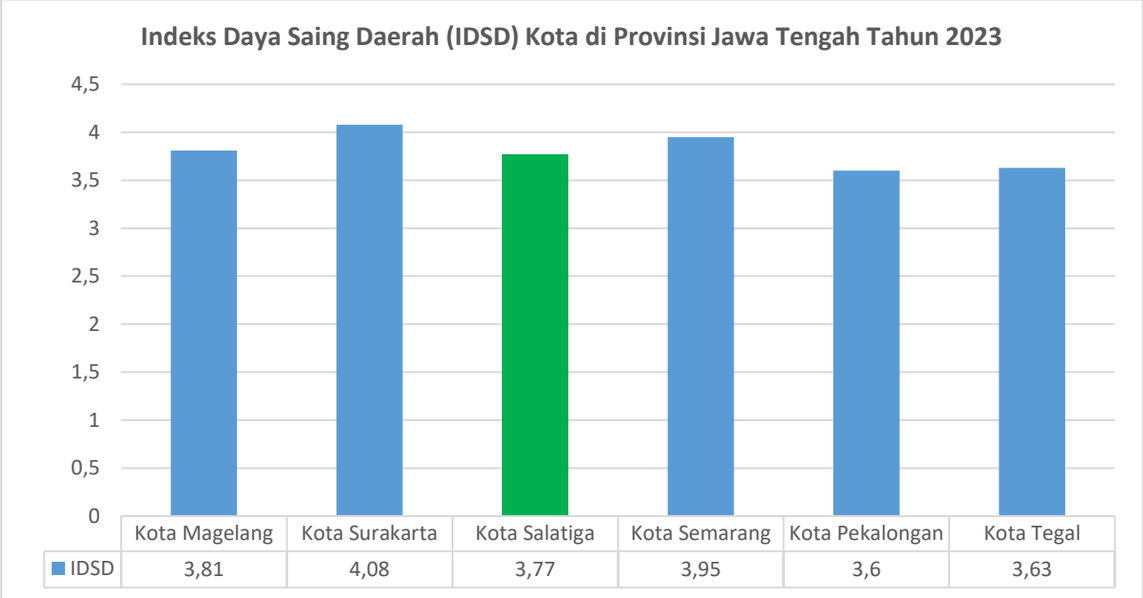

Grafik 2. 39 *Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2023

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Walaupun masih belum optimal, penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2018, level peilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 58,22 persen dan sedikit demi sedikit mengalami peningkatan ke 63,39 persen di tahuan 2019 dan 64,99 persen di tahun 2020, serta kembali naik di tahun 2021 menjadi 66 persen dan pada tahun 2022 menjadi 66,85 persen, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 64,93 persen.

2.4.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elekttonik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government Index*) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan pemerintahan suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah suatu daerah telah bergerak menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan terbuka. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 menunjukkan bahwa Indeks SPBE Kota Salatiga terkategori baik, yakni mencapai nilai 3,26. Namun, nilai tersebut berada di bawah nilai indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah (4,26). Posisi relatif nilai indeks SPBE Kota Salatiga terhadapat kota di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat terbawah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.4.3 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemajuan di suatu daerah, seperti negara bagian, provinsi, atau kota. Tujuan dari indeks ini adalah untuk mengukur sejauh mana suatu daerah telah berhasil dalam mengembangkan inovasi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, lingkungan, dan pelayanan publik. Indeks Inovasi Daerah membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dan mempromosikan inovasi dalam pembangunan daerah. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri, Indeks Inovasi Daerah Kota Salatiga memiliki kondisi perkembangan yang baik. Tahun 2019 indeks inovasi Kota Salatiga terkategori kurang inovatif, namun tahu 2020 hingga 2023 meningkat terkategori inovatif. Berikut adalah tabel Indeks Inovasi Daerah di Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

***Tabel 2. 22** Indeks Inovasi Daerah di Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023*

Tahun	Indeks Inovasi Daerah			
	Kota Salatiga		Provinsi Jawa Tengah	
2019	380	Kurang Inovatif	22.560	Sangat Inovatif
2020	923	Inovatif	36.357	Sangat Inovatif
2021	46,28	Inovatif	62,57	Sangat Inovatif
2022	47,11	Inovatif	71,32	Sangat Inovatif
2023	44,55	Inovatif	65,40	Sangat Inovatif

Sumber: SK Menteri Dalam Negeri

Selain itu, Inovasi daerah juga merupakan salah satu pilar dalam menentukan Indeks daya saing daerah (IDSD). Indeks ini merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Tahapan pencapaian kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan daerah perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan daya saing daerah. Pembentuk daya saing daerah dapat dihitung dari empat aspek yaitu Faktor Penguat/ Enabling Environment, Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Pasar dan Faktor Ekosistem Inovasi.

Aspek Ekosistem Inovasi pada tahun 2023 adalah sebesar 3,781, yang ditunjukkan dengan tiga pilar pendukung sebagaimana tabel di bawah ini :

***Tabel 2. 23** Tiga Pilar Pendukung pada Aspek Ekosistem Inovasi Kota Salatiga Tahun 2023*

Pilar Aspek Ekosistem Inovasi	Skor
Dinamika Bisnis	3,333
Kapasitas Inovasi	4,011
Kesiapan Teknologi	4,000
Rata-rata	**3,781**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pengembangan ekosistem inovasi saat ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing serta pelayanan umum kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan. Kemampuan inovasi bertumpu pada lembaga penelitian dan pengembangan untuk menyokong ekosistem inovasi. Berdasarkan aspek ekosistem inovasi tersebut maka dibagi kedalam beberapa pilar, yaitu :

a. Pilar Dinamika Bisnis

Dalam pengembangan ekosistem inovasi memiliki sarana seperti : Krenova, dan SIDa, berkaitan dengan tujuan menciptakan iklim daerah yang kondusif. Pengembangan SIDa diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2019.

b. Pilar Kapasitas Inovasi

Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam meningkatkan kapasitas inovasi adalah dengan pendekatan kapasitas inovasi kepemimpinan, kapasitas inovasi pelaksana yang berkualitas, kapasitas struktur inovasi dan kapasitas jaringan pendukung inovasi.

c. Pilar Kesiapan Teknologi

Implementasi tata kelola *e-government* di Pemerintah Kota Salatiga memungkinkan terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan perencanaannya. Kesenjangan itu menjadi hambatan dalam mewujudkan kesempurnaan tata kelola *e-government*. Dikarenakan adanya ketidakselarasan dalam penyusunan *e-government* dan koordinasi antar perangkat daerah pengampu *e-government.* Oleh karena itu dilakukan tata kelola yang terstruktur dengan baik mulai dari perencanaan sampai penerapannya oleh dinas terkait. Disamping itu melakukan penerapan IPTEK dan inovasi daerah juga meningkatkan kerja sama dengan lembaga kelitbangan dan Perguruan Tinggi khususnya di bidang kelitbangan.

2.4.4 Indeks Survey Penilaian Integritas Tahun 2023

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). SPI berusaha mengukur penilaian persepsi dan pengalaman sebagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yang terbagi menjadi dua penilaian yaitu penilaian internal dengan responden adalah pegawai pada instansi tersebut dan penilaian eksternal dengan responden adalah pengguna layanan/mitra kerja sama.

SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan Lembaga (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manuisa(SDM), *trading in influence* (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi. *(Buku Panduan pelaksanaan SPI KPK, 2023)*

Survei penilaian integritas (SPI) yang dilakukan KPK terhadap 94 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 510 pemerintah kabupaten/kota. Survei dilakukan pada Juli-September 2023 terhadap 553.321 responden dengan kombinasi metode online dan *computer assisted personal interview*. Pada tahun 2023 Survey Penilaian Integritas (SPI) untuk Kota Salatiga menurun sebesar 0,68 angka dari sebelumnya 73,30 menjadi 72,62.

Indeks SPI 2023

Jawa Tengah	78,17	77,91

Kab/Kota	2022	2023
Cilacap	76,06	75,53
Banyumas	80,33	79,68
Purbalingga	75,41	69,91
Banjarnegara	74,21	73,93
Kebumen	74,80	78,19
Purworejo	77,97	74,98
Wonosobo	74,79	73,65
Magelang	76,47	75,75
Boyolali	88,32	88,32
Klaten	75,91	78,84
Sukoharjo	79,80	77,39
Wonogiri	80,84	81,20
Karanganyar	78,00	79,09
Sragen	80,06	80,79

Kab/Kota	2022	2023
Grobogan	73,37	77,12
Blora	72,46	77,61
Rembang	77,13	75,32
Pati	78,25	80,75
Kudus	75,20	75,78
Jepara	72,82	76,20
Demak	74,56	71,94
Semarang	77,96	72,76
Temanggung	77,37	76,09
Kendal	71,41	77,04
Batang	74,50	80,88
Pekalongan	75,10	78,08
Pemalang	66,95	68,34
Tegal	75,10	75,99
Brebes	72,27	72,00
Kota Magelang	80,00	80,71
Kota Surakarta	81,99	83,75
Kota Salatiga	73,30	72,62
Kota Semarang	74,10	74,80
Kota Pekalongan	78,17	80,79
Kota Tegal	74,23	74,76

Gambar 2. 26. *Indeks Survey Penilaian Integritas Tahun 2023*

2.4.5 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Berdasarkan KepmenpanRB, menunjukan bahwa IPP Nasional cenderung meningkat dari tahun 2018-2022. Namun, sempat mengalami penurunan dari tahun 2020 (3,84) menjadi 3,79 di tahun 2021. Nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Nasional pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,87 dimana sebelumnya 3,79 (2021). Berikut adalah grafik perkembangan IPP Nasional.

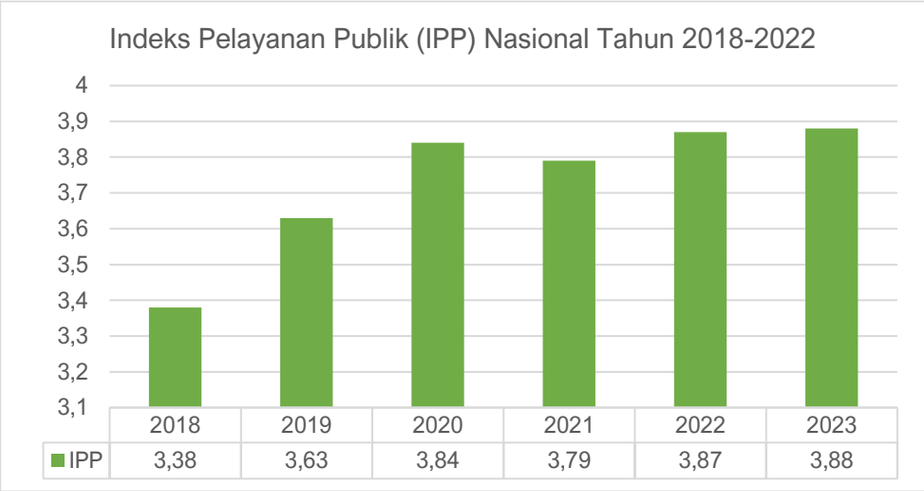

Grafik 2. 40 *Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Nasional tahun 2018-2023*
Sumber: KemenPANRB, 2018-2023

Indeks Pelayanan Publik Kota Salatiga memilik dua indeks, yaitu IPP yang dievaluasi oleh Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB). Adapun IPP Kota Salatiga yang dievaluasi Ombudsman pada tahun 2022 mencapai nilai 90,09 yang termasuk zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi dengan kategori A yang merupakan opini kualitas tertinggi. IPP tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 41 *Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kota Salatiga Tahun 2016-2022*
Sumber: Ombudsman, 2016-2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Adapun pengukuran IPP berdasarkan PANRB menggunakan sampel perangkat daerah. Tahun 2018 dan 2019 terdapat tiga perangkat daerah yang dijadikan sampel, yakni DPMPTSP, DISDUKCAPIL, dan RSUD Salatiga. Tahun 2020-2022 hanya dua perangkat daerah yang dijadikan sampel, yaitu DPMPTSP dan DISDUKCAPIL. IPP Kota Salatiga tahun 2018-2022 dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut.

Tabel 2. 24 *Indeks Pelayanan Publik Kota Salatiga Tahun 2018-2022 berdasarkan KEMENPANRB*

UPP	2018	Kategori	2019	Kategori	2020	Kategori	2021	Kategori	2022	Kategori
DPMPTSP	3.90	B (Baik)	4.3	A- (Sangat Baik)	4.4	A- (Sangat Baik)	4.51	A (Pelayanan Prima)	4.56	A (Pelayanan Prima)
DISDUKCAPIL	3.85	B (Baik)	3.58	B (Baik)	4.1	A- (Sangat Baik)	4.29	A- (Sangat Baik)	4.30	A- (Sangat Baik)
RSUD SALATIGA	3.96	B (Baik)	4.14	A- (Sangat Baik)						

Sumber: KEMENPANRB, 2016-2022

2.4.6 Jumlah Kejadian Konflik SARA

Kejadian konflik SARA merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan tata kelola pemerintahan terutama pada urusan ketentrataman dan ketertiban umum. Jumlah Konflik SARA adalah konflik yang menimbulkan perpecahan dikarenakan perbedaan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan dianggap melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. Jumlah Konflik SARA yang dilaporkan adalah konflik SARA yang dilaporkan dari masyarakat ke Kesbangpol atau APH. Berdasarkan laporan Badan Kesbangpol yang melaksanakan fungsi pemerintahan umum, pada tahun 2023, Kota Salatiga tidak ada kejadian Konflik SARA. (Bakebangpol, 2023).

2.4.7 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas (*https://irh.kemenkumham.go.id*).

Indeks Reformasi Hukum juga merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu :

1. Memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu;
3. Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundangundangan;
4. Meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan. Penilaian IRH dilakukan satu kali dalam setahun yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *(https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/irham/IRH-PUU-KSDAE2023.pdf)*

Pada tahun 2023, nilai Indeks Reformasi Hukum Kota Salatiga adalah 76,35 dengan nilai tiap variabel, sebagai berikut :

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi dengan nilai 12,7
2. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundangundangan (legal drafter) pusat yang berkualitas dengan nilai 22,2
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu dengan nilai 30,2
4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan dengan nilai 11,25

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Hasil telaah dokumen evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Kota Salatiga periode 2005-2025 menunjukan capaian yang masih bersifat kualitatif, artinya yakni belum adanya indikator beserta target secara kuantitatif yang diturunkan dari sasaran pokok. Berdasarkan penelaahan dan evaluasi dari RPJPD Kota Salatiga 2005-2025, terdapat beberapa isu dan permasalahan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam perumusan perencanaan Pembangunan Kota Salatiga dalam RPJPD 2025-2045. Dokumen RPJPD tahun 2005-2025 tersebut dijabarkan pada 4 tahap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Tahapan tersebut adalah 2005-2010 (Tahap I), 2010-2014 (Tahap II), 2015-2020 (Tahap IV) dan 2021-2025 (Tahap IV).

Berdasarkan dokumen evaluasi menunjukkan hasil perhitungan terhadap hasil evaluasi yang didapatkan kondisi sebagai berikut:

1. Terdapat 63 indikator sasaran pokok dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yang merupakan hasil kesepakatan bersama.
2. Dari 63 indikator tersebut terdapat 45 indikator berstatus positif (71,43%), 10 indikator bestatus negatif (15,87%), 7 indikator berstatus tetap (11,11%), 1 indikator berstatus NA (1,59%).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 25 *Capaian RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 per Unsur Visi, Misi dan Sasaran Pokok*

Unsur visi	Misi	Sasaran Pokok	Jumlah Indikator	Status Indikator			
				Positif	Negatif	tetap	TAD
Maju	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	Terwujudnya SDM yang berkualitas	16	11	3	2	0
	Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	16	13	3	0	0
	Kinerja Visi Maju		**32 (100%)**	**24 (75%)**	**6 (18,75%)**	**2 (6,25%)**	**0 (0%)**
Demokratis	Mewujudkan tata kelola pemerintahanyang baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahanyang baik	8	7	0	0	1
	Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum	6	2	0	4	0
	Kinerja Visi Demokratis		**14 (100%)**	**9 (64,29%)**	**0 (0%)**	**4 (28,57%)**	**1 (7,14%)**
Nyaman	Mewujudkan pembangunankota yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya penataan pembangunanyang berwawasan lingkungan	8	6	2	0	0
	Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai	Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai	9	6	2	1	0
	Kinerja Visi Nyaman		**17 (100%)**	**12 (70,59%)**	**4 (23,53%)**	**1 (5,88%)**	**0 (0%)**
	Kinerja RPJPD Kota Salatiga		**63 (100%)**	**45 (71,43%)**	**10 (15,87%)**	**7 (11,11%)**	**1 (1,59%)**

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJD Kota Salatiga 2005-2025

2.5.1 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator kinerja makro merupakan ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja ekonomi suatu wilayah. Indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan, stabilitas, dan perkembangan ekonomi. Berikut ini disampaikan capaian kinerja indikator makro pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025 Kota Salatiga.

Capaian indikator kinerja makro RPJPD tahun 2005-2025 terdiri dari 7 indikator yang menunjukan hasil capaian baik atau menunjukkan kondisi positif. Namun, terdapat 1 indikator yang kinerjanya kurang baik, yaitu indeks gini. Adapun nilai indeks gini tersebut menunjukkan tren negatif karena angkanya semakin naik. Capaian kinerja indikator makro dapat dilihat pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 26 *Evaluasi Capaian Kinerja indikator Makro*

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan	Pertumbuhan/ Penurunan(%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,35	84,99	8,47
2	Angka Kemiskinan	8,81	4,66	47,10
3	Angka Pengangguran	11,35	4,57	59,73
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,15	5,34	43
5	Pendapatan Perkapita	6.675.619,53	78.990.000	91,55
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Indeks)	0,29	0,417	-43,79
7	PDRB Per Kapita (ADHB)	6.577	84.321	1.182,1

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJD Kota Salatiga 2005-2025

Keterangan:
*capaian kinerja awal IPM menggunakan data tahun 2010
*capaian angka pengangguran 2005 memakai data tahun 2007
*capaian ketimpangan pendapatan tahun berjalan menggunakan capaian provinsi

2.5.1.1 IPM

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Salatiga selama periode RPJPD 2005-2025 selalu mengalami kenaikan. Meski pada tahun 2010-2023 terjadi perubahan dalam metode perhitungan. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Posisi IPM Kota Salatiga memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan, jika pada tahun 2010 IPM Kota Salatiga berada pada posisi 78,35, maka pada tahun 2023 posisi IPM Kota Salatiga berada di angka 84,99 atau terjadi pertumbuhan sebesar 6,64 dalam kurun 13 tahun. Capaian IPM Kota Salatiga berkontribusi positif terhadap kondisi IPM Jawa Tengah dan Nasional, adapun faktor yang pendorong tercapainya pertumbuhan IPM Kota Salatiga yaitu:

a. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga yang selalu meningkat;
b. Harapan Lama sekolah Kota Salatiga yang juga mengalami pertumbuhan positif, dalam kurun 5 tahun terakhir angka Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga selalu diatas Provinsi Jawa Tengah;
c. Rata-rata Lama sekolah Kota Salatiga juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, sama seperti HLS, RLS Kota Salatiga juga berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah;
d. Pengeluaran rill perkapita Kota Salatiga juga mengalami kenaikan setiap tahunya, pengeluaran riil perkapita Kota Salatiga juga dalam 5 tahun terakhir berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah.

Untuk melihat pertumbuhan IPM Kota Salatiga kurun waktu tahun 2005-2023, dapat dilihat melalui grafik berikut ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

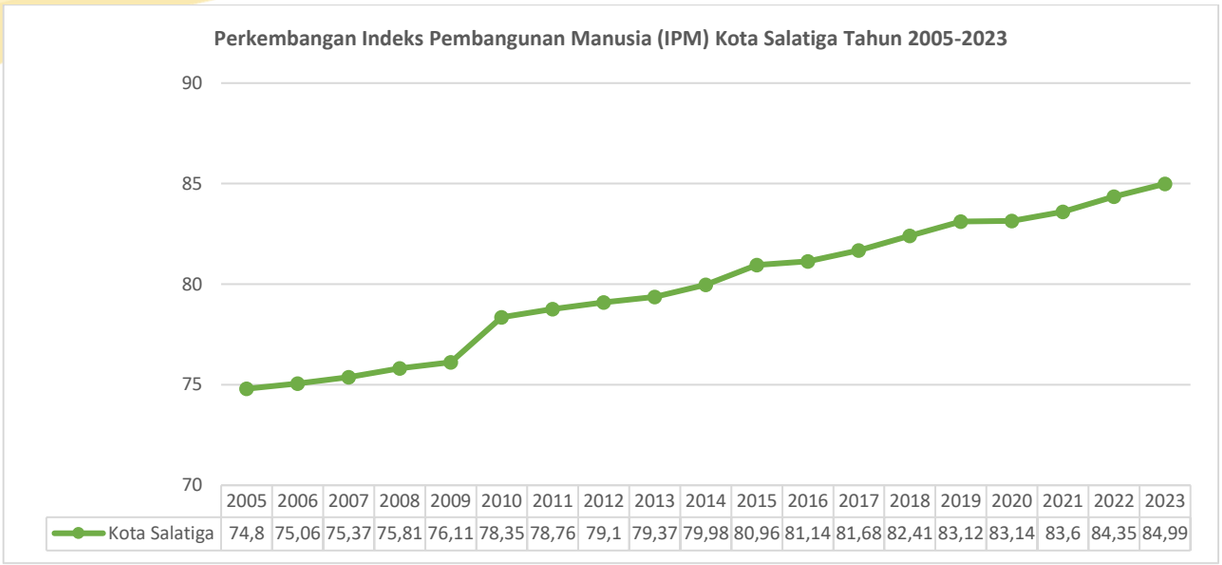

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	74,8	75,06	75,37	75,81	76,11	78,35	78,76	79,1	79,37	79,98	80,96	81,14	81,68	82,41	83,12	83,14	83,6	84,35	84,99

Grafik 2. 42 *Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Salatiga Tahun 2005-2023*
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005-2023

2.5.1.2 Angka Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin (P0) di Kota Salatiga tahun 2005-2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun awal perencanaan RPJPD yaitu tahun 2005 angka kemiskinan kota Salatiga berada di angka 8,81 sementara pada tahun 2023 angka kemisikinan Kota Salatiga berada pada angka 4,66. Walaupun menurun, akan tetapi rata-rata penurunan per tahun masih 0,24% dan tidak pernah mengalami penurunan 1%. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab permasalahan kemiskinan perlu mendapat perhatian pada periode perencanaan di masa mendatang.Untuk lebih lengkapnya, kondisi kemiskinan Kota Salatiga tahun 2005-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

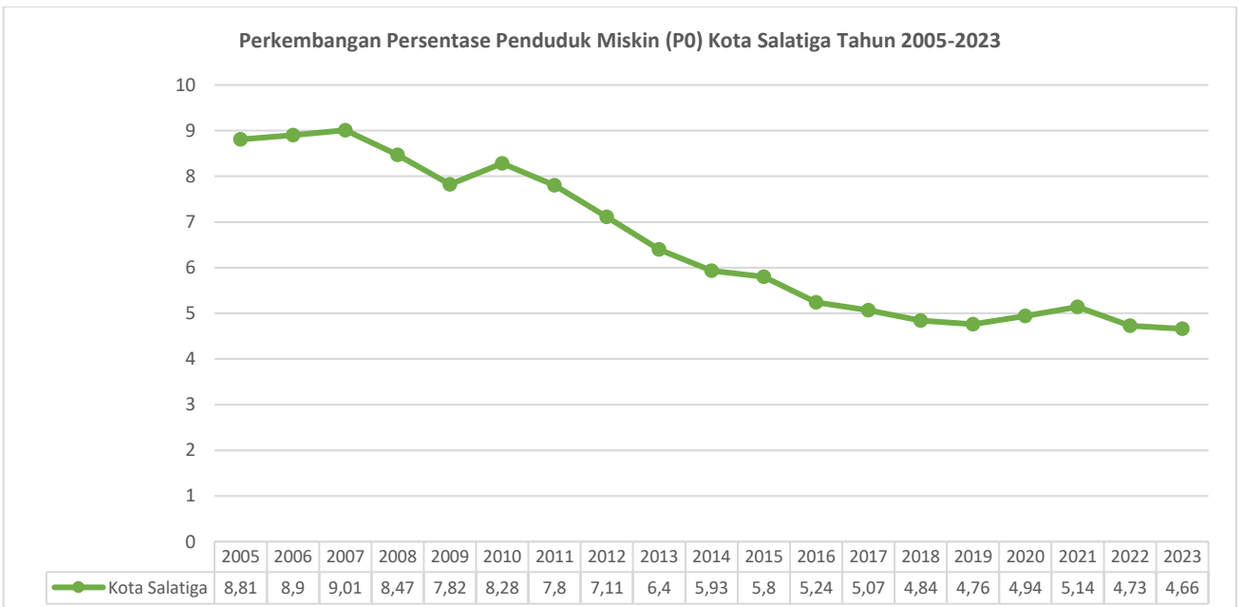

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	8,81	8,9	9,01	8,47	7,82	8,28	7,8	7,11	6,4	5,93	5,8	5,24	5,07	4,84	4,76	4,94	5,14	4,73	4,66

Grafik 2. 43 *Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Kota Salatiga tahun 2005-2023*
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005-2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Salatiga selama kurun waktu 2005-2023 juga mengalami tren penurunan, Jika pada tahun 2005 angka pengangguran berada di angka 11,35 maka pada tahun 2023 angka pengangguran di Kota Salatiga berada di angka 4,57. Secara keseluruhan terjadi penurunan angka pengangguran selama kurun waktu 2005-2023 yaitu sebesar 6,78. TPT Kota Salatiga tahun 2020 sebesar 7,44% mengalami kenaikan dari 3,01% dari tahun 2019 sebesar 4,33%. Kenaikan yang signifikan disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang berakibat pelemahan ekonomi di berbagai sektor yang secara langsung berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Untuk lebih lengkapnya trend perkembangan penurunan angka pengangguran Kota Salatiga dapat dilihat pada grafik berikut ini.

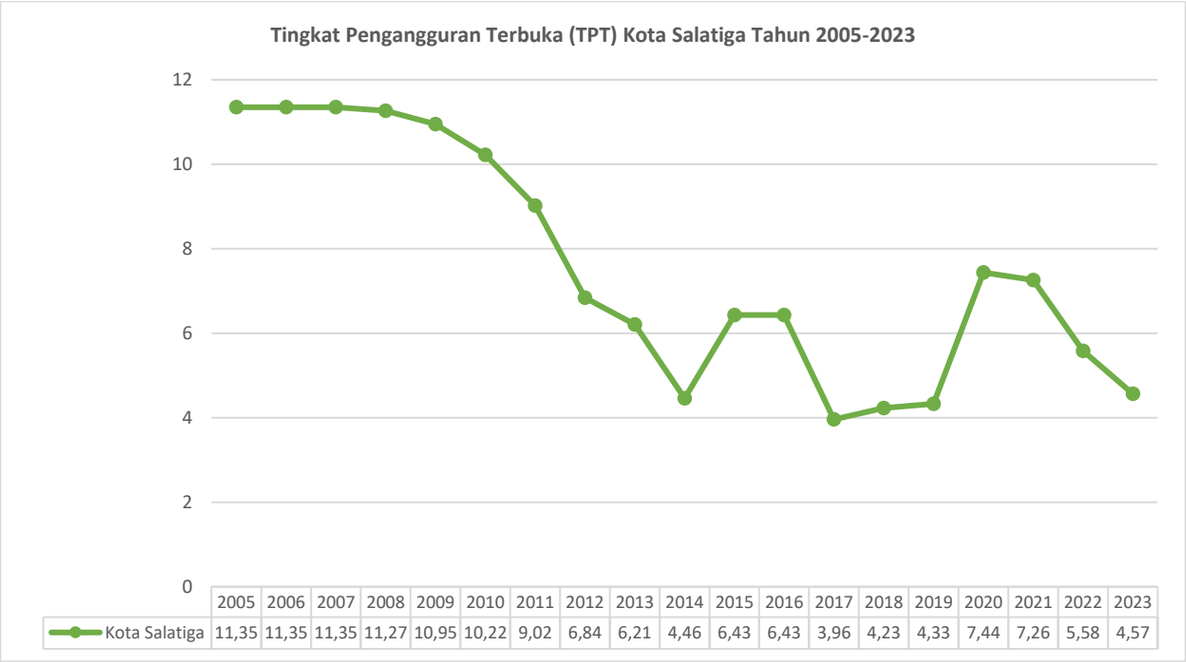

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	11,35	11,35	11,35	11,27	10,95	10,22	9,02	6,84	6,21	4,46	6,43	6,43	3,96	4,23	4,33	7,44	7,26	5,58	4,57

Grafik 2. 44 *Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2005-2023*
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005-2023

2.5.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga selama kurun waktu 2005-2023 memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga berada pada angka 4,15, sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dapat dikatakan mengalami perkembangan positif, terakhir pada tahun 2019 berada di angka 5,90, namun pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 saat itu pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga berada di angka -1,68, hingga bisa pulih kembali pada tahun 2023 menjadi 5,34. Untuk lebih lengkapnya pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dapat dilihat pada grafik berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

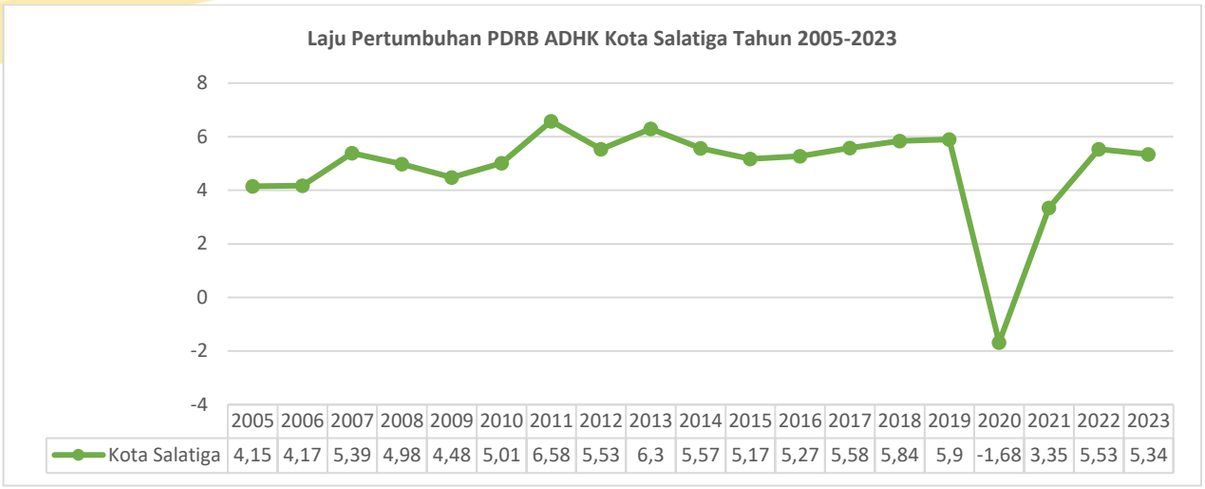

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	4,15	4,17	5,39	4,98	4,48	5,01	6,58	5,53	6,3	5,57	5,17	5,27	5,58	5,84	5,9	-1,68	3,35	5,53	5,34

Grafik 2. 45 *Pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga Tahun 2005-2022*

2.5.1.5 Ketimpangan Pendapatan

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Rasio Gini atau Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin tinggi, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah, atau mendekati pemerataan sempurna. Tingkat ketimpangan pada Indeks Gini dikategorikan menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang (0,3 < Indeks Gini < 0,4) dan tinggi (Indeks Gini > 0,4).

Gini Ratio Kota Salatiga pada tahun 2005 berada di angka 0,29 dan pada tahun 2015-2019 gini ratio seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada angka gini ratio yang diterbitkan oleh provinsi. Pada tahun 2023 angka gini ratio Kota Salatiga adalah sebesar 0,417. Berdasarkan kategori Indeks Gini, Kota Salatiga masih berada pada tingkat ketimpangan yang tinggi yang berarti tingkat kesejahteraan penduduk masih belum merata. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

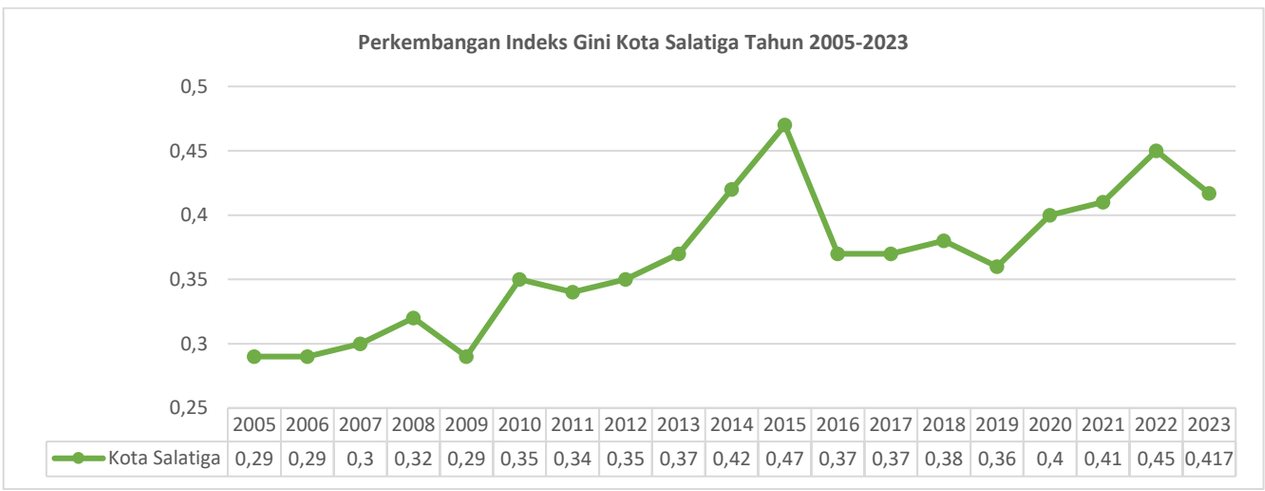

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	0,29	0,29	0,3	0,32	0,29	0,35	0,34	0,35	0,37	0,42	0,47	0,37	0,37	0,38	0,36	0,4	0,41	0,45	0,417

Grafik 2. 46 *Perkembangan Indeks Gini Kota Salatiga Tahun 2005-2023*
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2010-2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.5.1.6 PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Perkembangan PDRB per kapita ADHB Kota Salatiga kurun waktu 2005-2023 mengalami trend perkembangan yang cukup signifikan, jika pada tahun 2005 PDRB perkapita ADHB kota Salatiga berada di angka 6.577 pada tahun 2023 PDRB ADHB Kota Salatiga berada di angka 84.321, atau terjadi pertumbuhan sebesar 91,10. Untuk lebih lengkapnya pertumbuhan PDRB per kapita ADHB Kota Salatiga tahun 2005-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

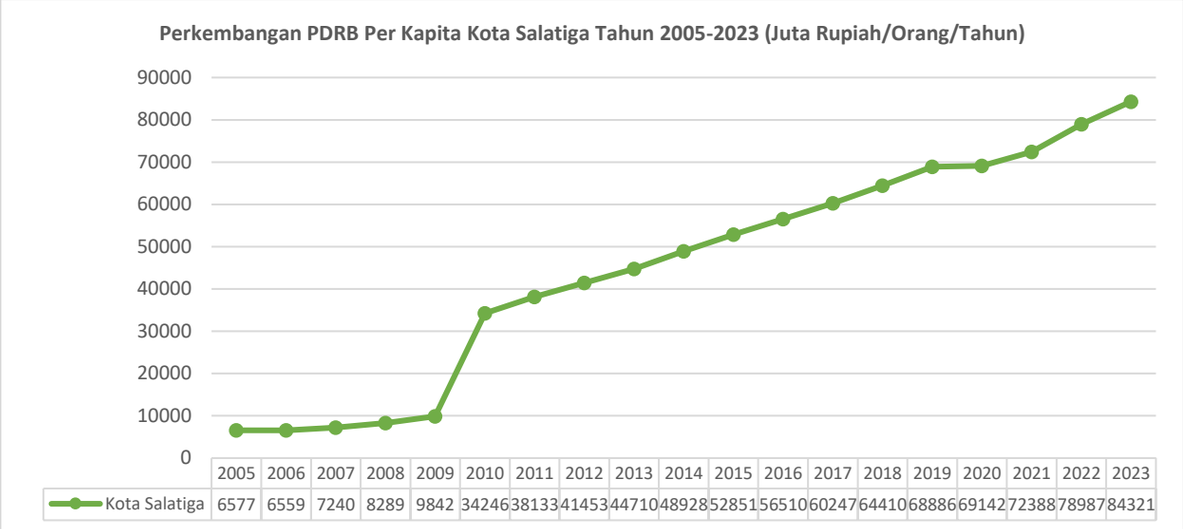

Grafik 2. 47 *Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB Kota Salatiga Tahun 2005-2023*
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005-2023

2.5.2 Evaluasi Misi RPJPD 2005-2025

Misi 1: Mewujudkan Peningkatan Kualitas SDM

Sasaran pokok dari misi ini adalah Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat. Fokus pencapaian sasaran pokok ini dapat dilihat dari berbagai kondisi sebagai berikut.

Tabel 2. 27 *Evaluasi Pencapaian Misi 1 RPJPD 2005-2025 Kota Salatiga*

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Tren	Keterangan
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berorientasi Iptek.	IPM	83,69	Meningkat	Positif
Meningkatnya pribadi dan karakter masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beriman bertaqwa dan berbudi luhur.	Indeks Kriminalitas	0,03	Menurun	Positif
Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.	rasio sekolah terhadap murid TK/RA	0.02	tetap	tetap
	rasio sekolah terhadap murid SD/MI	0,005	Menurun	Positif
	rasio sekolah terhadap murid SMP/MTs	0,003	Tetap	Tetap
	persentase ruang	80,17	Menurun	Negatif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Tren	Keterangan
	kelas TK/RA kondisi baik			
	persentase ruang kelas SD/MI kondisi baik	88,4	Meningkat	Positif
	persentase ruang kelas SMP/MTs Kondisi baik	98,62	meningkat	positif
Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.	persentase guru layak mengajar PAUD	86,72	meningkat	positif
	persentase guru layak mengajar SD/MI	97,39	meningkat	positif
	persentase guru layak mengajar SMP/MTs	97,63	meningkat	positif
	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	89,61	meningkat	positif
	Angka Partisipasi Murni Sekolah SD/MI	99,12	meningkat	positif
	Angka Partisiapsi Sekolah SMP/MTs	95,49	meningkat	positif
Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan	Prosentase lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi	32,10	meningkat	positif
	Prosentase PKBM yang terakreditasi	69,45	meningkat	positif

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJD Kota Salatiga 2005-2025

Indikator yang akan digunakan untuk mewujud misi ini adalah adanya peningkatan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan, peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, berkembangnya seni budaya dan prestasi olah raga, meningkatnya kualitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi, meningkatnya kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga, meningkatnya kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga kerja, terciptanya lapangan kerja baru dan perluasan lapangan kerja dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Disamping penguasaan seperti tersebut diatas, pembangunan SDM Kota Salatiga juga diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius berdasar agama yang dianutnya, bermoral, beretika dan berbudaya ditandai dengan semakin meningkatnya toleransi, solidaritas, rasa kebangsaan, beretika, bermoral, santun dan beradab dalam kehidupan sosial politik yang berbudaya, berwawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi pertama RPJPD 2005-2025 ini adalah salah satu upaya mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang tinggi. Beberapa unsur pembentuk daya saing SDM adalah Indeks Pendidikan, Angka Literasi/Numerisasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Masyarakat Digital, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Ketergantungan Penduduk. Dari keenam unsur pembentuk daya saing SDM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tersebut, berdasarkan data tahun 2017-2022, hanya angka ketergantungan yang menunjukkan kondisi yang kurang baik.

Angka ketergantungan Kota Salatiga pada tahun 2017-2022 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Pada periode tahun 2017-2020, angka ketergantungan Kota Salatiga stabil berada di angka 40. Kemudian nilai sempat turun pada tahun 2021 menjadi 39,34. Angka ketergantungan kembali mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya menjadi 42,34 yang artinya pada tahun 2022 sebanyak 100 penduduk usia produktif harus menanggung 43 penduduk usia tidak produktif. Apabila dibandingkan dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2022 angka ketergantungan Kota Salatiga berada di peringkat pertama, dengan angka ketergantungan sebesar 42,34. Angka Ketergantungan ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut Kota Salatiga telah mendapatkan bonus demografi, yang artinya ke depan akan menjadi tantangan perencanaan pembangungan.

Misi 2: Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada misi kedua adalah terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Untuk menggambarkan kinerja sasaran pokok ini ada beberapa fokus pembangunan yang dapat dilihat dari berbagai kondisi sebagai berikut.

Tabel 2. 28 *Evaluasi Pencapaian Misi 2 RPJPD 2005-2025 Kota Salatiga*

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Tren	Keterangan
Meningkatnya PDRB Kota, kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif.	pertumbuhan ekonomi	5,53	Meningkat	Positif
	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	84,55	Meningkat	Positif
	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	0,3	Meningkat	Negatif
	Kenaikan Nilai Investasi	-83,52	Meningkat	Positif
Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat	PDRB per kapita (ribu rp)	53.140	Meningkat	Positif
Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	9,98	Meningkat	Positif
Meningkatnya perkembangan perindustrian, perdagangan, pariwisata, agrobisnis serta jasa dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing global serta menjadi motor penggerak	Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	9,88	Meningkat	Positif
	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	8,19	Meningkat	Negatif
	Peningkatan kontribusi	8,16	Meningkat	Negatif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Tren	Keterangan
perekonomian.	sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB			
	Peningkatan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	19,26	Meningkat	Positif
Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan	Produktivitas tanaman pangan utama			
	- Padi (ton/ha)	6,18	Meningkat	Positif
	- Jagung (ton/ha)	7,4	Meningkat	Positif
	Produksi perikanan budidaya (ton)	717,381	Meningkat	Positif
	Produksi Daging Sapi Potong (kg)	1.701.880	Meningkat	Positif
	NTP	NA	Meningkat	Positif
	Skor PPH Ketersediaan	95,51	Meningkat	Positif

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJD Kota Salatiga 2005-2025

Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran pokok dari misi ketiga dalam RPJPD Kota Salatiga adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam sasaran pokok ini ada beberapa fokus yang dapat dijadikan ukuran fokus pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 29 *Evaluasi Pencapaian Misi 3 RPJPD 2005-2025 Kota Salatiga*

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Tren	Keterangan
Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik.	Partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pilkada Walikota, Pilkada Gubernur, Pemilu Legislatif, Pemilu Pilpres)	NA	Meningkat	Positif
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha	nilai IKM	84,95	Meningkat	Positif
Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	Indeks Profesionalitas ASN	54,74	Meningkat	Positif
Meningkatnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel	Opini BPK	WTP	Meningkat	Positif
	Skor LAKIP/ LKjIP	63,35	Meningkat	Positif
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya dan organisasi yang efektif dan efisien	Skor maturitas kelembagaan	NA	-	-
Meningkatnya peran kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.	Persentase PKK Aktif	100	Meningkat	Positif
	Persentase Posyandu Aktif	100	Meningkat	Positif

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJD Kota Salatiga 2005-2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Misi 4: Mewujudkan Demokrasi Berdasarkan Hukum

Sasaran pokok dari misi ini adalah terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum. Uraian terhadap kinerja sasaran pokok ini disajikan dalam bebrapa fokus sebagai berikut.

Tabel 2. 30 *Evaluasi Pencapaian Misi 4 RPJPD 2005-2025 Kota Salatiga*

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Tren	Keterangan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang selalu mendasarkan diri pada ketentuan perundangan yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan	Nilai LPPD	3,44	Meningkat	Positif
Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia	Persentase penegakan Perda/Perkada	100	tetap	tetap
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik	Persentase Perda yang melalui proses konsultasi publik	100	tetap	tetap
Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang	100	tetap	tetap
Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik	Indeks Demokrasi	NA	Meningkat	Positif
Meningkatnya sikap dan perilaku, toleransi , solidaritas antar agama, antar suku, ras, budaya, kepercayaan, meningkatnya keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat dengan segala macam perbedaan yang ada	Angka konflik sosial	0	tetap	tetap

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJD Kota Salatiga 2005-2025

Misi 5: Mewujudkan Pembangunan Kota Yang Berwawasan Lingkungan

Sasaran pokok dari misi kelima RPJPD Kota Salatiga adalah terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Terdapat beberapa fokus dengan indikator yang disepakati paling mendekati untuk dijadikan alat ukurnya yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 31 *Evaluasi Pencapaian Misi 5 RPJPD 2005-2025 Kota Salatiga*

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Tren	Keterangan
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,34	Meningkat	Positif
Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran	Indeks pencemaran air/indeks kualitas air	45	Meningkat	Positif
	Indeks pencemaran udara/indeks kualitas udara	84,11	Meningkat	Positif
	Indeks tutupan lahan	47,28	Menurun	Negatif
Meningkatnya kesadaran , sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam	volume sampah (m3)	448,9	Meningkat	Negatif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Tren	Keterangan
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam				
Meningkatnya pelaksanaan pembangunan sesuai tata ruang kota	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	98,7	Meningkat	Positif
Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat	Persentase RTH	16,31	Meningkat	Positif
	Luasan Kawasan Kumuh (%)	1,84	Menurun	Positif

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJD Kota Salatiga 2005-2025

Misi 6: Mewujudkan Fasilitas dan Utilitas Kota yang Berkualitas dan Memadai

Sasaran pokok dari misi keenam RPJPD ini adalah Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai. Dengan uraian capaian kinerjanya tersaji dalam beberapa fokus sebagai berikut.

Tabel 2. 32 *Evaluasi Pencapaian Misi 6 RPJPD 2005-2025 Kota Salatiga*

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Tren	Keterangan
Meningkatnya infrastruktur wilayah sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi	Persentase jalan dalam kondisi baik	99,2	Meningkat	Positif
	Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	60,11	Menurun	Negatif
	Persentase Penduduk Pengguna HP/Telepon	91,09	Meningkat	Positif
Meningkatnya perumahan layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	91,95	Meningkat	Positif
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	85,38	Meningkat	Positif
Meningkatnya keterpenuhan dan pemeratan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah RS	6	Tetap	Tetap
	Jumlah Puskesmas, Pustu, dan Klinik	26	Menurun	Negatif
	Persentase masyarakat memiliki akses air bersih	99,59	Meningkat	Positif
	persentase masyarakat memiliki sanitasi layak	88,19	Meningkat	Positif

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJD Kota Salatiga 2005-2025

2.5.3 Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan perhitungan kinerja pelakasanaan RPJMD selama periode RPJPD Kota Salatiga yang mengacu pada pengisian Form Evaluasi Pelaksanaan RPJPD didapatkan hasil sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 33 *Evaluasi Capaian Kinerja RPJPD Kota Salatiga Berdasarkan Pelaksanaan RPJMD*

Tahap RPJMD	Persentase Rata-Rata Kinerja	Status
2007-2012	Tidak Bisa Dihitung	Tidak Bisa Dihitung
2011-2016	90,28	Tinggi
2017-2022	87,93	Tinggi
2023-2026	Belum Bisa Dihitung	Belum Bisa Dihitung
Rata-Rata Kinerja RPJPD	**89,11**	**Tinggi**

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJD Kota Salatiga 2005-2025

Adapun berdasarkan hasil evaluasi RPJD Kota Salatiga 2005-2025 dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut.

1. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Salatiga tahun 2005-2025 ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045.
2. Pencapaian hasil yang belum optimal pada masing-masing indikator tujuan dan sasaran oleh perangkat daerah pengampu sesuai kewenangan dapat dijadikan catatan pada penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.
3. Dalam penyusunan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 sebaiknya disusun pula indikator beserta target-target kinerja yang ingin diwujudkan dalam periode pembangunan jangka panjang tersebut.
4. Indikator-indikator makro seperti IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, PDRB per kapita sebisa mungkin dijadikan alat ukur/indikator dalam RPJPD periode 2025-2045.
5. Selain indikator-indikator makro di atas, perlu juga disiapkan indikator- indikator sektoral yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam dokumen RPJPD periode 2025-2045.
6. Penetapan sasaran pokok sebaiknya disertai dengan rumusan indikator dan target yang ingin dicapai di tiap-tiap tahapan RPJMD dalam RPJPD supaya dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi bisa telihat realisasi kinerjanya.
7. Rumusan indikator sebaiknya disertai dengan definisi operasional dan rumus penghitungannya untuk mempermudah dalam pelaskanaan evaluasi. Hal tersebut mengingat dalam dokumen RPJPD periode 2005-2025, indikator- indikatoor yang ditetapkan tidak memiliki definisi operasional dan rumus penghitungannya sehingga menjadi kesulitan tersendiri ketika pelaksanaan evaluasi.
8. Kedepan untuk dapat mempertajam dan memperkuat sasaran pokok pada penyusunan dokumen RPJPD tahun 2025-2045 perlu melibatkan peran serta masyarakat, serta stakeholder.
9. Pada perencanaan dan pembangunan pada tahap selanjutnya (baik RPJPD maupun RPJMD) perlu dilakukan dokumentasi atas seluruh capaian indikator dengan baik, baik pencatatan secara bulanan, triwulan, semesteran, maupun tahunan, ataupun melalui mekanisme evaluasi atas pelaksanaan perencanaan Pembangunan yang ada.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sedangkan hasil evaluasi untuk RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 apabila disandingkan dengan Tantangan Indonesia Emas 2045 dan Megatren serta isu strategis RPJPD periode 2025-2045 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 34 *Persandingan Tantangan Indonesia Emas 2045 dan Megatren dengan Isu Strategis RPJPD 2025-2045 dan Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025*

8 Tantangan Indonesia Emas 2045 dan Megatren	Isu Strategis RPJPD 2025-2045	Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
1. Pembangunan SDM	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul	Indikator-indikator makro seperti IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, PDRB per kapita sebisa mungkin dijadikan alat ukur/indikator dalam RPJPD periode 2005-2045
2. Penyederhanaan Regulasi dan Penyederhanaan Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Adaptif	Seluruh Rekomendasi Evaluasi RPJPD 2005-2025 masih bersifat makro dan disusun sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
3. Transformasi Ekonomi	Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	
4. Tantangan Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Konektivitas dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Tantangan Perubahan Iklim	
5. Perkembangan Demografi	✓ Bonus Demografi ✓ Kesejahteraan yang Adil dan Merata	
6. Tekanan dari Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Tantangan Perubahan Iklim	
7. Perkembangan Teknologi yang Pesat	✓ Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Tantangan Perubahan Iklim ✓ Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Adaptif	
8. Pergeseran Kekuasaan Global	✓ Kesejahteraan yang Adil dan Merata ✓ Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Adaptif	

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Kependudukan

1. Proyeksi Jumlah Total Penduduk

Proses pembangunan yang berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan, maka pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (*people-centered development*),

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan ketentraman lahir dan batin penduduk itu sendiri.

Jumlah penduduk merupakan data dan informasi yang utama dalam perencanaan pembangunan. Data jumlah penduduk dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja pembangunan dan acuan dalam pembangunan di masa yang akan datang. Data tersebut dapat memperkirakan kebutuhan fasilitas maupun sarana prasarana, serta dapat menjadi acuan dalam membuat strategi kebijakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Salatiga 2023-2045 perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan dalam bagian ini menggunakan perangkat lunak Spectrum 5 dengan modul Demographic Projection (DemProj). Dalam melakukan proyeksi tersebut ada beberapa kondisi ideal yang diharapkan. Adapun indikator yang digunakan berupa indikator demografis seperti asumsi kelahiran, asumsi kematian dan migrasi. Beberapa aspek yang mendukung terhadap pencapaian kondisi ideal yang meliputi target terhadap *Total Fertility Rate* (TFR), PUS menggunakan kontrasepsi CPR, Angka Kelahiran Kasar (CBR), Angka Kematian Kasar (CDR), Angka Kematian Bayi (IMR) dan Angka harapan hidup. Sehingga proyeksi pertumbuhan penduduk atas dasar daya dukung yang tersedia akan memberikan gambaran penduduk ideal ditahun 2045.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kota Salatiga dapat diperkirakan bahwa pada akhir periode RPJPD (2045) jumlah penduduk Kota Salatiga adalah sebesar 211.210 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,43%. Kecamatan Sidorejo diperkirakan akan memiliki jumlah penduduk tertinggi pada akhir periode RPJPD (2045) di Kota Salatiga, yakni sebesar 54.842 jiwa. Pencapaian proyeksi tersebut dengan didukung kondisi ideal ditahun 2045 pada TFR sebesar 1,44, PUS menggunakan kontrasepsi CPR sebesar 89,16%, CBR sebesar 9,01, CDR sebesar 4,91 per 1000 KH dan angka kematian anak sebesar 3,85 per 1000 KH. Berikut tabel proyeksi penduduk di Kota Salatiga.

Tabel 2. 35 *Proyeksi Penduduk Kota Salatiga Tahun 2025-2045*

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Argomulyo	52.045	51.519	51.744	52.565	53.388	54.213
2	Tingkir	48.106	47.698	47.531	47.915	48.299	48.685
3	Sidomukti	46.125	46.987	48.211	49.966	51.719	53.470
4	Sidorejo	55.093	55.010	54.493	54.610	54.726	54.842
Kota Salatiga		**201.369**	**201.214**	**201.979**	**205.056**	**208.132**	**211.210**

Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga 2023-2045

Kondisi jumlah penduduk Kota Salatiga tahun 2025-2045 menunjukkan kondisi yang terus meningkat tiap tahun. Selain itu, Kecamatan Tingkir diperkirakan memiliki jumlah penduduk terkecil pada tahun 2030-2045, sedangkan tahun 2025 jumlah penduduk terkecil diperkirakan berada pada Kecamatan Sidomukti. Kacamtan Sidorejo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

diperkirakan dari tahun 2025-2045 memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kota Salatiga. Perkiraan perkembangan jumlah penduduk yang paling drastis dapat terlihat pada grafik, yaitu pada Kecamatan Sidomukti. Berikut adalah grafik perkembangan proyeksi penduduk tahun 2025-2045.

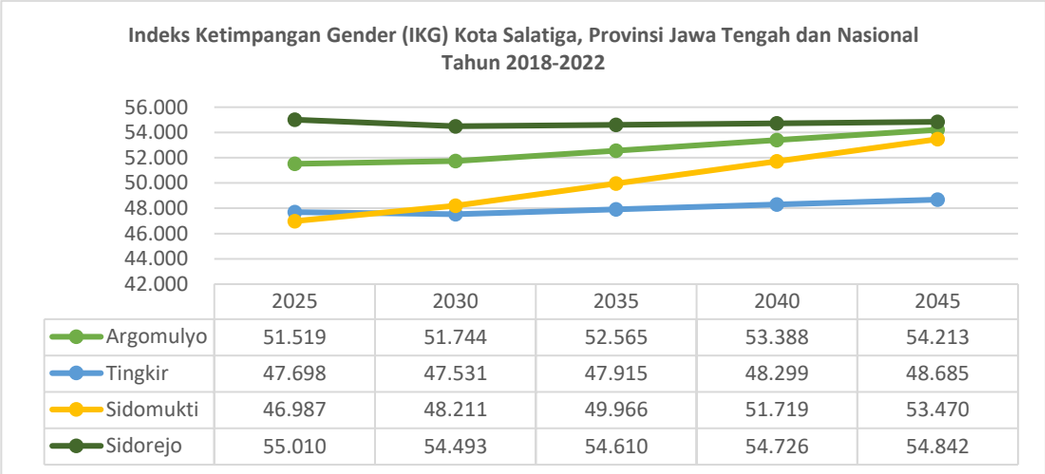

	2025	2030	2035	2040	2045
Argomulyo	51.519	51.744	52.565	53.388	54.213
Tingkir	47.698	47.531	47.915	48.299	48.685
Sidomukti	46.987	48.211	49.966	51.719	53.470
Sidorejo	55.010	54.493	54.610	54.726	54.842

Grafik 2. 48 *Perkembangan Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045*
Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

2. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kota Salatiga berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk Perempuan diperkirakan akan lebih besar dibanding jumlah penduduk laki-laki dari tahun 2025-2045 dengan kondisi tren yang terus meningkat untuk jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di Kota Salatiga pada akhir peridoe RPJPD (2045) diperkirakan sebesar 104.704 jiwa dan penduduk Perempuan sebesar 106.506 jiwa. Berikut adalah grafik perkembangan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

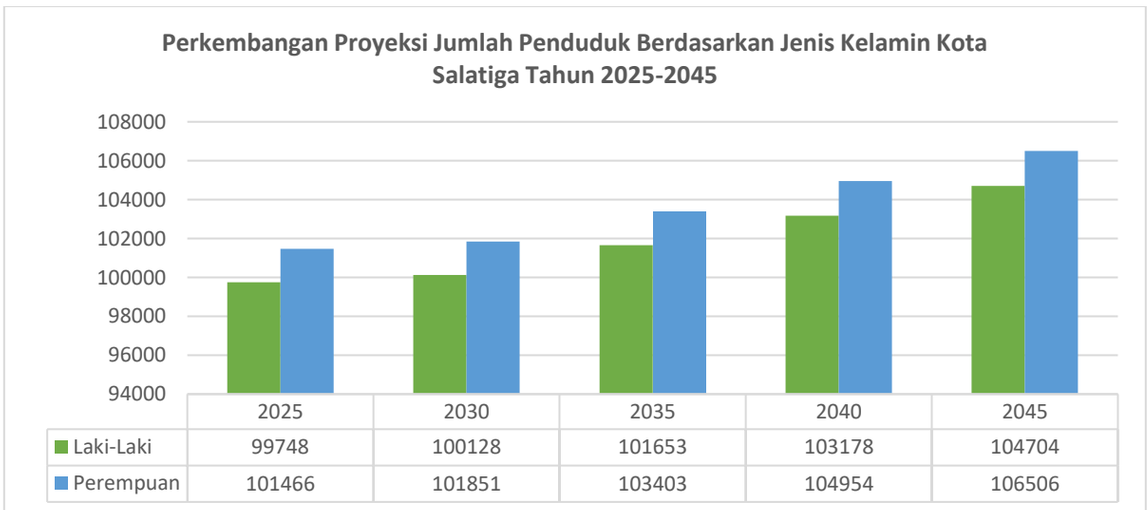

	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	99748	100128	101653	103178	104704
Perempuan	101466	101851	103403	104954	106506

Grafik 2. 49 *Perkembangan Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045*
Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

Adapun proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 36 *Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045*

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)		Proyeksi Penduduk (Jiwa)														
				2025			2030			2035			2040			2045		
		Lk	Pr	L	Pr	Jml	L	Pr	Jml	L	Pr	Jml	L	Pr	Jml	L	Pr	Jml
1.	Argomulyo	26.055	25.990	25.800	25.719	51.519	25.913	25.831	51.744	26.323	26.242	52.565	26.736	26.652	53.388	27.148	27.065	54.213
2.	Tingkir	23.776	24.330	23.516	24.182	47.698	23.433	24.098	47.531	23.624	24.291	47.915	23.813	24.486	48.299	24.002	24.683	48.685
3.	Sidomukti	22.830	23.295	23.255	23.732	46.987	23.861	24.350	48.211	24.727	25.239	49.966	25.594	26.125	51.719	26.462	27.008	53.470
4.	Sidorejo	27.211	27.882	27.177	27.833	55.010	26.921	27.572	54.493	26.979	27.631	54.610	27.035	27.691	54.726	27.092	27.750	54.842
Kota Salatiga		**99.872**	**101.497**	**99.748**	**101.466**	**201.214**	**100.128**	**101.851**	**201.979**	**101.653**	**103.403**	**205.056**	**103.178**	**104.954**	**208.132**	**104.704**	**106.506**	**211.210**

Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga 2023-2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Proporsi penduduk usia 0-14 Kota Salatiga diproyeksikan mengalami peningkatkan dari tahun 2025-2045, yakni dari 22,01% menjadi 22,49% tahun 2045. Tren peningkatan juga terdapat pada penduduk usia 65-75+ dari 8,37% menjadi 9,77%. Berdasarkan grafik, di sisi lain penduduk usia 15-64 mengalami penurunan dari 69,63% tahun 2025 menjadi 67,74 pada tahun 2045. Berikut adalah grafik proyeksi proporsi penduduk menurut kelompok umur.

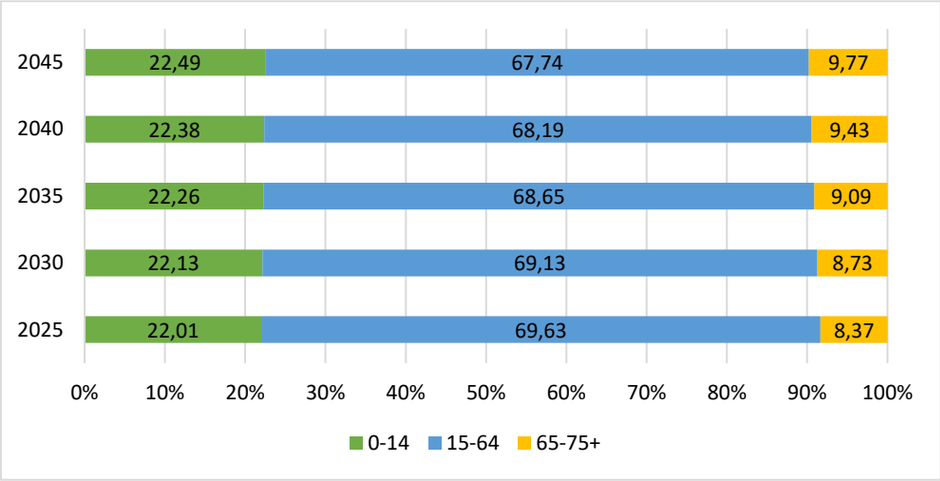

Grafik 2. 50 *Proyeksi Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Salatiga Tahun 2025-2045*
Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

Tabel 2. 37 *Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Salatiga Tahun 2025-2045*

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	42.441	43.770	44.705	45.639	46.572	47.506
15-64 Tahun	141.242	138.492	139.637	140.780	141.926	143.066
> 65 Tahun	17.686	16.638	17..637	18637	19.634	20.636
Angka Ketergantungan	42,76	42,638	42,644	42,651	42,657	42,663

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

4. Proyeksi Kepadatan Penduduk

Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Salatiga tahun 2025-2045 menunjukan angka yang terus meningkat yaitu pada awal periode RPJPD (2025) sebesar 3.618 jiwa/km^2 menjadi 2.842 jiwa/km^2 pada akhir periode (2045). Berdasarkan tabel menunjukan bahwa Kecamatan Sidomukti memiliki proyeksi kepadatan penduduk yang paling tinggi yakni sebesar 4.951 jiwa/km^2. Berikut adalah tabel proyeksi kepadatan penduduk Kota Salatiga.

Tabel 2. 38 *Proyeksi Penduduk Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2045*

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)					Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)				
			2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
1	Argomulyo	18	51.519	51.744	52.565	53.388	54.213	2.807	2.852	2.898	2.943	2.989
2	Tingkir	10	47.698	47.531	47.915	48.299	48.685	4.520	4.557	4.594	4.631	4.668
3	Sidomukti	11	46.987	48.211	49.966	51.719	53.470	4.302	4.464	4.626	4.789	4.951
4	Sidorejo	16	55.010	54.493	54.610	54.726	54.842	3.483	3.491	3.498	3.506	3.513
Kota Salatiga		**55**	**201.214**	**201.979**	**205.056**	**208.132**	**211.210**	**3.618**	**3.674**	**3.730**	**3.786**	**3.842**

Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Proyeksi Penduduk Usia Produktif

Proyeksi penduduk usia produktif di Kota Salatiga menunjukkan jumlah yang terus meningkat hingga mencapai 148.048 jiwa pada akhir periode. Tahun 2045 kecamatan yang memilik penduduk usia produktif paling tinggi yakni Kecamatan Sidorejo sebesar 38.519, sedangkan yang paling kecil Kecamatan Tingkir sebesar 34.296 jiwa. Berikut adalah tabel proyeksi jumlah penduduk usia produktif (15-64) di Kota Salatiga.

Tabel 2. 39 *Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif 2025-2045*

No	Kecamatan	Penduduk Usia Produktif 15-64 th 2023 (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif 15-64 (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Argomulyo	36.512	35.667	36.243	36.818	37.394	37.972
2	Tingkir	33.768	33.211	33.483	33.753	34.024	34.296
3	Sidomukti	32.244	32.375	33.597	34.820	36.042	37.262
4	Sidorejo	38.718	38.192	38.274	38.356	38.437	38.519
Kota Salatiga		**141.242**	**139.445**	**141.596**	**143.747**	**145.897**	**148.048**

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

6. Proyeksi Anak Usia Sekolah

Proyeksi penduduk anak usia sekolah bertujuan untuk menganalisis kebutuhan fasilitas pendidikan di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan agar fasilitas yang ada mencukupi kebutuhan Masyarakat secara merata. Anak usia sekolah dikelompokan berdasarkan umur 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24. Jumlah anak usia sekolah paling besar yakni pada kelompok usia 7-12 yang mencapai 21.868 jiwa diakhir periode RPJPD (2045). Jumlah anak usia sekolah yang terkecil yakni pada usia 16-18 hanya 9.394 jiwa pada akhir periode RPJPD. Berikut grafik perkembangan penduduk usia sekolah Kota Salatiga.

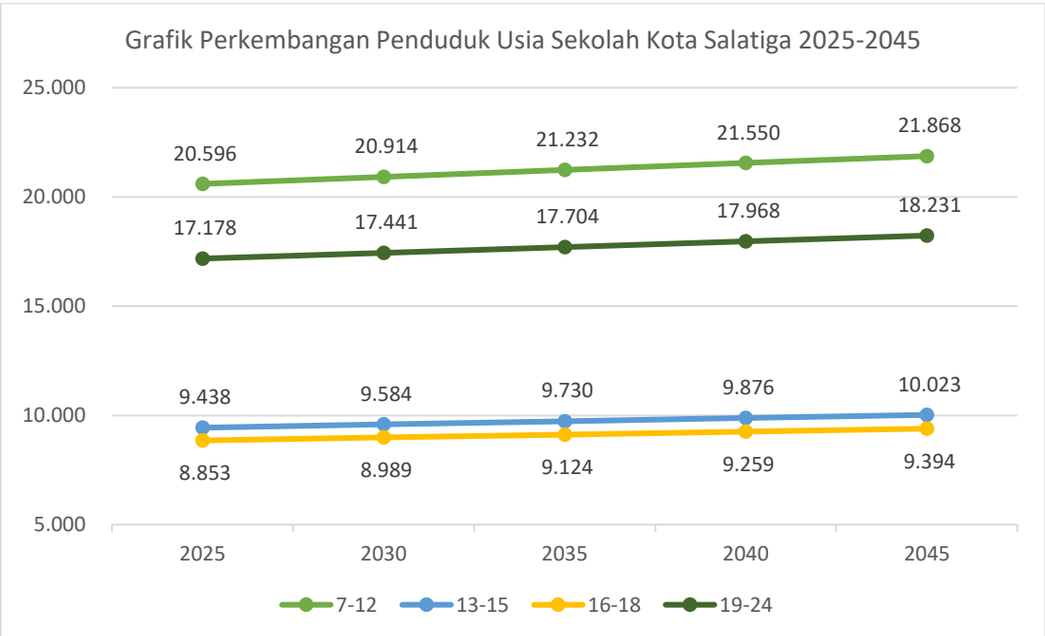

Grafik 2. 51 *Perkembangan Penduduk Usia Sekolah Kota Salatiga 2025-2045*
Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Proyeksi Angka Ketergantungan

Proyeksi angka ketergantungan Kota Salatiga tahun 2025-2045 mengalami peningkatan menjadi sebesar 42,66. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhir periode RPJPD (2045) penduduk usia non produktif semakin bergantung pada penduduk usia produktif. Kondisi tersebut linear dengan proyeksi proporsi penduduk non produktif yang semakin besar, sedangkan proporsi penduduk usia produktif semakin kecil. Berikut adalah grafik perkembangan proyeksi angka ketergantungan Kota Salatiga.

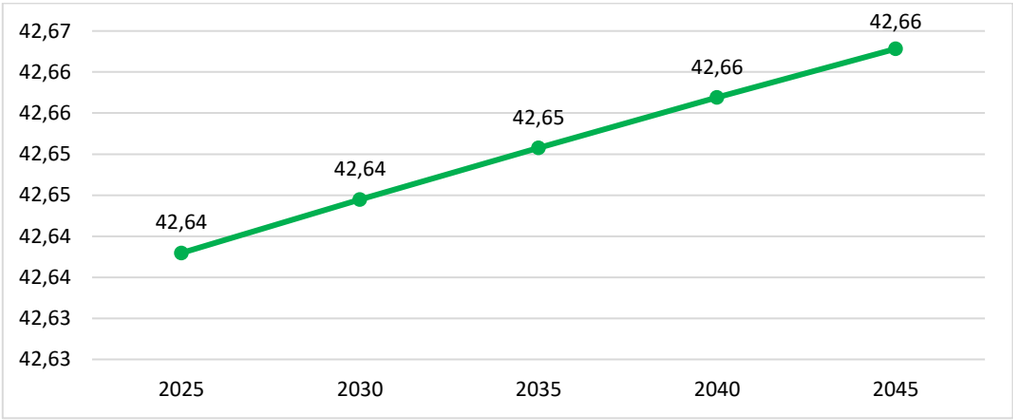

Grafik 2. 52 *Perkembangan Proyeksi Angka Ketergantungan Kota Salatiga 2025-2045*
Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

Angka ketergantungan tersebut juga dapat ditinjau pada tiap kecamatan. Berdasarkan data menunjukan bahwa pada akhir periode RPJPD (2045) Kecamatan Sidomukti memiliki angka ketergantungan yang paling tinggi sebesar 43,50, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Tingkir sebesar 41,96. Berikut adalah tabel proyeksi angka ketergantung di Kota Salatiga.

Tabel 2. 40 *Proyeksi Angka Ketergantungan 2025-2045*

No	Kecamatan	Angka Ketergantungan 2023 (%)	Proyeksi Angka Ketergantungan (%)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Argomulyo	42,54	42,77	42,77	42,77	42,77	42,77
2	Tingkir	42,46	41,96	41,96	41,96	41,96	41,96
3	Sidomukti	43,05	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50
4	Sidorejo	42,29	42,38	42,38	42,38	42,38	42,38
Kota Salatiga		**42,76**	**42,64**	**42,64**	**42,65**	**42,66**	**42,66**

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

8. Bonus Demografi

Bonus Demografi merupkan kondisi ketika penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur dan angka ketergantungan menunjukkan bahwa Salatiga pada tahun 2045 akan mendapatkan Bonus demografi (*The Window of Opportunity*). Hal ini ditunjukkan dari besarnya angka ketergantungan (*Dependency*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ratio) Kota Salatiga pada tahun 2045 adalah sebesar 42,66 persen. (catatan: bonus demografi terjadi apabila besarnya persentase angka ketergantungan di bawah 50 persen). Bahkan bonus demografi tersebut sudah didapatkan dari tahun 2021 ini. Kondisi ini tentu memberi dampak yang sangat besar bagi Kota Salatiga apabila mampu memanfaatkan momentum ini dengan baik. Agar manfaat Bonus Demografi ini bisa dinikmati dan berdampak secara positif, maka harus memperhatikan 4 pilar, yaitu Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya pengendalian penduduk, Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan.

2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar

Kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang rata dan berkeadilan menjadi salah satu perwujudan pembangunan wilayah di Kota Salatiga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Proyeksi sarana dan prasarana dihitung dengan memperhatikan proyeksi jumlah penduduk dan cakupan pelayanan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dan Kepmen PU No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal, Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum. Hasil proyeksi sarana dan prasarana merupakan angka minimum ketersediaan fasilitas yang dihitung berdasarkan ketentuan minimum fasilitas terhadap jumlah penduduk yang diproyeksikan. Namun, apabila kondisi *eksisting* menunjukkan angka yang sudah melebihi angka minimum dari hasil proyeksi, maka fasilitas terkait menunjukan kondisi yang memenuhi. Kondisi proyeksi yang angkanya dibawah angka *eksisting* bukan berarti memproyeksikan turun atau harus mengurangi fasilitas tersebut.

1. Rumah/tempat tinggal, dan permukiman

Proyeksi kebutuhan lahan permukiman tahun 2045 di Kota Salatiga mencapai 1.689.680 m^2 dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk dan standar kebutuhan lahan per orang, yakni 8 m^2. Adapun kecamatan yang kebutuhan lahan permukimannya tahun 2045 paling luas, yaitu Kecamatan Sidorejo. Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan lahan permukiman Kota Salatiga.

Tabel 2. 41 *Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman 2025-2045*

No	Kecamatan	Luas Lahan Permukiman (2023)	Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman (m2)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Argomulyo	29.594	407.376	413.952	420.520	427.104	433.704
2	Tingkir	11.050	377.160	380.248	383.320	386.392	389.480
3	Sidomukti	21.128	371.656	385.688	399.728	413.752	427.760
4	Sidorejo	14.567	435.016	435.944	436.880	437.808	438.736
Kota Salatiga		**76.340**	**1.591.208**	**1.615.832**	**1.640.448**	**1.665.056**	**1.689.680**

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kondisi perumahan menjadi salah satu fasilitas penting yang perlu diproyeksikan kebutuhannya sesuai dengan proyeksi jumlah penduduk pada tahun perencanaan dan direncanakan jumlah dan luasan lahannya. Perencanaan kebutuhan rumah hingga akhir tahun perencanaan, diproyeksikan akan bertambah. Menurut SNI 03-1733-2004 kebutuhan luas lantai minimum hunian untuk orang dewasa adalah 9,6 m2 dan untuk anak-anak adalah 4,8 m2. Oleh karena itu jika diasumsikan 1 keluarga berjumlah 4 orang maka jumlah luas lantai minimum tiap keluarga adalah 43,2 m2. Jika koefisien dasar bangunan adalah 50%, maka luas kavling minimum dengan jumlah keluarga 4 orang adalah 86,4 m2.

Berdasarkan PP No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, pemenuhan kebutuhan perumahan di Kota Salatiga diarahkan memiliki komposisi perbandingan 1:2:3 pada jumlah rumah mewah, menengah dan sederhana. Adapun untuk penetapan luas persil didasarkan pada Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kepadatan Rumah Tinggi dengan luas persil 60 m2 sampai 150 m2
- Kepadatan Rumah Sedang dengan luas persil 150 m2 sampai 250 m2
- Kepadatan Rumah Rendah dengan luas persil 150 m2 sampai 250 m2

Kebutuhan perumahan di Kota Salatiga diasumsikan 1 (satu) rumah untuk 1 (satu) keluarga dengan 4 anggota keluarga. Perhitungan kebutuhan rumah pada tahun 2045 sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 42 *Perhitungan Kebutuhan Rumah Kota Salatiga*

No	Kelurahan	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Rumah	Segmentasi Kebutuhan Rumah			Luas Persil (m2)					
				Mewah	Menengah	Sederhana	Mewah		Menengah		Sederhana	
				1	2	3	150	250	150	250	60	150
1	Sidorejo Lor	15,449	3,862	644	1,287	1,931	96,555	160,925	193,110	321,850	115,866	289,665
2	Mangunsati	18,811	4,703	784	1,568	2,351	117,570	195,950	235,141	391,901	141,084	352,711
3	Dukuh	15,372	3,843	641	1,281	1,922	96,078	160,130	192,156	320,259	115,293	288,233
4	Tegalrejo	13,234	3,308	551	1,103	1,654	82,711	137,851	165,421	275,702	99,253	248,132
5	Kutowinangun Kidul	8,813	2,203	367	734	1,102	55,082	91,803	110,164	183,607	66,099	165,246
6	Kutowinangun Lor	14,055	3,514	586	1,171	1,757	87,845	146,408	175,690	292,817	105,414	263,535
7	Salatiga	15,500	3,875	646	1,292	1,938	96,878	161,463	193,755	322,925	116,253	290,633
8	Noborejo	7,181	1,795	299	598	898	44,880	74,800	89,760	149,601	53,856	134,641
9	Bugel	3,761	940	157	313	470	23,509	39,181	47,017	78,362	28,210	70,526
10	Kalicacing	6,673	1,668	278	556	834	41,708	69,513	83,416	139,027	50,050	125,124
11	Cebongan	5,517	1,379	230	460	690	34,483	57,472	68,967	114,945	41,380	103,450
12	Randuacir	7,313	1,828	305	609	914	45,707	76,178	91,414	152,356	54,848	137,121
13	Ledok	11,867	2,967	494	989	1,483	74,169	123,614	148,337	247,229	89,002	222,506
14	Kumpulrejo	8,937	2,234	372	745	1,117	55,855	93,092	111,710	186,183	67,026	167,565
15	Kecandran	7,589	1,897	316	632	949	47,434	79,057	94,868	158,113	56,921	142,302
16	Blotongan	14,109	3,527	588	1,176	1,764	88,181	146,968	176,362	293,937	105,817	264,543
17	Gendongan	5,725	1,431	239	477	716	35,781	59,634	71,561	119,268	42,937	107,342
18	Kauman Kidul	4,575	1,144	191	381	572	28,596	47,660	57,192	95,321	34,315	85,789
19	Pulutan	4,976	1,244	207	415	622	31,103	51,838	62,206	103,677	37,324	93,309
20	Sidorejo Kidul	8,089	2,022	337	674	1,011	50,559	84,265	101,118	168,530	60,671	151,677
21	Tingkir Tengah	5,765	1,441	240	480	721	36,029	60,049	72,058	120,097	43,235	108,088
22	Tingkir Lor	5,393	1,348	225	449	674	33,704	56,173	67,408	112,346	40,445	101,112
23	Kalibening	2,525	631	105	210	316	15,780	26,300	31,560	52,600	18,936	47,340
		211,231	**52,808**	**8,801**	**17,603**	**26,404**	**1,320,196**	**2,200,327**	**2,640,392**	**4,400,653**	**1,584,235**	**3,960,588**

Sumber: Dokumen KLHS RDTR, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan perumahan yang dilakukan, diketahui bahwa fasilitas perumahan di Kota Salatiga yakni rumah mewah dengan luas lahan 1.467.972 m2 - 2.446.620 m2, rumah menengah dengan kebutuhan luas lahan antara 2.935.944 m2- 4.893.240 m2, dan rumah sederhana dengan kebutuhan luas lahan antara 1.761.566 m2- 4.403.916 m2. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan minimal sebesar 30% dari luas lahan keseluruhan. Sehingga dibutuhkan 30% dari luas rencana perumahan sebesar 24.548,2 m2 atau 2.454,82 ha. Sehingga lahan minimal yang harus tersedia dalam rencana perumahan sebesar 7.364,46 m2 atau 736,446 ha. Perhitungan sisa rencana zona perumahan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 43 *Perhitungan Analisis Zona Perumahan Kota Salatiga*

No	Keterangan	Luas
1	Rencana Zona Perumahan	2,454.82
2	Perumahan Eksisting	1,460
3	Fungsi Bangunan Fasilitas Umum dan Sosial Eksisting	692.28
4	Kebutuhan Perumahan	728.43
5	Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan (30% Luas Kebutuhan Perumahan)	736.44
6	Sisa Rencana Zona Perumahan (A-(B+C+D+E+F))	9.60

Sumber: Dokumen KLHS RDTR, 2024

Berdasarkan perhitungan di atas, luas rencana zona perumahan telah memenuhi kebutuhan lahan proyeksi rencana pengembangan perumahan di Kota Salatiga. Adapun selisih rencana zona perumahan dengan perhitungan proyeksi kebutuhan perumahan dapat dikembangkan kegiatan pendukung yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan perhitungan di atas, luas rencana zona perumahan telah memenuhi kebutuhan lahan proyeksi rencana pengembangan perumahan di Kota Salatiga. Adapun selisih rencana zona perumahan dengan perhitungan proyeksi kebutuhan perumahan dapat dikembangkan kegiatan pendukung yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Air

Kebutuhan sarana prasarana air bersih di Kota Salatiga diproyeksikan dengan mempertimbangkan penggunaan air rerata dan perkiraan kehilangan air serta proyeksi jumlah penduduk. Adapun penggunaan air rerata tersebut terdiri dari penggunaan air pada rumah tangga, hidran umum, domestik dan non domestik. Proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Salatiga tahun 2045 diperkirakan sebesar 52.280.080 liter/hari. Kecamatan yang diproyeksikan membutuhkan air bersih paling banyak, yakni Kecamatan Sidorejo sebesar 13.600.816 liter/hari. Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 44 *Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 2025-2045*

No	Kecamatan	Kebutuhan Air Bersih 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (l/hr)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Argomulyo		12.628.656	12.832.512	13.036.120	13.240.224	13.444.824
2	Tingkir		11.691.960	11.787.688	11.882.920	11.978.152	12.073.880
3	Sidomukti		11.521.336	11.956.328	12.391.568	12.826.312	13.260.560
4	Sidorejo		13.485.496	13.514.264	13.543.280	13.572.048	13.600.816
Kota Salatiga		**27.086.400**	**49.327.448**	**50.090.792**	**50.853.888**	**51.616.736**	**52.380.080**

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

Pemenuhan kebutuhan air tersebut mempertimbangkan pula proyteksi ketersediaan air yang dimiliki Kota Salatiga.

Tabel 2. 45 *Potensi Ketersediaan Air Kota Salatiga Tahun 2044*

No	Sumber Air	Satuan	Debit	Debit (m3/th)
A	**Potensi Mata Air**			
1	Mata Air Senjoyo	lt/dt	200	6,307,200
2	Mata Air Kaligojek	lt/dt	50	1,576,800
3	Mata Air Kaligethek	lt/dt	35	1,103,760
4	Mata Air Kalitaman	lt/dt	88.19	2,781,160
5	Mata Air Kalisombo timur dan barat	lt/dt	65	2,049,840
B	**Potensi Debit Sumur PDAM**			
1	Sumur Sukowati	lt/dt	15	473,040
2	Sumur Cebongan I	lt/dt	10	315,360
3	Sumur Cebongan II	lt/dt	3	94,608
4	Sumur Tegalsari I	lt/dt	10	315,360
5	Sumur Tegalsari II	lt/dt	15	473,040
6	Sumur Randuacir	lt/dt	3	94,608
7	Sumur Kradenan I	lt/dt	15	473,040
8	Sumur Kradenan II	lt/dt	3	94,608
9	Sumur Bulu	lt/dt	10	315,360
10	Sumur Ngemplak I	lt/dt	6	189,216
11	Sumur Ngemplak II	lt/dt	7	220,752
12	Sumur Kenteng	lt/dt	2.57	81,048
13	Sumur Noborejo	lt/dt	3.2	100,915
14	Sumur Nobowetan I	lt/dt	6	189,216
15	Sumur Nobowetan II	lt/dt	6	189,216
16	Sumur Ngronggo	lt/dt	0.87	27,436
17	Sumur Kecandran	lt/dt	0.51	16,083
18	Sumur Blotongan	lt/dt	10.7	337,435
19	Sumur Soka	lt/dt	3.62	114,160
20	Sumur Randuares	lt/dt	0.81	25,544
21	Sumur Warak	lt/dt	2.31	72,848
22	Sumur Bendosari	lt/dt	1.08	34,059
C	**Potensi Debit Sungai**			
1	Sungai Tapen	debit min (mt/dt)	19.26	1,664,064
2	Sungai Tengah	debit min (mt/dt)	42.71	3,690,144
3	Sungai Sraten	debit min (mt/dt)	127.46	11,012,544
	Potensi Ketersediaan Air (m3/tahun)			**34,432,464.96**

Sumber: Dokumen KLHS RDTR, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Energi/Listrik

Kebutuhan energi listrik di Kota Salatiga dihitung berdasarkan kebutuhan listrik domestik dan non domestik serta proyeksi penduduk tahun 2025-2045. Berdasarkan hasil proyeksi Kota Salatiga tahun 2045 membutuhkan energi sebesar 52.274,48 Kilo Volt Ampere (KVA). Kecamatan Sidorejo diproyeksikan membutuhkan energi listrik paling besar pada tahun 2045 sebesar 13.573,40 KVA. Kecamatan Tingkir diproyeksikan membutuhkan energi listrik paling kecil tahun 2045 sebesar 12.049,54 KVA. Berikut adalah proyeksi kebutuhan listrik di Kota Salatiga dari tahun 2025-2045.

Tabel 2. 46 *Proyeksi Kebutuhan Listrik 2025-2045*

No	Kecamatan	Kebutuhan Listrik 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Argomulyo	27.144,20	12.603,20	12.806,64	13.009,84	13.213,53	13.417,72
2	Tingkir	12.636,90	11.668,39	11.763,92	11.858,96	11.954,00	12.049,54
3	Sidomukti	14.728,45	11.498,11	11.932,22	12.366,59	12.800,45	13.233,83
4	Sidorejo	50.714,05	13.458,31	13.487,02	13.515,98	13.544,69	13.573,40
Kota Salatiga		**105.223,60**	**49.228,00**	**49.989,80**	**50.751,36**	**51.512,67**	**52.274,48**

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

4. Persampahan

Kebutuhan fasilitas persampahan di Kota Salatiga dihitung berdasarkan perkiraan produksi sampah domestik dan non domestik (L/Hari) serta proyeksi penduduk tahun 2025-2045. Perkiraan produksi sampah di Kota Salatiga menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2025-2045. Tahun 2045 perkiraan produksi sampah sebesar 506,90 L/Hari. Berikut adalah tabel proyeksi produksi sampah di Kota Salatiga.

Tabel 2. 47 *Proyeksi Produksi Sampah 2025-2045*

No	Kecamatan	Produksi Sampah 2023	Perkiraan Produksi Sampah (L/Hari)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Argomulyo	155.630	122,21	124,19	126,16	128,13	130,11
2	Tingkir	143.980	113,15	114,07	115,00	115,92	116,84
3	Sidomukti	137.860	111,50	115,71	119,92	124,13	128,33
4	Sidorejo	164.720	130,50	130,78	131,06	131,34	131,62
Kota Salatiga		**620.190**	**477,36**	**484,75**	**492,13**	**499,52**	**506,90**

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

Berdasarkan perkiraan produksi persampahan tersebut dapat diproyeksikan kebutuhan fasilitas persampahan yang terdiri dari gerobak sampah, transfer depo, container, dan dump truck. Tahun 2045 diperkirakan membutuhkan 634 unit gerobak sampah dimana per unit menampung 0,8 m3 sampah. Fasilitas transfer depo sebanyak 63 unit dengan kapasitan 10 m3 per unit. Kontainer yang melayani 2 depo diproyeksikan sebesar 32 unit pada tahun 2045 dan dump truck melayani 2 kontainer diproyeksikan sebesar 16 unit. Berikut adalah tabel proyeksi fasilitas persampahan di Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 48 Proyeksi Fasilitas Persampahan 2025-2045

No	Fasilitas Persampahan	Kondisi Eksisting (2023)	2025	2030	2035	2040	2045
1	Gerobak Sampah Kap.0,8m³/ Unit	550	597	606	615	624	634
2	Container (Melayani 2 Depo)	46	30	30	31	31	32
3	Dump Truck (Melayani 2 Container)	1	15	15	15	16	16
Kota Salatiga		**597**	**642**	**651**	**661**	**671**	**682**

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

5. Infrastruktur Kesehatan

Kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Salatiga dihitung berdasarkan SNI yang mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk di Kota Salatiga. Fasilitas kesehatan yang diproyeksikan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit bersalin, posyandu, dan apotek. Tahun 2045 proyeksi rumah sakit yang minimum dengan proyeksi jumlah penduduknya, yakni sebanyak 1, puskesmas sebanyak 2, puskesmas pembantu sebanyak 7, RS bersalin sebanyak 21(tidak termasuk praktek bidan), posyandu sebanyak 84 dan apotek sebanyak 21. Berikut adalah tabel proyeksi fasilitas kesehatan di Kota Salatiga.

Tabel 2. 49 Proyeksi Fasilitas Kesehatan 2025-2045

No	Fasilitas Kesehatan (unit)	Kondisi Eksisting (2023)	Proyeksi Fasilitas Kesehatan				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Rumah Sakit	5	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
2	Puskesmas	6	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
3	Puskesmas Pembantu	18	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
4	Rumah Sakit Bersalin	0	**20**	**20**	**21**	**21**	**21**
5	Posyandu	288	**80**	**81**	**82**	**83**	**84**
6	Apotek	39	**20**	**20**	**21**	**21**	**21**
Kota Salatiga		**356**	**128**	**130**	**132**	**134**	**136**

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

6. Infrastruktur Pendidikan

Kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Salatiga dihitung berdasarkan SNI yang mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk di Kota Salatiga. Fasilitas pendidikan yang diproyeksikan, antara lain TK, SD, SMP, SMA. Tahun 2045 fasilitas TK diproyeksikan sebanyak 169 unit, SD sebanyak 132 unit, SMP dan SMA 44 unit. Proyeksi ini merupakan kondisi ideal sesuai dengan proyeksi jumlah penduduk Kota Salatiga. Berikut adalah proyeksi fasilitas pendidikan di Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 50 *Proyeksi Fasilitas Pendidikan 2025-2045*

No	Fasilitas Pendidikan (Unit)	Kondisi Eksisting (2023)	Proyeksi Fasilitas Pendidikan (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	TK/ Sederajat	116	**159**	**162**	**164**	**167**	**169**
2	SD/ Sederajat	93	**124**	**126**	**128**	**130**	**132**
3	SMP/ Sederajat	35	**41**	**42**	**43**	**43**	**44**
4	SMA/ Sederajat	30	**41**	**42**	**43**	**43**	**44**
Kota Salatiga		**273**	**366**	**372**	**378**	**383**	**389**

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

7. Pasar

Kondisi *eksisting* jumlah pasar di Kota Salatiga berdasarkan dokumen Salatiga dalam Angka 2023 terdapat 15 pasar yang masih aktif dan tersebar di kecamatan-kecamatan. Namun, berdasarkan data pada dokumen Salatiga dalam Angka 2023 Kecamatan Argomulyo tidak memiliki pasar. Hal ini dapat dimungkinkan karena beberapa pasar yang berlokasi di kecamatan lain, berdekatan dengan Kecamatan Argomluyo, sehingga pasar tersebut dapat melayani Masyarakat di Kecamatan Argomulyo. Pasar yang berdekatan dengan Kecamatan Argomulyo, yaitu Pasar Raya II dan Pasar Rejosari. Berikut adalah tabel lokasi pasar yang ada di Kota Salatiga.

Tabel 2. 51 *Lokasi Pasar per Kecamatan di Kota Salatiga*

Nama Pasar	Lokasi Kecamatan	Nama Pasar	Lokasi Kecamatan
Pasar Raya 1	Tingkir	Pasar Rejosari	Sidomukti
Pasar Raya 2	Sidomukti	Pasar Banyuputih	Sidorejo
Pasar Blauran 1	Tingkir	Pasar Andong	Sidomukti
Pasar Blauran 2	Tingkir	Pasar Tamansari	Sidorejo
Pasar Eks Hasil	Tingkir	Pasar Ayam	Tingkir
Pasar Sayangan	Sidorejo	Cengek	Tingkir
Pasar Shoping	Sidorejo	Pasar Ayam Potong	Tingkir
Pasar Jetis	Sidorejo	Pasar Krenceng	Sidomukti

Sumber: Salatiga dalam Angka 2024

Kebutuhan pasar di Kota Salatiga dihitung berdasarkan SNI yang mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk di Kota Salatiga. Berdasarkan SNI, 1 pasar dapat melayani 30.000 jiwa. Tahun 2045 proyeksi pasar yang ideal dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduknya, yakni sebanyak 8unit pasar yang tersebar di masing-masing kecamatan sebanyak 2 unit. Berikut adalah tabel proyeksi fasilitas kesehatan di Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 52 *Proyeksi Fasilitas Pasar 2025-2045*

No	Kecamatan	Kondisi Eksisting (2023)	Proyeksi Kebutuhan *Fasilitas Pasar (unit)*				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Argomulyo	0	2	2	2	2	2
2	Tingkir	7	2	2	2	2	2
3	Sidomukti	4	2	2	2	2	2
4	Sidorejo	5	2	2	2	2	2
Kota Salatiga		**16**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**

Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program/Proyek Strategis

Pengembangan pusat pertumbuhan diharapkan dapat memberikan dampak pada daerah. Penetapan pusat-pusat kegiatan melalui rencana tata ruang baik pada level nasional, provinsi, atau kabupaten/kota menjadi pintu masuknya berbagai program atau proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomoer 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, menetapkan Kota Salatiga sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di Kawasan Perkotaan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Ungaran-Purwodadi (Kedungsepur), bersama dengan PKN Surakarta dan PKN Cilacap di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu detatapkan pula sepuluh Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Tengah yaitu Boyolali, Klaten, Tegal, Pekalongan, Kudus, Cepu, Magelang, Wonosobo, Kebumen, dan Purwokerto. Keberadaan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan program atau proyek strategis menjadi peluang bagi daerah untuk berkembang.

Tabel 2. 53 *Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*

Provinsi	PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	PKW (Pusat Kegiata Wilayah)	PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional)
Jawa Tengah	Surakarta	Boyolali	Tidak Ada
		Klaten	
	Kawasan Perkotaan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Ungaran-Purwodadi (Kedungsepur)	Tegal	
		Pekalongan	
		Kudus	
		Cepu	
		Magelang	
		Wonosobo	
	Cilacap	Kebumen	
		Purwokerto	

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dari rencana pengembangan sistem perkotaan nasional, ditetapkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berlokasi di Kawasan Perkotaan Kedungsepur yang termasuk di dalamnya adalah Kota Salatiga. Rencana pengembangan ini juga diakomodasi dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga tahun 2023-2043. Selain itu, dikembangkan juga Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Wilayah pengembangan pusat kegiatan di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan dokumen Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, WP Kedungsepur diarahkan pengembangannya dengan mendorong peningkatan pengembangan perkotaan Semarang sebagai salah satu kawasan strategis nasional dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengembangan industri di Kedungsapur diarahkan pengembangannya pada kawasan industri Semarang, Kendal, dan Demak berdasarkan prinsip mandiri, keberlanjutan, serta kelestarian alam. Selain itu, sektor pertanian terus dikembangkan utamanya pada kawasan penyangga disertai upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah dan pencegahan *urban sprawl*. Dalam rangka peningkatan mobilitas transportasi barang maka perlu upaya pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan pelabuhan darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor Jawa Tengah serta upaya untuk mengurangi biaya logistik di Jawa Tengah.

Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata terus dilakukan secara terintegrasi di dalam dan antar kawasan serta mendorong kerja sama antar daerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana di berbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan limbah. Pengembangan wilayah tersebut selaras dengan tujuan penataan ruang Kota Salatiga Kota sebagaimana dimaksud dalam Perda RTRW tahun 2023 -2043 adalah mewujudkan Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, jasa, dan destinasi wisata yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang didukung oleh sektor pendidikan, olahraga, serta industri.

Tabel 2. 54 *Sistem Pusat Kegiatan di Kota Salatiga*

Sistem Pusat Kegiatan	Lokasi
Pusat Pelayanan Kota (PPK)	1. Kelurahan Kalicacing di Kecamatan Sidomukti 2. Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo 3. Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir
Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	1. Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo 2. Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti 3. Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo 4. Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1. Kelurahan Blontongan 2. Kelurahan Bugel 3. Kelurahan Kauman Kidul 4. Kelurahan Pulutan 5. Kelurahan Kalibening 6. Kelurahan Tingkir Lor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sistem Pusat Kegiatan	Lokasi
	7. Kelurahan Tingkir Tengah 8. Keluarahan Noborejo 9. Kelurahan Ledok 10. Kelurahan Tegalrejo 11. Kelurahan Kumpulrejo 12. Kelurahan Cebongan 13. Kelurahan Kecandran 14. Kelurahan Dukuh 15. Kelurahan Gendongan

Sumber: Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023

Pengembangan sistem perkotaan tersebut dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan. Berikut merupakan program dan kegiatan pada sistem perkotaan di Kota Salatiga.

Tabel 2. 55 *Program Pengembangan Sistem Perkotaan di Kota Salatiga*

Program	Kegiatan	Lokasi
Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Salatiga	Pengembangan Tata Kawasan Pusat Pemerintahan	1. Kelurahan Kalicacing di Kecamatan Sidomukti 2. Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo
	Pengembangan Tata Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa	1. Kelurahan Kalicacing di Kecamatan Sidomukti 2. Keluarahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo 3. Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul di Kecamatan Tingkir
	Penyediaan RTH sebesar 20%	1. Kelurahan Kalicacing di Kecamatan Sidomukti 2. Keluarahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo 3. Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul di Kecamatan Tingkir
	Penyusunan dan Legalisasi RDTR	Kota Salatiga
	Pengembangan Wilayah Kedungsepur	Kota Salatiga
	Pengembangan Pusat Pelayanan dengan Daerah Perbatasan	Kota Salatiga
	Penyusunan Penanganan Masalah Oenataan Ruang Kawasan Perbatasan dengan Daerah Sekitar	Kota Salatiga
Pengembangan SPPK Sidorejo	Pegembangan dan Tata Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo
	Pengembangan Tata Kawasan Pendidikan	Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo
	Pengembangan dan Tata Kawasan Pemerintahan Skala Kecamatan	Kelurahan Siodrejo Lor di Kecamatan Sidorejo
	Penyediaan RTH sebesar 20%	Kelurahan Siodrejo Lor di Kecamatan Sidorejo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program	Kegiatan	Lokasi
Pengembangan SPPK Tingkir	Pengembangan dan Tata Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir
	Pengembangan dan Tata Kawasan Terminal	Kelurahan Sidorejo Kidul dan Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir
	Pengembangan dan Tata Kawasan Pemerintahan Skala Kecamatan	Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir
	Penyediaan RTH sebesar 20%	Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir
Pengembangan SPPK Argomulyo	Pengembangan dan Tata Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo
	Pengembangan dan Tata Kawasan Peruntukan Industri	Kelurahan Randiacir dan Kelurahan Noborejo di Kecamatan Argomulyo
	Pengembangan dan Tata Kawasan *Sport Centre*	Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo
	Pengembangan dan Tata Kawasan Pemerintahan Skala Kecamatan	Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo
	Penyediaan RTH sebesar 20%	Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo
Pengembangan SPPK Sidomukti	Pengembangan dan Tata Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti
	Pengembangan dan Tata Kawasan Perkantoran Terpadu	Kelurahan Kecandran di Kecamatan Sidomukti
	Pengembangan dan Tata Kawasan Pemerintahan Skala Kecamatan	Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti
	Penyediaan RTH sebesar 20%	Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti
Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Kota (PPL)	Pengembangan Sarana dan Prasarana	1. Kecamatan Argomulyo a. Kelurahan Noborejo b. Kelurahan Ledok c. Kelurahan Tegalrejo d. Kelurahan Kumpulrejo e. Kelurahan Cebongan 2. Kecamatan Sidomukti a. Kelurahan Kecandran b. Kelurahan Dukuh 3. Kecamatan Sidorejo a. Kelurahan Blotongan b. Kelurahan Bugel c. Kelurahan Kauman Kidul d. Lelurahan Pulutan 4. Kecamatan Tingkir a. Kelurahan Gendongan b. Kelurahan Kelibening c. Kelurahan Tingkir Lor
	Pengembangan dan Tata Kawasan Perdagangan dan Jasa	1. Kecamatan Argomulyo a. Kelurahan Noborejo b. Kelurahan Ledok c. Kelurahan Tegalrejo d. Kelurahan Kumpulrejo e. Kelurahan Cebongan 2. Kecamatan Sidomukti a. Kelurahan Kecandran b. Kelurahan Dukuh 3. Kecamatan Sidorejo a. Kelurahan Blotongan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program	Kegiatan	Lokasi
		b. Kelurahan Bugel c. Kelurahan Kauman Kidul d. Lelurahan Pulutan 4. Kecamatan Tingkir a. Kelurahan Gendongan b. Kelurahan Kelibening c. Kelurahan Tingkir Lor d. Kelurahan Tingkir Tengah
	Penyediaan RTH sebesar 20%	1. Kecamatan Argomulyo a. Kelurahan Noborejo b. Kelurahan Ledok c. Kelurahan Tegalrejo d. Kelurahan Kumpulrejo e. Kelurahan Cebongan 2. Kecamatan Sidomukti a. Kelurahan Kecandran b. Kelurahan Dukuh 3. Kecamatan Sidorejo a. Kelurahan Blotongan b. Kelurahan Bugel c. Kelurahan Kauman Kidul d. Lelurahan Pulutan 4. Kecamatan Tingkir a. Kelurahan Gendongan b. Kelurahan Kelibening c. Kelurahan Tingkir Lor d. Kelurahan Tingkir Tengah
Perwujudan Kawasan Strategis Kota dari Sudat Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Penataan Kawasan Pengembangan Pusat Perekonomian Koridoe Jalan Jenderal Sudirman dan Koridor Jalan Diponegoro	Kota Salatiga
	Penataan Kawasan Pengembangan Pariwisata Taman Wisata Sejarah Salatiga (Taman Wisesa)	Kota Salatiga
Perwujudan Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya	Penataan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Sekitranya	Kota Salatiga
	Penataan Kawasan Prasasti Plumpang dan Sekitranya	Kota Salatiga

Sumber: Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023

Selain pengembangan sistem perkotaan Kota Salatiga, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga juga memuat penetapan kawasan strategis kota. Kawasan Strategis yang ditetapkan di Kota Salatiga mencakup kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan sosial dan budaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 56 *Kawasan Strategis Kota Salatiga*

Kepentingan	Kawasan Strategis Kota
Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Pengembangan Pusat Pusat Perekonomian Koridor Jalan Jendral Sudirman dan Koridor Jalan Diponegoro
	Kawasan Pengembangan Pariwisata Taman Wisata Sejaraha Salatiga
Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya	Kawasan Strategis Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Satya Wacana dan Sekitarnya
	Kawasan Strategis Pendidikan Tinggi Universitas Islam Negeri Salatiga dan Sekitarnya
	Kawasan Prasasti Plumpang dan sekitarnya
	Kawasan Wisata Religi Makan Kyai Abdul Wahid dan Sekitarnya

Sumber: Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023

2.7.2 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Berdasarkan Undang-Undang Tentang RPJPN 2025-2045

Kebijakan Wilayah Jawa berdasarkan RPJPN 2025-2045 diarahkan menjadi wilayah Industri Berbasis Inovasi, Riset, dan Teknologi. Arah kebijakan didasari oleh potensi Wilayah Jawa menjadi pusat aglomerasi penduduk dan menjadi kawasan startegis bagi industri skala nasional. Sehingga dirumuskanlah lima prioritas arah pengembangan Wilayah Jawa sebagai berikut.

Tabel 2. 57 *Arah Pembangunan Wilayah Jawa*

No	Arah Pembangunan Wilayah
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global) serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
2	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan pusat pertumbhan industri ramah lingkungan, kawasan strategis pariwisata, kawasan strategis agrikultur kemandirian pangan, dan kawasan strategis perkotaan.
3	Percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan.
4	Pengembangan infrastruktur pendukung seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
5	Penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Arah kebijakan Wilayah Jawa dijabarkan berdasarkan lima prioritas arah pembangunan yang disajikan pada tabel 4.6. Arah Kebijakan Wilayah Jawa meliputi arah kebijakan transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Kebijakan pada transformasi sosial disajikan pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

***Tabel 2. 58** Arah Kebijakan Transformasi Sosial Wilayah Jawa*

Transformasi Sosial	
1.	Peluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
2.	Pengendalian penyakit menular seperti TBC dan kusta, dan percepatan penurunan stunting pada wilayah dengan beban tinggi.
3.	Perkuatan tenaga medis dan kesehatan dan pendidikan profesional yang didukung dengan pemberian bantuan/insetif dan peningkatan tenaga medis dari masyarakat lokal.
4.	Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya.
5.	Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6.	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;
7.	Pengembangan hub pendidikan tinggi global (global higher education hub); peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, setta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah; serta penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia, difokuskan di Megapolitan Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, Metropolitan Semarang, dan Yogyakarta.
8.	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan Vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja.
9.	Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar.
10.	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagia usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Arah kebijakan transformasi ekonomi di Wilayah Jawa diarahkan kepada pembangunan klaster ekonomi, pembangunan ketenagalistrikan, dan pembangunan ekosistem digital. Arah kebijakan dari penjabaran tranformasi ekonomi disajikan dalam tabel berikut.

***Tabel 2. 59** Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Wilayah Jawa*

Transformasi Ekonomi	
Klaster Ekonomi	
1.	Pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (*green chemistry*), dan teknologi nano hijau (green nanotechnology), didukung dengan pegembangan energi terbarukan (renewable energi). Pengembangan insdustri hijau diarahkan pada lokasi pesisir dan pelabuhan seperti Banten Utara, Kawasan Rebana-Jawa Barat, Pesisir Utara Jawa Tengah, dan Metropolitan Surabaya.
2.	Pengembangan beberapa kawasan strategis industri, seperti kawasan strategis industri Serang-Tangerang (klaster indutri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan insdutri orientasi ekspor), kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang dan Jawa Utara (klaster industri consumer goods dan general manufacutre), dan kawasan strategis industri Madiun-Surabaya-Gresik-Probolinggo (klaster industri pengolahan petrokimia, pengolahan material/metalurgi, maritim/galangan kapal, agroindustri, industri transportasi, dan pengolahan perikanan).
3.	Pengembangan Industri Jasa Bernilai Tambah Tinggi dan Teknologi seperti industri maritim, pertanian, otomotof, permesinan dan elektronika.
4.	Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian selatan yang memiliki karakteristik agro dan bentang alam. Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (Cultural Hub and Creative Industry (CCI)) juga perlu diadipsi dalam pengembangan pariwisata melalui penyelanggaraan Meeting, Incentives, Coferences, and Exhibitions (MICE) di wilayah-wilayah perkotaan. Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan atraksi yang unik serta amenitas, aksesibilitas, dan ancillary yang baik, antara lain pada kawasan strategis pariwisata Magelang-Yogyakarta-Solo (integrasi cultural & heritage tourism, ecotourism, dan industri/wkonomi kreatif), serta kawasan perkotaan yang memiliki potensi urban & health/medical tourism seperti Megapolitan Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, dan Megapolitan Semarang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Transformasi Ekonomi	
5.	Pengembangan kawasan strategis agrikultiral kemandirian pangan di Citarum-Cimanuk-Cisanggarung, Jratunseluna, Citanduy-Serayu, Bengawan Solo-Brantas, dan Tapal Kuda Jawa Timur, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan value komoditas pertanian dan menurunkan biaya produksi.
6.	Pengembangan sentra produksi pangan yang dilakukan secara kolektif antarwilayah, peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan teknologi pertaian yang modern dan efisien, serta pemberian insentif dan dukungan bagi petani untuk menggunakan teknologi dan inovasi pertanian yang ramah lingkungan.
7.	Pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya, terutama di perairan pesisir utara Jawa (WPP-712) dan perairan pesisir selatan Jawa (WPP-573), termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy pada perairan-perairan tersebut.
8.	Peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM terkait industri, jasa, parawisata dan pertanian, serta kemampuan digital.
9.	Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, perluasan akses teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan peluang lapangan kerja digital.
10.	Pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan antara lain penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan *urban farming*, penggunaan *Internet of Things* (IoT), pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) dan transportasi hijau, penerapan *smart city* dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan *creative financing*;
11.	Pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan (*fragmented government*) untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan (*cross prominent stakeholders*) dimulai dengan kota metropolitan Jakarta dan Surabaya;
12.	Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
13.	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan unutk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (global city) yaitu pada megapolitan Jakarta-Bandung, megapolitan Surabaya-Malang, dan metropolitan Semarang, serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Cirebon, Cilacap, Solo, Madiun, Kediri, dan Jember
Klaster Pembangunan Ketenagalistrikan	
1.	Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara signifikan untuk memperbaiki bauran energi baru dan terbarukan pada pembangkit listrik, termasuk pemanfaatan waduk besar unutk pembangunan PLTS Terapung dengan skala cakupan besar serta mempertimbangkan pembangunan PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik di Wilayah Jawa.
2.	Mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi energi yang modern dan efisien (smart grid) unutk menghubungkan sistem energi terbarukan di Pulau Jawa serta memastikan pasokan energi listrik yang stabil dan berkelanjutan.
3.	Meningkatkan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk mengadopsi energi terbarukan bervariabel (variable renewable energi/VRE) lebih banyak.
4.	Mengembangkan sistem penyimpanan energi (energi storage system/ESS) unutk mengatasi intermitensi.
5.	Mengembangkan interkoneksi antarwilayah.
6.	Mendorong akses dan kulaitas layanan unutk mendukung transportasi publik dan kendaraan pribadi berbasis listrik (electric vehicles) dalam rangka mengurangi dan memberhentikan penggunaan energi fosil.
Klaster Pembangunan Ekosistem Digital	
1.	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi TIK melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh plosok.
2.	Peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis.
3.	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill.

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Transformasi tata kelola bertujuan unutk menguatkan tata kelola pemerintahan. Transformasi tata kelola di Wilayah Jawa diarahkan melalui kebijakan berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 60 *Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Wilayah Jawa*

Transformasi Tata Kelola	
1.	Optimalisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.
2.	Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat.
3.	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
4.	Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal ini manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
5.	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE unutk penguatan aspek pemerintah digital.
6.	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jsa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
7.	Pengawasan proses pengembagan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan kteknologi informasi.

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Landasan transformasi diarahkan melalui supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekonomi. Landasan transformasi di Wilayah Jawa diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut.

Tabel 2. 61 *Landasan Transformasi di Wilayah Jawa*

Landasan Transformasi	
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi	
1.	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.
2.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah unutk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergiperencanaan dan penganggaran prioritas dearah denfan prioritas nasional.
3.	Penguatan pengendalaian inflasi daerah.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
1.	Peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan lingkugan hidup terutama pada kualitas udara yang masih rendah di Provinsi DKI Jakarta dan kualitas air di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi jawa Tengah, dan Provinsi DI Yogyakarta.
2.	Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, perikanan yang berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan.
3.	Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien.
4.	Penerapan skema insentif dan disinsentif untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian.
5.	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui modernisasi irigasi dan menambah pasokan air baku unutk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa.
6.	Mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi clean energy untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi terbarukan melalui pemberian insentif dan dukungan bagi para pengembang teknologi energi terbarukan.
7.	Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif.
8.	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi.
9.	Peningkatan kerja sama internasional untuk mengembangkan teknologi clean energy dan memperluas akses ke pasar global.
10.	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan, kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan.
11.	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Landasan Transformasi	
12.	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan mangrove serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya Badak dan Owa Jawa.
13.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana tsunami pada zona megathrust di pesisir selatan Pulau Jawa, termasuk mitigasi risiko pada wilayah perkotaan.
14.	Penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk masyarakat lokal terhadap ancaman perubahan iklim seperti rob dan abrasi termasuk perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedung Sepur, Gerbangkertosusila dari pbanjir 100 tahunan.
15.	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
16.	Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Pulau Jawa.
Ketahanan Sumber Daya Air Terpadu	
1.	Menambah pasokan air baku untuj perkotaan pesisir utara Pulau Jawa.
2.	Pembangunan bendungan baru untuk menunjang agenda modernisasi irigasi dan memperceoat transisi energi bersih di Pulau Jawa dengan memanfaatkan sumber pendapatan Non-Rupiaah Murni.
3.	Modernisasi irigasi mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.
4.	Perlindungan pesisir jabodetabek, Kedungsepur, Gerbangkertosusila dari banjir kala ulah 100 tahun.
5.	Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan.
6.	Penerapan kebijakan Zero Delta Q.
7.	Pemanfaatan prasarana publik sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir.
8.	Pengelolaan wilayah pesisir terpadu terintegrasi dengan rencana pembangunan kawasan.
9.	Penerapan Fload Forecasting Early Warning System (FFEWS) berbasis teknologi digital.

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Kerangka implementasi transformasi di Wilayah Jawa dilaksanakan berdasarkan agenda kewilayahn dan sarana prasarana serta kesinambungan pembangunan yang mencakup kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

Tabel 2. 62 *Kerangka Implementasi Transfromasi Wilayah Jawa*

Kerangka Implementasi Transformasi	
Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana	
1.	Penguatan kerja sama antaradaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa.
2.	Penuntasan RTDR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.
3.	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
4.	Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di antaranya pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan penyelesaian Pelabuhan Patimban (Jawa Barat) secara terpadu, serta pelabuhan Tanjung Perak (Jawa Timur) menajadi pelabuhan bertaraf global (global port), serta penguatan pelabuhan lainnya sebagai major port atau pelabuhan logistik utama seperti Pelabihan Tanjung Emas (Jawa Tengah).
5.	Pemanfaatan ALKI I di Wilayah Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu.
6.	Peningkatan konektivitas Sumatera-Jawa- Bali, termasuk sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan barang terutama antara Pulau Jawa dan Bali (Gilimanuk- Ketapang) serta antara Pulau Jawa dan Sumatera (Merak-Bakauheni) untuk menurunkan biaya logistik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kerangka Implementasi Transformasi	
7.	Optimalisasi dan pengembangan bandara utama dimulai dengan Soekarno-Hatta di Banten, Kertajati di Jawa Barat, Yogyakarta International Airport di DIY, Ahmad Yani di Semarang, dan Juanda di Jawa Timur, serta integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara kargo.
8.	Pengembangan jalan tol Pulau Jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik serta penyelesaian Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan wilayah.
9.	Pembangunan kereta antarkota termasuk pengembangan kereta cepat (Jakarta – Surabaya) yang terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta – Bandung, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan dan fasilitas antarmoda.
10.	Pengembangan transportasi pekotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang serta kota besar dan kira sedang lain seperti Yogyakarta, Solo, Serang, Cirebon, Malang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.
11.	Penguatan kerjasama Wilayah Metropolitan Jakarta dan sekitarya unutk mendukung fungsi Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional dan global paska pemuindahan ibu kota negara.
12.	Penurunan ketimpangan antara desa-kota di wilayah utara-selatan di Pulau Jawa terutama melalu peningkatan konektivitas antarwilayah.
13.	Pecepatan pembangunan, optimalisasi/penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna meningkatkan access to market dan accrss to information pada kawasan-kawasan afrimasi di Jawa, antara lain Banten Selatan, Jawa Barat Selatan, Madura, dan Pacitan-Trenggalek-Blitar.
14.	Pengembangan sistem smart grid ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan seperti PLTA, PLTP, PLTS, hidrogen dan sistem penyimpanan energi serta pengembangan jaringan transmisi interkoneksi dengan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Lainnya	
1.	Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kepadatan.
2.	Optimalisasi lahan, terutama di perkotaan, untuk penyediaan hunian vertikal.
3.	Peremajaan kota, terutama di kawasan metropolitan.
4.	Pengembangan opsi sewa-milik dalam pemenuhan kebutuhan hunian.
5.	Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutanm dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
6.	Penyediaan air siap minum dari keran melalui jarigan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
7.	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
8.	Peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber, 100% sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan 30% sampah terdaur ulang, serta sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
Kesinambungan Pembangunan	
1.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
2.	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
3.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
4.	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
5.	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
6.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

2.7.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Berdasarkan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga

Kebijakan pengembangan pertumbuhan wilayah yang akan dilaksanakan selain berpedoman pada peraturan tentang RTRW juga berpedoman pada Rencana Detail Tata Ruang. Kota Salatiga Dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga. Arahan pemanfaatan ruang dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RDTR Kota Salatiga merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program penataan ruang/pengembangan untuk wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan sebagaimana diatur dalam pedoman ini. Arahan pemanfaatan ruang ini bersifat optional dalam penyusunannya dan tergantung oleh kebutuhan daerah masing-masing.

1) Arahan pemanfaatan ruang berfungsi sebagai:
   a. Dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan ruang/ pengembangan wilayah perencanaan;
   b. Arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
   c. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan maupun penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
   d. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
2) Arahan pemanfaatan ruang disusun berdasarkan:
   a. Rencana struktur dan rencana jaringan prasarana;
   b. Rencana pola ruang;
   c. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
   d. Pengembangan kawasan perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
   e. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
   f. Prioritas pengembangan dalam wilayah perencanaan dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJP Daerah maupun RPJM Daerah.

3) Arahan pemanfaatan ruang WP Kota Salatiga disusun dengan kriteria:
   a. Mendukung perwujudan rencana struktur, rencana jaringan prasarana, dan rencana pola ruang di wilayah perencanaan serta mendukung perwujudan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
   b. Mendukung program penataan ruang wilayah kota;
   c. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
   d. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
   e. Terjaganya sinkronisasi antar program dalam satu kerangka program terpadu pengembangan kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah Kota Salatiga yang mencakup Aspek Geografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi kinerja RPJPD 2005-2025. Sementara itu isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan. Permasalahan Pembangunan daerah Kota Salatiga yang masih relevan dalam dua puluh tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Aspek Geografi

Permasalahan Pembangunan daerah pada aspek geografi yaitu menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan atas perubahan iklim.

A. Daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan lahan (LS) dan kebutuhan lahan (DL) didapatkan bahwa Status Daya Dukung Lahan : S_L (18.623 Ha) < D_L (48.052,80 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan Kota Salatiga tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut. (KLHS RPJPD Kota Salatiga 2024-2045, 2023)

Status daya dukung pangan defisit, berarti bahwa Kota Salatiga tidak mampu swasembada pangan dalam arti jumlah pendudukanya telah melampaui jumlah penduduk optimal. Kondisi Kota Salatiga yang mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan ketidak mampuan swasembada pangan menjadi permasalahan yang perlu diatasi.

Status daya dukung air Kota Salatiga, berdasarkan Dokumen Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), didapatkan hasil bahwa status daya dukung air pada status defisit/terlampaui. Status defisit/ terlampaui berarti bahwa Kota Salatiga tidak mampu memenuhi kebutuhan air.

Secara keseluruhan, masyarakat menggunakan air bersih untuk kegiatan yang dilakukan sehari-hari, seperti mandi, memasak, mencuci, hingga kebutuhan beternak. Kota Salatiga belum memiliki sumber mata air utama yang berasal dari wilayahnya sendiri, sehingga harus mengambil dari sumber mata air Senjoyo di Kabupaten Semarang. Hal ini menyebabkan Kota Salatiga belum mampu memenuhi semua kebutuhan air minum bagi warganya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Adanya pencemaran air pada status cemar ringan dan sedang ini berarti bahwa di beberapa sungai Kota Salatiga, terjadi penurunan kemampuan air dalam menetralisir sumber pencemar, sehingga berdampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama badan air.

B. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nilai IKLH 61,3 menunjukkan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga berada pada kategori sedang (50< 61,3 <70)

1. Persentase ketersedian Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang masih dibawah ideal

Kondisi dan ketersediaan ruang terbuka hijau masih belum memadai sesuai dengan ketentuan, dimana salah satu tolok ukur pengaplikasian konsep Kota Hijau adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Ruang Terbuka Hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30 persen dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007). Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya menunjukkan bahwa data ketersediaan RTH di Kota Salatiga mengalami penurunan persentase dari 27,68% tahun 2019, menjadi 16,31 pada tahun 2022. Selain itu, ketersediaan RTH yang masih minim ini juga mempengaruhi indek kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kota Salatiga yang belum mencapai target (ketercapaian 61,3%).

Setiap kelurahan di Kota Salatiga belum memenuhi persentase luasan RTH publik 20% dan persentase luasan RTH privat 10% sehingga apabila ditotalkan, persentase total luasan RTH belum memenuhi 30% dari total luas wilayah. Bahkan, persentase RTH privat di setiap kelurahan masih kurang dari 2%. Selain itu, hanya beberapa kelurahan saja dengan persentase RTH publik melebihi 5%. Ketersediaan RTH di Kota Salatiga lebih banyak berupa sempadan sungai dan hutan kota. Kelurahan Kumpulrejo memiliki ketersediaan RTH yang paling luas karena terdapat hutan kota dan taman kota di kelurahan tersebut. Luas hutan kota dan taman kota di Kota Salatiga dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan penduduk untuk skala kota. Selain itu, setiap kelurahan di Kota Salatiga juga sudah tersedia taman kelurahan. Akan tetapi, kebutuhan RTH untuk skala yang lebih kecil, seperti taman RT dan taman RW, masih belum terpenuhi.

2. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang salah satunya terjadi pada kasus pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan berpotensi bahaya/Rawan Bencana. Rendahnya ketaatan pada RTRW Kota Salatiga serta di Kota Salatiga disebabkan oleh terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga pengembangan penggunaan lahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

akan mengarah pada penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Salatiga. Kehidupan yang layak dimulai dengan perumahan yang layak, dan tindakan untuk meningkatkan kualitas perumahan dapat memberikan dampak positif yang besar pada kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Tingkat kesesuaian penggunaan lahan atas dasar regulasi RTRW di Kota Salatiga telah terjadi peningkatan sejak 2017 yaitu sebesar 90 persen namun hingga 2021 belum tercapai 100 persen. Peningkatan kesesuaian penggunaan lahan atas dasar regulasi RTRW hingga saat ini belum diikuti dengan peningkatan rasio wilayah wajah kota yang tertata dengan baik. Sejak tahun 2018, penataan wajah kota hanya mengalami peningkatan 25 persen dan akhir tahun 2022, hanya 70 persen wajah kota yang tertata dengan baik. Penataan ruang kota yang belum baik akan menghambat tercapainya kehidupan yang nyaman dan produktif. Penataan ruang kota juga menentukan masa depan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya dijelaskan bahwa hal ini terjadi karena rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah, pembangunan masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan memperoleh keuntungan ekonomi sering menimbulkan eksploitasi SDA sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas SDA dan lingkungan. Selain itu, belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur antar bidang sehingga upaya untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan menjadi terhambat, termasuk belum tersedianya Dokumen Tata Bangunan dan Lingkungan yang berwasawan Lingkungan dan Berkelanjutan.

3. Penanganan persampahan yang masih belum optimal

Isu penanganan persampahan di Kota Salatiga yang masih belum optimal ditunjukkan pada data hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 berupa data volume sampah yang meningkat. Adapun volume sampah di Kota Salatiga tahun 2022 meningkat menjadi 448,9 m3 dari tahun 2019 sebesar 342,18 m3. Selain itu, pada data capaian kinerja pada indikator penanganan persampahan dan pengangkutan sampah berada pada tren meningkat, namun cenderung stagnan pada tiga tahun terakhir, sedangkan pada indikator pengurangan persampahan mengalami penurunan. Isu persampahan yang ada di Kota Salatiga yakni berkaitan dengan usia TPA yang tersisa 4 tahun.

Sampah domestik merupakan permasalahan krusial yang harus ditangani dan ditingkatkan penanganannya. Hal ini diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan baik pencemaran udara, air dan tanah yang diakibatkan oleh timbulan sampah domestik yang tidak tertangani.

Mengacu pada hasil proyeksi produksi sampah di Kota Salatiga tahun 2025-2045 terus mengalami peningkatan, maka hal ini perlu menjadi fokus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan strategi atau teknologi pengelolaan sampah dan sarana prasarana persampahan di masa sekarang agar pada waktu yang akan datang volume sampah di Kota Salatiga tidak mengalami over capacity.

Harapannya kedepan dapat menciptakan TPA dengan Sistem Sanitary Landfill. Oleh karena adanya bahaya pencemaran air tanah oleh air lindi TPA sampah maka pengelolaan TPA sampah yang baik sangat diperlukan. Hal ini mengingat Kota Salatiga tidak memiliki sumber mata air yang mencukupi, dan beberapa tempat mengambil air tanah sebagai sumber air bersih masyarakat sehingga kualitas air tanah yang baik sangat penting untuk mensuplai kebutuhan air masyarakat.

3.1.2 Aspek Daya Saing

A. Perkembangan ekonomi lokal yang belum optimal

Daya Saing Ekonomi Daerah yang menjadi permasalahan utama Kota Salatiga adaalah perkembangan ekonomi lokal yang belum optimal. Ekonomi local merupakan proses pembangunan ekonomi yang menitik beratkan pada kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Sehingga hubungan yang terbentuk antara pihak-pihak tersebut akan sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan dari pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal di Kota Salatiga belum berjalan secara optimal hal ini terlihat dari masih rendahnya UKM yang mampu mengakses permodalan serta rendahnya kualitas produk oleh UKM, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum melaksanakan pembinaan kepada UKM secara optimal. Selain itu rendahnya kegiataan pemantauan dan pengawasan penanaman modal juga menjadi penghambat perkembangan ekonomi lokal.

Isu daya saing daerah ini juga berkaitan dengan nilai investasi dan Industri kecil menengah (IKM) di Kota Salatiga. Hasil evaluasi RPJPD Kota Salatiga tahun 2005-2025 menunjukkan nilai investasi yang menurun serta IKM di Kota Salatiga menurun dan tumbuh lambat, selain itu kontiribusi sektor IKM terhadap PDRB masih belum optimal.

B. Masih adanya hunian yang belum layak

Salah satu daya saing fasilitas/infrastruktur dasar yang menjadi permasalahan utama Kota Salatiga dalah terbatasnya ketersediaan rumah layak huni, sehat, aman dan terjangkau. Rumah yang belum layak huni, belum sehat dan harga terjangkau merupakan rumah yang masuk dalam rumah kumuh. Ketersediaan rumah layak huni selama 5 tahun terakhir sudah diatas 90 persen (91,4%) sehingga dapat dikatakan baik, namun belum mencapai target. Sedangkan untuk luasan kawasan kumuh hanya tinggal 1,93 persen pada tahun 2021.

Permukiman kumuh seringkali banyak dijumpai rumah tidak layak huni. Rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kota Salatiga tahun 2005-2025 masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan. Walaupun adanya program pemerintah berupa bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin, sebagai faktor pendorong tercapainya kinerja program, akan tetapi hasil yang diperoleh belum optimal.

Ketersediaan layanan air bersih dan sanitasi yang belum optimal. Dua hal ini akan menentukan tingkat kesehatan masyarakat kota. Meskipun hampir seluruh penduduk Kota Salatiga sudah dapat mengakses air bersih (99%), ternyata masih ada lokasi tertentu yang tidak terjangkau layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selain itu, masih ada 12 persen penduduk Kota Salatiga yang tidak terhubung ke sistem pengelolaan air limbah domestik komunal.

Isu sanitasi permukiman akan sangat berkaitan dengan kesejahteraan dan tingkat perekonomian penduduk, oleh karena itu, penyelesaiannya perlu dilakukan segera secara bersinergi dengan sektor lainnya.

Terbatasnya informasi kebencanaan, peta rawan bencana, kajian resiko bencana dan perencanaan penanggulangan bencana, belum optimalnya kualitas dan kuantitas data pertanahan dan pemetaan tanah, dan belum optimalnya kualitas data untuk perencanaan daerah. Kekurangan pada keterbatasan data yang berkualitas dan terbaharui akan membuat pelaksanaan penanggulangan bencana dan perubahan iklim menjadi kurang optimal.

C. Penyediaan jalan yang belum optimal

Jalan merupakan salah satu pilar infratruktur pada Daya Saing Failitas/Infrastruktur Wilayah. Belum optimalnya peningkatan ataupun penyediaan infrastruktur utama jalan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah kunci bagi mobilitas yang lancar dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Jalan dan jembatan yang baik belum mencapai 100 persen, bahkan, kecukupan jembatan hanya 11 persen. Hal ini tentu akan menghambat mobilitas penduduk. Jalan merupakan infrastruktur pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Meningkatnya usaha pembangunan maka akan meningkat pula tuntutan peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Berdasarkan dokumen evaluasi RPJPD Kota Salatiga tahun 2005-2025 dijelaskan bahwa kinerja pelayanan prasarana jalan yang didasarkan atas kecepatan yang mampu dicapai oleh kendaraan masih rendah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kemiskinan

Kemiskinan di Kota Salatiga adalah masalah yang perlu diperhatikan, seperti yang terjadi di banyak kota di seluruh dunia. Kota Salatiga, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, memiliki berbagai tantangan dan aspek yang perlu dipertimbangkan terkait kemiskinan. Angka kemiskinan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis terus mengalami tren peningkatan pada periode 2017-2021. Grafik persentase tingkat kemiskinan Kota Salatiga tahun 2017-2021 menunjukkan adanya dinamika. Berdasarkan data lima tahun terakhir, tahun 2021 menunjukkan kenaikan sebesar 0,38% dibanding tahun 2019. Tingkat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir paling tinggi berada pada tahun 2021 sebesar 5,14%. Kenaikan angka ini salah satunya diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

Isu kemiskinan juga terkait dengan ketenagakerjaan. Namun, permasalahan ketenagakerjaan di Kota Salatiga yang menjadi sorotan berkaitan dengan serapan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Salatiga. Banyak Perusahaan di Kota Salatiga yang pekerjanya berasal dari luar kota. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia (SDM) di Kota Salatiga banyak yang tidak memenuhi kualifikasi.

Permasalahan ketenagakerjaan lainnya, yaitu pengangguran terdidik. Penangguran terdidik merujuk pada situasi di mana individu yang memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang baik mengalami pengangguran atau kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan mereka. Ini adalah masalah yang umumnya dihadapi oleh lulusan universitas, sarjana, dan orang-orang yang telah mendapatkan pelatihan lanjutan atau spesialisasi dalam bidang tertentu. Penyebab pengangguran terdidik, yaitu Ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, kesenjangan keterampilan, persaingan yang ketat, ketidakstabilan ekonomi, dan masalah geografis. Cara mengatasi penangguran terdidik, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan dan penyesuaian dengan perubahan dalam tuntutan pasar kerja, serta dukungan dalam pencarian pekerjaan, pelatihan, dan pendampingan karir. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan memfasilitasi serapan tenaga kerja yang lebih baik bagi lulusan dan pekerja terdidik. Namun, permasalahan pengangguran terdidik ini tidak berkaitan dengan kemiskinan.

B. Kesenjangan pendapatan yang tinggi

Kesenjangan pendapatan yang tinggi di Kota Salatiga adalah fenomena yang menggambarkan perbedaan pendapatan yang signifikan antara kelompok penduduk di kota tersebut. Perbedaan pendapatan ini dapat menjadi masalah serius yang memengaruhi kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi di kota tersebut. Kesenjangan pendapatan di Kota Salatiga ditunjukkan pada angka indeks gini pada tiga tahun terakhir yang menunjukkan tren meningkat. Selain itu,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kesenjangan pendapatan ini dapat berkaitan dengan isu masih rendahnya kontribusi UKM, IKM dan Investasi.

C. Pendidikan usia dini yang masih rendah

Pembangunan pendidikan di Kota Salatiga tergolong baik dengan ditunjukkan adanya tren yang meningkat tiap tahunnya pada indikator RLS, HLS, dan AMH. Selain itu, APM dan APK juga menunjukan tren yang meningkat tiap jenjang pendidikan. Namun, berdasarkan data isu pendidikan di Kota Salatiga ini berada pada pendidikan usia dini yang capaiannya masih rendah bahkan dibawah target. Selain itu, persentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA juga mengalami tren yang menurun drastis Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 dijelaskan bahwa belum terlaksananya pengawasan perizinan pendirian sekolah baru yang sejenis secara optimal merupakan faktor penghambat pendidikan usia dini.

D. Masih terdapat angka putus sekolah

Berdasarkan data menunjukkan bahwa untuk menuju zero angka putus sekolah hingga sampai saat ini belum terwujud walaupun relatif sangat kecil angka putus sekolah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar dapat mencapai zero angka putus sekolah. Selain itu, masih adanya angka putus sekolah ini juga dapat dikaitkan dengan adanya permasalahan kenakalan remaja yang belum tertangani dengan baik. Dimana terjadi kasus pernikahan dini pada remaja yang disebabkan karena kurangnya kontrol pergaulan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.

E. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan masyarakat

Masih terdapat balita dengan kondisi gizi buruk (stunting). Terkait gizi buruk salah satunya adalah kejadian stunting (Gizi kronis), dimana Kota Salatiga saat ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 11,84 persen tahun 2021 dan tersebar pada semua Kecamatan dan Kelurahan di Kota Salatiga. Masih adanya kejadian Stunting ini akan mempengaruhi secara nyata pada kualitas Sumberdaya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang. Kasus stunting yang terjadi di Kota Salatiga menjadi salah satu isu kesehatan pada anak yang harus diperhatikan. Permasalahan stunting merupakan isu yang faktor penyebabnya datang dari berbagai dimensi. juga diakibatkan oleh banyak dimensi.

Kasus stunting di Kota Salatiga disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu pola asuh dalam keluarga, akses air bersih, dan sanitasi serta kekurangan gizi kronis. Selain ketiga faktor tersebut, terdapat faktor lain yang juga berpengaruh terhadap terjadinya kasus stunting di Kota Salatiga yaitu faktor sosial-budaya dan ekonomi. Faktor sosial-budaya berkaitan dengan pernikahan dini dan faktor ekonomi berkaitan dengan pendapatan orang tua guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mutu layanan dan penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar serta pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan AKI, AKB, Gizi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

buruk, Balita Stunting, HIV AIDS, penyakit menular dan tidak menular belum dilaksanakan secara optimal.

F. Peningkatan jumlah dan porsi penduduk usia tua serta angka ketergantungan meningkat

Peningkatan jumlah dan porsi penduduk usia tua serta angka ketergantungan memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, ekonomi, dan sistem kesejahteraan. tantangan kesehatan dan perawatan, ketidakpastian keuangan, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tantangan pendidikan, perubahan dalam pasar tenaga kerja, penurunan mobilitas tenaga kerja, perubahan dalam struktur keluarga, dan penyediaan perumahan yang sesuai dengan lansia yang dapat mengakibatkan perubahan dalam permintaan perumahan.

Berdasarkan hasil proyeksi 20 tahun kedepan menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia tua (65-75+) mengalami peningkatan. Walaupun proyeksi jumlah penduduk usia produktif di Kota Salatiga juga meningkat, tetapi porsinya terus berkurang. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk usia tua berbanding lurus dengan porsinya, yakni sama-sama meningkat. Hal ini juga ditunjukan pada angka ketergantungan yang terus meningkat. Walaupun angka ketergantungan tersebut masih berada dibawah 50, tetapi hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar pada tahun 2045 tetap bisa mendapatkan bonus demografi. Selain itu, kondisi ini juga memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir

3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

A. Kualitas Pelayanan Publik yang Belum Optimal

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Salatiga terlihat pada belum optimalnya pelayanan perangkat daerah di berbagai urusan (kesehatan, kecamatan/kelurahan, ketentraman, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan, perhubungan, perdagangan). Beberapa perangkat daerah belum mendasarkan pelayanannya pada standar operasional prosedur serta mengakomodir perubahan peraturan pelayanan-pelayanan masyarakat terbaru.

B. Data dan manajemen data yang kurang berkualitas

Isu lainnya yang berkaitan dengan tata Kelola pemerintahan di Kota Salatiga yakni berkaitan dengan data. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 dijelaskan bahwa Kota Salatiga kurang komitmen tentang keterbukaan informasi. Selain itu, dijelaskan pula yang menghambat dalam hal manajemen data yakni peran Wali Data yang kurang optimal dalam mengupdate data statistik sektoral, seperti pada portal Dataku. Kuranganya kualitas data dan manajemen data pada Kota Salatiga dapat ditunjukkan pada terbatasnya informasi kebencanaan, peta rawan bencana, kajian resiko bencana dan perencanaan penanggulangan bencana, belum optimalnya kualitas dan kuantitas data pertanahan dan pemetaan tanah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dan belum optimalnya kualitas data untuk perencanaan daerah. Kekurangan pada keterbatasan data yang berkualitas dan terbaharui akan membuat masyarakat tidak puas dengan pelayanan publik dan stakeholder sulit melakukan pengembangan program pembangunan.

C. Pemanfaatan sistem berbasis digital yang masih kurang

Pemanfaatan sistem berbasis digital dalam pemerintahan, yang dikenal sebagai e-government atau pemerintahan elektronik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi dalam layanan pemerintah. Pemerintah dapat memanfaatkan sistem berbasis digital untuk Layanan Online, Portal Pemerintah, Sistem Manajemen Kepegawaian, E-Procurement, Partisipasi publik, keamanan data, dan smart city. Pemanfaatan sistem berbasis digital yang masih kurang di Kota Salatiga berdasarkan evaluasi RPJPD disebabkan oleh masih banyak aplikasi yang dibuat pihak ke 3 tanpa pendampingan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi. Namun, disisi lain terdapat faktor pendorong untuk mengoptimalkan sistem berbasis digital dengan merintis single Sign On (SSO) di beberapa aplikasi.

Dalam rangka memperkuat Sistem Inovasi nasional (SINas) maka diperlukan dukungan dari tingkat lebih bawah atau daerah. Dukungan tersebut dapat diimplementasikan dengan sistem inovasi daerah (SIDa) yang merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional. Terdapat beberapa implementasi SIDa di Kota Salatiga yang belum optimal seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Manajemen Pertanahan, Sistem Informasi Puskesmas, SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), SINAS, Informasi Kependudukan, dan lain-lain.

D. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga/Instansi

Kurangnya koordinasi antar lembaga merupakan isu tata Kelola pemerintah yang sering terjadi di tiap daerah. Hal ini merujuk pada kurangnya komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga atau departemen yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kebijakan atau tugas dalam sebuah entitas. Dampak dari kurangnya koordinasi antar lembaga dapat berdampak negatif pada efisiensi, efektivitas, dan pengambilan keputusan.

Kurangnya koordinasi antar Lembaga di Kota Salatiga disebabakan karna belum optimalnya fungsi beberapa perangkat daerah sebagai koordinator/fasilitator antar perangkat, belum tersedianya sistem logistik (penyediaan dan distribusi) pangan serta koordinasi dan sinkronisasi pengelolaannya, rendahnya koordinasi ketahanan pangan, minimnya pengawasan keamanan pangan, minimnya pengawasan penanaman modal, serta rendahnya pemantauan limbah industri. Koordinasi dan sinkronisasi antar urusan layanan publik merupakan suatu keharusan dalam memecahkan masalah multisektor. apabila hal ini tidak diselesaikan, maka akan ada banyak program pembangungan yang tumpang tindih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah. Selain itu, pencapaian target kinerja daerah juga tidak akan tercapai jika terdapat kekosongan koordinasi.

3.2 Isu Strategis

3.3.1. Isu Strategis Internasional

Perencanaan pembangunan daerah menuntut berbagai macam intervensi dan penanganan yang termanifestasi dalam program dan penganggaran. Intervensi dan penanganan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tersebut dan isu-isu strategis di daerah. Berbeda dengan permasalahan, isu strategis mencakup potensi dampak yang dapat ditimbulkan serta signifikansi dari dampak tersebut terhadap pembangunan dan operasional daerah tersebut. Signifikansi dampak atau potensinya dinilai berdasarkan urgensi, luasan, intensitas, dan jumlah masyarakat atau penduduk yang dapat terdampak dari isu tersebut. Selain itu, isu strategis juga memiliki cakupan yang lebih umum dan dapat terkait antara satu isu dengan isu yang lain baik secara longitudinal (horizontal) maupun hirarkikal (vertical).

Karena dampaknya, isu strategis juga terkait dengan proyeksi dan dan tujuan serta mitigasi suatu daerah di masa mendatang. Oleh sebab itu, perumusan isu strategis menjadi sangat krusial dalam suatu perencanaan daerah sebagai landasan dalam memperkirakan tren dan tantangan atau permasalahan yang dapat muncul di masa atau tahun-tahun berikutnya.

A. Kemiskinan Global

Kemiskinan global adalah masalah kompleks dan mendalam yang mempengaruhi miliaran orang di seluruh dunia. Kemisikinan global merupakan kondisi ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, seperti makanan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dalam konteks pendapatan, kemiskinan ditunjukkan dengan keluarga hidup dengan pendapatan yang jauh di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional.

Kemiskinan seringkali terkait dengan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya di seluruh dunia. Beberapa negara atau wilayah memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, dan ada kesenjangan yang tajam antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan global, termasuk konflik bersenjata, perubahan iklim, ketidakstabilan politik, kurangnya akses ke pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, dan layanan kesehatan yang memadai. Ketidaksetaraan gender juga berperan dalam memperburuk kemiskinan bagi perempuan di banyak bagian dunia. Kemiskinan memiliki dampak yang merusak baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Dampaknya meliputi kelaparan, penyakit, ketidaksetaraan pendidikan, dan kurangnya akses ke layanan dasar. Ini juga dapat memicu konflik sosial, migrasi paksa, dan berbagai masalah sosial lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Banyak organisasi internasional, pemerintah, dan LSM telah berusaha mengatasi kemiskinan global melalui program-program bantuan, pembangunan ekonomi, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan upaya-upaya lainnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB mencakup penurunan kemiskinan global sebagai salah satu target utama. Kemiskinan global masih menjadi tantangan besar di masa depan, terutama mengingat berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim, krisis kesehatan global, dan perubahan teknologi juga akan memengaruhi dinamika kemiskinan global.

B. Resesi Ekonomi

Resesi ekonomi merupakan periode ketika aktivitas ekonomi di suatu negara atau wilayah mengalami penurunan yang signifikan. Resesi sering kali menyebabkan masalah ekonomi seperti peningkatan pengangguran, penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), dan ketidakpastian ekonomi secara umum. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor global atau regional yang mempengaruhi banyak ekonomi di seluruh dunia. Resesi ekonomi sering kali dipicu oleh peristiwa atau faktor-faktor global, seperti krisis keuangan global, penurunan permintaan global, fluktuasi harga komoditas global, atau ketidakstabilan mata uang internasional. Resesi semacam ini dapat menyebar ke banyak negara dan wilayah di seluruh dunia. Penurunan permintaan dan investasi global dapat memiliki dampak luas pada perekonomian yang terhubung secara global.

Negara-negara yang terkena resesi sering mengalami penurunan dalam ekspor dan pertumbuhan ekonomi domestik mereka, yang dapat mengarah pada peningkatan tingkat pengangguran dan ketidakstabilan finansial. Dalam menghadapi resesi ekonomi, kerja sama antar negara dalam mengambil tindakan kebijakan menjadi penting. Negara-negara dapat berusaha untuk mengkoordinasikan stimulus ekonomi dan tindakan lainnya untuk meminimalkan dampak resesi. Organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan finansial dan saran kebijakan kepada negara-negara yang terkena dampak resesi ekonomi internasional.

Durasi dan keparahan resesi internasional dapat bervariasi. Beberapa resesi mungkin singkat dan diikuti oleh pemulihan yang cepat, sementara yang lain dapat berlangsung lebih lama dan memiliki dampak yang lebih serius. Contoh nyata dari resesi ekonomi yakni Krisis Keuangan Asia 1997, Krisis Keuangan Global 2008, dan dampak ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Semua ini adalah contoh-contoh situasi di mana faktor-faktor global mempengaruhi perekonomian banyak negara secara bersamaan.

C. Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim menjadi perhatian utama karena mencakup kebencanaan dan juga terkait dengan sektor energi dan pangan sebagai sektor yang terdampak langsung. Energi menjadi sorotan mengingat sektor ini menyumbang gas rumah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kaca (GRK) yang turut berkontribusi pada pemanasan global. Gangguan terhadap cuaca dan semakin tidak terprediksi juga mengganggu panen dan produksi bahan pangan. Perubahan iklim juga terkait dengan pemanasan global dan juga isu keadilan iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca diakibatkan karena berbagai permasalahan antara lain, alih fungsi lahan, aktivitas pertanian dan peternakan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan energi fosil berlebihan, serta limbah domestik yang tidak terkelola, terlebih adanya peningkatan jumlah penduduk meningkat serta tingginya mobilitas masyarakat yang mempengaruhi perubahan iklim.

Melalui Paris Agreement to The United Nations Framework Conservation on Climate Change atau Persetujuan Paris atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim bahwa negara G20 disarankan untuk menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca sebagai bentuk untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, peran daerah Kota Salatiga penting dalam berkontribusi melaksanakan kegiatan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca di berbagai sektor.

D. Isu Geopolitik dan Stabilitas Regional

Isu geopolitik dan stabilitas regional terkait dengan friksi atau gesekan antar negara yang terkait dengan ancaman. Perang dan konflik, yang terkini salah satunya adalah invasi Rusia ke Ukraina, menjadi perhatian karena mengganggu suplai energi dan pangan secara global. Apabila perang Rusia dan Ukraina berlangsung jangka panjang, tentunya akan mempengaruhi stabilitas keamanan dan ekonomi Indonesia. Adapun pengaruh perang yaitu akan terjadinya ketidakstabilan harga minyak dunia yang meroket, terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah dan ekspor impor yang terganggu. Perang antara Rusia dan Ukraian meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut China Selatan. Selain itu, perang dapat mendorong negara lainnya mencari instrumen militer, sehingga dapat meningkatkan ketegangan antarnegara yang dapat memungkinkan adanya konflik atau perang di masa depan.

E. Perubahan Demografi Global

Perubahan demografi global adalah transformasi dalam struktur dan karakteristik populasi dunia. Hal ini mencakup perubahan dalam jumlah, usia, jenis kelamin, distribusi geografis, dan komposisi etnis serta faktor-faktor lain yang memengaruhi komposisi penduduk secara global. Perubahan demografi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi global saat ini berjumlah lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal ini memberikan tantangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dalam penyesuaian antara kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dengan sumber daya yang terbatas.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, pertumbuhannya terus melambat. Perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa populasi dunia akan mencapai 8,5 miliar dan 9,5 miliar jiwa pada tahun 2030 dan 2045. Hal ini disebabkan oleh menurunnya angka kematian dan rata-rata harapan hidup orang saat lahir meningkat. Terkait proporsi demografi seperti kelompok penduduk usia tua (aging population) yang dan jumlah penduduk usia muda yang meningkat akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

3.3.2. Isu Strategis Nasional

Dalam posisinya, isu-isu strategis di Kota Salatiga dirumuskan terkait dengan konteks Kota Salatiga dalam konstelasi regional dan posisinya secara nasional. Isu strategis tersebut disintesis berdasarkan pembacaan situasi dan kondisi terkini.

Di tingkat nasional, isu-isu strategis tertuang dalam Perencanaan jangka panjang Nasional lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subjek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Adapun isu-isu strategis RPJP Nasional Tahun 2025-2045 antara lain:

Tabel 3. 1 *Isu strategis Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045*

No	KATEGORI ISU	ISU DAN TANTANGAN
1	EKONOMI	Produktivitas rendah
2		Kemiskinan
3		Kontribusi UMKM terhadap perekonomian relatif rendah
4		Ketimpangan wilayah masih cukup tinggi
5		Penerapan ekonomi hijau yang masih terhambat
6	SOSIAL BUDAYA	Angka ketergantungan meningkat
7		Pembangunan kesehatan yang belum optimal
8		Kualitas pendidikan yang masih rendah dan belum merata karena disparitas pendidikan
9		Masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya RDTR kabupaten/kota yang tersedia,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	KATEGORI ISU	ISU DAN TANTANGAN
10	TATA KELOLA	Tata kelola pemerintah yang kurang efektif dan akuntabel
11		Belum meratanya kualitas pelayanan publik
12		Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan berbagai tantangan mendasar
13		Lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga
14	INFRASTRUKTUR	Pembangunan infrastruktur yang masih rendah
15		Kesenjangan pembangunan sarana prasarana dasar antara jawa dan luar jawa
16		Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau,
17	LINGKUNGAN	Sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana.
18		Terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan,
19		Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
20		Tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan.
21		Masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS)

Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJP Nasional

Berdasarkan dokumen RPJP Nasional terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global berpotensi mengembangkan kondisi sosial ekonomi global, namun dapat memberikan disrupsi. Adapun megatren global menuju 2045:

1. **Perkembangan Demografi Global**
   - Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar
   - Porsi LANSIA meningkat
2. **Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi**
   - Eskalasi persaingan antar negara dan kemunculan kekuatan baru
   - Nilai *output* negara berkembang mencapai 71%
3. **Disrupsi teknologi**
   - Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini
4. **Peningkatan Urbanisasi Dunia**
   - Penduduk perkotaan 65%
   - Peranan PDB 70%
5. **Peningkatan Peran Perdagangan Internasional**
   - Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun
6. **Perubahan Keuangan Internasional**
   - Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi multi currencies
7. **Peningkatan Penduduk Kelas Menengah**
   - Jumlah *middle* dan *upper income class* lebih dari 90% (8,8 miliar)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8. Peningkatan Persaingan Sumber Daya Alam

- Peningkatan peranan ekonomi asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA

9. Perubahan Iklim

- Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana

10. Pemanfaatan Luar Angkasa

- Ekonomi Antariksa
- Kelestarian Antariksa
- Keamanan Antariksa

Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2025-2045 memiliki visi:

"Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan"

Visi tersebut diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 Indikator Utama Pembangunan. Delapan misi (agenda) pembangunan terdiri dari tiga misi tranformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangaka implementasi transformasi. Misi pembangunan nasional Tahun 2025-2045 yaitu:

1. Transformasi Indonesia

1) Transformasi Sosial
2) Transformasi Ekonomi
3) Transformasi Tata Kelola

2. Landasan Transformasi

1) Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
2) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

3. Kerangka Implementasi Transformasi

1) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
2) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
3) Kesinambungan Pembangunan

Selanjutnya, kedelapan misi (agenda) tersebut dijabarkan atau dilaksanakan melalui 17 arah (tujuan) pembangunan, yang meliputi:

1. Kesehatan untuk Semua
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
4. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
5. Penerapan Ekonomi Hijau
6. Transformasi Digital
7. Intergrasi Ekonomi Domestik dan Global

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
9. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
10. Stabilitas Ekonomi Makro
11. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
12. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
13. Beragama Masalahat dan Berkebudayaan Maju
14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
15. Lingkungan Hidup Berkualitas
16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

3.3.3. Isu Regional Provinsi Jawa Tengah

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah terdapat isu-isu strategis Tahun 2025-2045 antara lain:

Tabel 3. 2 *Isu strategis Provinsi Jawa Tengah 2025-2045*

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	DAYA SAING	Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal	Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
2		Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Ketahanan Pangan Berkelanjutan
3		Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
4	GEOGRAFI	Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
5	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
6		Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat
7	PELAYANAN UMUM	Belum optimalnya reformasi birokrasi	Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Sumber: Pemaparan dalam Orientasi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.3.4. Isu Regional Kota Salatiga

3.2.4.1. Telaah RTRW Kota Salatiga tahun 2023-2043

Penataan ruang wilayah Kota Salatiga bertujuan untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, jasa, dan destinasi wisata yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang didukung oleh sektor pendidikan, olahraga, serta industri. Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023-2043 terdapat kebijakan penataan ruang Kota Salatiga yang meliputi:

1. Pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan destinasi wisata;
2. pengembangan sistem jaringan transportasi untuk memperlancar pergerakan antar pusat kegiatan;
3. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
4. perwujudan RTH kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas wilayah kota;
5. peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
6. pengelolaan dan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
7. peningkatan kualitas pemanfaatan ruang;
8. pengembangan kegiatan dan kawasan pendidikan;
9. penataan kawasan olahraga dan pariwisata;
10. pengembangan industri yang mempertimbangkan resiko lingkungan; dan
11. peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

3.2.4.2. Isu Strategis RPJPD Kota Salatiga

Isu strategis adalah suatu keadaan yang dapat menjadi permasalahan atau peluang bagi suatu daerah di masa yang akan datang. Permasalahan strategis juga dapat berkaitan dengan potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan jika dikelola dengan baik dapat menjadi sumber modal pembangunan yang penting. Isu-isu strategis Kota Salatiga dalam dokumen RPJPD 2025-2045 merupakan sintesa isu-isu strategis dalam berbagai tingkatan dan pertimbangan, antara lain isu internasional, isu nasional yang tertuang dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, isu provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah, serta dokumen KLHS dan RTRW. Adapun isu strategis Kota Salatiga 2025-2045 dapat ditelaah sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

***Tabel 3. 3** Telaah Isu Internasional, Nasional, Provinsi dan Kota*

No	Telaah Isu Internasional	Nasional		Provinsi Jawa Tengah			Kota Salatiga				
		Kategori Isu Nasional	Permasalahan Nasional	Aspek Permasalahan	Permasalahan Provinsi	Telaah Isu Provinsi	Kategori Isu Kota Salatiga	Telaah Isu KLHS	Permasalahan	Permasalahan Utama	Isu Daerah
1	Kemiskinan Global	Ekonomi	Produktivitas rendah	Daya Saing	1. Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Kemiskinan	Tingkat Kesejahteraan yang Belum Merata	Kesejahteraan yang Adil dan Merata
	Resesi ekonomi		Kemiskinan		2. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	2. Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan			Kesenjangan pendapatan yang tinggi		
			Kontribusi UMKM terhadap perekonomian relatif rendah		3. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah	3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan			Perkembangan ekonomi lokal yang belum optimal	Rendahnya Daya Saing Daerah	Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing
			Ketimpangan wilayah masih cukup tinggi								
			Penerapan ekonomi hijau yang masih terhambat								
2	Perubahan Demografi Global	Sosial Budaya	Angka ketergantungan meningkat	Kesejahteraan Msyarakat	4. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	4. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Sosial Budaya	Kualitas SDM	Peningkatan jumlah dan porsi penduduk usia tua serta angka ketergantungan meningkat	Peningkatan Jumlah dan Porsi Penduduk Usia Tua serta Angka Ketergantungan Meningkat	Bonus Demografi
			Pembangunan kesehatan yang belum optimal		5. Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat	5. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat			Pendidikan usia dini yang masih rendah	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Optimal	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Telaah Isu Internasional	Nasional		Provinsi Jawa Tengah			Kota Salatiga				
		Kategori Isu Nasional	Permasalahan Nasional	Aspek Permasalahan	Permasalahan Provinsi	Telaah Isu Provinsi	Kategori Isu Kota Salatiga	Telaah Isu KLHS	Permasalahan	Permasalahan Utama	Isu Daerah
			Kualitas pendidikan yang masih rendah dan belum merata karena disparitas pendidikan						Masih terdapat angka putus sekolah		
			Masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya RDTR kabupaten/kota yang tersedia						Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan masyrarakat		
3		Tata Kelola	Tata kelola pemerintah yang kurang efektif dan akuntabel	Tata Kelola	6. Belum optimalnya reformasi birokrasl	6. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan	PenanKualitas Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Kualitas Tata Kelola Pemerintahaan yang Masih Kurang	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Adaptif
			Belum meratanya kualitas pelayanan publik						Data dan manajemen data yang kurang berkualitas		
			Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan berbagai tantangan mendasar						Pemanfaatan sistem berbasis digital yang masih kurang		
			Lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga						Kurangnya Koordinasi Antra Lembaga/ Instansi		
4	Perubahan Iklim	Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur yang masih rendah	Geografi	7. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana	7. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Lingkungan	Daya Dukung Lingkungan	Persentase ketersedian Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang masih di bawah ideal	Rendahnya Pengelolaan Lingkungan dan Tantangan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Tantangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Telaah Isu Internasional	Nasional		Provinsi Jawa Tengah			Kota Salatiga				
		Kategori Isu Nasional	Permasalahan Nasional	Aspek Permasalahan	Permasalahan Provinsi	Telaah Isu Provinsi	Kategori Isu Kota Salatiga	Telaah Isu KLHS	Permasalahan	Permasalahan Utama	Isu Daerah
			Kesenjangan pembangunan sarana prasarana dasar antara jawa dan luar jawa						Penanganan persampahan yang masih belum optimal		Perubahan Iklim
			Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau						Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang		
5		**Lingkungan**	Sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana						Ketersediaan layanan air bersih dan sanitasi yang belum optimal		
			Terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkerlanjutan								
			Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan				**Infrastruktur**	Infrastruktur wilayah	Masih adanya hunian yang belum layak		
			Tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan						Penyediaan jalan yang belum optimal		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Telaah Isu Internasional	Nasional		Provinsi Jawa Tengah			Kota Salatiga				
		Kategori Isu Nasional	Permasalahan Nasional	Aspek Permasalahan	Permasalahan Provinsi	Telaah Isu Provinsi	Kategori Isu Kota Salatiga	Telaah Isu KLHS	Permasalahan	Permasalahan Utama	Isu Daerah
			Masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS)								

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berikut adalah pengelompokan isu di Kota Salatiga berdasarkan hasil telaah beberapa isu internasional, nasional, provinsi dan isu KLHS RPJPD.

1. **Kesejahteraan yang Adil dan Merata**

   Kesejahteraan sering menjadi fokus kebijakan sosial dan pembangunan di seluruh dunia. Kesejahteraan memiliki beberapa cakupan aspek, yakni aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan kekayaan materi, tetapi juga tentang kualitas hidup dan kebahagiaan. Dalam rangka peningkatan pemerataan kesejahteraan, maka terdapat beberapa isu yang masih perlu ditangani di Kota Salatiga, yakni berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan Masyarakat.

2. **Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing**

   Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu daerah dibandingkan daerah lain dalam menetapkan startegi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah, isu yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga yaitu perkembangan ekonomi lokal merupakan proses pembangunan ekonomi yang menitik beratkan pada kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Sehingga hubungan yang terbentuk antara pihak-pihak tersebut akan sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan dari pengembangan ekonomi lokal. Isu daya saing daerah ini juga berkaitan dengan nilai investasi dan Industri kecil menengah (IKM) di Kota Salatiga.

   Penyediaan infrastruktur dasar sebagai bentuk dukungan untuk Daya Saing Daerah juga menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam mencapai perekonomian yang berdaya saing. Kehidupan yang layak dimulai dengan perumahan yang layak, dan tindakan untuk meningkatkan kualitas perumahan dapat memberikan dampak positif yang besar pada kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga. Selain itu, belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur antar bidang sehingga upaya untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan menjadi terhambat, termasuk belum tersedianya Dokumen Tata Bangunan dan Lingkungan yang berwasawan Lingkungan dan Berkelanjutan.

3. **Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Tantangan Perubahan Iklim**

   Kondisi dan ketersediaan ruang terbuka hijau masih belum memadai sesuai dengan ketentuan, dimana salah satu tolok ukur pengaplikasian konsep Kota Hijau adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Ruang Terbuka Hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30 persen dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007). Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya menunjukkan bahwa data ketersediaan RTH di Kota Salatiga mengalami penurunan persentase yang selanjutnya berkontribusi besar terhadap indek

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kota Salatiga yang belum mencapai target (ketercapaian 61,3%).

Prosentase RTH setiap kelurahan di Kota Salatiga ditargetkan memenuhi persentase luasan RTH publik 20% dan persentase luasan RTH privat 10%, demikian pula perlu upaya untuk memenuhi kebutuhan RTH untuk skala yang lebih kecil, seperti taman RT dan taman RW.

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang salah satunya terjadi pada kasus pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan berpotensi bahaya/Rawan Bencana. Rendahnya ketaatan pada RTRW Kota Salatiga serta di Kota Salatiga disebabkan oleh terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga pengembangan penggunaan lahan akan mengarah pada penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Salatiga.

Isu penanganan persampahan di Kota Salatiga yang masih belum optimal juga menjadi salah satu isu lingkungan yang perlu diperhatikan dua puluh tahun ke depan. Volume sampah yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk menjadi permsalahan yang harus di atasi. Mengacu pada hasil proyeksi produksi sampah di Kota Salatiga tahun 2025-2045 terus mengalami peningkatan, maka hal ini perlu menjadi fokus pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan strategi atau teknologi pengelolaan sampah dan sarana prasarana persampahan di masa sekarang agar pada waktu yang akan datang volume sampah di Kota Salatiga tidak mengalami *over capacity*.

Harapaannya kedepan dapat menciptakan TPA dengan Sistem *Sanitary Landfill*. Oleh karena adanya bahaya pencemaran air tanah oleh air lindi TPA sampah maka pengelolaan TPA sampah yang baik sangat diperlukan. Hal ini mengingat Kota Salatiga tidak memiliki sumber mata air yang mencukupi, dan beberapa tempat mengambil air tanah sebagai sumber air bersih masyarakat sehingga kualitas air tanah yang baik sangat penting untuk mensuplai kebutuhan air Masyarakat.

Dengan demikian, perlunya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan upaya untuk menjawab tantangan perubahan iklim.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul

Isu strategis yang perlu diperhatikan untuk kota Salatiga dua puluh tahun kedepan adalah pendidikan untuk seluruh jenjang dan lapisan masyarakat, Kesehatan untuk semua dan perlindungan sosial.

Pendidikan usia dini yang masih rendah serta belum tercapainya zero angka putus sekolah menjadi permasalahan utama yang menjadi isu strategis pembentuk kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena kondisi ini juga dapat dikaitkan dengan adanya permasalahan kenakalan remaja yang belum tertangani dengan baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dimana terjadi kasus pernikahan dini pada remaja yang disebabkan karena kurangnya kontrol pergaulan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Masih terdapat balita dengan kondisi gizi buruk (*stunting)* berpengaruh nyata pada kualitas Sumberdaya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang. Kasus *stunting* yang terjadi di Kota Salatiga menjadi salah satu isu kesehatan pada anak yang harus diperhatikan. Permasalahan stunting merupakan isu yang faktor penyebabnya datang dari berbagai dimensi juga diakibatkan oleh banyak dimensi.

Selain kasus stunting, upaya pemenuhan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul.

5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Adaptif

Pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif mejadi isu penting untuk mengoptimalkan Tata Kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan Data dan penerapan manajemen data yang berkualitas dan terbaharui dalam pelayanan masyarakat dan pengembangan program pembangunan menjadi upaya strategis dalam peningkatan tata kelola pemerintahan. Selain itu, pemanfaatan sistem berbasis digital dalam pemerintahan, yang dikenal sebagai *e-government* atau pemerintahan elektronik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi dalam layanan pemerintah.

Koordinasi antar instansi dan perangkat daerah dengan peningkatan komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kebijakan atau tugas dalam sebuah entitas akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan dalam pengambilan Keputusan.

6. Bonus Demografi

Isu Bonus Demografi berupa peningkatan jumlah dan porsi penduduk usia tua serta angka ketergantungan meningkat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, ekonomi, dan sistem kesejahteraan. tantangan kesehatan dan perawatan, ketidakpastian keuangan, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tantangan pendidikan, perubahan dalam pasar tenaga kerja, penurunan mobilitas tenaga kerja, perubahan dalam struktur keluarga, dan penyediaan perumahan yang sesuai dengan lansia yang dapat mengakibatkan perubahan dalam permintaan perumahan.

Berdasarkan hasil proyeksi 20 tahun kedepan menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia tua (65-75+) mengalami peningkatan. Walaupun proyeksi jumlah penduduk usia produktif di Kota Salatiga juga meningkat, tetapi porsinya terus berkurang. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk usia tua berbanding lurus dengan porsinya, yakni sama-sama meningkat. Hal ini juga ditunjukan pada angka ketergantungan yang terus meningkat. Walaupun angka ketergantungan tersebut masih berada dibawah 50, tetapi hal ini perlu menjadi perhatian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pemerintah agar pada tahun 2045 tetap bisa mendapatkan bonus demografi. Selain itu, kondisi ini juga memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir.

3.3 Tantangan Pembangunan Daerah

3.3.1. Demografi

Peningkatan jumlah dan porsi penduduk usia tua serta angka ketergantungan meningkat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, ekonomi, dan sistem kesejahteraan. tantangan kesehatan dan perawatan, ketidakpastian keuangan, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tantangan pendidikan, perubahan dalam pasar tenaga kerja, penurunan mobilitas tenaga kerja, perubahan dalam struktur keluarga, dan penyediaan perumahan yang sesuai dengan lansia yang dapat mengakibatkan perubahan dalam permintaan perumahan.

Berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur dan angka ketergantungan menunjukkan bahwa Salatiga pada tahun 2045 akan mendapatkan Bonus demografi (The Window of Opportunity). Hal ini ditunjukkan dari besarnya angka ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Salatiga pada tahun 2045 adalah sebesar 42,66 persen. (catatan: bonus demografi terjadi apabila besarnya persentase angka ketergantungan di bawah 50 persen). Kondisi ini tentu memberi dampak yang sangat besar bagi Kota Salatiga apabila mampu memanfaatkan momentum ini dengan baik. Agar manfaat Bonus Demografi ini bisa dinikmati dan berdampak secara positif, maka harus memperhatikan 4 pilar, yaitu Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya pengendalian penduduk, Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan.

3.3.2. Perubahan Iklim, Daya Tampung dan Daya Dukung

A. Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim menjadi perhatian utama karena mencakup kebencanaan dan juga terkait dengan sektor energi dan pangan sebagai sektor yang terdampak langsung. Energi menjadi sorotan mengingat sektor ini menyumbang gas rumah kaca (GRK) yang turut berkontribusi pada pemanasan global. Gangguan terhadap cuaca dan semakin tidak terprediksi juga mengganggu panen dan produksi bahan pangan. Perubahan iklim juga terkait dengan pemanasan global dan juga isu keadilan iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca diakibatkan karena berbagai permasalahan antara lain, alih fungsi lahan, aktivitas pertanian dan peternakan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan energi fosil berlebihan, serta limbah domestik yang tidak terkelola, terlebih adanya peningkatan jumlah penduduk meningkat serta tingginya mobilitas masyarakat yang mempengaruhi perubahan iklim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

B. Daya Tampung dan Daya Dukung Lahan

1. Pangan

Berdasarkan hasil analisis DDDTLH diketahui bahwa produktivitas lahan pertanian untuk pemenuhan pangan (beras) mempunyai nilai < 0,12 ton/orang/tahun yang berarti bahwa Kota Salatiga mengalami defisit dalam pemenuhan pangan beras penduduk. Hal ini berarti bahwa Kota Salatiga belum mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat kotanya. Kondisi ini dapat tercermin dari luasan lahan pertanian yang 11% dari total luas administrasi Kota Salatiga memberikan dampak terhadap kecilnya produksi pertanian sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan Masyarakat.

2. Pemukiman

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa proyeksi nilai DDLB tahun 2044 sebesar 0,99. Hal ini berarti bahwa daya dukung lahan permukiman di Kota Salatiga termasuk dalam kategori terlampaui. Daya dukung lahan permukiman terlampaui berarti bahwa Kota Salatiga sudah tidak mampu menampung rencana pengembangan lahan terbangun, sehingga diarahkan dalam perencanaan Pembangunan direncanakan bangunan secara vertikal untuk menghemat lahan.

C. Daya Tampung dan Daya Dukung Air

Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air dalam Penyusunan KLHS RDTR yaitu:

1. Penghitungan Ketersediaan (Supply) Air

Potensi ketersediaan air Kota Salatiga sebesar 34.432.464,96 m3 per tahun. Total kebutuhan air di Kota Salatiga tahun 2045 sebesar 51.086.561 m3/tahun. Dari perhitungan proyeksi kebutuhan air di Kota Salatiga, kebutuhan air yang mengalami peningkatan kebutuhan volume tahun 2045 yaitu kebutuhan air domestik meningkat dari 16.616.621 m3/tahun menjadi 18.248.544 m3/tahun dan kebutuhan untuk aktivitas peternakan dari 258.347 m3/tahun menjadi 1.141.720 m3/tahun. Sedangkan kebutuhan air berbasis lahan mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan alih fungsi lahan dari lahan pertanian (sawah, ladang, kebun, tegalan) menjadi pola ruang terbangun.

2. Penghitungan Kebutuhan (Demand) Air

Perhitungan kebutuhan air di Kota Salatiga, menggunakan pendekatan standar kebutuhan air yang termuat di dalam Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari perhitungan proyeksi kebutuhan air di Kota Salatiga walauapun diproyeksikan mengalami penurunan dari 54.481.168 m3/tahun di tahun 2021 menjadi 51.086.561 m3/tahun di tahun 2045, tetapi jika dibandingkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dengan proyeksi ketersediaan air di Kota Salatiga, maka masih dalam kondisi defisit/terlampui. Proyeksi Status Daya Dukung Air Kota Salatiga dapat diketahui bahwa :

- Status Tahun 2021 :
  SA (34.432.464,96 m3/tahun) < DA (54.481.168 m3/tahun)
- Status Tahun 2045 :
  SA (34.432.464,96 m3/tahun) < DA (51.326.853 m3/tahun)

Status defisit/ terlampaui berarti bahwa Kota Salatiga tidak mampu memenuhi kebutuhan air.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045

Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, seluruh wilayah di Indonesia harus memiliki visi yang menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang selama 20 tahun untuk mendukung visi besar Indonesia Emas 2045 yang mengarahkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Perumusan visi di Kota Salatiga didasarkan pada beberapa konsideran dalam perencanaan pembangunan. Konsideran perumusan visi rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kota Salatiga, terdiri dari RPJP Nasional, RPJP Provinsi, tren global, tren regional, isu, permasalahan, dan potensi Kota Salatiga saat ini maupun yang menjadi tantangan 20 tahun ke depan, dan pertimbangan hasil pembangunan sebelumnya.

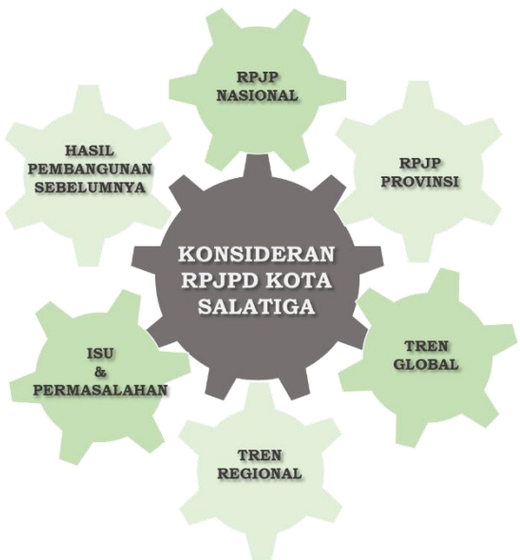

Gambar 4. 1 *Konsideran RPJP Kota Salatiga 2025-2045*

Kota Salatiga di masa mendatang menjadi harapan dan impian bagi seluruh masyarakat luas khususnya yang tinggal di Kota Salatiga, baik penduduk asli, pendatang, domisili maupun yang berkunjung di Kota Salatiga. Pembangunan di Kota Salatiga harus selaras dengan arah tujuan pembangunan di level regional atau level nasional. Berdasarkan pertimbangan kondisi Kota Salatiga saat ini, isu dan tantangan 20 tahun ke depan, potensi wilayah dan memperhatikan aspirasi dari *stakeholders* pembangunan, maka Visi Pembangunan Kota Salatiga tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 4. 2 *Perumusan Visi RPJPD Kota Salatiga*

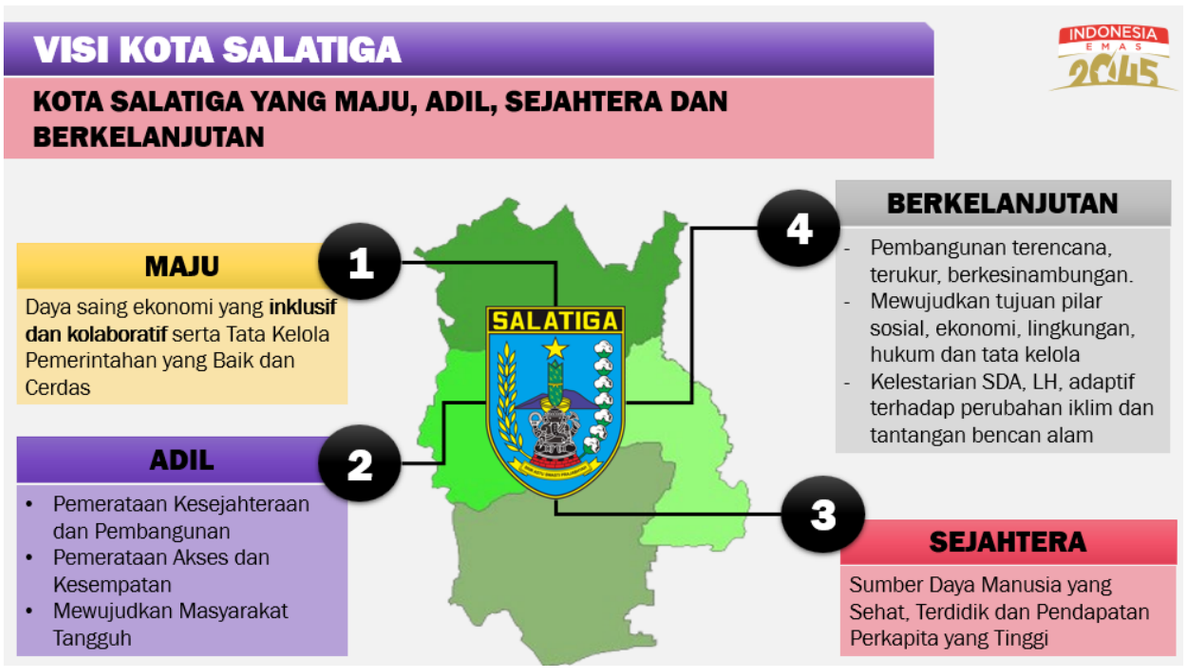

Gambar 4. 3 *Visi RPJPD Kota Salatiga*

"KOTA SALATIGA YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"

Visi pembangunan Kota Salatiga tahun 2025-2045 merupakan keberlanjutan visi pembangunan periode sebelumnya dan diharapkan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Salatiga dengan tetap berpedoman pada tujuan nasional seperti yang diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945, serta pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian pembangunan Kota Salatiga yang bekerlanjutan dapat terwujud dan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari masa ke masa.

Berdasarkan hal tersebut, maka visi Kota Salatiga dapat dijabarkan sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. **Daya Saing Ekonomi yang Inklusif dan kolaboratif serta Tata Kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.**

   Kota Salatiga diharapkan mampu berdaya saing dan tangguh secara perekonomian yang infklusif dan kolaboratif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal/sektor unggulan serta berpihak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, kemampuan daya saing perekonomian di Kota Salatiga ini juga diharapkan dapat menerapkan konsep ekonomi sirkular. Daya saing perekonomian yang baik diharapkan akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga.

   Selain itu perwujudan Maju di sektor tata Kelola pemerintahan adalah tata pemerintahan yang baik dan cerdas**.** Visi ini menyasar pada isu pelayanan publik, ketersediaan data, pemanfaatan TIK, dan koordinasi antar sektor. Dalam pembangunan kota diperlukan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah sebagai nahkoda pembangunan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik yang handal, tepat dan efisien melalui inovasi dan teknologi

2. **Pemerataan kesejahteraan, pembangunan, akses dan kesempatan serta mewujudkan masyarakat tangguh.**

   Masyarakat yang adil mencerminkan cita-cita dan harapan untuk mengembangkan Kota Salatiga menjadi tempat yang berkualitas, dinamis, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya serta memberikan pemerataan pembangunan, akses maupun kesempatan dalam memperoleh manfaat serta mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam seluruh aspek kehidupan. Target kemiskinan 0% tahun 2045 di RPJP Nasional, serta berdasarkan isu kemiskinan, ketimpangan, infrastruktur di Kota Salatiga merupakan hal yang disasar dalam visi ini. Melalui visi ini harapannya pembangunan Kota Salatiga menjadi lebih adil dengan pemerataan kesejahteraan, pembangunan, akses dan kesempatan.

3. **Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik dan Pendapatan Perkapita yang Tinggi.**

   Kualitas sumber daya manusia terdiri dari aspek pendidikan, dan kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Aspek-aspek ini merupakan kunci peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Dinamika demografis dan pertumbuhan populasi di Kota Salatiga ini tidak hanya dianggap sebagai tantangan, tetapi juga sebagai momentum yang signifikan untuk pembangunan. Pembangunan yang diupayakan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, dimana SDM yang berkualitas dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Kota Salatiga serta mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Visi ini untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik dan berpendapatan perkapita yang tinggi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. **Pembangunan terencana, terukur, berkesinambungan dan berkelanjutan.**
   Visi ini yang terkait dengan isu perubahan iklim dan tantangan lingkungan. Hal yang menjadi sasaran pada visi ini berkaitan dengan isu ketersediaan air bersih, persampahan, RTH, dan tata ruang serta penataan kawasan permukiman. Kawasan permukiman memiliki potensi untuk mitigasi dampak negatif dari perubahan iklim. Isu-isu tersebut termasuk penyebab perubahan iklim. Melalui visi pembangunan yang terencana, terukur, berkesinambungan dan berkelanjutan ini diharapkan dapat menciptakan landasan untuk membimbing pembangunan dan inisiatif di Kota Salatiga dalam mewujudkan tujuan pilar sosial, ekonomi, hukum dan tata kelola dan lebih siap menghadapi tantangan bencana alam dan perubahan iklim, sekaligus mempromosikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Visi RPJPD Kota Salatiga selaras dengan Visi RPJPD Provinsi jawa Tengah. Penyelarasan Visi RPJPD Kota Salatiga dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1 *Penyelarasan Visi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045*

VISI RPJPN	VISI RPJPD PROVINSI JAWA TENGAH	VISI RPJPD KOTA SALATIGA
Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	**Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan**	**Mewujudkan Kota Salatiga yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan**
MAJU Berdaya, Modern, Tangguh, Inovatif, Adil	**MAJU, meliputi substansi :** - Daya Saing - Modern - Inovatif - Mandiri - Tangguh - Aman	**MAJU** Daya Saing Ekonomi yang Inklusif dan kolaboratif serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Cerdas
BERDAULAT Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman	**SEJAHTERA** suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan	**ADIL** Pemerataan kesejahteraan dan pembangunan, pemerataan Akses dan kesempatan serta mewujudkan masyarakat tangguh
	BERBUDAYA Masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor	**SEJAHTERA** Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik dan Pendapatan perkapita yang tinggi
BERKELANJUTAN Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi	**BERKELANJUTAN, meliputi substansi :** - Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; - Risiko Bencana	**BERKELANJUTAN** - Pembangunan terencana, terukur, berkesinambungan. - Mewujudkan tujuan pilar sosial, ekonomi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

VISI RPJPN	VISI RPJPD PROVINSI JAWA TENGAH	VISI RPJPD KOTA SALATIGA
Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	**Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan**	**Mewujudkan Kota Salatiga yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan**
		lingkungan, hukum dan tata kelola - Kelestarian SDA, LH, adaptif terhadap perubahan iklim dan tantangan bencan alam
	TEMA KHUSUS : - Penumpu Pangan dan Industri Nasional	

4.2 Sasaran Visi Daerah Tahun 2025-2045

Dalam rangka mencapai visi Kota Salatiga sebagai Kota yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan, terdapat 5 Sasaran Visi Daerah Kota Salatiga yang juga selaras dengan Sasaran Visi Nasional dan Sasaran Visi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kelima Sasaran Visi Daerah Kota Salatiga dirumuskan untuk melihat dan mengukut ketercapaian Visi Daerah Kota Salatiga. Keterkaitan Sasaran Visi Daerah Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 2 *Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045*

No	RPJPN		RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kota Salatiga	
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator
1	Peningkatan Pendapatan per Kapita	GNI Per Capita (USD)	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Inklusif menuju peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per Kapita (Rp. Juta)
		Kontribusi PDB Maritim (%)		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Angka)		
		Kontribusi PDB Manufaktur (%)		Kontribusi PDRB sektor Industri (%)		
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	Pemerataan kesejahteraan dan pembangunan melalui Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	RPJPN		RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kota Salatiga	
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator
		Rasio Gini (Indeks)		Rasio Gini (Angka)		
		Kontribusi PDRB KTI (%)		Kontribusi PDRB Provinsi (%)		
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	Global Power Index (Peringkat)	Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat	Kapasitas Institusi (angka)	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Human Capital Index (Indeks)	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia (Angka)	Mewujudkan Tata Kelola yang dinamis dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi (angka)
5	Penurunan Emisi GRK menuju *Net Zero Emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission yang adaptif terhadap perubahan iklim	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO2eq)

Tabel 4. 3 *Target Sasaran Visi Daerah Kota Salatiga*

Sasaran Visi	Indikator	Tahun 2025	Target 2045
Peningkatan Daya Saing Ekonomi Inklusif menuju peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per Kapita ADHB	90,49 - 91,10 Juta Rupiah	462,00 – 542,61 Juta Rupiah
Pemerataan kesejahteraan dan pembangunan melalui Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Angka Kemiskinan	4,52% - 4,24%	0,21% - 0,00%
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	84,99	90,00
Mewujudkan Tata Kelola yang dinamis dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi	68,57	85,00
Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission yang adaptif terhadap perubahan iklim	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	24.158,45 $TonCO_2eq$	1.567.574,93 $TonCO_2eq$

Tabel 4. 4 *Target Indikator Sasaran Visi Daerah Kota Salatiga per tahapan*

Indikator	Target		Target per Tahapan			
	2025	2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
PDRB per Kapita ADHB (juta Rupiah)	90,49 - 91,10	462,00 - 542,61	91,11- 226,11	226,12 - 356,12	356,13 - 461,99	462,00-542,61
Angka Kemiskinan (%)	4,52 - 4,24	0,21 - 0,00	4,23-2,54	2,53-1,24	1,30-0,22	0,21 - 0,00
Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	84,99	90,00	86,19	87,71	88,96	90,00
Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	68,57	85,00	72,68	76,79	80,89	85,00
Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO2eq)	24.158,45	1.567.574,93	120.158,45	651.171,40	1.152.781,75	1.567.574,93

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4.3 Misi Daerah Tahun 2025-2045

Pemerintah Kota Salatiga merespon megatrend dan dinamika global maupun regional melaui kebijakan dan pembangunan yang adaptif. Perlu adanya transformasi dalam aspek pembangunan guna merespon tantangan, permasalahan, dan isu serta mewujudkan visi Kota Salatiga. Transformasi-transformasi tersebut dituangkan ke dalam strategi-strategi yang dapat dicapai, strategis, dan terukur.

Berdasarkan hal tersebut, maka Misi Kota Salatiga yang dirumuskan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Salatiga tahun 2025-2045 yang dijabarkan sebagai berikut:

***Gambar 4. 4** Misi RPJPD Kota Salatiga*

Misi 1: Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing melalui Pengembangan Sektor Unggulan yang Berkelanjutan

Perekonomian yang berdaya saing bertujuan untuk meningkatkan kemampuan suatu negara atau wilayah dalam bersaing di pasar global. Pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga merupakan hal yang perlu dipertahankan dan dioptimalkan. Melalui penguatan UMKM, IKM dan peningkatan nilai investasi maka perekonomian di Kota Salatiga ditargetkan dapat berdaya saing baik di tingkat regional maupun nasional.

Misi pertama ini diturunkan bertujuan untuk merespon isu strategis 20 tahun kedepan terkait daya saing, yaitu berupa perkembangan ekonomi lokal yang belum optimal di Kota Salatiga. Hal yang menjadi sorotan adalah terkait permodalan dan kualitas produk dari UMKM tersebut, sehingga perlu adanya langkah untuk mengatasinya. Selain itu juga terdapat isu investasi dan IKM yang menurun atau melambat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Misi 1: Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing mealui sektor unggulan yang berkelanjutan ini menjadi langkah untuk mengatasi isu terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Misi 2: Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

Kesejahteraan Masyarakat dan kemiskinan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Aspek kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan materi tetapi juga psikologis. Kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebutuhan dasar penduduk yang terpenuhi dan kualitas hidup yang meningkat. Misi Kedua ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan diturunkan untuk merespon permasalahan atau tantangan berupa kemiskinan. Kemiskinan menjadi isu yang perlu diperhatikan di Kota Salatiga, seperti yang terjadi di banyak kota di seluruh dunia.

Kemiskinan ekstrim yang saat ini menjadi prioritas penanganan dan upaya pengentasan menjadi 0 %, adalah salah satu isu yang perlu diselesaikan pada tahap pertama pembangunan. Walaupun pada tahun 2024, berdasarkan data kemiskinan yang telah divalidasi, menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrim yang masuk pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) untuk Kota Salatiga sudah tidak ada (0%), tetapi masih terdapat penduduk P2 yang perlu penanganan serius untuk menuju angka kemiskinan 0% pada tahun 2045.

Isu kemiskinan ini tidak hanya pada level regional, tetapi juga pada level nasional dan global. Misi ini menyasar pada permasalahan ketimpangan pendapatan di Kota Salatiga yang dibuktikan dengan nilai indeks gini Kota Salatiga mencapai 0,417 pada tahun 2023 dan menunjukkan tren yang meningkat tiga tahun terakhir.

Misi 3: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Aspek sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang krusial karena manusia merupakan aktor dalam pembangunan. Permasalahan SDM ini berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Adapun misi 3: Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing hadir untuk mengatasi permasalahan pendidikan, kesehatan, dan demografi di Kota Salatiga.

Tantangan dan permasalahan terkait pendidikan di Kota Salatiga, yaitu berkaitan dengan masih adanya angka putus sekolah dan pendidikan usia dini. Angka putus sekolah di Kota Salatiga sampai tahun 2021 masih belum menunjukan angka 0. Hal ini perlu menjadi perhatian agar angka tersebut mampu mencapai 0 dan tidak terjadi peningkatan. Angka putus sekolah ini berkaitan dengan adanya permasalahan kenakalan remaja yang belum tertangani dengan baik. Dimana terjadi kasus pernikahan dini pada remaja yang disebabkan karena kurangnya kontrol pergaulan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Isu kesehatan yang menjadi sorotan pada misi, yakni terkait stunting. Kasus stunting memiliki tren yang sangat dinamis. Masih adanya kejadian Stunting ini akan mempengaruhi secara nyata pada kualitas sumber daya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, terdapat kasus terkait bonus demografi, dimana pada 20 tahun mendatang hasil proyeksi menunjukkan bahwa Kota Salatiga memiliki

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

proporsi penduduk usia tua yang meningkat Hal ini juga ditunjukkan pada tren angka ketergantungan yang diproyeksikan terus meningkat. Peningkatan jumlah dan porsi penduduk usia tua serta angka ketergantungan memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, ekonomi, dan sistem kesejahteraan. Tantangan kesehatan dan perawatan, ketidakpastian keuangan, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tantangan pendidikan, perubahan dalam pasar tenaga kerja, penurunan mobilitas tenaga kerja, perubahan dalam struktur keluarga, dan penyediaan perumahan yang sesuai dengan lansia yang dapat mengakibatkan perubahan dalam permintaan perumahan.

Misi 4: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim merupakan dua aspek krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan ketahanan lingkungan. Misi ini hadir sebagai respon dari permasalahan berupa tata ruang, sampah, dan air, dimana ketiga permasalahan tersebut termasuk penyebab perubahan iklim. Tantangan terkait tata ruang yang berkaitan dengan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), dan kesesuaian lahan. Kedua hal tersebut perlu menjadi perhatian dalam Pembangunan Kota Salatiga karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang proporsinya seimbang antara bangunan dan RTH. Selain itu, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti degradasi lingkungan, konflik sosial, dan pengurangan kualitas hidup Masyarakat.

Kebijakan pengembangan kawasan permukiman yang hijau untuk mengurangi peningkatan suhu kawasan (mikro), yang mampu menyerap air hujan dan mengurangi *water run off* sebagai upaya konservasi air dan yang mampu mitigasi ancaman bencana kebakaran menjadi salah satu kebijakan yang akan diterapkan dalam mewujudkan misi keempat.

Isu persampahan yang ada di Kota Salatiga yakni berkaitan dengan usia TPA yang tersisa 4 tahun. Isu terkait ketersediaan air bersih dapat dikaitakan dengan bencana kekeringan sebagai dampak dari perubahan iklim. Ketersediaan air bersih di Kota Salatiga bersumber dari PDAM dan mata air yang ada di sana. Apabila sumber air bersih menggunakan sumur, maka menjadi kurang bersih dan memiliki bau karena dekat dengan kali. Apabila menggunakan PDAM adanya keterbatasan debit air tiap pagi hari. Hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk diatasi dalam jangka 20 tahun ke depan.

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Adil, dan Demokratis dengan Memanfaatakan Teknologi Informasi

Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil, dan demokratis adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan melayani kepentingan seluruh masyarakat. Penerapan teknologi informasi dapat memainkan peran penting dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan publik. Misi ini turun sebagai respon dari isu tata kelola di Kota Salatiga, seperti kualitas pelayanan publik yang belum optimal, data dan manajemen data yang kurang berkualitas, pemanfaatan sistem berbasis digital yang masih kurang, serta kurangnya koordinasi antara lembaga/instansi.

Misi Kota Salatiga selaras dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Adapun penyelarasan Misi RPJPD Kota Salatiga dan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 5 *Penyelarasan Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045*

No	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Tengah	RPJPD Kota Salatiga
1	Transformasi Sosial	Transformasi Sosial	3.Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing
			2.Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan
2	Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi	1. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing melalui Pengembangan Sektor Unggulan yang berkelanjutan
3	Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola	5.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan demokratis dengan memanfaatkan teknologi informasi
4	Supremasi Hukum, Stabilitasdan Kepemimpinan Indonesia	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	4.Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadlian	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadlian	
7	Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
8	Kesinambungan Pembangunan	Kesinambungan Pembangunan	

Sedangkan untuk Periode dan Tema RPJPD telah selaras dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Adapaun penyelarasan Periode dan Tema RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

Tabel 4. 6 *Penyelarasan Periode dan Tema RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Periode	Pentahapan Implementasi RPJPN	Tema RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Tema RPJPD Kota Salatiga
2025-2029	Penguatan Fondasi Transformasi	Penguatan Landasan Transformasi	Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah
2030-2034	Akselerasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Akselerasi Transformasi
2035-2039	Ekspansi Global	Pemantapan Transformasi	Optimalisasi Pembangunan
2040-2045	Perwujudan Indonesia Emas	Perwujudan Visi	Perwujudan Kota Salatiga Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan

Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 4. 7 *Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045*

No	RPJPN		RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kota Salatiga	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7
1	Transformasi Sosial : Menciptakan manusia Indonesia Unggul	IE1. Kesehatan untuk Semua	Terwujudnya SDM unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	CJ01. Kesehatan untuk Semua	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, dan Berkualitas	1. Kesehatan untuk Semua
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		CJ02. Pendidikan Berkualitas secara Inklusif		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Terwujudnya masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial	CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Tranformasi Ekonomi: Membawa Indonesia keluar *Middle Income Trap*/MIT	IE4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	CJ04. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
		IE5. Penerapan Ekonomi Hijau		CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau		5. Penerapan Ekonomi Hijau
		IE6. Transformasi Digital		CJ06. Transformasi Digital		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
				CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
		IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
		IE8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	RPJPN		RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kota Salatiga	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
3	Transformasi Tata Kelola: Menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil partisipatif	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Terwujudnya tata kelola yang berintegritas dan dinamis	CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Kolaboratif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan demokratis	6. Transformasi Digital
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Menciptakan lingkungan strategis yang kondusif serta kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di Global	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	CJ10. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial		9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
		IE11. Stabilitas Ekonomi makro		CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
		IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah		11. Stabilitas Ekonomi makro
						12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	RPJPN		RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kota Salatiga	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
6	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:Menciptakan hubungan timbal balik yang seimbang antara aspek Sosial Budaya dan Ekologi sebagai penguat transformasi	IE13. Beragama, Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Terwujudnya masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial	CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, dan Berkualitas	13. Beragama, Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana	CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Terwujudnya Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim	15. Lingkungan Hidup Berkualitas
		IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pangan		CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pangan
		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim		CJ17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		17. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan turunan dari misi yang menggambarkan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.

Arah kebijakan Kota Salatiga ini dibagi menjadi 4 tahapan berdasarkan pada penyelarasan periode dan tema RPJPD Kota Salatiga dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 1 *Penyelarasan Periode dan Tema RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045*

Periode	Pentahapan Implementasi RPJPN	Tema RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Tema RPJPD Kota Salatiga
2025-2029	Penguatan Fondasi Transformasi	Penguatan Landasan Transformasi	Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah
2030-2034	Akselerasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Akselerasi Transformasi
2035-2039	Ekspansi Global	Pemantapan Transformasi	Optimalisasi Pembangunan
2040-2045	Perwujudan Indonesia Emas	Perwujudan Visi	Perwujudan Kota Salatiga Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan

Arah kebijakan dan Tahapan Pembangunan Kota Salatiga dengan tema setiap tahapannya, sebagai berikut.

Gambar 5. 1 *Tahapan Pembangunan Kota Salatiga 2025-2045*

5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029 (Tahap I): Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah

Arah kebijakan tahap pertama Kota Salatiga adalah penguatan fondasi pembangunan daerah. Dalam tahap ini, arah kebijakan difokuskan pada upaya untuk mendorong perekonomian lokal, mendorong kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, mendorong penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, adil, merata dan tepat sasaran, mendorong pengelolaan sumber daya alam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim, serta mendorong pemerataan pelayanan publik yang berkualitas dan keterbukaan informasi.

5.1.1.1. Transformasi Ekonomi untuk mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing melalui Pengembangan Sektor Unggulan yang Berkelanjutan

Penguatan fondasi pada bidang ekonomi diarahkan pada penguatan dan pengembangan sektor unggulan ekonomi lokal yang dapat bersaing tidak hanya pada tingkat lokal dan nasional namun juga dapat bersaing secara global. Kebijakan akan difokuskan pada upaya untuk mendorong perekonomian lokal dengan memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) serta pengembangan kapasitas terhadap informasi investasi modal dan layanan keuangan untuk pengembangan usaha masyarakat lokal. Arah kebijakan difokuskan pada fasilitasi usaha ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, serta penguatan potensi ekonomi kreatif menuju perekonomian berdaya saing baik lokal, nasional maupun global melalui inisiasi penerapan inovasi dan teknologi, digitalisasi dengan pengoptimalan perangkat daerah urusan informasi dan komunikasi, ekonomi hijau serta penguatan wilayah sebagai pusat perekonomian sesuai dengan kebijakan tata ruang.

5.1.1.2. Transformasi Tata Kelola untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Adil, dan Demokratis dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

Penguatan fondasi tata kelola pemerintahan diarahkan pada penguatan reformasi birokrasi menuju birokrasi digital yang baik, bersih, adil dan demokratis. Kebijakan ini akan difokuskan pada upaya penguatan reformasi birokrasi untuk mendorong pemerataan pelayanan publik yang berkualitas melalui optimalisasi kompetensi Sumber Daya Aparatur yang adaptif serta mendorong penguatan manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. Selain itu, kebijakan juga diarahkan pada peningkatan keamanan, ketertiban dan integritas politik untuk mengurangi kriminalitas lokal serta peningkatan stabilitas makro daerah melalui kapasitas fiskal daerah, pengendalian inflasi, riset ekonomi produktif dan peningkatan produk dalam negeri, UMKM dan Koperasi.

5.1.1.3. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

Penguatan fondasi pada bidang pembangunan kewilayahan diarahkan pada pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan pada masyarakat. Kebijakan akan difokuskan pada upaya untuk mendorong kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan khususnya untuk mewujudkan 0% kemiskinan *ekstrim* melalui peningkatan kualitas keluarga, perlindungan sosial, perluasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

penyediaan bantuan sosial serta penyediaan infrastruktur pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

5.1.1.4. Transformasi Sosial untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Penguatan fondasi pada bidang sumber daya manusia mutlak diperlukan guna menjamin keberhasilan dalam pencapaian target dari rencana pembangunan yang ditetapkan. Kebijakan akan difokuskan pada mendorong penguatan sumber daya manusia yang berkarakter positif dan berkebudayaan maju melalui penyediaan dan perluasan layanan pendidikan, literasi, numerasi, kesehatan, kebudayaan bagi seluruh masyarakat serta penguatan sistem pendidikan. Kebijakan pada periode ini juga diarahkan pada penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, adil, merata dan tepat sasaran terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

5.1.1.5. Ketahanan Ekologi untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Adaptasi Perubahan Iklim

Penguatan fondasi ketahanan ekologi diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan akan difokuskan pada upaya untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim serta meningkatkan kualitas penataan ruang melalui penguatan regulasi, pembinaan, dan pengawasan yang berorientasi pada penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ramah disabilitas sesuai dengan standar dan arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034 (Tahap II): Akselarasi Transformasi

Arah kebijakan tahap kedua Kota Salatiga adalah Akselerasi Transformasi. Dimana pada tahap ini kebijakan akan difokuskan pada percepatan peningkatan perekonomian lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, memperkuat akses layanan kesehatan dan sistem pendidikan, peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim, serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan mengakses data daerah atau informasi pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya transformasi sosial masyarakat yang sejahtera, merata dan berkeadilan.

5.1.2.1. Transformasi Ekonomi untuk mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing melalui Pengembangan Sektor Unggulan yang Berkelanjutan

Transformasi perekonomian dilakukan melalui percepatan pembangunan ekonomi lokal daerah yang memiliki daya saing serta memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Arah kebijakan akan difokuskan pada peningkatan perekonomian lokal melalui pengembangan UMKM dan IKM yang berkaitan dengan pengembangan produk serta penguatan iklim investasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sebagai wujud kesiapan daerah untuk meningkatkan investasi guna menggerakan pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu juga diarahkan pada peningkatan usaha ekonomi kerakyatan untuk pengembangan produk, daya saing, serta penguatan investasi untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif menuju perekonomian berdaya saing baik lokal, nasional maupun global melalui inisiasi penerapan inovasi dan teknologi, digitalisasi dengan optimalisasi peran perangkat daerah pelaksana urusan informasi dan komunikai, peningkatan penerapan ekonomi hijau serta perwujudan kota sebagai pusat perekonomian sesuai dengan kebijakan tata ruang.

5.1.2.2. Transformasi Tata Kelola untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Adil, dan Demokratis dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

Transformasi tata kelola pada periode akselerasi transformasi dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Arah kebijakan akan difokuskan pada peningkatan pelayanan publik yang berkualitas serta peningkatan kemudahan mengakses data daerah atau informasi pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Selain itu, arah kebijakan pada periode ini diarahkan pada penguatan keamanan dan ketertiban dan integritas politik untuk mengurangi kriminalitas lokal dan penguatan stabilitas ekonomi makro daerah dengan penguatan kapasitas fiskal daerah, pengendalian inflasi, riset ekonomi produktif dan peningkatan produk dalam negeri, UMKM dan Koperasi.

5.1.2.3. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

Transformasi pembangunan kewilayahan diarahkan pada akselerasi penguatan sosial masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Arah kebijakan akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sistem perlindungan sosial yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat terutama pada kelompok rentan, penguatan kualitas keluarga, dan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar.

5.1.2.4. Transformasi Sosial untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Akselerasi transformasi sosial menjadi fokus kebijakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing guna menjamin keberhasilan pencapaian target rencana pembangunan. Arah kebijakan akan diarahkan pada percepatan dalam upaya penguatan sumber daya manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

yang terdidik, sehat dan berkualitas dengan penguatan karakter positif dan berkebudayaan maju melaui penyediaan dan perluasan layanan pendidikan, literasi, numerasi, kesehatan, kebudayaan bagi seluruh masyarakat serta penguatan pendidikan. Selain itu kebijakan pada periode ini juga diarahkan untuk memperkuat akses layanan kesehatan dan sistem pendidikan, termasuk pelatihan guru, peningkatan kurikulum, dan penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk mendorong pendidikan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja.

5.1.2.5. Ketahanan Ekologi untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Adaptasi Perubahan Iklim

Transformasi pada bidang ketahanan ekologi dilakukan dengan percepatan dalam pengelolaan sumber daya alam secara luas dan berkelanjutan. Arah kebijakan akan diarahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim melalui pengendalian pencemaran, manajemen persampahan dan sumber daya air, penataan dan peningkatan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan standar dan arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2049 (Tahap III): Optimalisasi Pembangunan

Arah kebijakan tahap ketiga Kota Salatiga diarahkan pada optimalisasi pembangunan atau pemantapan transformasi sebagai persiapan guna menyongsong periode akhir visi daerah. Arah kebijakan pada tahap ini dititikberatkan pada mempertahankan pengembangan UMKM dan IKM serta investasi untuk mendukung perekonomian lokal, mempertahankan upaya pengentasan kemiskinan dan menyejahterakan Masyarakat, mempertahanakan layanan dan sistem pendidikan maupun kesehatan yang berkualitas, mempertahankan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim yang melibatkan Masyarakat, serta mempertahankan kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang didukung keterbukaan informasi daerah atau pemerintah berbasis TIK dengan melibatkan atau berkolaborasi dan koordinasi antar sektor. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil pemantapan transformasi sosial masyarakat yang merata dan berkeadilan.

5.1.3.1. Transformasi Ekonomi untuk mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing melalui Pengembangan Sektor Unggulan yang Berkelanjutan

Optimalisasi transformasi ekonomi diarahkan pada pemantapan pembangunan ekonomi lokal daerah yang memiliki daya saing serta memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Arah kebijakan akan difokuskan pada pengoptimalan pengembangan UMKM dan IKM serta investasi melalui pembentukan dan pengembangan model kerja sama yang efisien dan efektif, memperluas akses pemasaran dan promosi untuk mendukung perekonomian lokal. Selain itu, kebijakan pada periode ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

diarahkan untuk upaya pengoptimalan usaha ekonomi kerakyatan untuk penguatan produk, daya saing, serta penguatan investasi serta penguatan ekonomi kreatif menuju perekonomian berdaya saing baik lokal, nasional maupun global melalui penerapan inovasi dan teknologi, digitalisasi dengan tetap mengoptimalkan peran perangkat daerah urusan informasi dan komikasi, optimalisasi penerapan ekonomi hijau serta pengoptimalan fungsi kota sebagai pusat perekonomian sesuai dengan kebijakan tata ruang.

5.1.3.2. Transformasi Tata Kelola untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Adil, dan Demokratis dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

Optimalisasi transformasi tata kelola diarahkan pada pemantapan pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif serta reformasi birokrasi digital yang inovatif. Arah kebijakan akan difokuskan pada pengoptimalan kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang didukung keterbukaan informasi daerah atau pemerintah berbasis TIK dengan melibatkan atau berkolaborasi dan koordinasi antar sektor, pengoptimalan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Pada periode ini kebijakan juga diarahkan pada optimalisasi sistem keamanan dan ketertiban dan integritas politik untuk mengurangi kriminalitas lokal dan optimalisasi stabilitas ekonomi makro daerah dengan tetap melakukan penguatan kapasitas fiskal daerah, pengendalian inflasi, riset ekonomi produktif dan peningkatan produk dalam negeri, UMKM dan Koperasi.

5.1.3.3. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

Optimalisasi pembangunan kewilayahan ditekankan pada stabilisasi transformasi sosial masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Arah kebijakan akan difokuskan pada pengoptimalan upaya pengentasan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan, penciptaan lapangan kerja/usaha, perluasan jaminan sosial dan penguatan akses infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas tinggi.

5.1.3.4. Transformasi Sosial untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Optimalisasi transformasi sosial dititikberatkan pada pemantapan transformasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing guna menjamin keberhasilan pencapaian target rencana pembangunan. Arah kebijakan difokuskan pada pemantapan sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan dan berkualitas melalui pengoptimalan layanan dan sistem pendidikan, literasi, numerasi, maupun kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan promosi gaya hidup sehat dan gizi yang baik untuk mengurangi angka kematian dan penyakit yang dapat dicegah didukung dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pendidikan dan pembangunan keluarga untuk optimalisasi pembentukan karakter SDM yang unggul, tangguh dan berkebudayaan maju. Selain itu kebijakan pembangunan juga diarahkan pada upaya pemantapan sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan dan berkualitas melalui pengoptimalan layanan dan sistem pendidikan maupun kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan promosi gaya hidup sehat dan gizi yang baik untuk mengurangi angka kematian dan penyakit yang dapat dicegah.

5.1.3.5. Ketahanan Ekologi untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Adaptasi Perubahan Iklim

Optimalisasi ketahanan ekologi ditekankan pada pemantapan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim. Arah kebijakan akan difokuskan pada pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim yang melibatkan masyarakat dengan upaya pengembangan kapasistas serta penguatan partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan standar dan arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045 (Tahap IV): Perwujudan Kota Salatiga Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan

Arah kebijakan tahap keempat Kota Salatiga diarahkan untuk mewujudkan Kota Salatiga yang maju, adil, sejahtera dan berkelanjutan. Tahap keempat ini merupakan perwujudan dari visi dan misi jangka panjang daerah yang ditandai dengan tercapainya indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, antara lain mewujudkan perekonomian Kota Salatiga yang berdaya saing melalui pengembangan sektor unggulan yang berkelanjutan; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil, dan demikratis dengan memanfaatkan teknologi informasi; Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalu pemerataan pembangunan; Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; Serta mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim.

5.1.4.1. Transformasi Ekonomi untuk mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing melalui Pengembangan Sektor Unggulan yang Berkelanjutan

Transformasi bidang ekonomi diarahkan pada perwujudan perekonomian Kota Salatiga berdaya saing melalui pengembangan sektor unggulan yang berkelanjutan serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian baik lokal, regional maupun nasional dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan digitalisasi dengan menerapkan ekonomi hijau dan mewujudkan Kota sebagai pusat perekonomian sesuai dengan arah kebijakan tata ruang.

5.1.4.2. Transformasi Tata Kelola untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Adil, dan Demokratis dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Transformasi tata kelola diarahkan pada perwujudan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, adil, dan demokratis dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pemerataan pelayanan publik, keterbukaan data, dan koordinasi antar sektor didukung dengan keamanan dan ketertiban yang kondusif serta stabilitas ekonomi makro yang stabil.

5.1.4.3. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

Pembangunan kewilayahan ditekankan pada perwujudan masyarakat sejahtera dan berkeadilan melalui pemberian prioritas pembangunan serta pemerataan pembangunan baik pada akses maupun kesempatan menuju masyarakat yang tangguh dalam seluruh aspek kehidupan.

5.1.4.4. Transformasi Sosial untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Arah kebijakan transformasi sosial dititikberatkan pada mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berkualitas menuju sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing.

5.1.4.5. Ketahanan Ekologi untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Adaptasi Perubahan Iklim

Arah kebijakan ketahanan ekologi ditekankan pada perwujudan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim yang memerhatikan penataan ruang dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan arah kebijakan RTRW.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 5. 2 *Arah Kebijakan Kota Salatiga Tahun 2025 - 2045*

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
Mewujudkan Kota Salatiga yang Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan		**2025-2029** Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah	**2030-2034** Akselerasi Transformasi	**2035-2039** Optimalisasi Pembangunan	**2040-2045** Perwujudan Kota Salatiga Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan
Maju Daya Saing Ekonomi yang Inklusif dan Kolaboratif serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan cerdas	**Transformasi Ekonomi** Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing melalui Pengembangan Sektor Unggulan yang Berkelanjutan	Penguatan fondasi pada bidang ekonomi diarahkan pada upaya untuk mendorong perekonomian lokal dengan memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) serta pengembangan kapasitas terhadap informasi investasi modal dan layanan keuangan untuk pengembangan usaha masyarakat lokal	Meningkatkan perekonomian lokal melalui pengembangan UMKM dan IKM yang berkaitan dengan pengembangan produk serta penguatan iklim investasi sebagai wujud kesiapan daerah unutk meningkatkan investasi guna menggerakan pertumbuhan ekonomi lokal	Mengoptimalkan pengembangan UMKM dan IKM serta investasi melalui pembentukan dan pengembangan model kerja sama yang efisien dan efektif, memperluas akses pemasaran dan promosi untuk mendukung perekonomian lokal	Mewujudkan perekonomian Kota Salatiga berdaya saing melalui pengembangan sektor unggulan yang berkelanjutan serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian baik lokal, regional maupun nasional dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan digitalisasi dengan menerapkan ekonomi hijau dan mewujudkan Kota sebagai pusat perekonomian sesuai dengan arah kebijakan tata ruang
		Fasilitasi usaha ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, serta penguatan potensi ekonomi kreatif menuju perekonomian berdaya saing baik lokal, nasional maupun global melalui inisiasi penerapan inovasi dan teknologi, digitalisasi dengan mengoptimalkan program kerja perangkat daerah pelaksana urusan informasi dan komunikasi, ekonomi hijau serta penguatan wilayah sebagai pusat perekonomian sesuai dengan kebijakan tata ruang	Peningkatan usaha ekonomi kerakyatan untuk pengembangan produk, daya saing, serta penguatan investasi untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif menuju perekonomian berdaya saing baik lokal, nasional maupun global melalui inisiasi penerapan inovasi dan teknologi, digitalisasi dengan penguatan dan optimalisasi program kerja perangkat daerah pelaksana urusan informasi dan komunikasi ekonomi hijau serta perwujudan kota sebagai pusat perekonomian sesuai dengan kebijakan tata ruang	Pengoptimalan usaha ekonomi kerakyatan untuk penguatan produk, daya saing, serta penguatan investasi serta penguatan ekonomi kreatif menuju perekonomian berdaya saing baik lokal, nasional maupun global melalui penerapan inovasi dan teknologi, digitalisasi dengan mengoptimalkan program kerja perangkat daerah pelaksana urusan informasi dan komunikasi, ekonomi hijau serta pengoptimalan fungsi kota sebagai pusat perekonomian sesuai dengan kebijakan tata ruang	
	Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Adil, dan Demokratis dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Penguatan fondasi tata kelola pemerintahan diarahkan pada upaya penguatan reformasi birokrasi untuk mendorong pemerataan pelayanan publik yang berkualitas melalui optimalisasi kompetensi Sumber Daya Aparatur yang adaptif serta mendorong penguatan manajemen data dan keamanan informasi megoptimalkan program kerja perangkat daerah urusan Informasi dan komunikasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan mengakses data daerah atau informasi pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan megoptimalkan program kerja perangkat daerah urusan Informasi dan komunikasi, Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang didukung keterbukaan informasi daerah atau pemerintah berbasis TIK dengan melibatkan atau berkolaborasi dan koordinasi antar sektor, pengoptimalan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, adil, dan demokratis dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pemerataan pelayanan publik, keterbukaan data, dan koordinasi antar sektor didukung dengan keamanan dan ketertiban yang kondusif serta stabilitas ekonomi makro yang stabil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
Mewujudkan Kota Salatiga yang Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan		**2025-2029** Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah	**2030-2034** Akselerasi Transformasi	**2035-2039** Optimalisasi Pembangunan	**2040-2045** Perwujudan Kota Salatiga Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan
		Peningkatan keamanan dan ketertiban dan integritas politik untuk mengurangi kriminalitas lokal	Penguatan keamanan dan ketertiban dan integritas politik untuk mengurangi kriminalitas lokal	Optimalisasi sistem keamanan dan ketertiban dan integritas politik untuk mengurangi kriminalitas lokal	
		Peningkatan Stabilitas Ekonomi makro daerah dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, pengendalian inflasi, riset ekonomo produktif dan peningkatan produk dalam negeri, UMKM dan Koperasi	Penguatan kapasitas fiskal daerah, pengendalian inflasi, riset ekonomo produktif dan peningkatan produk dalam negeri, UMKM dan Koperasi	Optimalisasi penguatan kapasitas fiskal daerah, pengendalian inflasi, riset ekonomi produktif dan peningkatan produk dalam negeri, UMKM dan Koperasi	
Adil Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan	**Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan** Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan	Mendorong kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan ekstrim melalui peningkatan kualitas keluarga, perlindungan sosial, perluasan penyediaan bantuan sosial serta penyediaan infrastruktur pelayanan dasar	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sistem perlindungan sosial yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat terutama pada kelompok rentan, penguatan kualitas keluarga, dan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar	Mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan, penciptaan lapangan kerja/usaha, perluasam jaminan sosial dan penguatan akses infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas tinggi	Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian prioritas pembangunan serta pemerataan pembangunan baik pada akses maupun kesempatan menuju masyarakat yang tangguh dalam seluruh aspek kehidupan
Sejahtera Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing	**Transformasi Sosial** Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Mendorong penguatan sumber daya manusia yang berkarakter positif dan berkebudayaan maju melaui penyediaan dan perluasan layanan pendidikan, literasi, numerasi, kesehatan, kebudayaan bagi seluruh masyarakat serta penguatan pendidikan	Percepatan dalam upaya penguatan sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berkualitas dengan penguatan karakter positif dan berkebudayaan maju melaui penyediaan dan perluasan layanan pendidikan, literasi, numerasi, kesehatan, kebudayaan bagi seluruh masyarakat serta penguatan system pendidikan	Pemantapan sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan dan berkualitas melalui pengoptimalan layanan dan sistem pendidikan, literasi, numerasi, maupun kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan promosi gaya hidup sehat dan gizi yang baik untuk mengurangi angka kematian dan penyakit yang dapat dicegah didukung dengan pendidikan dan pembangunan keluarga untuk optimalisasi pembentukan karakter SDM yang unggul, tangguh dan berkebudayaan maju serta	Titik berat pada periode ini adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berkualitas menuju sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing
		Mendorong penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, adil, merata dan tepat sasaran terutama bagi kelompok masyarakat rentan.	Memperkuat akses layanan kesehatan dan sistem pendidikan, termasuk pelatihan guru, peningkatan kurikulum, dan penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk mendorong pendidikan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja	Pemantapan sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan dan berkualitas melalui pengoptimalan layanan dan sistem pendidikan maupun kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan promosi gaya hidup sehat dan gizi yang baik untuk mengurangi angka	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
Mewujudkan Kota Salatiga yang Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan		**2025-2029** Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah	**2030-2034** Akselerasi Transformasi	**2035-2039** Optimalisasi Pembangunan	**2040-2045** Perwujudan Kota Salatiga Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan
				kematian dan penyakit yang dapat dicegah	
Berkelanjutan Pembangunan Terencana, Terukur, Berkesinambungan, Berkelanjutan, serta Tangguh Bencana dan Perubahan Iklim	**Ketahanan Ekologi** Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim serta meningkatkan kualitas penataan ruang melalui penguatan regulasi, pembinaan, dan pengawasan yang berorientasi pada penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ramah disabilitas sesuai dengan standar dan arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim melalui pengendalian pencemaran, manajemen persampahan dan sumber daya air, penataan dan peningkatan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan standar dan arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim yang melibatkan masyarakat dengan upaya pengembangan kapasistas serta penguatan partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan standar dan arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim yang memerhatikan penataan ruang dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan arah kebijakan RTRW

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan melalui langkah-langkah transformasi di daerah yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 serta pencapaian visi Indonesia Emas. Sasaran pokok RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dirumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2045, maka dirumuskan 5 (lima) sasaran pokok yang diukur melalui indikator kinerja yang diharapkan akan terwujud pada akhir tahun rencana jangka panjang daerah yaitu di tahun 2045.

Adapun sasaran pokok RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

5.2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat dan berkualitas

Cita-cita pembanguan manusia di Kota Salatiga Tahun 2045 adalah terwujudnya sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berkualitas. Sumber daya manusia merupakan modal dasar utama dalam pembangunan, sehingga rangkaian transformasi yang dilakukan menekankan pada pentingnya akses layanan kesehatan dan pendidikan. Tidak hanya pada aspek pendidikan dan kesehatan, pembangunan manusia perlu dilakukan secara menyeluruh termasuk aspek karakter dan budaya. Hasil akhir dari pembangunan manusia ini diharapkan masyarakat memiliki kemampuan adaptasi yang baik dan mampu bersaing untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan di masa depan yang semakin dinamis.

5.2.1.1. Kesehatan Untuk Semua

Fokus arah kebijakan pada aspek kesehatan antara lain :

a. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
b. Penguatan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk semua dengan jaminan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan
c. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berkompetensi tinggi
d. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan
e. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
f. Pemerataan akses layanan kesehatan yang universal untuk kesehatan jiwa dan raga yang inklusif dari bayi sampai lansia
g. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting
h. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan
i. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.2.1.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Fokus arah kebijakan pada aspek pendidikan antara lain :

a. Wajib PAUD 1 tahun dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah
b. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas serta peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
c. Pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompetensi tinggi
d. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal Kota Salatiga
e. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
f. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja
g. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)

5.2.1.3. Beragama, Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Fokus arah kebijakan pada aspek kebudayaan antara lain :

a. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
b. Pemantapan pendidikan karakter dan budaya dalam kurikulum pendidikan dasar
c. Penguatan Literasi Masyarakat
d. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah dan berdampak pada kesejahteraan mayarakat

5.2.2. Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat

Terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat dicerminkan dengan menurunnya kemiskinan, ketimpangan dan ketidakcukupan pangan. Untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan diperlukan transformasi sosial yaitu dengan perlindungan sosial yang adaptif. Upaya yang dilakukan antara lain mendorong pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas keluarga, perlindungan sosial, perluasan penyediaan bantuan sosial serta penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.

Kemiskinan ekstrim menjadi prioritas penanganan dan upaya pengentasan menjadi 0 %, adalah salah satu isu yang perlu diselesaikan pada tahap pertama pembangunan, mengingat amanah SDG’s yang menyatakan bahwa kemiskinan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

ekstrem 0% pada tahun 2030. Walaupun pada tahun 2024, berdasarkan data kemiskinan yang telah divalidasi, menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrim yang masuk pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) untuk Kota Salatiga sudah tidak ada (0%), tetapi masih terdapat penduduk P2 yang perlu penanganan serius untuk menuju angka kemiskinan 0% pada tahun 2045.

5.2.2.1. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Arah kebijakannya antara lain :

a. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif serta peningkatan akses layanan dasar bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan yang tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
b. Perluasan penyediaan jaminan sosial bagi kelompok marjinal dan rentan
c. Perluasan penyediaan bantuan sosial dengan pengembangan mekanisme pemberian bantuan yang tepat sasaran dan efisien
d. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
e. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik)

5.2.2.2. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Fokus arah kebijakan pada aspek kesetaraan gender masyarakat inklusif antara lain :

a. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
b. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
c. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan

5.2.3. Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing

Dalam rangka mewujudkan perekonomian Kota Salatiga yang berdaya saing, diperlukan transformasi pada bidang ekonomi sehingga terwujud ekonomi daerah yang memiliki daya saing baik secara lokal, nasional dan global serta memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan menekankan pada proses peningkatan produktivitas ekonomi perkotaan dengan memanfaatkan data, riset, inovasi, teknologi, digitalisasi, ekonomi hijau serta penguatan wilayah sebagai pusat perekonomian sesuai dengan kebijakan tata ruang.

Transformasi Ekonomi bidang pertanian memanfaatkan kawasan strategis pertanian dengan kondisi luasan lahan pertanian yang hanya 11% dari total luas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

administrasi Kota Salatiga. Upaya perwujudan kawasan budidaya pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkenbunan, peternakan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan budidaya pertanian sesuai dengan ketentuan tata ruang dan wilayah. Kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan pertanian serta pengelolaan budidaya perikanan air tawar melalui penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan water prosperity, modernisasi pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, penguatan SDM dan kelembagaan pertanian.

5.2.3.1. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Arah kebijakannya antara lain :

a. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
b. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan pada kawasan strategis Pertanian, melalui:
    1. Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan *water prosperity* melalui pengembangan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang dan DAS Rawa Pening yang merupakan bagian dari area kerja DAS Jratunseluna.
    2. Penyediaan sarana produksi pertanian yang unggul dan berdaya saing
    3. Modernasisasi pertanian dan perikanan serta implementasi teknologi untuk *Urban Farming.*
    4. Penyediaan infrastruktur esensial pertanian terintegrasi.
    5. Pengembangan *closed loop* model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.
    6. Penguatan Sumber Daya Manusia Pertanian yang unggul dan berdaya saing;
    7. Peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan perikanan dan pengembangan UMKM pengolahan hasil perikanan Kota
c. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik pada kawasan metropolitan Semarang, health/medical tourism serta Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (Cultural Hub and Creative Industry (CCI) melalui penyelanggaraan Meeting, Incentives, Coferences, and Exhibitions (MICE) di wilayah-wilayah perkotaan
d. Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM terkait industri, jasa, parawisata dan pertanian, serta kemampuan digital
e. Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, perluasan akses teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan peluang lapangan kerja digital

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

f. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy

5.2.3.2. Penerapan Ekonomi Hijau

Arah kebijakannya antara lain :

a. Membentuk perekonomian kota yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan jangka panjang dengan mempertimbangkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan fokus pada pembangunan ramah lingkungan
b. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan
c. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau

5.2.3.3. Transformasi Digital

Arah kebijakannya antara lain :

a. Peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis
b. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill
c. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan

5.2.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Arah kebijakannya antara lain :

a. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Semarang
b. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
c. Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
d. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan unutk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global *(global city)*

5.2.3.5. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Arah kebijakannya antara lain :

a. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif, penerapan teknologi dan kemitraan usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
c. Peningkatan produktivitas BUMD
d. Penguatan pengelolaan jalan daerah
e. Peremajaan kota, terutama di kawasan metropolitan

5.2.4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan demokratis

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan demokratis dicerminkan dengan pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif serta reformasi birokrasi digital yang inovatif untuk pelayanan publik yang lebih optimal. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan transformasi tata kelola pada pemerintahan melalui penataan regulasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan keamanan untuk kondusivitas wilayah, disertai dengan peningkatan upaya-upaya untuk stabilitas ekonomi makro daerah.

5.2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Fokus arah kebijakannya adalah :

a. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
b. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah
c. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
d. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah
e. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
f. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat
g. Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal ini manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah
h. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
i. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional
j. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko
k. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Fokus arah kebijakannya adalah :

a. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
b. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal
c. Penguatan integritas partai politik

5.2.4.3. Stabilitas Ekonomi Makro

Fokus arah kebijakannya adalah :

a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah, melalui :
   - intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)
   - penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah
   - peningkatan kualitas belanja daerah
   - optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)
   - sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
b. Penguatan pengendalian inflasi daerah
c. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan
d. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, melalui :
   - pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif
   - penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri
e. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi

5.2.4.4. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Fokus arah kebijakannya adalah dengan mendukung pelaksanaan kebijakan pusat dan daerah

5.2.5. Terwujudnya Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim

Pada tahun 2045 diharapkan Kota Salatiga dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan dapat beradaptasi pada perubahan iklim. Terwujudnya cita-cita tersebut ditandai dengan terbentuknya lingkungan hidup yang berkualitas, berketahanan dan kemandirian energi, air dan pangan serta mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.2.5.1. Lingkungan Hidup Berkualitas

Fokus arah kebijakan pada aspek lingkungan hidup antara lain :

a. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis serta berpedoman pada Rencana Detail Tata Ruang Kota
b. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan
c. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*
d. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan
e. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan

5.2.5.2. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pangan

Fokus arah kebijakan pada aspek ketahanan energi antara lain :

a. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
b. Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien
c. Penyediaan air siap minum dari keran melalui jarigan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan
d. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif sesuai karakteristik daerah Kota Salatiga
e. Penerapan skema insentif dan disinsentif untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian
f. Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, perikanan yang berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan

5.2.5.3. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim

Fokus arah kebijakan pada aspek resiliensi bencana antara lain :

a. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya
b. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan
c. Pengembangan kawasan permukiman yang tangguh terhadap perubahan iklim
d. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan lahan, serta mitigasi risiko
f. Pengembangan transportasi pekotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Semarang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang
g. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
h. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 5. 3 *Penyelarasan Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan IUP RPJPN dengan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan IUP RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Salatiga*

No	RPJPN			RPJPD Provinsi Jawa Tengah			RPJPD Kota Salatiga		
	Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP
1	Transformasi Sosial	IE1 Kesehatan untuk Semua	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Terwujudnya SDM unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	CJ01. Kesehatan untuk Semua	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, dan Berkualitas	1. Kesehatan untuk Semua	4 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
			2 Kesehatan Ibu dan Anak :			2 Kesehatan Ibu dan Anak :			Kesehatan Ibu dan Anak :
			a Angka Kematian Ibu			a Angka Kematian Ibu			5 Jumlah Kasus Kematian Ibu (angka)
			b Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)			b Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)			6 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
			3 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			3 Penanganan Tuberkulosis:			Penanganan Tuberkulosis:
			4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)			a Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)			7 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)
						b Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)			8 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)
						4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)			9 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
		IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	5 Hasil Pembelajaran		CJ02. Pendidikan Berkualitas secara Inklusif	5 Hasil Pembelajaran:		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil Pembelajaran:
			a Rata-rata nilai PISA a-i Membaca a-ii Matematika a-iii Sains			a Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			10 Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	RPJPN			RPJPD Provinsi Jawa Tengah			RPJPD Kota Salatiga		
	Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP
						i) Literasi Membaca ii) Numerasi			i) Literasi Membaca SD/Sederajat ii) Literasi Membaca SMP/Sederajat iii) Numerasi SD/Sederajat iv) Numerasi SMP/Sederajat
			b Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)			b Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca ii) Numerasi			11 Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
			c Harapan Lama Sekolah			c Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)			12 Harapan Lama Sekolah (tahun)
			6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)			d Harapan Lama Sekolah (tahun)			13 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
			7 Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi			6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)			14 Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)
						7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi			
		IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif	8 Tingkat Kemiskinan (%)	Terwujudnya masyarakat yang Berkarakter dan	CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8 Tingkat Kemiskinan (%)	Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	1 Tingkat Kemiskinan (%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	RPJPN			RPJPD Provinsi Jawa Tengah			RPJPD Kota Salatiga		
	Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP
				Berketahanan Sosial					
			9 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)			9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)			38 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
			10 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			10 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal			
2	Transformasi Ekonomi	IE4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	11 Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	CJ04. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	23 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
			12 Pengembangan Pariwisata			12 Pengembangan Pariwisata:			24 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*
			a Rasio PDB Pariwisata (%)			a Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*			25 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*
			b Devisa Pariwisata (miliar USD)			b Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*			26 Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
			13 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)			3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif			27 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
			14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			4 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			28 Return on Aset (ROA) BUMD (%)
			a Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)			a Proporsi Jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi			29 Disparitas Harga
			b Rasio kewirausahaan (%)			b Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level Provinsi			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	RPJPN			RPJPD Provinsi Jawa Tengah			RPJPD Kota Salatiga		
	Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP
			c Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)			c Rasio Kewirausahaan Daerah (%)			
			d Return on Asset (ROA) BUMN (%)			d Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)			
			15 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			e Return on Aset (ROA) BUMD (%)			
			16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)			15 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			36 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
			17 Tingkat Penguasaan IPTEK			16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)			37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
			a Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)			17 Tingkat Penguasaan IPTEK : Kapabilitas Inovasi			34 Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD)
			b Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)						
		IE5 Penerapan Ekonomi Hijau	18 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a Indeks Ekonomi Hijau		CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau	18 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a Indeks Ekonomi Hijau		5. Penerapan Ekonomi Hijau	
			b Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)			b Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer			
		IE6 Transformasi Digital	19 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)		CJ06. Transformasi Digital	19 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		6. Transformasi Digital	39 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet
		IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20 Biaya Logistik (%)		CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20 Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	30 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
			21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB)			21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)			55 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota
			22 Ekspor Batang dan Jasa (% PDB)			22 Ekspor Barang dan Jasa			56 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	RPJPN			RPJPD Provinsi Jawa Tengah			RPJPD Kota Salatiga		
	Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP
		IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23 Kota maju, inklusif dan berkelanjutan		CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23 Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan:		8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	40 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
			a Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)			a Proposi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional			41 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (%) (sesuai kewenangan)
			b Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)			b Rumah Tangga dengan Askes Hunian Layak, Terjangkau dan Berkenalan			42 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota
						c Persentase Desa Mandiri			35 Persentase Desa Mandiri
						d Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap			
						e Indeks Pelayanan Transportasi			
						f Persentase Keterwujudan Penataan Ruang			
3	Transformasi Tata Kelola	IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24 Indeks Materi Hukum	Terwujudnya tata kelola yang berintegritas dan dinamis	CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Kolaboratif	24 Indeks Reformasi Hukum	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan demokratis	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	51 Indeks Reformasi Hukum
			25 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			25 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			52 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			26 Indeks Pelayanan Publik			26 Indeks Pelayanan Publik			53 Indeks Pelayanan Publik
			27 Anti Korupsi			27 Indeks Integritas Nasional			54 Indeks Integritas Nasional
			a Indeks Integritas Nasional						50 Indeks Reformasi Birokrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	RPJPN			RPJPD Provinsi Jawa Tengah			RPJPD Kota Salatiga		
	Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP
			b Indeks Persepsi Korupsi						
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial	28 Indeks Pembangunan Hukum	Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	CJ10. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial	28 Indeks Pembangunan Hukum : Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM		10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	
			29 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sedirian di area tempat tinggalnya (%)			29 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya			
			30 Indeks Demokrasi Indonesia			30 Indeks Demokrasi Indonesia			
		IE11 Stabilitas Ekonomi Makro	31 Rasio Pajak terhadap PDB (%)		CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		11. Stabilitas Ekonomi makro	31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
			32 Tingkat Inflasi (%)			32 Tingkat Inflasi (%)			32 Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB
			33 Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			33 Pendalaman/Intermedaiasi Sektor Keuangan:			33 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB
			a Aset Perbankan/PDB (%)			a Total Dana Pihak Ketiga/PDRB			
			b Aset Dana Pensiun/PDB (%)			b Aset Dana Pensiun/PDRB			
			c Aset Asuransi/PDB (%)			c Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan			
			d Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)			d Total Kredit/PDRB			
			e Total Kredit/PDB (%)			34 Inklusi Keuangan			
			34 Inklusi Keuangan						
		IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan	35 Asia Power Index (Diplomatic Influence)		CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah	35 Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah		12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	RPJPN			RPJPD Provinsi Jawa Tengah			RPJPD Kota Salatiga		
	Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP
		Berdaya Gentar Kawasan						Berdaya Gentar Kawasan	
			36 Asia Power Index (Military Capability)			36 Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah			
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Terwujudnya masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial	CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, dan Berkualitas	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	15 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)
			38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)			38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)			16 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)
									17 Jumlah pengunjung tempat bersejarah
									18 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir
									19 Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)
									20 Jumlah Kejadian Konflik Sara (kali)
		IE14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	21 Indeks Pembangunan Keluarga
			40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)			40 Indeks Ketimpangan Gender			22 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
		IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas	41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya	CJ15. Lingkungan	41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Terwujudnya Pengelolaan sumber daya	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	46 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	RPJPN			RPJPD Provinsi Jawa Tengah			RPJPD Kota Salatiga		
	Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP
				Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana	Hidup Berkualitas		alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim		
			42 Kualitas Lingkungan Hidup			42 Kualitas Lingkungan Hidup :			43 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
			a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah			47 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
			b Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)			b Rumah Tangga dan Akses Sanitasi Aman			
			c Timbulan sampah terolah di fasilitas Pengolahan sampah (%)			c Pengelolaan Sampah : - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah - Proposi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah			
		IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43 Ketahanan Energi, Air dan Pangan		CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43 Ketahanan Energi, Air dan Pangan		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pangan	44 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
			i Ketahanan Energi - Indeks Ketahanan energi			a Ketahanan Energi:			45 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)
			ii Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)			- Konsumsi Listrik per Kapita			2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)
			iii Ketahanan Air			- Intensitas Energi Primer			3 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	RPJPN			RPJPD Provinsi Jawa Tengah			RPJPD Kota Salatiga		
	Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP
			- Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)			b Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)			
			- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)			c Ketahanan Air			
						- Kapasitas Air Baku			
						- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan			
						- Persentase Kondisi Baik Infrasrstruktur Tampungan Air Kewenangan Provinsi			
						- Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi			
						- Persentase Sungai Kondisi Baik Kewenangan Provinsi			
		IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44 Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)		CJ17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44 Indeks Risiko Bencana		17. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim	48 Indeks Risiko Bencana (IRB)
			45 Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a Kumulatif b Tahunan			45 Persentase Penurunan Emisi GRK: a Kumulatif b Tahunan			49 Kontribusi Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 5. 4 *Penyelarasan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan dan Indikator Utama Pembangunan*

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Kota Salatiga	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat dan berkualitas	1 Kesehatan untuk Semua	a. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	78,08	84,47	Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan
			b. Penguatan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk semua dengan jaminan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan	2 Kesehatan Ibu dan Anak :			
			c. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berkompetensi tinggi	a. Jumlah Kasus Kematian Ibu (angka)	2	0	
			d. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	5,69	3,38	
			e. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	3 Penanganan Tuberkulosis:			
			f. Pemerataan akses layanan kesehatan yang universal untuk kesehatan jiwa dan raga yang inklusif dari bayi sampai lansia	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	100	
			g. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting.	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	95	
			h. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan	4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,26	99,50	
			i. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.				
		2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	a. Wajib PAUD 1 tahun dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah	1 Hasil Pembelajaran:			Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan
			b. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas serta peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):			
			c. Pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompetensi tinggi	a. Literasi Membaca SD/Sederajat	71,93	89,68	
			d. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal Kota Salatiga	b. Literasi Membaca SMP/Sederajat	68,22	85,05	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Kota Salatiga	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
			e. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	c. Numerasi SD/Sederajat	54,81	94,23	
			f. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja	d. Numerasi SMP/Sederajat	42,92	95,88	
			g. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	2 Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,07	12,77	
				3 Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,94	17,67	
				4 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	21,20	37,97	
				5 Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	89,56	100	
		13 Beragama, Maslahat dan Berkebudayaan Maju	a. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	1 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	89,73	91,73	Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan
			b. Pemantapan pendidikan karakter dan budaya dalam kurikulum pendidikan dasar	2 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	19,75	35	
			c. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah dan berdampak pada kesejahteraan mayarakat	3 Jumlah pengunjung tempat bersejarah	13,778	27,920	
				4 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	18,26	26,56	
				5 Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	0,97	2,06	
				6 Jumlah Kejadian Konflik Sara (kali)	n/a	0	
		14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	a. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	1 Indeks Pembangunan Keluarga	63,5-67,03	68,45-70,10	Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan
			b. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,12-0,12	0,07-0,04	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Kota Salatiga	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
			c. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.				
2	Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat	3 Perlindungan Sosial yang Adaptif	a. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif serta peningkatan akses layanan dasar bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan yang tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	1 Tingkat Kemiskinan (%)	4,24-4,52	0,00-0,21	Kemiskinan, Pemerataan Pendapatan, dan Infrastruktur
			b. Perluasan penyediaan jaminan sosial bagi kelompok marjinal dan rentan	2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	51,76	87,85	
			c. Perluasan penyediaan bantuan sosial dengan pengembangan mekanisme pemberian bantuan yang tepat sasaran dan efisien				
			d. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang				
			e. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik)				
3	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	a. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	33,74	40,56	Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, IKM dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
			b. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan budidaya	2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	7,87	11,46	
			c. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik pada kawasan metropolitan Semarang, health/medical tourism serta Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (Cultural Hub and Creative Industry (CCI) melalui penyelanggaraan Meeting, Incentives, Coferences, and Exhibitions (MICE) di wilayah-wilayah perkotaan	3 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	1.066	2.021	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Kota Salatiga	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
			d. Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM terkait industri, jasa, parawisata dan pertanian, serta kemampuan digital	4 Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	7,11	7,12	
			e. Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, perluasan akses teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan peluang lapangan kerja digital	5 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,13	7,51	
			f. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy	6 Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,40	8,71	
				7 Disparitas Harga	±10	±10	
				8 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,49-4,19	3,37-3,07	
				9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	65,18	81,09	
				10 Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD)	3,8	4,2	
		5 Penerapan Ekonomi Hijau	a. membentuk perekonomian kota yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan jangka panjang dengan mempertimbangkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan fokus pada pembangunan ramah lingkungan				
			b. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.				
			c. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau				
		6 Transformasi Digital	a. Peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	1 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	91,43	96,45	Pelayanan Publik, Teknologi Informasi, Manajemen Data dan Kooridnasi antar Lembaga
			b. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill				
			c. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.				
		7 Integrasi Ekonomi	a. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik	1 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	42,92	33,73	Pertumbuhan Ekonomi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Kota Salatiga	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
		Domestik dan Global	massal rendah emisi berbasis jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Semarang				Investasi, IKM dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
			b. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	90,49-91,10	462,00-542,61	
			c. Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	3 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	16,21-16,41	22,21-24,41	
			d. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan unutk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (global city)				
		8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	a. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif, penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	1 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	92,82	100	Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, IKM dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
			b. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	2 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (%) (sesuai kewenangan)	95,52	95,56	
			c. Peningkatan produktivitas BUMD	3 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	7	90	
			d. Penguatan pengelolaan jalan daerah	4 Persentase Desa Mandiri	-	-	
			e. Peremajaan kota, terutama di kawasan metropolitan				
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan demokratis	9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	a. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	1 Indeks Reformasi Hukum	79,35	95,00	Pelayanan Publik, Teknologi Informasi, Manajemen Data dan Kooridnasi antar Lembaga
			b. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.3	4	
			c. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	3 Indeks Pelayanan Publik	4,39	5,00	
			d. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah	4 Indeks Integritas Nasional	74,25	90,54	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Kota Salatiga	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
			e. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	5 Indeks Reformasi Birokrasi	68,57	85,00	
			f. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat				
			g. Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal ini manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah				
			h. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital				
			i. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional				
			j. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko				
			k. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan				
		10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	a. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Upaya mendukung kewenangan pusat di daerah			Pelayanan Publik, Teknologi Informasi, Manajemen Data dan Koordinasi antar Lembaga
			b. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal				
			c. Penguatan integritas partai politik				
		11 Stabilitas Ekonomi makro	a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah, melalui :	1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,68	0,39	
			- intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), termasuk penerimaan opsen pajak dengan melakukan sinkronisasi, konsolidasi dan sosialisasi penanganan piutang pajak opsen daerah	2 Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	60,82	90	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Kota Salatiga	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
			- penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah	3 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	42,03	87	
			- peningkatan kualitas belanja daerah				
			- optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)				
			- sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.				
			b. Penguatan pengendalian inflasi daerah.				
			c. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.				
			d. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, melalui :				
			- pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif				
			- penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.				
			e. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi				
		12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Mendukung pelaksanaan kebijakan pusat pada daerah				
5	Terwujudnya Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim	15 Lingkungan Hidup Berkualitas	a. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis serta berpedoman pada Rencana Detail Tata Ruang Kota	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,93	70,85	Lingkungan Hidup, Tata ruang, Sampah, tata guna lahan dan Air
			b. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	15	95	
			c. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi	3 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	78,16	90	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Kota Salatiga	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
			pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy				
			d. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan				
			e. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.				
		16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pangan	a. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	1 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	63,83	100	
			b. Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien	2 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	65,85	75,85	
			c. Penyediaan air siap minum dari keran melalui jarigan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan	3 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,45	1,15	
			d. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif sesuai karakteristik daerah Kota Salatiga	4 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	94,34	95,7	
			e. Penerapan skema insentif dan disinsentif untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian				
			f. Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, perikanan yang berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan				
		17 Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim	a. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya	1 Indeks Risiko Bencana (IRB)	87,90-86,82	68-59,71	
			b. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.	,2. Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO2eq)	24.158,45	1.567.574,93	
			c. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang tangguh terhadap perubahan iklim				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Kota Salatiga	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
			d. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.				
			e. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan lahan, serta mitigasi risiko				
			f. Pengembangan transportasi pekotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Semarang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang				
			g. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)				
			h. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 5. 5 *Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan*

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Target Per Tahapan				Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah	Akselerasi Transformasi	Optimalisasi Pembangunan	Perwujudan Kota Salatiga Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat dan berkualitas	1 Kesehatan untuk Semua	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	78,08	84,47	79,36	80,96	82,55	84,47	Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan
			2 Kesehatan Ibu dan Anak :							
			a. Jumlah Kasus Kematian Ibu (angka)	2	0	2	1	1	0	
			b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	5.69	3,38	5,11	4,48	3,91	3,38	
			3 Penanganan Tuberkulosis:							
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	100	93	95	97	100	
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	95	91	93	94	95	
			4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,26	99,50	98.57	98.92	99.24	99,50	
		2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	1 Hasil Pembelajaran:							Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan
			Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):							
			a. Literasi Membaca SD/Sederajat	71,93	89,68	76,33	80,73	85,13	89,68	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Target Per Tahapan				Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	2025-2029 Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah	2030-2034 Akselerasi Transformasi	2035-2039 Optimalisasi Pembangunan	2040-2045 Perwujudan Kota Salatiga Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan	
			b. Literasi Membaca SMP/Sederajat	68,22	85,05	72,42	76,60	80,82	85,05	
			c. Numerasi SD/Sederajat	54,81	94,23	64,66	74,46	84,26	94,23	
			d. Numerasi SMP/Sederajat	42,92	95,88	56,16	69,40	82,64	95,88	
			2 Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,07	12,77	11,57	12,07	12,57	12,77	
			3 Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,94	17,67	16,34	16,77	17,20	17,67	
			4 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	21,20	37,97	25,21	29,89	34,01	37,97	
			5 Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	89,56	100	93,04	96,84	98	100	
		13 Beragama, Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	89,73	91,73	90,23	90,73	91,23	91,73	Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan
			2 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	19,75	35	19,75	23	28	35	
			3 Jumlah pengunjung tempat bersejarah	13,778	27,920	14,914	19,034	22,066	27,920	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Target Per Tahapan				Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	2025-2029 Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah	2030-2034 Akselerasi Transformasi	2035-2039 Optimalisasi Pembangunan	2040-2045 Perwujudan Kota Salatiga Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan	
			4 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	18,26	26,56	19.38	22.57	24.32	25.65	
			5 Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	0.97	2,06	1.22	1.47	1.72	2,06	
			6 Jumlah Kejadian Konflik Sara (kali)	n/a	0	0	0	0	0	
		14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1 Indeks Pembangunan Keluarga	63,5-67,03	68,45-70,10	63,5-64,82	65,15-66,47	66,80-68,12	68,45-70,10	Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan
			2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,12-0,12	0,07-0,04	0,12-0,11	0,11-0,08	0,08-0,07	0,07-0,04	
2	Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat	3 Perlindungan Sosial yang Adaptif	1 Tingkat Kemiskinan (%)	4,24-4,52	0,21 - 0,00	4,23-2,54	2,53-1,24	1,30-0,22	0,21 - 0,00	Kemiskinan, Pemerataan Pendapatan, dan Infrastruktur
			2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	51.76	87.85	60.71	70.36	79.81	87.85	
3	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	33,74	40,56	35,18	37.6	39.15	40.56	Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, IKM dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
			2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	7,87	11,46	8,69	9,67	10,59	11,46	
			3 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	1.066	2.021	1.200	1.460	1.693	2.021	
			4 Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	7,11	6.53	7.11	7.11	7.12	7.12	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Target Per Tahapan				Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	2025-2029 Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah	2030-2034 Akselerasi Transformasi	2035-2039 Optimalisasi Pembangunan	2040-2045 Perwujudan Kota Salatiga Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan	
			5 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1.13	7.51	2.73	4.44	6.05	7.51	
			6 Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,40	8,71	3.97	5.6	7.1	8,71	
			7 Disparitas Harga	±10	±10	±10	±10	±10	±10	
			8 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,49-4,19	3,37-3,07	4,49-4,19	4,49-4,19	4,49-4,19	3,37-3,07	
			9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	65,18	81,09	69.08	73.28	77.18	81,09	
			10 Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD)	3.8	4.2	3,9	4	4,1	4,2	
		5 Penerapan Ekonomi Hijau								
		6 Transformasi Digital	1 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	91.43	96.45	92.7	94.01	95.27	96.45	Pelayanan Publik, Teknologi Informasi, Manajemen Data dan Kooridnasi antar Lembaga
		7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	1 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	42.92	33.73	40.63	38.3	36	33,73	Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, IKM dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
			2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	90,49-91,10	462,00-542,61	91,11- 226,11	226,12 - 356,12	356,13 -461,99	462,00-542,61	
			3 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	16,21-16,41	22,21-24,41	16,42-18,41	18,42-21,00	21,01-22,20	22,21-24,41	
		8 Perkotaan sebagai Pusat	1 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	92.82	100	94,15	96,41	98.25	100	Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, IKM dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Target Per Tahapan				Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	2025-2029 Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah	2030-2034 Akselerasi Transformasi	2035-2039 Optimalisasi Pembangunan	2040-2045 Perwujudan Kota Salatiga Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan	
		Pertumbuhan Ekonomi	2 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (%) (sesuai kewenangan)	95,52	95,56	95,53	95,54	95,55	95,56	Pemberdayaan Ekonomi Lokal
			3 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	7	90	19	40	66	90	
			4 Persentase Desa Mandiri	-	-	-	-	-	-	
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan demokratis	9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1 Indeks Reformasi Hukum	79,35	95,00	82,48	86,39	90,31	95,00	Pelayanan Publik, Teknologi Informasi, Manajemen Data dan Koordinasi antar Lembaga
			2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.3	4	3.45	3.65	3.83	4	
			3 Indeks Pelayanan Publik	4,39	5,00	4.55	4.72	4.87	5,00	
			4 Indeks Integritas Nasional	74,25	90,54	77,51	81,58	85,65	90,54	
			5 Indeks Reformasi Birokrasi	68,57	85,00	72,68	76,79	80,89	85,00	
		10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial								
		11 Stabilitas Ekonomi makro	1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,68	0,39	0.61	0.53	0.46	0,39	
			2 Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	60.82	90	67.94	75.52	82.87	90	
			3 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	42.03	87	53.06	64.64	75.99	87	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	TARGET		Target Per Tahapan				Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	2025-2029 Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah	2030-2034 Akselerasi Transformasi	2035-2039 Optimalisasi Pembangunan	2040-2045 Perwujudan Kota Salatiga Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan	
		12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan								
5	Terwujudnya Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim	15 Lingkungan Hidup Berkualitas	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,93	70,85	70,12	70,35	70,58	70,85	Lingkungan Hidup, Tata ruang, Sampah, tata guna lahan dan Air
			2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	15	95	32.5	50	70	95	
			3 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	78.16	90	80.21	83.66	86.91	90	
		16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pangan	1 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	63.83	100	72,87	81,91	90,95	100	
			2 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	65.85	75.85	68,35	70,85	73,35	75,85	
			3 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,45	1,15	2,97	2,97	1,32	1,15	
			4 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	94,34	95,7	94,68	95,02	95,36	95,7	
		17 Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim	1 Indeks Risiko Bencana (IRB)	87,90-86,82	68-59,71	86,82	80,89	75,68	68-59,71	
			2 Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO2eq)	24.158,45	1.567.574,93	120,158.45	651,171.40	1,152,781.75	1,567,574.93	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB VI
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga dalam dua puluh tahun ke depan dan merupakan dokumen perencanaan makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah, disusun sebagai satu acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Salatiga secara sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan jangka panjang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Salatiga untuk turut andil dan ambil bagian dalam pembangunan Kota Salatiga dua puluh tahun ke depan.

Guna menjaga kesinambungan pembangunan, maka pelaksanaan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045, memperhatikan kaidah pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi :

1. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
2. Kerangka pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko;
3. Sistem insentif untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya;
4. Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, serta
5. Komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kota Salatiga di masa mendatang menjadi harapan dan impian bagi seluruh masyarakat Kota Salatiga. Pembangunan di Kota Salatiga selaras dengan arah tujuan pembangunan di level regional atau level nasional. Harapan tersebut diteuangkan dalam Visi Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025-2045 yaitu mewujudkan ***"KOTA SALATIGA SEBAGAI KOTA YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN"***. Perwujudan visi tersebut dicapai melalui misi :

Misi 1 : Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing melalui Pengembangan Sektor Unggulan yang Berkelanjutan;

Misi 2 : Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan;

Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing;

Misi 4 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Adaptasi Perubahan Iklim;

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Adil, dan Demokratis dengan Memanfaatakan Teknologi Informasi.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, yang dikuatkan dengan dukungan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat secara umum dan dunia usaha. Harapan ke depan, dengan berhasilnya perwujudan Kota Salatiga yang ***MAJU, ADIL, SEJAHTERA, dan BERKELANJUTAN*** akan dapat mendukung Indonesia Emas 2045.

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN